



Prosiding Seminar Nasional

# Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Kamis, 6 Oktober 2016

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jamaris, dkk

ISBN 978-602-60486-0-8

Diterbitkan oleh:  
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang



# **KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA**

Padang, 6 Oktober 2016

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL**

**DITERBITKAN OLEH  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 72:  
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
tentang Hak Cipta**

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



# **KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL  
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
Padang, 6 Oktober 2016**

**DITERBITKAN OLEH  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2016**

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

**Prosiding Seminar Nasional**  
Pendidikan Luar Sekolah 2016  
**Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa**

Penulis, Jamaris, dkk.  
Editor, Syafruddin Wahid  
Padang, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah (2016)  
x & 257 hlm; 15,5 x 23 cm

Copyright@2016  
by Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang  
Padang, Sumatera Barat

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia  
Oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang  
Cetakan pertama, Oktober 2016

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Kampus UNP Air Tawar,  
Air Tawar Barat, Padang Utara, Padang  
Sumatera Barat

**ISBN 978-602-60486-0-8**

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga prosiding hasil Seminar Nasional Pendidikan Luar Sekolah 2016 dapat terselesaikan.

Target pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh komponen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat desa. Terkait itu, pemerintah melalui Kementerian Desa PDT mengonsep adanya tenaga pendamping desa. Pendampingan Desa merupakan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi pendampingan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bagian dari proses belajar masyarakat (*community learning process*).

Para tenaga pendamping profesional bertugas untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan UU tentang Desa dan mendampingi masyarakat dalam peningkatan daya tawar untuk mengakses sumberdaya lokal yang dibutuhkan demi kepentingan pembangunan. Pendampingan dilakukan sebagai proses penguatan (*empowering society*) sebagai masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (*self governing community*), dan bukan berbasis pada mobilisasi partisipasi masyarakat yang lebih bersifat *top down*.

Demi upaya mewujudkan desa sebagai *self governing community*, para tenaga profesional Pendamping Desa diarahkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk mampu mengorganisir dan mengkonsolidasikan seluruh potensi yang selanjutnya akan direkrut, dilatih dan dibentuk menjadi kader-kader desa.

Prosiding ini disusun sebagai tindak lanjut kegiatan seminar yang telah dilaksanakan pada Oktober 2016. Seminar diikuti oleh peserta baik peneliti, dosen, praktisi maupun pemerhati pendidikan. Partisipasi aktif dari semua stakeholder diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata pada sinergi kinerja di bidang pendidikan luar sekolah. Semua makalah yang dimuat dalam prosiding ini telah melalui peer review.

Materi prosiding dikelompokkan berdasarkan bidang kajian. Pengelompokkan berdasarkan bidang ini mungkin tidak dapat dilakukan secara tepat karena keterkaitan antar bidang ilmu dalam beberapa makalah, namun redaksi mengelompokkan berdasarkan dominasi kandungannya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi pada kegiatan seminar dan penyusunan prosiding ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pembangunan pendidikan luar sekolah di Indonesia.

Padang, Oktober 2016  
Redaksi

## DAFTAR ISI

### **PENYIAPAN SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI TENAGA PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA**

- 1. PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KOMPETENSI  
PENDAMPING PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA** oleh  
Jamaris (Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri  
Padang) ..... 1
- 2. SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN  
PEMBANGUNAN NAGARI** oleh Syafruddin Wahid (Dosen  
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang) ..... 17
- 3. PERAN STRATEGIS SARJANA PENDIDIKAN LUAR  
SEKOLAH DALAM Mendukung PROGRAM  
PEMBANGUNAN DESA** oleh Ismaniar (Dosen Jurusan  
Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas  
Negeri Padang) ..... 42
- 4. PENGEMBANGAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA  
UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh  
Alim Harun Pamungkas (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ..... 51

### **PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA BERBASIS PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**

- 5. PENGUATAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM  
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA** oleh Syur'aini  
(Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang) ..... 63
- 6. PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN  
MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN  
KOMPETENSI PENDAMPING PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA** oleh Dayat Hidayat (Dosen Program  
Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP Universitas Singaperbangsa  
Karawang) ..... 73
- 7. PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL** ..... 88

---

**BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** oleh  
Wirdatul Aini (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas  
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) .....

- 8. PERAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYA  
PENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK  
PROGRAM PENDAMPINGAN DESA** oleh Muhaimin  
(Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Program  
Pascasarjana Universitas Negeri Malang) ..... 97
- 9. PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PEMBANGUNAN  
MASYARAKAT PEDESAAN** oleh Iswandi (Dosen STKIP  
YPM Bangko Jambi) ..... 105
- 10. PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
MASYARAKAT DESA** oleh Elfi Rahmi (Dosen Fakultas  
Pertanian Universitas Andalas) ..... 116
- PRESPEKTIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA**
- 11. MEMAHAMI MASYARAKAT SEBAGAI SUATU SISTEM  
SOSIAL** oleh Setiawati (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ..... 125
- 12. SURAU DAN UPAYA MEWUJUDKAN *SELF GOVERNING  
COMMUNITY* DI SUMATERA BARAT** oleh MHD. Natsir  
(Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu  
Pendidikan Universitas Negeri Padang) ..... 135
- 13. PROCESSING WASTE INTO ORGANIC FERTILIZER  
FOR THE GROUP OF FARMERS IN BLOOMING SAIYO  
KNEGARIAN TANJUNG BALIT THE DISTRICT X  
KOTO DISTRICT SOLOK** oleh Siti Farida F & Mas'ula  
(Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu  
Pendidikan Universitas Negeri Padang) ..... 144

**PERAN PENDAMPING DESA DALAM PEMBANGUNAN DAN**

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

14. **PENDEKATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL AGEN PERUBAHAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KASUS DESA PALEM KAB. KEDIRI DAN DUSUN BAJULMATI KAB. MALANG)** oleh Zulkarnain (Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang) ..... 150
15. **PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SADAR BENCANA SEBAGAI SALAH SATU MITIGASI BENCANA** oleh Vevi Sunarti (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ..... 166
16. **PERAN PENDAMPING DESA DALAM RELOKASI KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG** oleh Mahfuzi Irwan (Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta) ..... 183
17. **PENDAMPING DESA SEBAGAI PENGGERAK PEMBERDAYAAN BERWAWASAN LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN** oleh Marta Dwi Ningrum (Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta) ..... 198

## KOMPETENSI TENAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

18. **URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONG BELAJAR DALAM PELAYANAN PROGRAM PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI BAGIAN UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA** oleh Tasril Bartin (Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) ..... 210
19. **PEMUDA SEBAGAI FASILITATOR PENDAMPING DESA** oleh Syamsuddin (Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Nonfomal Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta) ..... 225

## KONSEP PEMBELAJARAN

---

<b>20. PERAN GURU PROFESIONAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN</b> oleh Darnis Arief (Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang) .....	238
--	-----





## PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN KOMPETENSI PENDAMPING PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA

Jamaris

Guru Besar Pendidikan Luar Sekolah  
Universitas Negeri Padang

### A. PENDAHULUAN

Masyarakat desa identik dengan ketertinggalan atau keterbelakangan, terutama dalam hal kualitas sumberdaya manusia. Keteringgalan itu disebabkan oleh banyak hal, antara lain keterbatasan akses informasi, transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, enggannya tinggal di desa sumberdaya manusia yang bermutu. Keteringgalan juga identik dengan kemiskinan, karena pekerjaan masyarakat desa lebih dominan pada aktivitas agraris, seperti pertanian, nelayan, perladangan, perburuan, dan lain sebagainya.

Ketertinggalan dan kemiskinan merupakan dua aspek yang bersumber dari kebodohan. Artinya, masyarakat desa yang terbatas aksesnya berakibat pada ketertinggalan, kemiskinan, dan kebodohan. Hal ini sudah merupakan mata rantai yang sudah menjadi momok permasalahan masyarakat desa. Orang tertinggal, karena miskin. Orang miskin, karena bodoh. Orang bodoh, karena tertinggal atau terbelakang. Apa pun bentuk pembangunan yang ditujukan pada masyarakat desa, jika mereka masih mengalami permasalahan ini, akan sulit mengeluarkannya dari lingkaran tersebut.

Apabila melihat potensi alam tempat masyarakat desa bermukim, tersimpan suatu kekayaan yang tiada terhingga. Semua yang ada pada masyarakat perkotaan dipasok dari daerah pedesaan. Mulai dari potensi pertanian sampai pada potensi pertambangan. Sehebat apa pun produk yang dihasilkan oleh masyarakat perkotaan, semuanya berasal dari daerah pedesaan. Katakanlah disebut mobil, sebuah mobil memiliki bahan baku dari besi, plastik, karet, dan lain sebagainya. Semuanya itu diperoleh dari daerah pedesaan. Artinya masyarakat pedesaan kaya akan sumber daya alam, namun “miskin” dari sumberdaya manusianya. Jika, pembangunan selalu berfokus pada eksploitasi sumber daya alam yang ada di pedesaan, maka masyarakat desa akan tinggal menunggu “kematianannya”. Soedjatmiko (1986) menyatakan bahwa yang diperlukan suatu strategi pembangunan yang sadar akan per-

soalan lingkungan hidup dan menjaga supaya dalam setiap fase pembangunan *impact* ekologinya diusahakan sekecil-kecilnya.

Eksplotasi yang terjadi sekarang tidak hanya pada sumber daya alam daerah pedesaan, melainkan juga terhadap sumber daya manusianya. Banyak kasus yang dapat dicermati, seperti terjadi perdagangan manusia, “adu domba” antar kelompok atau antar suku, semua itu tiada lain untuk kepentingan eksploitasi sumber daya alam. Sering dilakukan dengan “*menina-bobokan*” orang desa melalui fasilitas yang jarang diperolehnya dengan tujuan agar tidak kritis terhadap penguasa dan pengusaha. Kasus demi kasus selalu muncul dalam masyarakat desa dengan kualitas yang semakin meningkat, tiada lain efek dari usaha eksploitasi sumberdaya manusia pedesaan.

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah amanatkan untuk perlunya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat desa. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Untuk mewujudkan itu diperlukan dana desa sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 60 tahun 2014, dinyatakan bahwa tahun 2016 alokasi rata-rata per desa Rp628 juta, dengan alokasi terendah Rp570 juta dan alokasi tertinggi Rp2,22 miliar. Total dana desa tahun 2016 untuk seluruh Indonesia sebesar Rp46,9 triliun dengan jumlah desa 74.754. Dana Desa ini diturunkan sebanyak 3 tahapan yaitu: tahap I paling lambat April minggu II, tahap II paling lambat Agustus minggu II, dan tahap III paling lambat Oktober Minggu II. Khusus untuk Sumatera Barat, bahwa terdapat 880 desa, masing-masing desa memperoleh Rp565.640.000,00 dengan total anggaran Rp598.637.609.000,00.

Jumlah penerima terbanyak adalah Kabupaten Pesisir Selatan dengan 182 desa, total Rp112.965.690.000,00. Jumlah desa yang paling sedikit adalah Kabupaten Pasaman Barat sebanyak 19 Desa, total anggaran Rp10.747.160.000,00. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 247 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi dana desa, pasal 25 menyatakan bahwa dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Keberadaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, dalam melaksanakan undang-undang dan peraturan tersebut yaitu pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hal inimerupakan upaya terobosan dalam mengentaskan lingkaran masalah masyarakat pedesaan. Diharapkan dengan pemberdayaan melalui pendidikan masyarakat dapat terhindar orang desa dari eksploitasi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga tidak terkesan “habis proyek, habis pula kegiatan”. Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan wujud kemandirian berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana dana desa efektif mengatasi lingkaran permasalahan masyarakat desa melalui pendampingan yang kompeten?

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Kualitas Masyarakat Desa Ditentukan oleh Akses Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi saat ini sudah tidak dapat dibendung oleh siapa pun, kecuali negara yang memiliki otoritas penuh dalam pembatasannya. Seperti diketahui terdapat beberapa negara yang membentengi masuknya informasi secara bebas pada negaranya, seperti Korea Utara, Iran, dll. Informasi yang dibaca pada beberapa media, negara tersebut tidak membolehkan beberapa aplikasi bercokol dinegaranya. Hal ini dianggap oleh sebagian masyarakat membatasi hak masyarakat untuk mengakses informasi secara bebas, terutama pada negara yang menganut liberalisme. Membatasi akses masyarakat terhadap informasi, dianggap sebagai membodohi masyarakatnya. Pada hal maksud negara tersebut membatasi akses informasi, antara lain agar tidak merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama agama, moral, politik, hukum, budaya dan lain-lain.

Apabila dikaitkan dengan penjelasan pada pendahuluan di atas, bahwa masyarakat desa yang terbatas akses informasinya berakibat pada lingkaran keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Artinya, terdapat hubungan positif, antara kebebasan terhadap akses informasi dengan peningkatan kualitas masyarakat. Diharapkan dapat menghentikan keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Namun, disisi lain negara-negara yang menutup sebagian akses informasi terhadap masyarakatnya, ternyata juga termasuk negara yang lebih maju dari Indonesia. Berarti, akses informasi melalui teknologi informasi tidak otomatis dapat meningkatkan kualitas masyarakatnya.

Masyarakat desa di Indonesia, pada dasarnya sebagian besar sudah dengan mudah mengakses informasi lewat media elektronik terutama teknologi komunikasi. Jaringan informasi sudah sampai ke daerah-daerah terpencil, bahkan sudah ada daerah terdepan Indonesia. Mereka dengan mudah menyaksikan di media televisi dan radio, kejadian-kejadian yang ada di masyarakat perkotaan. Namun, ternyata tidak cukup untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat pedesaan. Artinya, akses informasi mereka belum sejalan dengan peningkatan kualitas sumberdaya manusia masyarakat pedesaan. Malah terdapat akses negatif dari kebodohan mereka dalam memahami informasi yang mereka terima. Tidak jarang di desa terjadi perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau negatif dan melanggar aturan agama, budaya, dan aturan negara. Karena mereka belum mampu memilah dan memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Artinya, Kebebasan akses informasi belum menjamin terjadinya peningkatan kualitas masyarakat pedesaan.

Kemudahan terhadap akses informasi menjadi lebih penting, jika terlebih dahulu mengutamakan kualitas pendidikan pada masyarakat. Upaya memilah dan memilih informasi yang benar dan sesuai dengan kebutuhan, maka diperlukan pendidikan. Tidak jarang terjadi, karena rendahnya kemampuan memilah dan memilih informasi, berakibat pada “kecelakaan” pada masyarakat desa. Artinya, terdapat banyak kasus ditemukan tentang terjadi penipuan dan kejahatan pada masyarakat desa, karena ulah akses informasi yang bebas. Rendahnya kemampuan atau kecerdasan masyarakat desa sering menjadi sasaran kejahatan orang-orang yang tidak bertanggungjawab di dunia maya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebebasan terhadap informasi tidak menjamin terjadinya peningkatan kualitas masyarakat desa.

Pendidikan masyarakat merupakan satu-satunya yang diharapkan meningkatkan kualitas masyarakat desa.

## **2. Kebutuhan Pendidikan Masyarakat**

Manusia mulai saat dalam kandungan sudah memiliki berbagai kebutuhan, terutama kebutuhan biologis dan psikologis. Sejak manusia lahir, maka muncul banyak kebutuhan sesuai dengan kodratnya. Terdapat kebutuhan mendasar yang melekat sebagai identitas manusia dan kemanusiaan yaitu kebutuhan teologis, kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan sosiologis, dan kebutuhan antropologis. Setiap pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam menjalankan kehidupannya terjadi pergeseran atau menyesuaikan dengan perkembangan yang ada pada diri dan lingkungannya.

Ketika manusia berkelompok dalam suatu wilayah, maka dia membentuk suatu masyarakat dengan tuntutan kebutuhan pendidikan yang relevan. Untuk itu pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi pertumbuhan dan perkembangan manusia serta tuntutan dan tantangan kehidupan masyarakatnya. Pendidikan yang mampu mewadahi atau melayani setiap kebutuhan manusia atau masyarakat adalah pendidikan luar sekolah. Pendidikan luar sekolah memiliki karakteristik fleksibel, menyesuaikan dengan ruang dan waktu, dan mengacu pada karakteristik atau identitas manusia dan lingkungannya.

### **a. Fleksibel Pendidikan Luar Sekolah**

Kebutuhan manusia terhadap pendidikan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, kurikulum yang ketat, serta sistem klasikal yang kaku. Manusia memiliki keunikan baik fisik maupun psikis, lingkungan maupun tuntutan kehidupannya. Kelebihan dan kelemahan/kekurangan manusia dapat dijadikan titik tolak untuk pemenuhan kebutuhan pendidikannya. Terlebih ketika manusia sudah membentuk atau berada dalam komunitas tertentu, sebutlah namanya masyarakat. Manusia menghadapi banyak kebutuhan, permasalahan dan tantangan yang diharapkan dijawab oleh pendidikan. Untuk itu dibutuhkan sistem pendidikan yang mampu memenuhi segala tuntutan, tantangan, dan kebutuhan unik dari manusia. Sistem pendidikan yang fleksibel untuk memenuhi hal tersebut tiada lain sistem pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah merupakan jaring pengaman pendidikan yang mampu menjawab segala kondisi dan kebutuhan masyarakat atau manusia. Kekhasan pendidikan luar sekolah terletak pada fleksibel dalam arti semua kebutuhan, permasalahan dan kondisi ma-

usia atau masyarakat dapat terwadahi dalam pendidikan luar sekolah. Kindervater (1979), menyatakan bahwa pendidikan nonformal (pendidikan Luar Sekolah) “*programs are designed to enable people to critically analyze their own life situation and to develop the skills required to improve their situation*”.

**b. Ruang dan Waktu Keterlaksanaan Pendidikan Luar Sekolah**

Keberadaan manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari ruang dan waktu. Hal ini akan menentukan kebutuhan dan bentuk pendidikan yang diberikan kepada manusia. Artinya, keberadaan manusia di berbagai lokasi dan waktu, tetap membutuhkan pendidikan dalam upaya pemenuhan hidup dan kehidupannya. Pendidikan adalah kehidupan manusia, dan manusia tanpa pendidikan belum dapat mencapai kemanusiaannya. Dimanapun manusia berada dan kapan pun waktunya, perlu sistem pendidikan yang dapat mewedahi situasi dan kondisi keberadaannya tersebut. Sistem pendidikan yang mampu menjawab kondisi dan situasi manusia terkait dengan ruang dan waktu adalah pendidikan luar sekolah.

Pendidikan luar sekolah dapat menyesuaikan dengan ruang dan waktu keberadaan manusia, apalagi ketika manusia berada dalam suatu masyarakat tertentu yaitu masyarakat desa. Umumnya masyarakat desa lebih homogen ruang dan waktunya, akan lebih mudah membelajarkan mereka dalam sistem pendidikan luar sekolah. Kebutuhan pendidikan masyarakat desa, lebih kepada pengembangan kemandirian dalam berusaha dan penerimaan terhadap perubahan baik yang diprogramkan pemerintah maupun muncul dalam dinamika perubahan di masyarakat.

**c. Karakteristik atau Identitas Manusia sebagai Dasar Pendidikan Luar Sekolah**

Pendidikan luar sekolah dapat melayani siapa pun karakter manusianya, mulai lahir sampai wafat. Beragam karakter manusia dengan segala keunikan atau sifatnya, dibawa sejak lahir maupun pengaruh lingkungan alam atau agama dan budaya. Pada dasarnya manusia membutuhkan pendidikan agar dia bisa menjalankan hidup dan kehidupannya. Menurut Schumaeker (1977) menitik beratkan bahwa “manusia sebagai pusat kesadaran eksistensial”. Oleh karena itu, pendidikan harus mengupayakan peningkatan kesadaran eksistensi manusia yang menjadi sasaran utama dalam pembangunan masyarakat. Pendidikan luar sekolah diharapkan mampu melayani pusat kesadaran eksistensi manusia dengan segala karakternya. Fleksibilitas sistem

pendidikan luar sekolah tidak terbatas pada karakter tertentu, namun dapat memenuhi kebutuhan pendidikan berbagai karakter manusia.

Pendidikan luar sekolah sering “diplesetkan” dengan pendidikan luas sekali atau pendidikan lebar sekali. Walaupun “plesetan” itu kelihatannya dapat membuat kita ketawa, namun kenyataannya bahwa pendidikan luar sekolah memang dipersiapkan untuk melayani berbagai karakter manusia dan masyarakat, dan karakter kebutuhan pendidikannya. Jika manusia berkelompok dan disebut dengan masyarakat, akan menjadi lebih mudah pendidikan luar sekolah melayani kebutuhan pendidikannya. Penyelenggaraan dapat dalam bentuk kelompok kecil maupun dalam kelompok besar, bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan pendidikan masyarakat tersebut. Tidak satu pun sistem pendidikan yang bisa melayani semua kebutuhan pendidikan masyarakat, kecuali pendidikan luar sekolah. Untuk itu dalam upaya pemberdayaan masyarakat atau memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat, maka pendidikan luar sekolah mampu menjawabnya.

#### **d. Situasi Lingkungan Alam dan Pendidikan Luar Sekolah**

Keberadaan manusia atau masyarakat di suatu wilayah atau tempat tertentu, tidak terlepas dari pengaruh faktor lingkungan alamnya. Manusia berinteraksi dengan lingkungan alamnya menciptakan suatu budaya dan berkembang sesuai dengan dinamika dan kualitas yang dimilikinya. Semakin tinggi dinamika dan kualitas manusia yang berdiam di wilayah tersebut, maka kecenderungan terjadi tuntutan terhadap lingkungannya. Keberadaan manusia pada suatu lingkungan alam, dapat terlihat dari cara dia melakukan atau perlakuannya terhadap alam tersebut. Kecenderungan terjadi, manusia yang rendah pendidikannya cenderung menyesuaikan dengan kondisi alam tersebut. Sedangkan semakin tinggi kualitasnya, cenderung mendayagunakan dan memperbaharui alam sebagai sumber kesejahteraan. Agar alam menjadi sumber kesejahteraan masyarakat, maka membutuhkan pendidikan berkualitas.

Pendidikan luar sekolah diciptakan salah satunya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam berbagai kondisi alam di mana mereka berada. Sebutlah namanya alam pertanian, perkebunan, lautan, perkotaan, pegunungan, dan lainnya. Semua itu dapat diprogramkan pendidikan luar sekolah guna melayani kebutuhan pendidikan masyarakat yang dapat mendayagunakan alam untuk kesejahteraannya. Sehingga lulusan program studi pendidikan luar sekolah harus menyiapkan

lulusannya membuatkan program pendidikan masyarakat yang sesuai dengan kondisi alam dan lingkungannya.

**3. Kompetensi Pendampingan Masyarakat Desa**

Upaya mewujudkan kemandirian masyarakat desa melalui pembangunan sudah menjadi komitmen pemerintah. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Masyarakat desa dengan segala kelebihan dan kekurangannya memerlukan tenaga ahli guna mendampingi mereka dalam menggerakkan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraannya. Hal ini tercantum pada pasal 112, bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Berikut dikemukakan pengertian, tugas pokok dan fungsi, kompetensi dan persyaratan menjadi pendamping desa.

**a. Pengertian**

Penjelasan pasal 90 huruf (b) bahwa yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia pendamping dan manajemen. Selanjutnya dipertegas oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pada pasal 1 dinyatakan bahwa pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahannya dan fasilitasi Desa. Gambar berikut ini merupakan orang atau pihak yang menjadi pelaku pendampingan desa.



Skema : Pelaku Pendampingan Desa

**b. Tugas Pendampingan Desa**

Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa menghendaki perubahan dalam model pendampingan desa, yaitu dari pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa, menjadi pendekatan “pemberdayaan masyarakat desa”. Desa-desa didorong menjadi subjek penggerak pembangunan Indonesia dari pinggiran. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, pada pasal 11 dinyatakan bahwa Pendamping Desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya pasal 12 menyatakan bahwa pendampingan desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi:

- 1) mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2) mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 3) melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemerintahan Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- 4) melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat Desa;
- 5) melakukan peningkatan kapasitas bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan Desa yang baru;
- 6) mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipasi; dan
- 7) melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Di samping itu Pasal 18 pada peraturan menteri tersebut menyatakan bahwa (1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong; (2) Dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kader Pemberdayaan Masya-

rakat Desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi: a. kelompok tani; b. kelompok nelayan; c. kelompok pengrajin; d. kelompok perempuan; e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; f. kelompok masyarakat miskin; dan g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

### **c. Fungsi Dasar dan Kompetensi Pendamping Desa**

Pendamping desa merupakan tenaga yang menjadi andalan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Adapun fungsi dasarnya: (1) fungsi penyadaran, (2) fungsi pembelajaran, (3) fungsi pelembagaan dan pengorganisasian, serta (4) fungsi pengembangan kemandirian/-otonomi/keadilan. Selanjutnya, dalam buku tersebut dikemukakan kompetensi yang diharapkan bagi pendamping desa menurut buku petunjuk teknis pendampingan desa tahun 2015 dikemukakan sebagai berikut ini.

Tujuh kriteria terkait kompetensi dasar pendamping desa, yaitu kemampuan: (1) mengumpulkan, menganalisis, mengorganisasikan informasi, (2) mengkomunikasikan informasi dan ide-ide, (3) merencanakan dan mengorganisasikan aktivitas/ kegiatan, (4) bekerja-sama dengan orang lain dan kelompok, (5) menggunakan gagasan secara matematis dan teknis, (6) memecahkan masalah, (7) menggunakan teknologi.

Tiga kategori kompetensi pendamping desa, yaitu (1) kompetensi umum, mencakup upaya membangun relasi sosial, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat, mengembangkan kesadaran masyarakat untuk berubah menuju kehidupan yang lebih baik, mengembangkan kapasitas sebagai fasilitator, meningkatkan aksesibilitas antar pemangku kepentingan, dan membangun visi dan kepemimpinan masyarakat; (2) Kompetensi inti, meliputi membangun jejaring dan kemitraan, membangun solidaritas sosial, mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintahan lokal, memperkuat posisi tawar masyarakat, merancang perubahan kehidupan masyarakat, mengelola pembelajaran di dalam masyarakat, menyiapkan kader pemberdayaan masyarakat, mengembangkan kemandirian masyarakat, mengelola konflik di dalam masyarakat, dan menembangkan sistem kontrol sosial; (3) Kompetensi khusus/pilihan pendamping desa, mencakup : mengembangkan inovasi pemberdayaan masyarakat, dan memfasilitasi penerapan inovasi pemberdayaan masyarakat di bidang/sector kegiatan tertentu.

Matriks Kedudukan dan Tugas Normatif Pelaku Pendampingan  
(Permendes No. 3/2015 tentang Pendampingan Desa)

Kedudukan	Pelaku Pendampingan	Tugas
Pusat	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Pasal 15-17
Provinsi	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat	Pasal 15-17
Kab./Kota	Pendamping Teknis	Pasal 13-14
Kecamatan	Pendamping Desa	Pasal 11-12
Desa	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pasal 18-19

#### 4. Efektivitas Lulusan Pendidikan Luar Sekolah sebagai Pendamping Masyarakat Desa

Lulusan pendidikan luar sekolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat desa. Persepsi bahwa lulusan pendidikan sekolah lebih fokus menangani masyarakat yang terpinggirkan atau terkebelakang dapat dikatakan saat itu sebagai sesuatu yang benar. Sehingga, pelaksanaan kurikulum program studi pendidikan luar sekolah sering diidentikkan dengan upaya menggerakkan masyarakat desa. Untuk itu program kementerian desa yang membutuhkan pendamping desa dengan kompetensi utama dan kompetensi inti sebagai tersebut terdahulu, menjadi efektif dengan mendayagunakan lulusan pendidikan luar sekolah.

##### a. Kompetensi yang Relevan

Agen perubahan atau fasilitator perubahan atau motivator perubahan atau pendidik masyarakat dan istilah lainnya yang relevan, merupakan sebutan yang tepat bagi lulusan pendidikan luar sekolah apabila mengabdikan pada masyarakat desa. Profesi ini telah dipelajari dan dilatih melalui kurikulum program studi pendidikan luar sekolah. Kompetensi identifikasi, komunikasi masyarakat, dan perencanaan, pelaksana, evaluasi dan pengembang program pendidikan masyarakat, pemberdayaan potensi dan kemandirian masyarakat menjadi bahan kajian bagi program studi pendidikan luar sekolah. Sehingga lulusan program studi pendidikan luar sekolah apabila berhadapan dengan masyarakat desa seharusnya menjadi suatu kesenangan, karena sesuai dengan profesinya.

Menyimak program kementerian Desa dengan ujung tombak pendampingan desa dalam pemberdayaan masyarakat desa, menjadi

suatu yang relevan dengan pendayagunaan lulusan program studi pendidikan luar sekolah. Kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi lulusan pendidikan luar sekolah merupakan suatu kesatuan yang sangat relevan. Untuk itu perlu sinergi antara kementerian desa dengan program studi pendidikan luar sekolah dalam menyiapkan tenaga pendamping desa sebagai upaya optimalisasi mewujudkan kemandirian masyarakat desa dalam mencapai kesejahteraannya.

#### **b. Pencapaian Hasil Yang Efektif**

Sasaran akhir dari program kementerian desa dalam memanfaatkan pendamping desa tiada lain terwujudnya kemandirian desa yang berkelanjutan. Sehingga segala potensi desa baik sumber daya manusia dan sumber daya alamnya dikembangkan secara optimal. Mewujudkan kemandirian masyarakat desa tidak semudah membalikkan telapak tangan. Artinya, berbagai permasalahan masyarakat desa menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian desa. Kendala yang dihadapi jika ditangani oleh pendamping desa yang tidak kompeten, maka pencapaian hasilnya menjadi tidak efektif.

Harapan pemerintah dan masyarakat, jika bisa dipercepat diperoleh kemandirian masyarakat desa dalam menjalankan hidup dan kehidupannya tentu menjadi keberhasilan yang efektif. Upaya efektifitas program kementerian melalui pendamping desa maka diperlukan tenaga yang kompeten. Tenaga yang kompeten pendamping desa akan lahir dari kompetensi program studi yang relevan yaitu lulusan pendidikan luar sekolah. Lulusan pendidikan luar sekolah tidak hanya berperan sebagai agen pembaharuan dalam mendampingi masyarakat desa, melainkan yang lebih mendasar adalah melaksanakan pendidikan masyarakat yang menjadi dasar terjadinya kemandirian. Jika dibandingkan dengan lulusan program studi yang lain, mereka memiliki kompetensi dalam mengimplementasikan program atas kebutuhan proyek. Banyak terjadi, bahwa apabila “dana proyek” ada maka “proyek” itu akan terlaksana, sebaiknya jika “dana proyek” itu habis, maka “proyek” itu terhenti. Padahal mewujudkan kemandirian masyarakat desa, harus menyentuh kebutuhan dasarnya yaitu pendidikan yang memberdayakan. Efektivitas program kementerian desa menjadi sulit diwujudkan. Untuk itu lulusan program studi pendidikan luar sekolah memiliki kompetensi untuk mewujudkan efektivitas pemberdayaan masyarakat desa dalam mencapai kemandiriannya.

### c. Ketepatan Sasaran Dana Desa

Ketepatan sasaran pemanfaatan dana desa dalam membangun desa sangat diharapkan sekali, terutama upaya pemberdayaannya. Jika tidak tepat sasaran dapat memunculkan efek negatif bagi masyarakat desa. Beberapa kasus ditemukan efek tidak tepat sasaran pembangunan masyarakat desa, antara lain masyarakat miskin diperalat oleh sebagian pemuka masyarakat pemimpin formal di desa itu untuk mendapat keuntungan pribadi dan kelompoknya, munculnya konflik horizontal karena tidak transparan atau persaingan kelompok atau individu, terjadinya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, yang pandai semakin pandai dan yang bodoh semakin bodoh. Pengalaman bertahun-tahun dalam membangun masyarakat desa pada orde baru dan orde sebelumnya bahwa sudah banyak program dan dana untuk masyarakat desa, sampai saat ini selalu saja mereka tergolong pada masyarakat yang terpinggirkan atau sebagai kantong kemiskinan. Kita tentu tidak bisa menyalahkan siapa, namun tentu menjadi pembelajaran bagi kita semua terutama pemerintah. Untuk itu, sebaiknya kejadian masa lalu ini tidak terulang pada masa datang.

Keterlibatan orang yang kompeten dan komitmen dalam pembangunan masyarakat desa melalui pendamping desa tentu sudah menjadi keharusan. Tepat sasaran program dan masyarakat yang dilibatkan akan dapat dilaksanakan oleh pendamping desa kompeten dan komitmen tersebut. Untuk itu, pendayagunaan lulusan pendidikan luar sekolah sebagai bagian yang sudah memenuhi kriteria kompeten dan komitmen menjadi pendamping desa.

### d. Percepatan Pembangunan Desa

Keterlibatan pendamping desa yang kompeten dan komitmen akan dapat mempercepat perubahan pada masyarakat desa dengan secara terbuka menerima program pembangunan. Keterbukaan masyarakat tidak terlepas dari tingkat kualitas sumber daya manusianya satu-satunya melalui pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Tentu pendaya gunaan lulusan program studi pendidikan luar sekolah menjadi sangat tepat di dayagunakan sebagai pendamping desa. Sehingga, percepatan pembangunan desa menjadi lebih cepat sesuai dengan harapan program kementerian desa.

Percepatan yang dimaksudkan tentu pada upaya kemandirian masyarakat dalam mewujudkan dan mempertahankan kesejahteraannya. Apabila masyarakat desa sudah terdapat kemandirian, apakah tidak diperlukan lagi pendamping desa yang kompeten dan komitmen?

Jawabnya selalu di perlukan, karena kemandirian masyarakat desa tidak berarti sudah bisa berusaha dan produktif dalam menjalankan kehidupannya. Namun, yang lebih penting adalah kemandirian itu diharapkan terjadi aktivitas masyarakat pembelajar atau masyarakat saling membelajarkan. Artinya, mewujudkan masyarakat saling membelajar atau pembelajar akan berdampak pada masyarakat belajar sepanjang hayat. Lulusan program studi pendidikan luar sekolah memiliki kompetensi mewujudkan masyarakat belajar sepanjang hayat. Sehingga, kemandirian masyarakat desa terjadi keberlanjutan atau kesinambungan.

#### **e. Menjamin Kesinambungan Program Studi PLS**

Pemerintah bertanggungjawab terhadap pendidikan masyarakatnya dan kesempatan bekerja bagi rakyatnya. Artinya, program pemerintah pada setiap lembaga baik kementerian maupun perguruan tinggi harus bersinergi dalam mengemban tanggung-jawab tersebut. Perguruan tinggi menciptakan lulusan yang kompeten, sementara kementerian memberi kesempatan pada lulusan perguruan tinggi untuk membuka lapangan kerjanya. Dengan kata lain, sudah saatnya selalu kementerian menciptakan program kerja yang dapat menyerap lulusan perguruan tinggi yang kompeten untuk bekerja dalam melaksanakan program kementerian tersebut dalam upaya meningkatkan kemandirian masyarakat desa.

Sinergi antara perguruan tinggi khususnya program studi Pendidikan Luar Sekolah dengan program kementerian Desa dalam menciptakan lapangan kerja, tentu menjadi tanggung-jawab bersama. Manfaat terbesar dari sinergi ini, antara lain dapat menyeraplulusan program studi pendidikan luar sekolah, kementerian desa memperoleh pendamping desa yang kompeten dan komitmen, terjadi efektivitas pelaksanaan program kementerian desa, akhirnya terwujud kemandirian masyarakat berupa masyarakat belajar. Manfaat lain yang sangat penting adalah terjaminnya kesinambungan program studi pendidikan luar sekolah, karena memiliki lapangan kerja yang dapat diserap oleh kementerian pedesaan.

### **C. SIMPULAN**

1. Permasalahan mendasar dalam pembangunan masyarakat desa terletak pada kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan.

2. Setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar terhadap pendidikan, namun oleh keterbatasan pendidikan yang terstruktur berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk dapat mengecap pendidikan semacam itu.
3. Kebebasan dalam mendapatkan akses informasi ternyata tidak linear dengan peningkatan kualitas manusianya, bahkan dapat menjadi bencana atau mendapat efek negatif bagi masyarakat desa.
4. Keberadaan manusia dan atau masyarakat memiliki kebutuhan terhadap pendidikan yang sesuai dengan kondisi ruang dan waktu, serta karakteristik yang dimilikinya, serta dipengaruhi oleh perkembangan lingkungannya.
5. Fleksibel pendidikan luar sekolah menjadi jawaban yang tepat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan manusia sesuai dengan kondisi dan situasi yang dialaminya.
6. Pembangunan desa sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa, mengubah pendekatan “kontrol dan mobilisasi” pemerintah terhadap desa, menjadi pendekatan “pemberdayaan masyarakat desa”. dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Untuk itu peraturan menteri desa yang merupakan turunan undang-undang desa mengharuskan adanya tenaga pendampingan desa.
7. Program Kementerian desa tentang pembangunan desa yang melibatkan pendamping desa, hanya dapat terlaksana secara efektif manakala pendamping desanya kompeten dan komitmen dalam menjalankan tugasnya.
8. Lulusan program studi pendidikan luar sekolah memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan kompetensi yang dibutuhkan pendamping desa oleh kementerian desa.
9. Sinergi antara kementerian desa dengan perguruan tinggi (program studi pendidikan luar sekolah) hendaknya menjadi suatu keharusan dalam mengemban tanggung-jawab negara terhadap kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (2014), undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa,  
Kementerian Desa (2015), Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 3 tahun 2015 tentang Pendampingan Desa.

- Kindervatter, Suzanne, (1979), *Nonformal Education as an Empowering Process*, Center for Internasional Education University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts.
- Schummaecher, (1977), *A Guide For The Perplexed*, Jonathan Cape LTD, London
- Soedjatmiko, (1986), *Dimensi Manusia dalam Pembangunan*, Yayasan Obor, Jakarta

## SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN PEMBANGUNAN NAGARI

Syafruddin Wahid

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan UNP Padang  
syafruddinwahid@yahoo.com

### Abstrak

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa mengemukakan bahwa nagari disetarakan dengan desa. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh seorang wali nagari, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS). Meskipun seorang wali nagari, dalam menjalankan pemerintahannya, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil, mengingat banyaknya aspek pembangunan yang harus dikelola oleh wali nagari dan stafnya, mereka masih memerlukan tenaga pendamping untuk berbagai bidang dan aspek pembangunan. Walaupun beberapa bidang dan/atau aspek pembangunan tidak menuntut latar belakang pendidikan tertentu, namun alangkah baiknya rekrutmen didasarkan kedekatan relevansi kompetensi calon petugas dalam bidang tertentu tersebut. Sehubungan dengan pemikiran yang dikemukakan, maka tujuan penulisan ini adalah untuk mendiskusikan (1) selintas tentang nagari, (2) kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari, dan (3) kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang dihubungkan dengan kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari.

**Kata Kunci:** pendidikan luar sekolah, pembangunan, nagari

### A. PENDAHULUAN

Orang Minangkabau menyebut *nagari*-nya Alam Minangkabau. Alam Minangkabau terdiri dari bagian, yakni luhak nan tigo, pasisia, dan rantau. Luhak nan tigo adalah dataran tinggi yang terletak di sekitar tiga gunung, yakni Gunung Merapi, Sago, dan Singgalang. Pasisia adalah daerah yang terbentang di bagian Barat Pulau Sumatra yang di Selatan berbatasan dengan Bengkulu dan di Utara berbatasan dengan Tapanuli. Sedangkan daerah rantau adalah

SEMINAR NASIONAL  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
"KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"  
Kamis/ 6 Oktober 2016

aliran sungai yang bermuara ke Timur Pulau Sumatra, ke Utara berbatasan dengan Selat Malaka, ke Selatan dengan Laut Cina Selatan, ke Timur sampai dengan Rantan Nan Sambilan (Negeri Sembilan). Secara adat, demikianlah konsep nagari masyarakat Minangkabau.

Berdasarkan UU No. 6/2014 tentang Desa, tingkatan nagari disetarakan dengan desa, sebab istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan di provinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dalam menjalankan pemerintahannya, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh *anak nagari* secara langsung dan demokratis untuk masa jabatan 6 tahun dan kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Orang yang dipilih menjadi wali nagari adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Secara administratif, nagari berada pemerintahan di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Jika dalam struktur pemerintahan kota, nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Sehubungan dengan itu, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini. Untuk itu, dalam sebuah nagari terdapat Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai, dan *niniak mamak (tungku tigo sajarangan)*. Selain itu, untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah pendu-

duk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Meskipun seorang wali nagari, dalam menjalankan pemerintahannya, dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut, mengingat banyaknya aspek pembangunan yang harus dikelola oleh wali nagari dan stafnya, mereka masih memerlukan tenaga pendamping pembangunan nagari untuk berbagai bidang dan aspek pembangunan. Walaupun beberapa bidang dan/atau aspek pembangunan tidak menuntut latar belakang pendidikan tertentu, namun alangkah baiknya rekrutmen didasarkan kedekatan relevansi kompetensi calon petugas dalam bidang tertentu tersebut.

Sehubungan dengan pemikiran yang telah dikemukakan, maka tujuan penulisan tulisan ini adalah untuk mendiskusikan (1) selintas tentang nagari, (2) kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari, dan (3) kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang dihubungkan dengan kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Selintas tentang Nagari

Nagari adalah pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah nagari menggantikan istilah desa, yang digunakan diprovinsi lain di Indonesia. Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara etimologi kata nagari berasal dari Bahasa Sanskerta *nagarom* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Bentuk lain dari kata ini antara lain *nagara*, *negara*, *negeri*, *nagori*, *nogori*, *nogoro*.

Nagari dipimpin oleh seorang wali nagari, dan dalam menjalankan pemerintahannya. Dahulunya wali nagari dibantu oleh beberapa orang wali jorong, namun sekarang dibantu oleh sekretaris nagari dan beberapa pegawai negeri sipil (PNS) yang jumlahnya bergantung dengan kebutuhan pemerintahan nagari tersebut. Wali nagari dipilih oleh *anak nagari* secara demokratis dengan pemilihan langsung. Masa jabatan adalah 6 tahun, kemudian dapat dipilih kembali untuk satu kali

masa jabatan berikutnya. Wali nagari, biasanya dipilih adalah orang yang dianggap paling menguasai tentang semua aspek kehidupan dalam budaya Minangkabau, sehingga wali nagari tersebut mampu menjawab semua persoalan yang dihadapi anak nagari.

Nagari secara administratif pemerintahan berada di bawah kecamatan yang merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten. Sedangkan nagari bukan merupakan bagian dari perangkat daerah jika berada dalam struktur pemerintahan kota. Berbeda dengan kelurahan, nagari memiliki hak mengatur wilayahnya yang lebih luas. Nagari merupakan bentuk dari republik mini.

Dalam sebuah nagari dibentuk Kerapatan Adat Nagari (KAN), yakni lembaga yang beranggotakan *tungku tigo sajarangan*. *Tungku tigo sajarangan* merupakan perwakilan anak nagari yang terdiri dari alim ulama, cerdik pandai, dan *niniak mamak*. Keputusan penting selalu diambil berdasarkan dimusyawarahkan antara wali nagari dan *tungku tigo sajarangan* di balai adat atau balairungsari nagari. Untuk legislasi, dibentuklah Badan Musyawarah Nagari (BMN) nama lain dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Unsur dalam BMN memuat unsur pada KAN dan dilengkapi dengan unsur pemuda, wanita dan perwakilan tiap suku. BMN berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan masa jabatan selama 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BMN ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 11 orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan nagari, serta ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.

Dari aspek kesejarahan, sistem kanagarian telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia. Kerajaan Pagaruyung pada dasarnya merupakan konfederasi nagari-nagari yang berada di Minangkabau. Terdapat dua aliran besar dalam sistem pemerintahan nagari di Minangkabau yakni *Koto Piliang* dan *Bodi Caniago* yang keduanya mempunyai kemiripan dengan pemerintahan polis-polis pada masa Yunani kuno (Bonner, 1933). Selain dipengaruhi oleh tradisi adat, struktur masyarakat Minangkabau juga diwarnai oleh pengaruh agama Islam, dan pada suatu masa pernah muncul konflik akibat pertentangan kedua pengaruh ini, yang kemudian dapat diselesaikan dengan menyasikan kedua pengaruh tersebut dalam konsep *Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah* (Haris, 2004).

Nagari merupakan unit pemungkiman yang paling sempurna yang diakui oleh adat, nagari memiliki teritorial beserta batas dan mempunyai struktur politik dan aparat hukum tersendiri, selain itu beberapa kelengkapan yang mesti dipenuhi oleh suatu pemungkiman untuk menjadi nagari diantaranya adanya balai adat, masjid serta ditunjang oleh areal persawahan (Kato, 2005).

Pembentukan nagari melalui suatu proses yang dalam istilah pepatah yang ada pada masyarakat adat Minang itu sendiri, yaitu *Dari Taratak manjadi Dusun, dari Dusun manjadi Koto, dari Koto manjadi Nagari, Nagari ba Panghulu*. Dalam sistem administrasi pemerintahan Minang dimulai dari struktur terendah yang disebut dengan *Taratak*, kemudian berkembang menjadi *Dusun*, kemudian berkembang menjadi *Koto* dan kemudian berkembang menjadi *Nagari*, yang dipimpin secara bersama oleh para penghulu atau datuk setempat. Biasanya disetiap nagari yang dibentuk itu minimal telah terdiri dari 4 suku yang mendomisili kawasan tersebut (Kato, 2005).

Dalam laporannya de Stuers (Exhibitum, 1825) menyimpulkan bahwa pada daerah pedalaman Minangkabau tidak pernah ada suatu kekuasaan pemerintahan terpusat dibawah seorang raja. Berdasarkan laporan tersebut, kemudian Belanda menerapkan model sistem penguasa-penguasa di tingkat distrik yang kemudian dikenal dengan adanya jabatan kepala laras atau *tuanku laras* yang di daerah tersebut kelarasan ini dirancang sepadan dengan pengelompokan nagari yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya satuan pemerintahan lebih rendah tetap dipegang oleh penghulu-penghulu sebelumnya tanpa mengalami perubahan sampai pada tahun 1914.

Pada tahun 1914 dikeluarkan ordonansi nagari yang membatasi anggota kerapatan nagari hanya pada penghulu yang diakui pemerintah Hindia Belanda saja. Hal ini dilakukan dengan asumsi untuk mendapatkan sistem pemerintahan yang tertib dan teratur. Penghulu-penghulu yang dulunya memimpin nagari secara bersama-sama sekarang diharuskan untuk memilih salah satu di antara mereka sebagai kepala nagari atau wali nagari, sehingga posisi penghulu suku kehilangan fungsi tradisionalnya. Namun sejalan dengan waktu, jabatan kepala laras dan kepala nagari ini yang sebelumnya asing akhirnya dapat diterima dan menjadi *tradisi adat*, jabatan ini juga akhirnya turut diwariskan kepada kemenakan dari pemegang jabatan sebelumnya (Verbaal, 1985). Namun sekarang jabatan *tuanku laras* sudah dihapus sedangkan *wali nagari* tidak boleh diwariskan kepada kemenakan yang

memegang jabatan sebelumnya tetapi tetap harus dipilih secara demokratis.

Setelah proklamasi kemerdekaan, sistem pemerintahan nagari ini diubah agar lebih sesuai dengan keadaan waktu itu. Pada tahun 1946 diadakan pemilihan langsung di seluruh Sumatera Barat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari. Calon-calon yang dipilih tak terbatas pada penghulu saja. Partai politik pun boleh mengajukan calon. Pada kenyataannya banyak anggota Dewan Perwakilan Nagari dan wali nagari terpilih yang merupakan anggota partai. Masyumi menjadi partai yang mendominasi. Dalam masa perang kemerdekaan dibentuk juga organisasi pertahanan tingkat nagari, yaitu Badan Pengawal Negeri dan Kota (BNPK). Badan ini didirikan atas inisiatif Chatib Sulaiman.

Namun setelah keluarnya Perda No. 50 tahun 1950 tentang pembentukan wilayah otonom, maka sejak itu pemerintahan nagari hampir tidak berperan lagi. Kemudian ditambah sewaktu Kabinet Mohammad Natsir tahun 1951 membekukan Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Sumatera Tengah yang juga mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, dan Jambi sekarang. Maka dengan demikian dewan perwakilan tingkat nagari pun statusnya menjadi tidak jelas juga. Kemudian pasca Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, hampir keseluruhan aparat nagari diganti oleh pemerintah pusat yang sekaligus mengubah pemerintahan nagari (Asnan, 2007).

Tahun 1974 Gubernur Harun Zain memutuskan untuk mengangkat kepala nagari sebagai pelaksana pemerintahan dan Dewan Perwakilan Rakyat Nagari sebagai lembaga legislatif terendah. Namun keputusan ini hanya berumur pendek. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan desa, sistem nagari dihilangkan dan jorong digantikan statusnya menjadi desa. Kedudukan wali nagari dihapus dan administrasi pemerintahan dijalankan oleh para kepala desa. Meskipun demikian, nagari masih dipertahankan sebagai lembaga tradisional. Peraturan Daerah No. 13/1983 mengatur tentang pendirian Kerapatan Adat Nagari (KAN) di tiap-tiap nagari yang nagari. Namun KAN sendiri tidak memiliki kekuasaan formal.

Perubahan peta politik nasional yang terjadi, membangkitkan kembali semangat masyarakat Sumatera Barat untuk kembali menjalankan sistem pemerintahan nagari. Dengan berlakunya otonomi

daerah pada tahun 2001, istilah pemerintahan nagari kembali digunakan untuk mengganti istilah pemerintahan desa yang digunakan sebelumnya dalam sistem pemerintahan kabupaten, sedangkan nagari yang berada dalam sistem pemerintahan kota masih seperti sebelumnya yaitu bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada tahun 2004, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan UU No. 22/1999 dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, kemudian Presiden Indonesia dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara bersama, disahkanlah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk menggantikan UU No. 22/1999. Dan dari undang-undang baru ini diharapkan munculnya pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut maka keluarlah PP No. 72/2005 tentang desa, yang menekankan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan keanekaragaman daerah, yang memiliki makna bahwa istilah *desa* dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pemerintah tetap menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam satu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu terdapatlah beberapa nama yang sama dengan Desa.

## **2. Kualifikasi dan Persyaratan Tenaga Pendamping Pembangunan Nagari**

Terdapat sembilan jenis tenaga pendamping pembangunan desa. Empat di antaranya dapat diikuti oleh semua latar belakang ilmu, satu oleh yang berlatarbelakang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan empat bidang lainnya dapat dimasuki oleh mereka yang berlatar belakang pendidikan teknik, sebagai berikut.

### **a. Pendamping Lokal Desa (PLD)**

- 1) Latar belakang pendidikan minimal Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat;
- 2) Memiliki pengalaman kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat minimal 2 (dua) tahun;
- 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;

- 4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
- 5) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
- 6) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 7) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa;
- 8) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 9) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas; dan
- 10) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 45 (empat puluh lima) tahun.
- 11) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

**b. Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP)**

- 1) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal Diploma III (D-III);
- 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 4 (empat) tahun untuk D-III dan 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1);
- 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan di Desa;
- 4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
- 5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan di tingkat Desa;
- 6) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
- 7) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
- 8) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 9) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa;

- 10) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 11) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 12) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
- 13) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

**c. Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PDTI)**

- 1) Latar belakang pendidikan bidang ilmu Teknik Sipil minimal Diploma III (D-III);
- 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan infrastruktur Desa minimal 4 (empat) tahun untuk D-III dan 2 (dua) tahun untuk Strata 1 (S-1)
- 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan kegiatan infrastruktur di Desa;
- 4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
- 5) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan Desa;
- 6) Memiliki pengalaman memberikan pelatihan dan bimbingan teknis konstruksi secara sederhana;
- 7) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 8) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah Desa dan masyarakat Desa;
- 9) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 10) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 11) Pada saat mendaftar usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun dan;
- 12) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

**d. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD)**

- 1) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal S-1 (Strata-1);
- 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
- 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
- 4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan kapasitas, kaderisasi dan pengorganisasian masyarakat;
- 5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
- 6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
- 7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
- 8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan mencakup aspek penyusunan modul sederhana, fasilitasi penyelenggaraan pelatihan, fasilitasi kaderisasi dan menguasai metodologi pendidikan orang dewasa;
- 9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet
- 12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas
- 13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun dan
- 14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

**e. Tenaga Ahli Infrastruktur Desa (TA-ID)**

- 1) Latar belakang pendidikan dari bidang ilmu Teknik Sipil minimal S-1 (Strata-1);
- 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;

- 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral khususnya yang terkait dalam pembangunan infrastruktur;
- 4) Memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan pengorganisasian masyarakat;
- 5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
- 6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
- 7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
- 8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan terkait dengan pembangunan infrastruktur Desa;
- 9) Berpengalaman dalam perencanaan, pelaksanaan dan kontrol dalam pekerjaan teknik;
- 10) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 11) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- 12) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 13) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 14) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
- 15) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

**f. Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA-PP)**

- 1) Latar belakang pendidikan dari semua bidang ilmu minimal S-1 (Strata-1);
- 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
- 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
- 4) Memiliki pengalaman dalam pembangunan Desa secara partisipatif dan siklus perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota;

- 5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
- 6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
- 7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
- 8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan secara partisipatif;
- 9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
- 11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
- 14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

**g. Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa (TA-PED)**

- 1) Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu ekonomi minimal S-1 (Strata-1);
- 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pem-berdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
- 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan ekonomi perdesaan;
- 4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan ekonomi pedesaan;
- 5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasya-rakatan;
- 6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
- 7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;

- 8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan ekonomi pedesaan;
  - 9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
  - 10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
  - 11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
  - 12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
  - 13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
  - 14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.
- h. Tenaga Ahli Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TA-TTG)**
- 1) Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu teknologi dalam pertanian/perikanan/peternakan/kehutanan/pariwisata minimal S-1 (Strata-1);
  - 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima) tahun;
  - 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan teknologi tepat guna;
  - 4) Memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi tepat guna untuk pengembangan sosial ekonomi Desa;
  - 5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan;
  - 6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
  - 7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
  - 8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan dalam bidang teknologi tepat guna pedesaan;
  - 9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
  - 10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;

- 11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
- 14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

**i. Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (TA-PSD)**

- 1) Latar belakang pendidikan diutamakan bidang ilmu kependidikan atau kesehatan minimal S-1 (Strata-1);
- 2) Memiliki pengalaman kerja dalam bidang pembangunan Desa dan atau pemberdayaan masyarakat minimal 5 (lima);
- 3) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
- 4) Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan minimum di bidang pendidikan dan kesehatan serta pengalaman dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
- 5) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan;
- 6) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
- 7) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
- 8) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan pendidikan dan kesehatan;
- 9) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 10) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 11) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 12) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 13) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan

- 14) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.
- 15) Memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengorganisasi pelaksanaan program dan kegiatan sektoral dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
- 16) Memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan minimum di bidang pendidikan dan kesehatan serta pengalaman dalam pengembangan pendidikan dan kesehatan;
- 17) Pengalaman dalam melakukan fasilitasi kerja sama antarlembaga kemasyarakatan;
- 18) Mampu melakukan analisis kebijakan terhadap implementasi program di wilayahnya;
- 19) Memahami sistem pembangunan partisipatif dan pemerintahan kabupaten;
- 20) Memiliki kemampuan memberikan pelatihan dan pembimbingan pengembangan pendidikan dan kesehatan;
- 21) Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik secara lisan dan tulisan;
- 22) Memiliki kemampuan dan sanggup bekerjasama dengan aparat pemerintah daerah kabupaten/kota;
- 23) Mampu mengoperasikan komputer minimal program Office (Word, Excel, Power Point) dan internet;
- 24) Sanggup bekerja penuh waktu sesuai standar operasional prosedur dan siap bertempat tinggal di lokasi tugas;
- 25) Pada saat mendaftar usia minimal 30 (tiga puluh) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun; dan
- 26) Dilarang menjadi pengurus partai politik manapun dan/atau terlibat dalam kegiatan politik yang dapat mengganggu kinerja.

### **3. Kompetensi, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah Jurusan PLS**

Dengan memperhatikan rumusan kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah Jurusan PLS berikut ini, dapat diketahui bahwa lulusannya layak sebagai Tenaga Pendamping Pembangunan Nagari. Adapun kompetensi dan bahan kajian PLS adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut.

Tabel Rumusan Kompetensi, Bahan Kajian, dan Mata Kuliah

<b>Profil Sarjana PLS</b>	<b>Rumusan Kompetensi</b>	<b>Bahan Kajian</b>	<b>Mata Kuliah</b>
	<b>Kompetensi Utama</b>		
<b>A. PENDIDIK</b> (Fasilitator, Tutor KF, Pamong Belajar)	1. Menguasai konsep ilmu yang melandasi PLS	1. Pendidikan Sepanjang Hayat 2. filsafat dan teori pendidikan	1. (PLS 111) Filsafat dan Konsep PLS (3 sks) 2. (PLS 188) Psikologi Sosial (3 sks)
<b>B. TENAGA KEPENDIDIKAN</b> (Pembentuk/pendiri satuan PLS, pengelola satuan PLS, pengembang satuan PLS)		1. Konsep dan prinsip tingkah laku manusia 2. Struktur dan proses sosial	1. (PLS 107) Pengantar Sosiologi (3 sks)
<b>C. AKADEMISI</b>	1. Menguasai Substansi Bidang Keahlian	1. Filsafat PLS 2. Struktur Keahlian PLS 3. Sistem PLS	1. (PLS 111) Filsafat dan Konsep PLS (3 sks)
	2. Kemampuan Memahami Pedagogi dan Andragogi	1. Konsep Pedagogi dan Penerapannya 2. Konsep Andragogi dan Penerapannya	1. (FIP 102) Pedagogi ( 2 sks) 2. (FIP 105) Andragogi (3 sks)

SEMINAR NASIONAL  
 JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
 "KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"  
 Kamis/ 6 Oktober 2016

	3. Kemampuan Mengembangkan Masyarakat	1. Pembangunan dalam Aspek Sosiologis 2. Hakikat Pembangunan Masyarakat 3. Aspek-Aspek Pembangunan Masyarakat 4. Teknik Pengembangan Masyarakat	1. (PLS 160 Sosiologi Pembangunan) (3 sks) 2. (PLS 247) Pembangunan Masyarakat
	4. Kemampuan Merancang Kegiatan Pembelajaran PLS	1. Penyusunan Rancangan Pembelajaran 2. Perumusan Tujuan Pembelajaran 3. Penetapan Sistematika Bahan Ajar 4. Penyusunan Skenario Langkah-Langkah Pembelajaran	1. (PLS 000) Desain Instruksional (3 sks)
	5. Kemampuan Mengembangkan Bahan dan Sumber Belajar	1. Analisis Cakupan Bahan Ajar 2. Penyusunan Pokok-pokok Bahan Ajar 3. Penyusunan Paket Belajar	1. (PLS 000) Penyusunan Bahan Ajar (3 sks)
	6. Kemampuan Merancang dan Menggunakan Media Pembelajaran	1. Fungsi dan Karakteristik Media Pembelajaran 2. Pengembangan Media Pembelajaran 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam PLS	1. (PLS 132) Media dan Sarana Belajar PLS (3 sks) 2. (PLS 000) Teknologi Informasi dan Komunikasi PLS (3 sks)
	7. Menguasai Pendekatan dan	1. Prinsip dan Strategi Pembelajaran 2. Langkah-langkah Penggunaan	1. (PLS 245) Metode dan Strategi Pembelajaran PLS (3

	Metode Pembelajaran	Metode Pembelajaran	sks)
	8. Kemampuan Melaksanakan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi Belajar</li> <li>2. Penciptaan Kondisi Belajar yang Kondusif</li> <li>3. Belajar Partisipatif</li> <li>4. Interaksi Pembelajaran</li> <li>5. Pengorganisasian Kegiatan Pembelajaran</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (PLS 245) Metode dan Strategi Pembelajaran PLS</li> <li>2. (PLS 000) Teknik Interaksi Pembelajaran PLS (3 sks)</li> </ol>
	9. Kemampuan Melakukan Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip dan Prosedur Penilaian</li> <li>2. Penyusunan Alat Penilaian</li> <li>3. Analisis Hasil Penilaian</li> <li>4. Pemanfaatan Hasil Penilaian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (PLS 230) Penilaian Hasil Belajar PLS (3 sks)</li> </ol>
	10. Kemampuan Mengidentifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar PLS</li> <li>2. Prosedur Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar</li> <li>3. Model-Model Identifikasi Kebutuhan dan Sumber Belajar</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (PLS 000) Analisis Kebutuhan dan Sumber Belajar (3 sks)</li> </ol>
	11. Kemampuan Merencanakan Program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang Pembentukan Satuan PLS</li> <li>2. Prosedur Pembentukan Satuan PLS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (PLS 229) Perencanaan Program PLS (3 sks)</li> <li>2. (PLS 144) Desain Program</li> </ol>

**SEMINAR NASIONAL**  
**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA”**

Kamis/ 6 Oktober 2016

	Pembelajaran	3. Pembentukan Kepengurusan Satuan PLS 4. Merancang Program Pendidikan untuk Setiap Satuan Pendidikan	PLS (3 sks)
12.	Kemampuan Merencanakan Program Pembelajaran	1. Merancang Pembentukan Satuan PLS 2. Prosedur Pembentukan Satuan PLS 3. Pembentukan Kepengurusan Satuan PLS 4. Merancang Program Pendidikan untuk Setiap Satuan Pendidikan	1. (PLS 229) Perencanaan Program PLS (3 sks) 2. (PLS 144) Desain Program PLS (3 sks)
13.	Kemampuan Menyelenggarakan Kegiatan PLS	1. Menetapkan Jadwal Kegiatan 2. Rekrutmen Peserta Didik 3. Menetapkan Tutor 4. Mengadakan Bahan Belajar 5. Mengelola Kegiatan Pendidikan	1. (PLS 144) Desain Program PLS 2. (PLS 000) Penyusunan Bahan Ajar PLS 3. (PLS 255) Pengelolaan Program PLS
14.	Kemampuan Monitoring dan Mengevaluasi Program PLS	1. Mengembangkan Alat Monitoring dan Evaluasi 2. Melaksanakan Pengumpulan Data 3. Menganalisis Data 4. Memanfaatkan Data untuk Perbaikan Program Pendidikan	1. (PLS 136) Penilaian Program PLS (3 sks)
15.	Kemampuan	1. Identifikasi Model-Model Program	1. (PLS 000) Pengembangan

	n Mengembangkan Program PLS	PLS 2. Pengembangan Model-Model Program yang inovatif 3. Ujicoba Model dan Bentuk Penyelenggaraan Program PLS	Model Satuan PLS (3 sks)
	16. Kemampuan Meneliti dan Mengembangkan PNF	1. Konsep dan Prosedur Penelitian PLS 2. Rancangan Penelitian PLS 3. Pelaksanaan Penelitian PLS 4. Pemanfaatan Hasil Penelitian PLS	1. (PLS 130) Penelitian 1 (3 sks) 2. (PLS 131) Penelitian 2 (3 sks)
	17. Kemampuan Mengembangkan Diri dan Profesi	1. Belajar Sepanjang Hayat 2. Profesionalisasi PLS 3. Motivasi Berprestasi Pengembangan Keahlian Sesuai dengan Profesi	1. (PLS 111) Filsafat dan Konsep PLS (3 sks) 2. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi
	18. Kemampuan Berpikir dan Menulis Ilmiah	1. Analisis Permasalahan PLS 2. Logika Berpikir 3. Kaedah-Kaedah Penulisan Karya Ilmiah 4. Teknik Penulisan Karya Ilmiah 5. Penyusunan Karya Ilmiah	1. (PLS 143) Seminar PLS (3 sks) 2. (PLS 182) Teknik Penulisan Karya Ilmiah (3 SKS) 3. (UNP 013) Skripsi
	<b>Kompetensi Pendukung</b>		
	1. Kemampuan Menggunakan dan Mengkomunikasikan	1. Sosialisasi dan Pemasaran Program 2. Analisis Situasi dan Kebutuhan Pemakai Program	1. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi 2. (PLS 120) Identifikasi

SEMINAR NASIONAL  
 JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
 "KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"

Kamis/ 6 Oktober 2016

	an Program PLS Berbasis Teknologi Informasi		Kebutuhan Belajar
	2. Kemampuan Berbahasa Inggris	1. Kaidah dan Praktek Bahasa Inggris 2. Aplikasi Bahasa Inggris	1. (PLS 000) Bahasa Inggris (3 sks)
	3. kemampuan dan Teknologi Informasi	1. Konsep dan Aplikasi Komunikasi Efektif 2. Alat dan Media Teknologi Komunikasi Efektif 3. Strategi Komunikasi Efektif 4. Pengenalan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. (PLS 000) Teknologi Informasi dan Komunikasi PLS
	4. Kemampuan Bekerjasama dengan Sejawat	1. Hubungan Interpersonal 2. Interaksi Sosial 3. Empati dan Simpati	1. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi 2. (PLS 108) Psikologi Sosial
	5. Kemampuan Memahami Sosial Budaya Masyarakat Setempat	1. Karakteristik Masyarakat 2. Kelompok-Kelompok Sosial dalam Masyarakat 3. Stratifikasi Sosial 4. Situasi Sosial 5. Masyarakat dan Kebudayaan	1. (PLS 107) Pengantar Sosiologi 2. (PLS 108) Psikologi Sosial 3. (PLS 248) Antropologi Sosial
	6. Kemampuan Meningkatkan	1. Orientasi Profesi Keahlian PLS 2. Pengembangan Profesi PLS	1. (PLS 111) Filsafat dan Konsep PLS

	Kinerja Profesi	3. Pembinaan Tugas Profesional	
	7. Kemampuan Membimbing Pengembangan Karir Peserta Didik	1. Mengetahui Karakteristik Peserta Didik 2. Bimbingan Karir dan Peningkatan Kerja 3. Fasilitas Pengembangan Karir	1. (PLS 117) BP PLS (3 sks) 2. (PLS 000) Pengembangan SDM (3 sks)
	8. Kemampuan Menganalisis Data PLS	1. Mengetahui Berbagai Data PLS 2. Menghimpun Berbagai Data PLS 3. Menganalisis Berbagai Data PLS	1. (PLS 129) Statistik
	<b>Kompetensi Lainnya</b>		
	1. Kemampuan Menjalin Kerjasama dengan Pihak Terkait	1. Negosiasi 2. Komunikasi dan Interaksi dalam Kerjasama	1. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi 2. (PLS 108) Psikologi Sosial
	2. Kemampuan Mensosialisasikan Program PLS	1. Sosialisasi Program PLS 2. Persuasif	1. (PLS 204) Motivasi Persuasi
	3. Kemampuan Berkomunikasi dengan Baik	1. Teknik dan Cara Berkomunikasi 2. Memahami Karakteristik Orang Lain 3. Mengetahui Saluran Komunikasi Efektif 4. Keterampilan Komunikasi	1. (PLS 204) Komunikasi, Motivasi dan Persuasi 2. (PLS 108 ) Psikologi Sosial 3. (PLS 107 )Pengantar Sosiologi

SEMINAR NASIONAL  
 JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
 "KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"

Kamis/ 6 Oktober 2016

	4. Kemampuan Mengembangkan Inovasi Program PLS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Identifikasi Model-Model Program PLS</li> <li>2. Pengembangan Model-Model yang Inovatif</li> <li>3. Ujicoba Model dan Penyelenggaraan Program PLS yang Inovatif</li> </ol>	1. (PLS 144) Desain Program
	5. Kemampuan Mengelola dan Memanfaatkan Laboratorium PLS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip dan Fungsi Laboratorium PLS</li> <li>2. Komponen-Komponen Laboratorium PLS</li> <li>3. Prosedur Kerja di Laboratorium PLS</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (PLS 128 ) Magang PLS</li> <li>2. (PLS 125) PPL PLS</li> </ol>
	6. Kemampuan Melaksanakan Proses Pembelajaran di Lembaga Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keterampilan Pembelajaran dalam Kelompok Kecil</li> <li>2. Keterampilan Pembelajaran dalam Kelompok Belajar yang Lebih Luas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (PLS 193) <i>Micro Teaching</i></li> <li>2. (UNP 105) PL Kependidikan</li> </ol>
	7. Kemampuan Memberikan Pencerahan terhadap Sejawat dan Sasaran Didik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama dalam Kelompok</li> <li>2. Bimbingan dan Penyuluhan</li> <li>3. Teknik Problem Solving</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. (PLS 108) Psikologi Sosial</li> <li>2. (PLS 117) BP PLS</li> <li>3. (PLS 108) Psikologi Sosial</li> </ol>
	8. Kemampuan Memahami dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis-Jenis Keterampilan Ekonomi Produktif</li> </ol>	1. (PLS 221 ) Kewiraswastaan (3 SKS)

	<p>Mengembangkan Kewiraswastaan</p>	<p>2. Strategi Pengembangan Ekonomi Produktif 3. Pemasaran Keterampilan Ekonomi Produktif</p>	
--	-------------------------------------	---	--

### C. PENUTUP

Demikianlah makalah tentang *Sarjana Pendidikan Luar Sekolah dan Pembangunan Nagari* dengan mengkaji *link and match* antara kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari dengan kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah lulusan sarjana Pendidikan Luar Sekolah. Dalam pengkajian tersebut, teramati bahwa sebagian besar kompetensi, bahan kajian, dan mata kuliah lulusan sarjana Pendidikan Luar Sekolah *link and match* dengan kualifikasi dan persyaratan tenaga pendamping pembangunan nagari, kecuali yang menyangkut dengan pengembangan teknologi tepat guna dan ekonomi. Semoga kajian ini bermanfaat bagi pemegang kebijakan.

### DAFTAR RUJUKAN

- Asnan, Gusti. 2007. *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Batuah, A. Dt. & Madjoindo, A. Dt. 1959. *Tambo Minangkabau dan Adatnya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bonner, Robert Johnson. 1933. *Aspects of Athenian democracy Vol 11*. University of California Press. pp. 25–86
- Haris, Syamsuddin. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kato, Tsuyoshi. 2005. *Adat Minangkabau dan Merantau dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Laporan kepada Gubernur Jendral, 30 Agustus 1825, *Exhibitum*, 24 Agustus 1826, No. 41.
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang *Desa*
- Yayasan Kemala. 2005. *Tanah Masih di Langit: Penyelesaian Masalah Penguasaan Tanah dan Kekayaan Alam di Indonesia yang Tak Kunjung Tuntas di Era Reformasi*. Bandung: Yayasan Kemala
- Verbaal*, 22 Januari 1875, No. 39.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

## PERAN STRATEGIS SARJANA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM MENDUKUNG PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Ismaniar

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang  
ismaniar.js@gmail.com

### Abstract

The success of national development is largely determined by the implementation of development at the level of village government. The role of companion well as technical personnel and personnel empowerment krudensial position in supporting the implementation of development at the village level. Non-formal education bachelor with the knowledge and skills are mastered, it is a potential for a position as assistant village especially in the aspect of community empowerment. The strategic role that can be done outside of school to undergraduate education in the development of rural communities such as programmers, facilitators, mediators, evaluators and supervisors of village development

**Key words:** strategic role, non-formal education bachelor, support village development

### A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau, baik besar maupun kecil terdapat di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu secara geografis, wilayah negara Indonesia juga dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga memiliki iklim yang tropis dan sangat potensial dalam pengembangan bidang pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, jika dilihat dari posisi strategis lalu lintas hubungan antar negara, wilayah Indonesia berada di antara dua Samudera yaitu Hindia dan Samudra Pasifik dan di antara dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia.

Berdasarkan fakta geografis di atas, maka seharusnya negara Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang besar dengan kemakmuran kehidupan rakyatnya melebihi bangsa

SEMINAR NASIONAL  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
"KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"  
Kamis/ 6 Oktober 2016

lainnya. Namun kondisi yang terjadi sekarang ini malah sebaliknya, hampir di semua aspek kehidupan bangsa Indonesia tertinggal dibandingkan dengan bangsa di negara sekelilingnya. Sudah sejak lama Indonesia merdeka, tapi status negara berkembang seakan-akan abadi kita sandang. Sumber daya alam yang kaya dan kondisi geografis yang menggiurkan ternyata belum menjanjikan apa-apa jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas baik.

Secara administratif upaya pembangunan yang dilakukan di negara Indonesia pada tingkatan yang paling menyentuh kehidupan masyarakat adalah diselenggarakan di desa dan kelurahan. Jika dibandingkan jumlah desa dengan jumlah kelurahan yang ada, maka sudah tentu jumlah desa yang ada jauh lebih banyak karena menjangkau daerah terluar, maupun tertinggal di wilayah Indonesia, sementara kelurahan hanya terdapat di wilayah perkotaan.

Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat, kemudian kepala desa akan memilih aparat desa untuk membantu dalam pelaksanaan tugasnya. Secara umum yang menjadi kepala desa adalah orang-orang yang dianggap tokoh di wilayahnya, mereka dipilih karena wibawa yang dimilikinya atau bisa juga karena berasal dari silsilah keluarga yang dianggap terpuji oleh masyarakatnya. Banyak sekali di antara mereka yang terpilih menjadi kepala desa kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan pemerintahan atau kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan. Sehingga kondisi tersebut berdampak pada kurang terlihatnya dampak kebijakan pembangunan yang dilakukan bagi kemajuan pembangunan desa selama ini.

Perubahan-perubahan yang terjadi bergerak sangat lambat dan kurang berkontribusi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Dari dulu sampai sekarang kondisi kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perubahan yang signifikan, begitu juga dengan infrastruktur yang tersedia di kawasan pedesaan hampir tidak banyak mengalami perubahan. Kondisi desa masih diwarnai dengan banyaknya jalan-jalan rusak, jembatan penyeberangan antar desa dalam kondisi darurat, gedung-gedung sekolah tidak terurus dan sebagainya.

Melihat kondisi-kondisi yang sudah diuraikan di atas maka dalam makalah ini penulis ingin menuangkan pikiran tentang posisi strategis yang dapat diambil oleh sarjana pendidikan luar sekolah dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Sarjana Pendidikan Luar Sekolah**

Upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas baik, tidak bisa dilepaskan dari proses pendidikan. Pendidikan dapat diperoleh seseorang di lingkungan sekolah (formal), maupun di lingkungan luar sekolah (non formal dan in formal). Hal ini seperti yang dituangkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Sarjana pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan tenaga profesional yang disiapkan di lembaga pendidikan formal tepatnya di universitas atau sekolah tinggi ilmu pendidikan, khususnya fakultas ilmu pendidikan jurusan/program studi Pendidikan Luar Sekolah. Di Indonesia terdapat puluhan Universitas eks IKIP dan STKIP yang menyelenggarakan jurusan/program studi PLS. Setiap tahunnya ratusan sarjana PLS diluluskan dari berbagai Universitas dan STKIP yang ada dan siap untuk masuk ke dunia kerja dengan modal keilmuan yang mereka miliki.

Sebagai seorang tenaga profesional, sarjana pendidikan luar sekolah disiapkan dengan berbagai ilmu, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka membantu upaya pemberdayaan masyarakat (*empowering society*). Terkait dengan persiapan untuk menjadi tenaga profesional di bidang pemberdayaan masyarakat tersebut, semasa di bangku perkuliahan seorang sarjana pendidikan luar sekolah dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengidentifikasi kebutuhan belajar masyarakat, merancang dan melaksanakan program untuk masyarakat, menilai penyelenggaraan program di tengah masyarakat, serta mengontrol jalannya program-program pendidikan dan keterampilan di tengah masyarakat. Di samping itu, mereka juga dibekali dengan teori motivasi dan persuasi, metode pembelajaran orang dewasa, pengetahuan tentang pembangunan desa dan lain sebagainya.

Semua pengetahuan dan keterampilan yang dialami selama masa perkuliahan tersebut membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi seorang sarjana pendidikan luar sekolah untuk berkontribusi dalam pembangunan masyarakat desa.

### **2. Pembangunan Desa**

Untuk memahami makna pembangunan desa, maka terlebih dahulu kita sebaiknya memahami makna pembangunan. Pembangunan merupakan proses kegiatan untuk meningkatkan keberdayaan dalam

meraih masa depan yang lebih baik. Dari pengertian tersebut, makna dari pembangunan ditekankan pada upaya untuk memperbaiki keberdayaan masyarakat, dan bahkan hendaknya lebih diperluas menjadi peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Selanjutnya berdasarkan makna pembangunan di atas, maka dapat dirumuskan bahwa pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa mempunyai arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dari ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Untuk lebih memahami tentang pengertian pembangunan desa, maka sebagai bahan pertimbangan dapat kita baca definisi pembangunan desa menurut beberapa ahli berikut.

Suparno (2001:46) mengatakan bahwa pembangunan desa merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Jadi proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan kegiatan pemerintah. Sementara itu, menurut Kartasasmita (2001:66) pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. Pendapat kedua orang ahli tersebut di dukung lagi oleh mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak (2001:222).

Berdasarkan pendapat para ahli yang sudah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah peningkatan keberdayaan serta penyertaan partisipasi masyarakat desa dalam proses pembangunan yang didukung oleh pemerintah dalam bentuk pemberian bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

Selanjutnya adapun sasaran yang paling pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan desa adalah:

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur di kawasan permukiman di perdesaan.

3. Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Ketiga sasaran pembangunan desa yang dikemukakan tersebut akan terwujud jika para pemimpin desa memiliki kemampuan dalam memimpin dan menggerakkan masyarakatnya untuk bekerjasama dan mendukung terlaksananya pembangunan. Secara umum para pemimpin desa yang ada, merupakan tokoh-tokoh pilihan masyarakat di wilayahnya masing-masing karena wibawa atau kharisma yang mereka miliki. Faktor wibawa dan kharisma dari seorang pemimpin sangat penting dalam upaya menggerakkan pembangunan desa, namun itu saja tidak cukup. Seorang pemimpin desa juga harus memiliki kemampuan merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Untuk kemampuan dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, hal inilah yang jarang dimiliki oleh seorang kepala desa.

Keberadaan tenaga-tenaga profesional yang dapat mendampingi pemimpin desa sangat dibutuhkan dalam menggerakkan pembangunan desa. Tenaga profesional yang dibutuhkan untuk mendampingi pemerintah desa dan pembangunan dapat di kelompokkan menjadi dua yaitu tenaga teknis dan tenaga non teknis (pemberdayaan). Tenaga teknis yang dibutuhkan diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi di bidang pertanian, bidang peternakan, teknik, kesehatan perkebunan dan perikanan. Sementara untuk kelompok non teknis (pemberdayaan) yang sangat potensial adalah sarjana pendidikan luar sekolah.

### **3. Peran Strategis Sarjana PLS dalam Pembangunan Desa**

Menyadari besarnya kontribusi desa terhadap kesuksesan pembangunan nasional, dewasa ini perhatian pemerintah terhadap terselenggaranya pembangunan desa semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat dari program-program yang diluncurkan pemerintah untuk memacu pemberdayaan desa, salah satu program yang diluncurkan pemerintah yaitu adanya alokasi dana desa untuk pembangunan setiap desa yang ada.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan perdesaan pada tahun 2016, dapat dilihat dari sisi alokasi anggaran dana desa yang mencapai Rp46,98 triliun. Untuk Sumatera Barat saja pada tahun anggaran 2016 mempunyai alokasi dana desa

sebesar Rp598.637.609.000,00 dengan jumlah desa sebanyak 880 buah desa (Data Kemenkeu, 2015). Dana yang besar tentunya saja menuntut pengelola dan semua pihak yang terlibat harus mengelola dengan akuntabilitas dan penuh tanggung jawab. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, desa merupakan bagian tolok ukur keberhasilan suatu pembangunan jika dilihat dari distribusi pembangunan itu sendiri.

Besarnya dana yang dikucurkan pemerintah untuk memacu pembangunan desa, secara langsung maupun tidak menuntut para pengelola desa menunjukkan kerja keras dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan pembangunan itu sendiri. Mengingat para penyelenggara desa pada umumnya merupakan pemimpin yang dipilih secara langsung oleh masyarakat karena faktor kharismatik atau wibawa yang melekat pada dirinya, bukan karena faktor keilmuan dan keterampilan dalam merancang dan melaksanakan program, maka di sinilah letak dibutuhkan tenaga pendamping pembangunan desa.

Sarjana pendidikan luar sekolah merupakan tenaga profesional yang potensial untuk mengisi posisi tenaga pendamping pembangunan desa, khususnya pada aspek pemberdayaan. Sesuai dengan fokus utama pendidikan luar sekolah yaitu untuk memberdayakan masyarakat (*empowering society*). Berbagai ilmu, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh semasa perkuliahan sangat fungsional dalam kegiatan pembangunan desa. Berikut ini merupakan beberapa posisi strategis yang dapat diisi oleh sarjana pendidikan luar sekolah terkait dengan program pendamping pembangunan desa.

#### **a. Sebagai programer pembangunan desa**

Program-program yang dibuat dalam rangka membangun desa hendaknya memperhatikan faktor kebutuhan masyarakat. Seringkali terjadi program pembangunan yang dilaksanakan di desa kurang mendapat perhatian dan tanggapan positif dari masyarakat, dikarenakan tidak menyentuh kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Untuk mengetahui kebutuhan masyarakat seorang pemimpin terlebih dahulu haruslah melakukan identifikasi kebutuhan, dan menentukan skala prioritas program yang akan diselenggarakan. Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan, maka akan diketahui apa saja program-program yang tepat diselenggarakan dan dapat memecahkan permasalahan masyarakat. Program pembangunan yang tepat pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan akhirnya meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Sebaliknya program pema-

ngunan yang tidak tepat hanya akan menghabiskan anggaran yang disediakan negara, dan tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sarjana pendidikan luar sekolah adalah tenaga profesional dalam hal ini karena mereka dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat.

**b. Sebagai fasilitator pembangunan desa**

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan masyarakat, dibutuhkan ketersediaan berbagai sumber baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Kenyataannya di lapangan dalam kegiatan pembangunan desa tidak semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Oleh sebab itu maka dibutuhkan orang-orang yang memiliki kemampuan dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Seorang sarjana pendidikan luar sekolah dapat mengambil posisi sebagai fasilitator pembangunan desa, karena mereka mengkaji tentang masalah pembangunan masyarakat, bimbingan dan penyuluhan, motivasi dan persuasi dan pengetahuan terkait.

**c. Sebagai mediator pembangunan desa**

Selanjutnya dalam program pembangunan desa selain dibutuhkan tenaga pemberdayaan, juga yang tidak kalah pentingnya adalah tenaga teknis. Banyak sekali tenaga-tenaga teknis yang perlu dilibatkan dalam program pembangunan desa, di antaranya; dari bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perkebunan, perhubungan dan sebagainya. Kendala yang sering ditemui selama ini adalah banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menemui tenaga teknis yang dibutuhkan untuk membantu penyelesaian masalah yang mereka alami. Kurangnya pengetahuan dan terbatasnya sumber informasi menjadi penyebab utama, sehingga masyarakat seringkali terjebak dengan kebiasaan turun menurun dalam menjalani kegiatannya sehari-hari.

Terkait dengan uraian di atas, maka sarjana pendidikan luar sekolah dapat menempatkan posisinya sebagai mediator pembangunan desa. Mereka dapat membantu pemerintah desa menjadi mediator bertemunya antara masyarakat dengan tenaga teknis yang dibutuhkan, baik secara individual maupun kelompok.

**d. Sebagai evaluator pembangunan desa**

Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi program-program pembangunan desa yang telah dilaksanakan, maka diperlukan kegiatan evaluasi baik pada saat program berlangsung maupun setelah program selesai dilakukan. Tidak semua aparat pemerintahan desa yang memili-

ki kemampuan dalam mengevaluasi program pembangunan desa, jadi diperlukan tenaga pendamping dalam melaksanakan tugas tersebut. Sarjana pendidikan luar sekolah semasa perkuliahan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengevaluasi program. Terkait dengan uraian tersebut, maka sarjana pendidikan luar sekolah sangat potensial jika ditugaskan sebagai evaluator pembangunan desa.

**e. Sebagai supervisor pembangunan desa**

Proses pelaksanaan pembangunan desa tidaklah dapat dipandang sebagai suatu pekerjaan yang mudah. Banyak aspek yang perlu mendapatkan perhatian, dan juga melibatkan banyak orang. Tantangan dan hambatan sangat mungkin terjadi setiap waktu dan kesempatan, sehingga dibutuhkan pengawas/supervisor yang bertanggung jawab memastikan pembangunan yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya. Sarjana pendidikan luar sekolah dapat mengisi posisi sebagai tenaga supervisor pembangunan desa, karena mereka dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan supervisi.

## **C. SIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan kajian yang sudah diuraikan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- a. Tercapainya tujuan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh terselenggara atau tidaknya pembangunan di tingkat pemerintah desa.
- b. Peran pendamping baik sebagai tenaga teknis maupun tenaga pemberdayaan menduduki posisi krusial dalam mendukung terselenggaranya pembangunan di tingkat desa.
- c. Sarjana pendidikan luar sekolah dengan pengetahuan dan keterampilan yang dikuasainya, sangat potensial untuk menduduki posisi sebagai pendamping desa khususnya pada aspek pemberdayaan masyarakat.
- d. Peran yang dapat dilakukan sarjana pendidikan luar sekolah dalam pembangunan masyarakat desa diantaranya sebagai programer, fasilitator, mediator, evaluator dan supervisor pembangunan desa.

### **2. Saran**

Berdasarkan kajian yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rekomendasi sebagai berikut.

- a. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pembangunan Desa sebagai pihak yang berwenang dalam perekrutan tenaga pendamping desa hendaknya dapat menunjuk sarjana pendidikan luar sekolah sebagai tenaga pemberdayaan dalam pembangunan desa.
- b. Jurusan/program studi pendidikan luar sekolah diharapkan dapat lebih memaksimalkan upaya penyiapan lulusannya dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan yang mendukung kebutuhan lapangan kerja.
- c. Kepada mahasiswa lulusan pendidikan luar sekolah diharapkan lebih termotivasi dalam membekali diri dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja, baik melalui kegiatan perkuliahan maupun melalui keikutsertaan dengan berbagai jenis organisasi kemahasiswaan yang ada.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Coastal Community Development Project (CCDP). 2015. *Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir*. Jakarta: CCDP
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Kartasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat. Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM
- Kartasmita, Ginandjar. 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka CIDESINDO
- Suparno, A.Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional

## PENGEMBANGAN PROGRAM KULIAH KERJA NYATA UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Alim Harun Pamungkas

Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan

Universitas Negeri Padang

082230294393/pamungkasd527@gmail.com

### A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN), secara umum memiliki dua pendekatan utama, yaitu: KKN berpendekatan tematik dan KKN berpendekatan mandiri. Dalam KKN berpendekatan tematik, universitas menetapkan tema yang mencerminkan bidang, tujuan dan sasaran seluruh program kerja yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh kelompok mahasiswa KKN. Dalam KKN berpendekatan mandiri, universitas memberikan kebebasan kepada kelompok mahasiswa KKN untuk mengembangkan dan melaksanakan program kerja berdasarkan hasil asesmen masalah dan atau kebutuhan masyarakat sasaran.

KKN berpendekatan tematik bertujuan membentuk, membina, dan mengembangkan pemberdayaan keluarga sebagai terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pemanfaatan potensi manusia dan alam setempat. Dari sudut masyarakat penerima, KKN berpendekatan tematik membantu masyarakat dalam membentuk, mengisi dan mengembangkan lembaga pemberdayaan masyarakat di desa secara sistematis. Lembaga pemberdayaan desa dibentuk sebagai wadah bagi keluarga dan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam bidang kewirausahaan, pendidikan dan pelatihan keterampilan, KB (Keluarga Berencana) dan kesehatan, serta lingkungan. Secara keseluruhan, semua upaya tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki mutu manusia, misalnya seperti pengukuran berdasar pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau pencapaian tujuan dan sasaran SDGs (*Sustainable Development Goals*).

Kendati ada perbedaan dalam proses penetapan tema, pada KKN berpendekatan tematik sudah dipastikan, sedangkan pada KKN mandiri ditetapkan oleh kelompok mahasiswa KKN. Pada dasarnya kedua pendekatan ini menerapkan tahapan pengembangan program

kerja dan metode pemberdayaan masyarakat yang sama. Titik-tolak suatu program senantiasa adalah permasalahan yang dihadapi, atau kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat sebagai khalayak sasaran. Selanjutnya, karena fungsi utama kelompok mahasiswa KKN, baik dalam KKN berpendekatan tematik, maupun KKN berpendekatan mandiri adalah sebagai duta dan/atau mitra perubahan (*agents of change*), duta dan/atau mitra pembangunan (*agents of development*), atau duta dan/atau mitra pemberdayaan (*agents of empowerment*), maka, metode kerja mereka dalam menjalankan peran pun pada dasarnya sama. Karena itu, uraian tentang pengembangan program, tipologi program dan ragam metode pendidikan untuk pemberdayaan keluarga dan masyarakat, bisa diterapkan, baik untuk KKN berpendekatan tematik maupun KKN berpendekatan mandiri.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Selintas Pengelolaan Kuliah Kerja Nyata (KKN)**

Secara sosiologik, perguruan tinggi senantiasa memiliki sekurang-kurangnya tiga jati diri. Pertama, perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikan akademik dan atau profesional, baik jenjang diploma, sarjana, magister, maupun doktor. Karena itu, tolok ukur pertama penilaian atas sebuah perguruan tinggi tentu saja adalah kelayakan dharma pendidikan atau pengajaran.

Kedua, perguruan tinggi juga niscaya merupakan sebuah lembaga akademik yang berperan mengembangkan dan menyebarkan ilmu, teknologi dan seni, sesuai dengan bidang-bidang keilmuan, teknologi dan kesenian yang ditekuni. Karena itu, tolok ukur kedua penilaian atas sebuah perguruan tinggi tentu saja adalah kelayakan dharma penelitian, yang termasuk di dalamnya adalah penerbitan karya ilmiah oleh para akademisi perguruan tinggi yang bersangkutan.

Ketiga, perguruan tinggi juga niscaya merupakan lembaga sosial yang tidak bisa lepas dari tanggungjawab untuk peran serta (*participation*) meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena itu, tolok ukur ketiga penilaian atas sebuah perguruan tinggi adalah kelayakan dharma pengabdian pada masyarakat, yang termasuk di dalamnya adalah melalui program kerja Kuliah Kerja Nyata para mahasiswa. Konsep peranserta itu sendiri, harus dipandang sebagai konsekuensi logik dari kesadaran bahwa lembaga dan warga perguruan tinggi (*civitas academica*) merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat

(*part of the whole community*), yang karena itu harus ikut ambil (*take parts*) bagian dalam perbaikan dari keseluruhan.

Pada tingkat mahasiswa, turunan (*derivation*) dari tinjauan sosiologik kelembagaan tersebut adalah bahwa: (1) dharma pertama seorang mahasiswa adalah belajar, mengikuti perkuliahan dengan sebaik-baiknya, (2) dharma kedua seorang mahasiswa adalah bergiat dalam penalaran, kajian dan penelitian, termasuk menulis karya akademik, dan (3) dharma ketiga seorang mahasiswa adalah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) secara terprogram dan melembaga.

KKN adalah suatu kegiatan intrakurikuler yang dapat diwajibkan untuk jenjang sarjana pada tingkat tertentu, yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa, dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan pelayanan masyarakat. KKN merupakan wahana penerapan serta pengembangan ilmu, teknologi, dan seni yang dilaksanakan di luar kampus dalam waktu, tata kerja, dan persyaratan tertentu. Karena itu, KKN juga diarahkan untuk menjamin keterkaitan antara dunia akademik dengan dunia praktik atau antara dunia teoretik dengan dunia empirik, sehingga bisa menjamin hubungan timbal balik saling menguatkan antara mahasiswa dengan masyarakat. Sebagai kegiatan intrakurikuler, KKN menyerupai matakuliah berkredit, yang dibina oleh tim pembekalan, dan dibimbing oleh dosen pembimbing lapangan, serta dikelola oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM).

Tugas utama dari tim pembekalan adalah membantu mahasiswa memperoleh seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, dan kecakapan minimum yang diperlukan bagi setiap mahasiswa peserta KKN untuk merencanakan, melaksanakan, menilai, dan melaporkan program kerja KKN. Upaya ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan lokakarya. Kegiatan pelatihan dilakukan dalam rangka pengumpulan dan analisis data untuk perencanaan program, sedangkan kegiatan lokakarya dilakukan untuk penentuan skala prioritas dan penetapan program utama dan program kerja pokok dan program kerja pendukung.

Tugas utama dosen pendamping lapangan sebagai berikut: (1) bertindak sebagai anggota unit pengelola KKN selama di lapangan dengan membina kerjasama dengan perangkat desa atau kelurahan, kecamatan, instansi atau dinas dan masyarakat di lokasi KKN; (2)

mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi KKN serta membantu melancarkan proses pendekatan sosial mahasiswa KKN dengan masyarakat dan instansi atau dinas di lokasi KKN; (3) membina disiplin dan motivasi serta mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan program KKN dan membantu memecahkan masalah yang dihadapi agar program-program KKN terlaksana dengan baik; (4) membantu menciptakan hubungan sosial yang positif antar mahasiswa KKN, dan antara mahasiswa KKN dengan perangkat pemerintahan, instansi terkait dan warga masyarakat secara umum; (5) membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan program kerja KKN; (6) melakukan penilaian dalam rangka evaluasi KKN sebagai matakuliah; (7) menyusun laporan tertulis mengenai program dan kegiatan pembimbingan mahasiswa KKN yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran untuk kelanjutan program; dan (8) bertanggung jawab kepada pimpinan universitas melalui Ketua LPM.

## 2. Model Pengembangan Program Kerja KKN

Setelah cukup lama dilaksanakan oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia, saat ini dikenal terdapat banyak model KKN. Misalnya, KKN Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM) seperti yang dilaksanakan oleh Universitas Gadjahmada di Yogyakarta, atau KKN yang biasa diselenggarakan oleh beberapa LPTK, yaitu KKN dan Praktik Pengalaman Lapangan Terpadu. Model atau pola-pola tersebut pada dasarnya dikembangkan berdasarkan tujuan dan karakteristik dari perguruan tinggi masing-masing.

Sebuah model baru yang diusulkan untuk dapat dikembangkan dan diterapkan berdasar pada studi pendidikan luar sekolah adalah KKN-PPPM (Pelayanan, Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat). Untuk itu, setiap kelompok kerja mahasiswa KKN bisa memilih dan menyelenggarakan berbagai program kerja yang dikelompokkan menjadi tiga jenis program, yaitu: (1) program pendidikan masyarakat (*community education*), (2) program pelayanan masyarakat (*community service*), dan (3) program pengembangan masyarakat (*community development*).

Mempertimbangkan waktu pelaksanaan KKN yang singkat, maka jenis program pengembangan masyarakat tidak dilaksanakan tersendiri oleh mahasiswa, melainkan dijadikan program payung oleh LPM dan disinergikan dengan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen. Karena itu, sajian singkat ini memusatkan perhatian pada jenis program KKN untuk pemberdayaan keluarga

dan masyarakat, melalui kegiatan pendidikan dan pelayanan masyarakat.

### 3. Program Pendidikan Masyarakat

#### a. Konsep dan Tipologi

Berdasarkan hasil pengumpulan dan telaah data, bisa dirumuskan permasalahan atau kebutuhan, yaitu: kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Selanjutnya, seorang pengembang program bisa mengajukan pertanyaan, apakah permasalahan tersebut berkenaan dengan pengetahuan, sikap dan keterampilan warga masyarakat, atau kelompok sasaran. Bila penyelesaian masalah tersebut berhubungan langsung, atau mensyaratkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis program yang paling relevan adalah program pendidikan masyarakat.

Faktor	Tipe Program		
	Pengembangan	Kelembagaan	Penerangan
Tujuan utama	Mendefinisikan dan memecahkan masalah-masalah individu, kelompok ataupun komunitas.	Pertumbuhan dan perbaikan kemampuan dasar, ketrampilan, pengetahuan, kompetensi individual.	Pertukaran informasi
Sumber Tujuan	Dikembangkan terutama dari kebutuhan atau masalah khalayak sasaran.	Dikembangkan terutama dari disiplin ataupun bidang ilmu atau dari pihak pendidik.	Diperoleh dari informasi baru hasil penelitian, undang-undang dan peraturan baru.
Penggunaan ilmu dan teknologi	Pengetahuan digunakan untuk membantu pemecahan masalah.	Penguasaan ilmu dan teknologi jadi fokus. Program diarahkan pada bagaimana mencapai tujuan ini.	Informasi ditransfer kepada khalayak sasaran untuk segera diketahui dan digunakan.
Pilihan khalayak sasaran	Terlibat dalam penentuan masalah atau kebutuhan dan ruang lingkup serta sifat program.	Terlibat dalam implementasi pelatihan.	Terlibat terutama sebagai penerima informasi.
Peran Programmer	Memperlancar seluruh proses kependidikan dan	Mendiseminasikan ilmu dan teknologi melalui proses	Memberikan jawaban akan kebutuhan infor-

	pelatihan, sejak identifikasi kebutuhan sampai evaluasi program.	instruksional.	masi baru.
Standar Keefektifan	Ditentukan oleh kualitas solusi masalah dan intensitas penguasaan ketrampilan pemecahan masalah oleh individu, kelompok dan komunitas.	Ditentukan oleh sampai sebaik mana khalayak sasaran menguasai pengetahuan atau kompetensi yang diinginkan.	Ditentukan oleh jumlah orang yang terjangkau, dan berapa banyak informasi yang terdistribusikan.

Bagan 1: Tipologi Program Pendidikan dan Pelatihan

Secara sederhana, pendidikan masyarakat adalah segala bentuk kegiatan pembelajaran di luar sistem persekolahan, yang terorganisasi, disengaja dan direncanakan untuk membantu masyarakat memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk memperbaiki taraf hidup mereka (Rogers, 1993). Karena itu, kegiatan semacam kursus, penataran, pelatihan, penyuluhan, dan belajar kelompok merupakan sebagian ragam program pendidikan masyarakat.

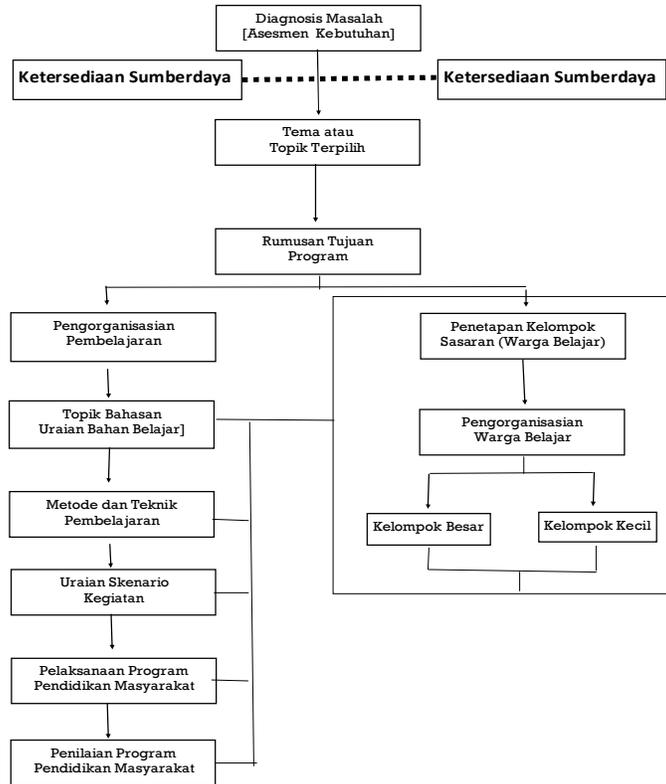
Jenis-jenis program pendidikan masyarakat bisa diperjelas dengan menggunakan tipologi program menurut Boyle (1981:7). Ada tiga tipe program yaitu (1) program pengembangan (*developmental*), (2) program kelembagaan (*institutional*), dan (3) program penerangan (*informational*).

Program pengembangan melibatkan khalayak sasaran dalam penentuan masalah atau kebutuhan dan ruang lingkup serta sifat program. Peranan programer adalah memperlancar seluruh proses kependidikan dan pelatihan, sejak dari pengenalan kebutuhan sampai evaluasi hasil dan program. Program kelembagaan melibatkan khalayak sasaran dalam pelaksanaan pelatihan. Sedangkan peranan programer menyebarkan ilmu dan teknologi melalui proses instruksional. Program penerangan melibatkan khalayak sasaran terutama sebagai penerima informasi. Peranan programer adalah memberikan jawaban terhadap permintaan informasi.

Berdasarkan tipologi program pendidikan dan pelatihan tersebut, bisa dipilih apakah akan mengembangkan jenis program pengembangan, kelembagaan, maupun penerangan.

### b. Pengembangan Program Pendidikan Masyarakat

Sejalan kaidah kemandirian, maka masalah atau kebutuhan yang paling layak atau mungkin untuk dijadikan program terpilih adalah yang disertai dengan ketersediaan sumber daya, baik manusia, prasarana dan sarana, maupun dana program. Sejalan dengan peran mahasiswa KKN sebagai duta pembangunan, yang mencakup peran katalisator, pembantu proses, pemberi solusi, dan penghubung sumber (*catalyst, process helper, solution giver, and sources linker*), maka apabila ternyata tidak tersedia sumber daya, mahasiswa berperan sebagai penghubung sumber belajar, sehingga dimungkinkan terjadinya pertemuan antara kebutuhan belajar dengan sumber belajar.



Bagan 2: Pengembangan Program Pendidikan Masyarakat

Berbagai metode pembelajaran bisa diterapkan dalam program pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat. Pemilihan atas salah satu atau lebih metode harus didasarkan pada ranah utama yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. Berikut diuraikan secara ringkas langkah-langkah perancangan program pendidikan masyarakat.

Pertama, identifikasi masalah. Sebelum program dilaksanakan perlu dipahami terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh masyarakat secara tepat. Masalah di sini dapat diartikan sebagai keadaan, fakta, kejadian yang memberikan gambaran kepada kita sebagai sesuatu yang belum sesuai dengan yang kita harapkan, baik dari segi norma-norma keilmuan, maupun dari segi norma-norma hukum yang berlaku.

Kedua, cara mengidentifikasi masalah. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut, pengamatan, wawancara, telaah dokumen, angket, analisis masalah kelompok, analisis jabatan, dan bahkan uji kecakapan atau pengetahuan. Sesuai dengan peran kelompok mahasiswa KKN, maka khalayak sasarannya adalah keluarga dan masyarakat, khususnya yang kurang beruntung atau belum berkembang, sedangkan masalah-masalah yang akan dipilih sebagai titik tolak program adalah masalah kehidupan sehari-hari. Karena itu, teknik yang paling mudah digunakan adalah teknik pengamatan, wawancara dan telaah dokumen.

Ketiga, merumuskan topik pembelajaran dialogis. Setelah berbagai masalah dikenali, maka perlu diadakan penggolongan menurut jenisnya. Misalnya: banyak warga terjangkit penyakit kulit, penggunaan air mandi dan minum tidak sehat, cara berwudlu tidak sesuai syarat kesehatan, udara sangat berdebu, makanan dibiarkan tak tertutup, serta tumpukan sampah di sembarang tempat. Gejala-gejala masalah tersebut, dapat dicakup dalam topik penyakit menular dan penyebarannya. Kelompok masalah ini bisa diupayakan pemecahannya melalui topik tersebut dan dilakukan dengan metode pembelajaran dialogis. Topik penyakit menular dan penyebarannya memang agak luas, tetapi dengan begitu justru bisa menampung permasalahan yang telah ditemukan. Dengan topik diperluas seperti ini, dialog dapat diperkaya, bersifat lentur, dan menarik warga belajar, sehingga dialog bisa lebih hidup dan tidak kekurangan bahan.

Keempat, merumuskan tujuan. Tujuan perlu dirumuskan dengan jelas agar dialog tepat mengenai sasaran dan pesan-pesan dialog dapat memberikan pengetahuan dan kesadaran akan masalah, serta memperbaiki tindakan-tindakan warga masyarakat lebih lanjut.

Kelima, menguraikan bahan dalam bentuk pokok-pokok bahasan. Berdasarkan tujuan khusus pada langkah 3 dapat dirumuskan pokok bahasan sebagai berikut: (a) macam-macam penyakit menular; (b) sebab-sebab terjadinya penularan; (c) media penularan (udara, air, makanan, kontak langsung); (d) tindakan-tindakan sering terjadi yang menimbulkan penularan (contoh kongkrit di lingkungan mereka); dan (e) cara-cara menghindari penularan penyakit.

Keenam, menetapkan kelompok sasaran (*target group*), setelah pokok-pokok bahasan diketahui, maka perlu ditetapkan siapa saja yang hendak dipengaruhi tindakannya sebagai warga belajar atau binaan. Proses selanjutnya berupa pengorganisasian dengan cara, misalnya: (a) memohon ijin kepada pemerintah setempat dengan mengemukakan gagasan yang akan dilakukan; (b) jika pemerintah setempat dapat menerima gagasan yang diajukan, maka dapat diusulkan hal-hal yang akan dilakukan. Termasuk di dalamnya adalah mengadakan rapat-rapat kelompok kecil, menggunakan wadah organisasi atau kelompok kecil yang sudah ada di desa, tetapi juga bisa mempubli-kasikan poster-poster atau pamflet dan sebagainya untuk sasaran masal atau kelompok besar.

Ketujuh, menentukan teknik dialog. Penentuan teknik dialog dilakukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai serta ukuran kecil atau besarnya kelompok sasaran. Sebagai contoh, setelah mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dipilihlah teknik "mimbar wawancara". Alasannya antara lain karena kelompoknya cukup besar, serta agar pesan yang hendak disampaikan lebih terarah dan menjangkau seluruh khalayak sasaran.

Kedelapan, pengembangan skenario. Misalnya, mimbar wawancara diadakan di balai desa, yang memuat sekitar 50 orang sebagai peserta atau pendengar resmi, ditambah dengan yang tidak resmi di luar balai desa, atau bila penduduk sekitar ingin menonton. Karena itu diperlukan penguat suara. Pelaku-pelakunya adalah kelompok maha-siswa KKN yang terdiri dari empat mahasiswa. Salah seorang maha-siswa menjadi pewawancara dan lainnya yang diwawancarai. Keempat-nya menyiapkan ruang yang ditata agar sesuai dengan metode dialog interaktif.

Kesembilan, pelaksanaan. Agar pelaksanaan berjalan dengan baik maka perlu ditempuh langkah-langkah: (1) menyiapkan ruangan sebaik mungkin sehingga pengunjung dapat mengikuti wawancara dengan baik; (2) menyediakan penguat suara, terutama jika pengun-

jung melimpah; (3) perlu latihan terlebih dahulu supaya lebih meyakinkan dan enak diikuti; (4) mempersiapkan atraksi-atraksi selingan dengan permainan, teka-teki, musik dan sebagainya; (5) mengendalikan penggunaan waktu agar tidak terlalu lama, misalnya paling lama 120 menit dan dilakukan penyesuaian berdasarkan suasana acara dan hadirin; dan (6) jika memang harus meminta bantuan dari narasumber ahli, harus ada jaminan bahwa narasumber tersebut benar-benar ahli dan memastikan bisa hadir.

Kesepuluh, penilaian program. Untuk mengetahui kelayakan proses maupun hasil program, perlu diadakan dilakukan penilaian pada para peserta, misalnya dengan: (a) wawancara tentang penguasaan bahan; dan (b) wawancara balikan tentang proses dan kegunaan program tersebut.

#### **4. Program Pelayanan Masyarakat**

##### **a. Konsep dan Tipologi**

Terlebih dulu harus ditegaskan bahwa perguruan tinggi merupakan lembaga pendidikan akademik dan atau profesional. Setiap mahasiswa peserta KKN juga harus dilihat sebagai calon akademisi atau tenaga profesional. Karena itu, konsep pelayanan masyarakat dalam program KKN juga harus dipahami dalam batasan pelayanan "akademik" dan atau "profesional". Memang tidak terdapat larangan bila bersama-sama warga masyarakat, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan kerja yang bersifat fisik. Namun, bila porsi terbesar dari kegiatan adalah kerja fisik, maka program KKN menjadi kehilangan hakikat dan menyimpang dari tujuan utamanya.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pelayanan masyarakat yang sejalan dengan visi dan misi perguruan tinggi, yaitu: layanan keahlian, layanan profesional, layanan konsultatif, layanan asistensial, dan layanan advokasional. Mahasiswa peserta KKN jurusan teknik, misalnya, secara minimum sudah mampu memberikan layanan keahlian dalam bidang masing-masing, seperti konstruksi bangunan, jaringan komputer, rekayasa perangkat lunak, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun lembaga di desa KKN.

Mahasiswa kedokteran, kesehatan, dan keperawatan, bisa memberikan layanan profesional sesuai bidang keahlian yang sedang ditekuni. Tentu saja, dalam pelaksanaan, kegiatan ini harus disupervisi oleh tenaga profesional kedokteran, ataupun kesehatan masyarakat. Dengan dibantu dan disupervisi oleh tenaga ahli, mahasiswa psikologi

dan mungkin pendidikan bisa memberikan layanan konsultasi psikologik, bimbingan dan konseling pendidikan. Secara umum, hampir semua mahasiswa bisa melakukan layanan asistensial dalam administrasi pemerintahan desa KKN. Sejauh tidak menyangkut kasus persengketaan dan konflik sosial politik, mahasiswa fakultas hukum bisa memberikan layanan advokasional bagi warga masyarakat yang membutuhkan.

#### **b. Pengembangan Program Pelayanan Masyarakat**

Dalam identifikasi masalah, seluruh permasalahan yang telah ditemukan mahasiswa sesuai dengan bidangnya masing-masing selama observasi pendahuluan, dituliskan dalam lembar rekapitulasi yang telah dipersiapkan. Apabila mahasiswa dari disiplin bidang tertentu menemukan masalah untuk disiplin bidang lain, maka hal tersebut dapat direkomendasikan kepada rekan mahasiswa dari bidang yang sesuai dalam satu subunit atau unit yang sama. Permasalahan yang telah ditemukan dituliskan dalam lembar Identifikasi Permasalahan, dirinci menurut lokasi ditemukannya masalah dan nara sumbernya, bisa satu narasumber atau lebih.

Pada langkah prioritas masalah, mahasiswa memilih permasalahan yang diprioritaskan untuk dijadikan calon program selama masa KKN. Penentuan skala prioritas program didasarkan atas urgensi, keterjangkauan sesuai dengan analisis Sumber Daya Kuwat (Kesempatan, Uang, Waktu, Alat, dan Tenaga), serta diberi uraian alasan yang mendasari pemilihannya untuk ditangani sebagai program KKN. Berdasarkan analisis Sumber Daya Kuwat, yang memungkinkan diangkat sebagai program KKN.

Rencana Program Kerja KKN yang akan dilaksanakan, dikembangkan dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipilih, dan dituliskan dalam lembar rencana program. Rencana program ini khusus untuk program utama, yaitu yang sesuai dengan bidangnya dan program pendukung, yaitu apabila tidak sesuai dengan bidangnya.

Usulan rencana Program Kerja KKN dibahas dalam loka-karya untuk penajaman dan persetujuan dari LPM dan dosen pembimbing lapangan. Persetujuan program kerja disesuaikan dengan program payung yang dikembangkan oleh LPM. Dokumen program kerja KKN juga dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan LPM dan universitas bila memerlukan bantuan atau dukungan khusus.

Penilaian program kerja KKN dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan dan kemanfaatan program yang telah dilaksanakan oleh

mahasiswa. Secara kumulatif dan komposit, hasil penilaian ini menjadi dasar bagi penilaian program KKN yang dikelola oleh LPPM.

### C. SIMPULAN

Dalam jenis program pengembangan masyarakat, atau yang biasa dikenal dengan program pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*), juga bisa dilaksanakan dalam bentuk program pendidikan dan/atau pelayanan masyarakat. Perbedaannya, dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dimungkinkan untuk disertakan program-program pemberian sumber dana dan sumber daya lain, baik sebagai modal utama maupun sebagai rangsangan. Tentu saja, pola pemberian bantuan demikian lebih mungkin dilakukan oleh pemerintah atau lembaga donasi lain, dan tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan KKN.

Sebuah desain program pendidikan masyarakat, sekurang-kurangnya mencakup langkah dan hasil kegiatan berikut: (1) diagnosis masalah atau asesmen kebutuhan; (2) tema atau topik terpilih; (3) rumusan tujuan program; (4) pengorganisasian pembelajaran yang mencakup penetapan pokok bahasan dan uraian bahan belajar, metode dan teknik pembelajaran, uraian skenario kegiatan, pelaksanaan program pendidikan masyarakat, dan penilaian program pendidikan masyarakat; (5) penetapan kelompok sasaran atau warga belajar; dan (6) pengorganisasian warga belajar, dalam kelompok kecil atau kelompok besar.

Pengembangan program pelayanan masyarakat oleh mahasiswa KKN pada dasarnya mengikuti pola pengembangan program secara umum, yaitu: (1) identifikasi masalah; (2) prioritas masalah; (3) rencana program; (4) pelaksanaan program; dan (5) penilaian program.

### DAFTAR RUJUKAN

- Apps, JW. 1979. *Problems in Continuing Education*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Boyle, P.G. 1981. *Planning Better Programs*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Rogers, Alan. 1993. *Adult Learning for Development*. Cassel Educational Limited. Villiers House 41/47 Strand London.
- Rosidi, Sakban, dkk. 2015. *Bahan Pedamping Pembekalan dan Lokakarya Kuliah Kerja Nyata, Universitas Islam Majapahit, 31 Juli -2 Agustus 2015* (makalah).

## PENGUATAN PENDIDIKAN KELUARGA DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA

Syur'aini

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan UNP Padang  
syurainipls@gmail.com

### Abstrak

Keluarga adalah lembaga terkecil dalam suatu negara dan merupakan embrio dalam pembangunan bangsa. Dalam keluarga dapat dilahirkan manusia visioner yang memiliki pandangan jauh kedepan, serta memiliki pemikiran untuk memajukan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Banyak strategi yang dapat dipakai untuk menguatkan peran keluarga, namun yang terpenting adalah bagaimana seluruh anggota keluarga menyadari akan pentingnya pendidikan dalam keluarga dan menyadari bahwa pendidikan dalam keluarga menjadi penentu keberhasilan masa depan masyarakat desa. Untuk membantu mempercepat pembangunan desa diperlukan adanya tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola masyarakat desa dan mendampingi pemerintahan desa. Tenaga profesional yang relevan dengan tugas ini diantaranya adalah lulusan Pendidikan Luar Sekolah.

**Kata kunci:** penguatan, pendidikan keluarga, pembangunan

### A. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan lembaga terkecil yang terdapat dalam masyarakat. Keluarga merupakan embrio tempat tumbuhnya suatu bangsa. Embrio inilah yang berkembang semakin lama semakin besar hingga menjadi sempurna dan dapat memunculkan sosok baru yang sangat besar dan semakin lama semakin besar. Saking besarnya antara satu embrio dengan embrio lainnya tidak saling mengenal. Itulah yang disebut dengan bangsa yang terdiri dari beribu-ribu jumlah keluarga berhimpun menjadi satu.

Meskipun keluarga adalah embriodan sosoknya kecil namun memiliki peran penting dalam membangun suatu bangsa. Keluarga

yang menentukan apakah negara/bangsa yang terbentuk akan menjadi maju atau mundur. Apabila keluarga terbina dengan baik tentu negara juga akan menjadi baik, sebaliknya jika keluarga dibiarkan tumbuh seperti hilalang dihutan raya maka negara juga akan menjadi seperti hutan raya yang tidak punya aturan bagi para penghuninya. Ada pohon yang tumbuh besar dan semakin besar dan ada pohon yang tidak bisa berkembang dengan baik karena dihalangi oleh pohon yang sangat besar dan menghambat akan pertumbuhannya. Oleh karena itu lembaga utama yang harus diperbaiki, ditenahi dan dibangun adalah keluarga. Keluarga merupakan puisi yang paling bermakna dan menjadi mutiara yang paling berharga.

Dengan adanya keluarga-keluarga yang berpendidikan, berakhlak mulia, terurus dengan baik akan dapat menjadikan kampung/desa/nagari bahkan negara menjadi baik, aman, tenteram dan damai sehingga tercipta masyarakat madani yang kita dambakan bersama. Meskipun kata-kata seperti ini sering dilontarkan sebagai kata-kata mutiara penuh hikmat, namun dalam pelaksanaannya masih jauh dari yang diharapkan. Keluarga-keluarga masih memiliki segudang masalah yang dapat mengganggu ketentraman kehidupan berbangsa dan bernegara. Betapa banyak kita jumpai anak-anak yang tidak mendapatkan hak pendidikan, terlantar dengan sia-sia, bahkan di-*bully* oleh orang-orang biadab yang tidak bertanggung jawab membuat kita menghela nafas panjang sambil berkata kasihan, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua.

Untuk mengakhiri semua ini atau sekurang-kurangnya meminimalisir penderitaan bangsa ini tentu kita harus kembali ke akar masalah yaitu keluarga bahagia sejahtera yang ditandai dengan pemberdayaan keluarga baik dari segi ekonomi, pendidikan, sosial budaya, maupun mental spiritual. Bila hal ini dapat ditingkatkan maka dengan sendirinya akan berdampak pada ekonomi, pendidikan, sosial budaya yang berada setingkat di atasnya dan seterusnya terhadap bangsa dan negara. Keluarga harus menjadi garda terdepan dalam melaksanakan pembangunan desa, keluarga harus dikuatkan perannya dalam segala bidang terutama dalam pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun. Untuk semuanya ini perlu dorongan dan motivasi yang kuat dari setiap lapisan sosial yang ada dalam masyarakat. Diperlukan adanya tenaga-tenaga ahli yang bernuansa ke masyarakat yang dapat mendampingi pemerintahan desa.

**B. PEMBAHASAN****1. Keluarga Sebagai Lembaga Utama Melahirkan Manusia Visioner**

Manusia visioner adalah individu yang memiliki pandangan jauh ke depan. Mereka tidak hanya memikirkan kondisi yang ada saat ini, namun lebih mengutamakan berfikir untuk kehidupan di masa yang akan datang baik kehidupan dunia maupun kehidupan di akhir nanti. Manusia visioner tidak dapat terwujud dengan sendirinya namun harus diciptakan dan direncanakan dengan baik. Manusia visioner tidak dapat tercipta jika pendidik tidak menggunakan pendekatan holistik integratif yaitu suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik (anak) yang memasyarakat, membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional dan global (Tilaar, 2000).

Melahirkan manusia visioner memerlukan tempat khusus dan orang yang handal berada di dalamnya, itulah yang diharapkan ada dalam lembaga pendidikan yang di sebut keluarga. Dalam keluargalah kita dapat menggodok dan membentuk semuanya itu. Namun tidak jarang kita temukan keluarga menjadi tempat yang suram dan menakutkan bagi anggota keluarga karena tidak terjadinya keharmonisan dalam keluarga sehingga lembaga keluarga menjadi lemah. Keluarga dapat membuat orang berhasil jika peran keluarga tersebut kuat dan berfungsi dengan baik tapi juga dapat membuat orang kecewa bila peran keluarga melemah dan tidak berjalan dengan baik.

Mungkin sudah banyak yang tahu bahwa peran keluarga sangatlah penting dalam membuat pondasi untuk membentengi diri generasi dari segala ancaman yang dapat menjerumuskan ke dalam hal-hal yang tidak baik. Karena keluarga (orang tua dan seluruh anggota keluarga) adalah pendidik pertama dan utama untuk anak. Sehingga dengan pendidikan tersebut anak akan terpelihara dari siksaan hidup di dunia dan dapat mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Sebagaimana dinyatakan dalam Alqur'an surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَاذْكُرُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَةٌ  
غُلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan

Lingkungan pertama yang akan mempengaruhi perkembangan anak yaitu keluarga, karena keluarga merupakan pondasi pertama ketika anak akan memulai perjalanannya mengharungi kehidupan. Keluarga adalah elemen penting dalam perkembangan manusia yang merupakan bagian dari tiga pusat pendidikan yakni keluarga, sekolah dan masyarakat. Menurut Roucek dan Warren, keluarga adalah insititusi yang paling penting dalam kehidupan seseorang, karena dari keluarga seseorang melangkah keluar dan kepada keluarga pula seseorang akan kembali. Di dalam keluarga seseorang hidup bersama dengan sekelompok orang secara akrab. Sebab keluarga merupakan *community primer* paling penting, yang mencerminkan keakraban yang relatif kekal.

Friedman menuturkan fungsi keluarga berfokus pada proses yang digunakan oleh keluarga untuk mencapai tujuan keluarga tersebut. Proses ini termasuk komunikasi diantara anggota keluarga, penetapan tujuan, resolusi konflik, pemberian makanan, dan penggunaan sumber dari internal maupun eksternal. Tujuan ekonomi dan pendidikan dalam keluarga memerlukan dukungan secara psikologi antar anggota keluarga, apabila dukungan tersebut tidak didapatkan, maka akan menimbulkan konsekuensi emosional seperti marah, depresi dan perilaku yang menyimpang. Tujuan yang ada dalam keluarga akan lebih mudah dicapai apabila terjadi komunikasi yang jelas dan secara langsung. Komunikasi tersebut akan mempermudah menyelesaikan konflik dan pemecahan masalah.

Memperhatikan fenomena saat ini sepertinya banyak orang tua tidak mepedulikan pendidikan anaknya. Yang ada di benak mereka hanyalah bagaimana caranya mendapatkan rupiah untuk bisa makan

sementara orangtua kurang memperhatikan pendidikan anaknya sehingga keluarga tidak lagi sebagai pendidik utama bagi anak. Betapa banyak kita lihat anak berpisah dari orangtuanya, terlantar dan hidup di jalanan yang penuh dengan kekerasan dan penyiksaan. Tidak jarang juga terjadi penganiayaan anak oleh orangtuanya sendiri dan bahkan pembunuhan terhadap anak kandung. Begitu juga anak-anak yang di usia sekolah sudah harus menjadi pe-kerja anak yang merampas hak-hak pendidikannya.

Seandainya saja para orang tua itu mau menerapkan hal ini, memberikan pendidikan dalam keluarga semenjak lahir mungkin tingkat kejahatan pada anak akan sangat berkurang bahkan mungkin nol. Karena memberikan pendidikan pada anak sejak dini, merupakan cara membangun pondasi bagi anak dalam menghadapi pengaruh dari luar. Ini sekaligus akan mengurangi juga resiko anak mendapatkan kejahatan dan terpengaruh hal-hal negatif dari luar.

Sifat anak merupakan cerminan dari keadaan keluarga, apabila anak sampai berkata kotor bahkan sampai mengganggu orang lain maka keluarga tersebut dapat dikatakan gagal dalam mendidik anak. Jika anak memiliki sifat dan perilaku yang baik serta memiliki kemampuan memikirkan masa depan bangsa terutama pemikiran tentang pembaharuan pembangunan di daerah pedesaan maka keluarga tersebut telah sukses mendidik anak menjadi masyarakat yang visioner.

## **2. Strategi Penguatan Pendidikan Keluarga**

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam menguatkan sendi-sendi kehidupan dalam keluarga, diantaranya dengan jalan:

### **a. Memberikan pengetahuan agama pada anak sejak dini**

Jika orang tua sudah mengajarkan nilai-nilai agama pada anak sejak dini, maka ketika dewasa anak tidak akan mudah terpengaruh oleh keadaan apapun. Selama ini salah satu yang membedakan desa dengan kota adalah kehidupan beragama dimana di desa kehidupan beragama lebih kuat dibanding dengan kehidupan beragama di kota namun saat ini perbedaan itu tidak begitu terlihat bahkan sebahagian desa justru lebih menunjukkan pendangkalan dalam kehidupan beragama.

### **b. Mengontrol dan mengawasi apa saja yang dilakukan anak**

Mungkin kita bisa mengontrol anak dengan mudah saat ia masih kecil. Tapi jika anak sudah mulai beranjak remaja dan sudah kita fasilitasi dengan *handphone* dan laptop, maka kita harus ekstra hati-hati. Melalui komunikasi via *handphone* atau internet, mereka bisa saja

salah bergaul dengan orang-orang yang tidak baik sehingga akan terba-wa arus. Bahkan anak yang tidak memakai dua barang itu saja bisa terjerumus, apalagi yang bisa komunikasi dengan mudah.

**c. Membuat Aturan dalam Keluarga**

Orangtua harus memiliki aturan dalam keluarga, dimana aturan dibuat bersama dengan anak-anak. Aturan ini akan berguna sebagai norma keluarga yang harus dipatuhi bagi semua anggota keluarga dan aturan berlaku untuk semua anggota keluarga tak tekecuali ayah dan ibu. Bila ada pelanggaran terhadap aturan maka sanksi harus dijalan-kan, tidak ada kata hiba dan kasihan yang terlontar dari mulut orang-tua.

**d. Orangtua harus memiliki pengetahuan yang luas**

Orangtua harus memiliki pengetahuan yang luas bagaimana mengasuh anak secara positif, bagaimana mendidik anak di era digital, bagaimana menjadi orangtua hebat. Hal ini tidak mudah dilakukan jika orangtua belum memahami arti pendidikan yang holistik integratif.

**e. Melaksanakan pengasuhan Positif**

Pengasuhan anak secara positif adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh orang tua. Pelaksanaan pendidikan haruslah dipenuhi oleh nuansa kasih sayang antar sesama anggota keluarga yaitu ayah, ibu, kakak, kakek, nenek, om, tante, sepupu dan asisten rumah tangga, saling menghargai membangun hubungan yang hangat antara anak dan orang tua, serta menstimulasi tumbuh kembang anak (Kemdikbud, 2016). Tanpa adanya kasih sayang dalam mendidik anak, maka akan kering kerontanglah jiwa para generasi kita. Terjadi ketidak puasan anak di rumah, sehingga ia mencari tempat-tempat yang dapat memu-askan hatinya hingga ia bertemu dengan dunia lain di luar rumah me-nawarkan berbagai macam kegiatan yang jauh lebih menariknya dari dalam keluarga atau di rumah. Pengasuhan yang dilaksanakan harus menggunakan pendekatan dengan mengedepankan penghargaan, pe-menuhan dan perlindungan hak-hak anak, juga mengedepankan kepentingan terbaik anak. Pengasuhan positif juga merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan bersahabat dan ramah sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. John Bowlbly (dalam Lestari, 2012) dengan *attachment theory* nya mengidentifikasi pengaruh perilaku pengasuhan sebagai faktor kunci dalam hubungan orang tua anak yang dibangun semenjak dini.

#### f. Mendidik anak di era digital

Ikatan Dokter Indonesia menyatakan “Anak-anak generasi masa kini merupakan generasi pelaku digital (*digital native*) yaitu mereka yang sudah mengenal media elektronik dan digital sejak lahir (Kemdikbud, 2016). Sementara kita sebagai orangtua merupakan imigran digital yaitu orang yang lahir sebelum munculnya teknologi digital, sehingga harus mampu menyesuaikan diri dengan era digital tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan dalam artian orangtua gagap teknologi (*gaptek*) maka anak-anak kita akan tenggelam ditelan era digital. Orangtua diharapkan mampu melindungi anak-anak dari ancaman era digital, tetapi tidak menghalangi potensi, manfaat yang bisa ditawarkannya karena banyak sekali kebaikan dan kemudahan yang diperoleh termasuk kemudahan dalam menjelajahi ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin canggih.

### 3. Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Sebahagian besar masyarakat Indonesia saat ini tinggal di daerah pedesaan. Mata pencaharian mereka pada umumnya adalah sebagai nelayan, buruh dan bertani baik sebagai petani penggarap lahan yang dimiliki orang lain (buruh tani) maupun sebagai petani yang memiliki lahan pertanian dan menggarap sendiri pertaniannya ataupun hanya memiliki lahan pertanian yang digarap oleh orang lain.

Pengertian masyarakat pedesaan bukan hanya dibatasi oleh tempat tinggal dan mata pencaharian belaka, namun juga kepada budaya dan adat istiadat (*customs*), kebiasaan yang mereka miliki (*folkway*), mobilitas sosial yang diibaratkan oleh Smith (1951) masyarakat desa seperti “air tenang dalam sebuah ember” sedangkan masyarakat perkotaan seperti “air mendidih dalam ketel” (Khairuddin, 1992). Ada segolongan orang yang bertempat tinggal di kawasan pedesaan, namun mereka memiliki budaya layaknya seperti orang yang tinggal dipertanian. Kehidupannya sangat individual, jiwa menolong sangat jauh, kebiasaannya sangat berbeda dari masyarakat sekitarnya apakah orang seperti ini layak disebut masyarakat desa?.

Kehidupan masyarakat desa ditandai dengan kekeluargaan dan kebersamaan, solidaritas yang sangat tinggi. Adanya rasa kesatuan yang erat antar warga, sehingga apapun yang akan mereka lakukan selalu ada musyawarah diantara anggotanya. Dengan demikian pembangunan masyarakat pedesaan tidak dapat hanya dilakukan oleh pemimpin desa saja namun harus dilakukan secara bersama-sama dengan

melibatkan semua unsur yang ada di masyarakat. Pembangunan pedesaan adalah suatu proses dimana anggota-anggota masyarakat desa mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka, kemudian merencanakan dan mengerjakan bersama untuk memenuhi keinginan mereka (T.R. Batten).

Cetusan tentang pembangunan masyarakat desa sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui UU No. 6/2014. Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Selanjutnya UU No. 6/2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian sangat dimungkinkan untuk melaksanakan penguatan peran keluarga dalam pembangunan sesuai dengan adanya dana desa.

Membangun dan memberdayakan masyarakat desa harus dengan semangat baru yang berapi-api dan keinginan yang besar untuk meraih prestasi. McClelland mencetuskan sebuah konsep *the need for Achievement* yang terkenal dengan istilah *n-Ach* yaitu dorongan untuk meraih prestasi (Budiman, 2000). Bila masyarakat desa telah memiliki dorongan yang kuat untuk ingin maju maka mereka akan mudah diubah. Namun hal ini tidak semudah membalik telapak tangan meskipun sudah tersedia dana untuk pemberdayaan masyarakat desa. Masih diperlukan adanya tenaga yang tangguh dan kuat yang mendampinginya.

#### **4. Peran Sarjana Pendidikan Luar Sekolah dalam Penguatan Keluarga Menuju Pembangunan Desa**

Dalam membangun masyarakat, baik masyarakat desa maupun masyarakat kota, lebih-lebih lagi masyarakat desa tidak dapat dilakukan terpisah-pisah dan dengan pemikiran jangka pendek dan sambil lalu. Pembangunan harus dilakukan secara bersama dan terus menerus

dengan visi yang jauh ke depan agar dapat mencapai kesejahteraan masyarakat atau masyarakat adil dan makmur seperti yang tertuang dalam GBHN.

Mewujudkan semuanya itu diperlukan tenaga profesional yang peduli dan handal untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat dengan cara persuasif, komunikatif dan bertanggung jawab. Dengan cara ini diharapkan keluarga-keluarga yang ada menjadi bangun dari tidur nyenyak yang membuat generasi kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Setelah terbangun diharapkan keluarga tersebut berdiri dan bergerak untuk mendapatkan informasi dan selalu *up date* informasi, sehingga tidak pernah ketinggalan kereta dan kehilangan kesempatan berharga karena kesempatan tidak pernah datang dua kali. Selanjutnya keluarga diharapkan berlari kencang dan semakin kencang tanpa peduli akan cemooh dari masyarakat yang tidak mau maju serta selalu berfikir positif itu adalah kunci utama kesuksesan (*positive thinking*).

Merealisasikan semuanya ini prodi pendidikan luar sekolah telah menyiapkan mahasiswanya untuk dapat berkiprah dalam pendampingan pembangunan masyarakat di pedesaan. Dengan kompetensi yang dimiliki yaitu kemampuan mengembangkan masyarakat, teknik-teknik pengembangan masyarakat dan ilmu pengetahuan yang dimiliki berupa pengetahuan tentang mengelola kehidupan masyarakat, bagaimana mengelola hidup berdampingan di masyarakat, keilmuan andragogi yang sangat berguna dalam mendekati keluarga sebagai orang dewasa, bidang keilmuan motivasi dan persuasi yang dapat memberikan dorongan semangat bagi keluarga untuk belajar dan selalu belajar kapanpun dan dimanapun. Di samping itu bekal ilmu pendidikan anak usia dini yang tak kalah pentingnya saat ini juga dimiliki oleh lulusan pendidikan luar sekolah sebagai bekal dalam menghadapi keluarga untuk menjadi orangtua hebat. Jika dibandingkan dengan profesi-profesi lain, orangtua adalah profesi yang paling tidak tersiapkan (Anis Baswedan, dalam Kemdikbud, 2016). Kita tidak pernah mendengar adanya sekolah untuk menjadi orangtua hebat, pada hal sangat diperlukan sekali pengetahuan tentang segala sesuatu yang membuat orangtua menjadi hebat. Memang tidak diperlukan sekolah khusus untuk menjadi orang tua apalagi bersekolah di pendidikan formal khusus untuk menjadi orangtua. Banyak sekali bidang keilmuan yang harus dimiliki orangtua oleh karena itu sangat diperlukan belajar sepanjang hayat yaitu belajar kapan saja dan dimana pun berada selama

hayat di kandung badan (Cropley, 1978) semangat inilah yang harus ditanamkan pada para keluarga di daerah pedesaan. Ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara membangkitkan semangat masyarakat agar belajar sepanjang hayat untuk menuju kehidupan yang lebih baik dimiliki oleh lulusan Pendidikan Luar Sekolah.

### C. PENUTUP

Tulisan ini akan ditutup dengan mengemukakan beberapa kesimpulan sehingga dapat menambah pemahaman dari uraian yang sudah ditulis terdahulu. Kesimpulan dimaksud adalah: (1) keluarga adalah tempat yang ampuh untuk menjadikan masyarakat desa memiliki mental yang kuat dalam membangun, (2) strategi yang paling ampuh dalam menciptakan masyarakat madani adalah penguatan peran keluarga, (3) membangun masyarakat desa haruslah dilakukan secara holistik integratif, dan (4) lulusan jurusan pendidikan luar sekolah memiliki kemampuan sebagai tenaga pendamping pembangunan desa.

### DAFTAR RUJUKAN

- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Cropley, A. J. 1978. *Lifelong Education a Psychological Analysis University of Regina, Saskatchewan*. New York: Pergamon Press.
- Khairuddin, H. 1992. *Pembangunan Masyarakat Desa Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi, dan Perencanaan*. Yogyakarta: Liberty.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, (2014), Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Seri pendidikan Orangtua: Pengasuhan Positif*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Seri pendidikan Orangtua: Mendidik Anak di Era Digital*. Jakarta.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2016. *Seri pendidikan Orangtua: Menjadi Orangtua Hebat*. Jakarta.
- Lestari, Sri. 2012. *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penangan Konflik dalam Keluarga*. Jakarta; Kencana
- Tribunnews. 2016. Penguatan Peran Keluarga dalam Pendidikan Anak. <http://www.tribunnews.com/tribunners/2016/06/01/penguatan-peran-keluarga-dalam-pendidikan-anak>. Diakses tanggal 13 September 2016.
- Tilaar, H.A.R. 2000. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

**PELATIHAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN  
MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN  
KOMPETENSI PENDAMPING PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA**

Dayat Hidayat

Program Studi Pendidikan Luar Sekolah FKIP  
Universitas Singaperbangsa Karawang  
dayathidayat194@yahoo.com

**Abstrak**

Tujuan kajian ini menganalisis tentang: (1) pelatihan berbasis kewirausahaan masyarakat; (2) kompetensi kewirausahaan; dan (3) pemberdayaan masyarakat. Kajian ini menggunakan metode analisis literatur, dengan melakukan studi komparasi berbagai sumber dan dilakukan analisis mendalam sehingga ditemukan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Kajian ini menyimpulkan temuan: (1) pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian; (2) kompetensi pendamping pengembangan kewirausahaan masyarakat meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewirausahaan; (3) pemberdayaan masyarakat dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu pemberdayaan individu, pemberdayaan organisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat meliputi sosial, ekonomi dan/atau politik peserta didik dalam masyarakat.

**Kata kunci:** pelatihan, kewirausahaan, masyarakat, kompetensi, pendamping, pemberdayaan

**A. PENDAHULUAN**

Program kewirausahaan masyarakat merupakan hal penting yang perlu mendapatkan perhatian bersama. Karena melalui program ini diharapkan akan muncul parawirausahawan yang mampu menciptakan peluang-peluang kerja baru, menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang kreatif dan inovatif yang memiliki nilai ekonomis dan mampu memberdayakan potensi lokal, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian pendidikan kewira-

SEMINAR NASIONAL  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
"KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"  
Kamis/ 6 Oktober 2016

usaha akan menjadi program unggulan dalam setiap jenjang pendidikan nonformal, khususnya kursus dan pelatihan, seperti: (1) peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dan organisasi mitra; (2) penyusunan standar kompetensi, kurikulum berbasis kompetensi, dan bahan ajar; (3) sertifikasi kompetensi; (4) pemberian beasiswa; (5) pelaksanaan berbagai lomba, penghargaan, dan penilaian kinerja; dan (6) pengembangan sistem informasi. Pilihan menjadi wirausaha, sesungguhnya merupakan salah satu alternatif yang paling menjanjikan untuk kehidupan yang akan datang. Sayangnya, pilihan menjadi wirausaha ini belum begitu banyak tumbuh di kalangan masyarakat pedesaan. Untuk itu banyak dilakukan pelatihan kewirausahaan masyarakat. Pelatihan kewirausahaan bagi masyarakat pedesaan harus terus menerus dilakukan oleh siapapun yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat untuk melahirkan sebanyak-banyaknya calon wirausaha baru.

Pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat berkaitan pula dengan pemanfaatan modal sosial dan modal budaya masyarakat. Putnam, et al. dalam Suharto (2007) menyatakan modal sosial adalah penampilan organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma (atau hal timbal balik), dan jaringan (dari ikatan-ikatan masyarakat), yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi adanya koordinasi dan kerjasama bagi keuntungan bersama. Fukuyama (1995) menyatakan modal sosial adalah kemampuan yang timbul dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam sebuah komunitas.

Arsyad, L. dan Elan. dkk. (2011:95) mengemukakan bahwa strategi pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat menitik beratkan proses peningkatan pertumbuhan ekonomi yang dimotori oleh masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal untuk pembangunan dalam upaya untuk memperbaiki kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Strategi pengembangan kewirausahaan ini yang menggunakan pendekatan kewilayahan yang mengandalkan terutama sekali pada kebutuhan, potensi, dan pelaku lokal dari suatu daerah tertentu (*locality*).

Pengembangan kewirausahaan berbasis masyarakat yang berorientasi peningkatan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal tidak hanya terbatas pada potensi-potensi konvensional yang dikenal selama ini seperti ketersediaan sumberdaya alam dan manusia saja, tetapi juga sangat mengandalkan kepada potensi kelembagaan, modal sosial, dan budaya. Tradisi lokal, sistem nilai dan perilaku, adat

istiadat, struktur sosial dan budaya atau seni juga merupakan potensi dan pendorong utama di dalam dinamika proses pembangunan masyarakat berbasis potensi lokal. Kesemua hal tersebut menyumbangkan sumber daya manusia dan keuangan, memfasilitasi tenaga kerja dan hubungan-hubungan sosial dan mendorong pertukaran barang dan jasa secara formal maupun informal serta penyebaran informasi dan pengetahuan melalui jejaring perusahaan dan organisasi lokal.

Dampak yang diharapkan dalam penyelenggaraan program pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat adalah terjadinya peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kesempatan kerja merupakan perluasan atau terbukanya penyediaan lapangan pekerjaan bagi para penganggur penuh dan mempertinggi produktivitas dan pendapatan bagi mereka yang setengah menganggur dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Peningkatan pendapatan yang dalam ilmu ekonomi dasar dapat diartikan sebagai peningkatan kebutuhan untuk konsumsi dan tabungan sebagai akibat atau imbalan dari produk yang telah dihasilkan. Hubungannya dapat dirumuskan dengan rumus sebagai berikut,  $Pendapatan = Konsumsi + Tabungan$ .

Selain itu, pendapatan dapat diklasifikasikan dari yang berskala kecil seperti pendapatan perorangan dan masyarakat sampai yang berskala besar seperti pendapatan daerah dan pendapatan nasional. Dalam penelitian ini dampak yang diharapkan setelah mengikuti program pelatihan kewirausahaan berbasis masyarakat adalah peningkatan pendapatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Pelatihan Pendampingan Kewirausahaan Masyarakat

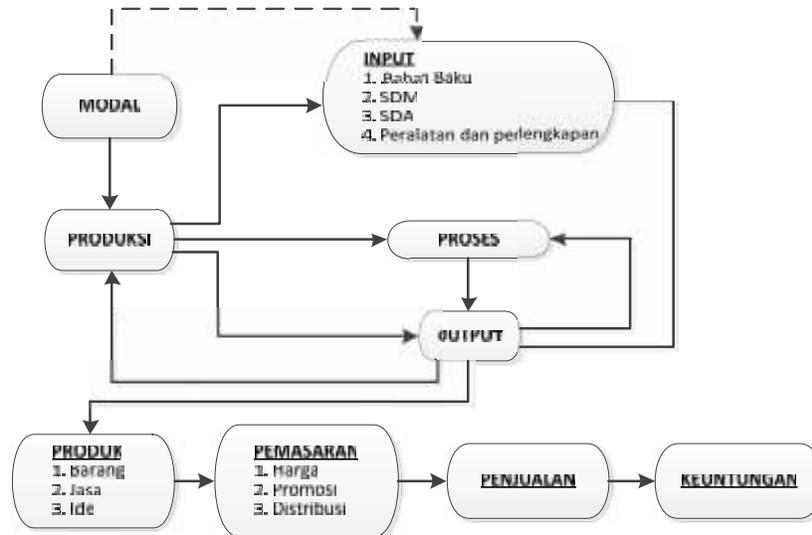
Michael J. Juicus (1972) dalam Kamil, M. (2010:3) mengemukakan: *“the term training is used here to indicate any process by which the aptitudes, skills, and abilities of employes to perform specific job are increased”* (istilah pelatihan yang digunakan di sini adalah untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu). Dari kedua pengertian di atas dapat dilihat bahwa pelatihan berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dalam kenyataan, Pelatihan sebenarnya tidak harus selalu dalam kaitan dengan pekerjaan, atau tidak selalu diperuntukan bagi pegawai.

Dalam konteks kajian ini, teori pelatihan yang digunakan merujuk kepada pendapat Robinson (1981:12), yang mengemukakan bahwa pelatihan adalah pengajaran atau pemberian pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku (pengetahuan, keterampilan dan sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan. Pelatihan berbasis kewirausahaan masyarakat dalam mengembangkan kewirausahaan masyarakat memiliki dimensi pemberdayaan masyarakat lokal. Pelatihan berbasis kewirausahaan masyarakat sebagai suatu proses pemberdayaan bukan sekedar proses penyampaian keingin-tahuan dan keterampilan, melainkan untuk lebih menekankan pada upaya untuk mengangkat dan mengembangkan kemampuan masyarakat (masyarakat belajar). Dalam meningkatkan kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan tersebut, proses pelatihan diharapkan dapat mengatasi atau memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupannya. Pelatihan sebagai proses pemberdayaan juga menekankan pada kemampuan kritis masyarakat dalam menganalisis setiap situasi ekonomi, sosial, dan politik yang dihadapinya, dan mengembangkan keterampilannya lebih lanjut dalam rangka memperbaiki taraf hidupnya (Kindervatter, 1979:12-13). Dengan demikian mereka tidak tergantung kepada kekuasaan orang atau pihak lain baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Konsep pelatihan berbasis masyarakat sesuai dengan potensi lokal didasari oleh kerangka filosofis, psikologis, dan sosiologis yang memandang perlunya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pelatihan dengan menumbuhkan aspek pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Perkembangan model pelatihan ini didasari oleh pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan orang dewasa (*adult education*), penelitian tentang otak manusia, model Lazanov, inovasi pendekatan modern seperti *accelerated learning* dan *quantum learning* (Sumpeno, 2008:46)

Inti dari kompetensi seorang wirausaha ialah inovatif dan kreatif. Dengan demikian tujuan pelatihan kewirausahaan hendaknya diarahkan pada pembentukan sikap dan perilaku seseorang yang memiliki kemampuan inovatif serta bermanfaat bagi masyarakat luas. Karenanya yang bersangkutan harus selalu ingin tahu, mencoba, bermain, dan intuitif. Tujuan pelatihan kewirausahaan hendaknya dapat memberikan bekal bagi peserta didik melalui tiga dimensi, yaitu aspek *managerial skill*, *production technical skill*, dan *personality*

*developmental skill*. Dari ketiga hal utama tersebut intinya ialah menanamkan sikap dan semangat mandiri serta kemampuan kerjasama dan tertanamnya paradigma wirausaha yang secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1 Paradigma Kewirausahaan (Suherman, E., 2010:23)

Berdasarkan paradigma wirausaha, berarti jika seseorang ingin menjadi *entrepreneur* ia harus mandiri untuk melakukan kerjasama atau harus mampu melaksanakan kerjasama dalam kemandirian. Hal tersebut diarahkan untuk pengadaan modal dan melakukan produksi mulai dari penyediaan *input*, pelaksanaan proses sampai menghasilkan *output* berupa produk dalam bentuk barang, jasa maupun ide. Selanjutnya produk tadi dipasarkan dan/atau dijual agar mendapat keuntungan yang pada gilirannya, dari keuntungan tersebut dapat dibudidayakan untuk memproduksi pada periode berikutnya.

Indikasi penting tercapainya tujuan pelatihan kewirausahaan ialah tumbuhnya jiwa usaha dalam pribadi setiap peserta didik, sehingga dapat membentuk komunitas "*business entrepreneur*" yang imbasnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas kegiatan per-

ekonomian masyarakat untuk mengurangi kemiskinan dan menanggulangi masalah pengangguran yang kian hari makin bertambah.

Dalam konteks pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan, Astim, R. (2000:5-6) mengemukakan bahwa “pelatihan kewirausahaan merupakan semacam pendidikan yang mengajarkan agar mampu menciptakan kegiatan usaha sendiri. Pelatihan semacam itu ditempuh dengan cara: (a) membangun keimanan, jiwa dan semangat; (b) membangun dan mengembangkan sikap mental dan watak wirausaha; (c) mengembangkan daya pikir dan cara berwirausaha; (d) memajukan dan mengembangkan daya penggerak diri; (e) mengerti dan menguasai teknik dalam menghadapi resiko, persaingan dan suatu proses kerjasama; (f) mengerti dan menguasai kemampuan menjual ide; (g) memiliki kemampuan kepengurusan atau pengolahan; serta (h) mempunyai keahlian tertentu termasuk penguasaan bahasa asing tertentu untuk keperluan komunikasi”.

Leonard Nadler (1982) dalam Sudjana, D. (2004:104) mengemukakan bahwa tujuan pelatihan pada dasarnya adalah suatu pernyataan yang menguraikan suatu perubahan yang diusulkan akan terjadi pada diri peserta pelatihan, yaitu perubahan setelah peserta pelatihan menyelesaikan pengalaman belajarnya dalam pelatihan. Lebih lengkap tujuan pelatihan dapat diberi arti sebagai suatu rumusan tentang hasil yaitu keluaran (*output*) dan dampak (*outcome*) yang ingin dicapai oleh pelatihan. Mengacu pada pengertian tersebut, maka dapat dikemukakan bahwa tujuan pelatihan adalah gambaran tentang perilaku yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta pelatihan setelah mengikuti pelatihan. Tujuan ini dipandang sebagai tolok ukur yang akurat untuk pencapaian hasil suatu pelatihan. Tujuan dapat berbentuk verbal (lisan) dan/atau non verbal (tulisan). Tujuan secara tertulis secara jelas lebih baik dan mudah dipahami oleh peserta pelatihan dibandingkan dengan tujuan lisan.

Pelatihan pendampingan program kewirausahaan berbasis masyarakat merupakan sebuah solusi alternatif yang digunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi pada pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kewirausahaan berbasis masyarakat. Pelatihan pendampingan program kewirausahaan berbasis masyarakat, adalah untuk memandu atau memberikan acuan penyelenggaraan program kewirausahaan untuk pemberdayaan masya-

rakat, khususnya di pedesaan. Pelatihan ini disusun melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

## 2. Kompetensi Pendamping dalam Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat

McClelland (1962) dalam Sihotang, A. (2007:4) mendefinisikan kompetensi sebagai karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses atau tidaknya seseorang dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan atau situasi, begitu pula Marshall, menyebutkan kompetensi sebagai karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan memberikan kinerja unggulan dalam pekerjaan, peran, atau situasi tertentu.

Dale dan Gordon dalam Sudarmanto (2009) menyatakan bahwa kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau memegang jabatan, dengan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya. Menurut Gordon kompetensi menggambarkan pengetahuan, pemahaman, *skill*, nilai, sikap dan ketertarikan.

Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang berefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh peserta pelatihan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pelatihan sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu.

Kompetensi merupakan sebuah konsep yang dapat diartikan sebagai kombinasi antara keterampilan (*skill*), atribut personal, dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kinerja (*job behavior*) yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. Kompetensi merupakan faktor penentu keberhasilan kinerja. Fokus kompetensi adalah perilaku yang merupakan aplikasi dari *skill*, atribut personal dan pengetahuan. Kompetensi juga diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah

menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia dapat melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

1. Kompetensi merupakan gabungan berbagai karakteristik individu. Kompetensi tidak terdiri dari satu karakteristik saja. Kompetensi merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakteristik dasar lainnya dari individu;
2. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja/perilaku. Kompetensi tampil dalam bentuk kinerja/perilaku yang dapat diobservasi dan diukur (*measurable*). Jika potensi yang belum ditampilkan dalam bentuk perilaku yang dapat observasi/diukur tidak dapat dikategorikan sebagai kompetensi;
3. Kompetensi merupakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang unggul dan yang rata-rata.

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan seluruh peran kerja sesuai dengan standar yang diharapkan dalam suatu pekerjaan yang juga dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan dan sikap.

Selanjutnya, berkaitan dengan pengertian kewirausahaan, Hisrich-Peters (1995:10) dalam Alma, B. (2004:26) dikemukakan bahwa “*entrepreneurship is the process of creating something different with vaule by devoting the necessary time and effort, assuming the accompanying financial, psychic, and social risk, and receiving the resulting rewards of monetary and personal satisfaction and independence.* (Kewirausahaan adalah proses menciptakan sesuatu yang lain dengan menggunakan waktu dan kegiatan disertai modal dan resiko serta menerima balas jasa dan kepuasan serta kebebasan).

Suryana (2007:10) juga mengemukakan bahwa kewirausahaan merupakan terjemahan dari “*entrepreneurship*”, yang dapat diartikan sebagai “*the backbone of economy*”, yaitu syaraf pusat perekonomian atau sebagai ‘*tailbone of economy*’, yaitu pengendali perekonomian suatu bangsa (Wirakusumo, 1997:1). Secara etimologi kewirausahaan merupakan nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha (*start-up phase*) atau suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru (*creative*) dan sesuatu yang berbeda (*innovative*).

Zimmener, W. T. and Norman M.S. (1996:51) mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah “*applying creativity and innovation to solve the problem and to exploit opportunities that people face everyday*”. Kewirausahaan adalah penerapan kreatifitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan upaya untuk memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari kreatifitas, inovasi dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru. *Kreatifitas* oleh Zimmener, W. T. & Norman M.S. (1996:51) diartikan sebagai kemampuan mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara baru untuk memecahkan persoalan dan menghadapi peluang (*creativity is the ability to develop new ideas and discover new ways of looking at problem and opportunities*).

Drucker, P.F. (1994:27) dalam Suryana (2007:10) mengemukakan kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (*ability to create the new and different thing*). Bahkan, *enterpreneurship* secara sederhana sering juga diartikan sebagai prinsip atau kemampuan wirausaha. Kewirausahaan adalah “*ability to create the new and different*”, suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda.

Tujuan pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan meliputi aspek: pertama, pengetahuan kewirausahaan. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi pengetahuan kewirausahaan yang meliputi: (a) pengantar kewirausahaan; (b) perencanaan usaha; (c) perencanaan dan pengendalian keuangan; dan (d) penggunaan sumber daya dalam menjalankan usaha.

Kedua, sikap kewirausahaan. Mungkin kita pernah mendengar bahwa keluarga yang kaya akan memunculkan anak-anak yang kaya karena mereka terbiasa kaya. Begitu pula ada yang menganggap bahwa seseorang menjadi pengusaha karena memang keluarga besarnya adalah keturunan pengusaha. Anggapan seperti ini merupakan pemikiran yang keliru. Tidak bisa dipungkiri memang, ada banyak pengusaha yang lahir dari keluarga atau keturunan pengusaha. Tetapi bukan berarti diturunkan secara genetis. Mungkin hal ini terjadi karena aspek lingkungan pengusaha yang cukup kuat mempengaruhi jiwa orang tersebut menjadi pengusaha. Menjadi wirausaha (*entrepreneur*) tentu saja merupakan hak azasi semua kita. Jangan karena tidak punya

turunan pengusaha sehingga menutup peluang untuk menjadi wirausaha.

Ketiga, keterampilan kewirausahaan. Wirausaha yang sukses pada umumnya adalah mereka yang memiliki kompetensi yaitu seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, keterampilan dan kualitas individu yang meliputi sikap, motivasi, nilai serta tingkah laku yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan/kegiatan. Keterampilan yang harus dimiliki menurut Suryana (2007) adalah sebagai: (a) *managerial skill* (keterampilan mengelola); (b) *conceptual skill* (keterampilan menyusun konsep); (c) *human skill* (keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi dan berelasi); (d) *decision making skill* (keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan); dan (e) *time managerial skill* (keterampilan dalam mengatur dan menggunakan waktu).

### 3. Pemberdayaan Kewirausahaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan terjemahan dari *empowerment*, yang berasal dari kata “*power*” yaitu kekuatan. Istilah pemberdayaan dapat dikaitkan dengan proses transformasi sosial, ekonomi dan politik (kekuasaan). Pemberdayaan yang diartikan sebagai penumbuhan kekuasaan dan wewenang bertindak yang lebih besar kepada si miskin merupakan salah satu implikasi dari pengertian pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Konsep pemberdayaan pada dasarnya adalah upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik, di dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional dalam bidang politik, ekonomi dan lain-lain.

Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan terhadap dunia kehidupan peserta didik, sesuai dengan pendidikan penyadaran yang diajukan Freire, maka *Suzanne Kindevatter* (1979) dalam Sudjana, D. (2004:77), mengemukakan konsep pemberdayaan atau *Empowering Process*. Konsep ini bermakna bahwa “*people gaining an understanding of and control over social, economic, and lor political forces in order to improve their standing in societv*”. Proses pemberian kekuatan atau pemberdayaan adalah setiap upaya pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan peserta didik terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan/atau politik, sehingga pada gilirannya peserta didik memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan status sosial, ekonomi dan politiknya

dalam masyarakat. Pemberdayaan adalah proses membantu individu atau masyarakat dalam menciptakan pemahaman baru sekaligus memberi kebebasan untuk membuat pilihan. Dengan kata lain pemberdayaan adalah proses meningkatkan kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu, seperti kompetensi dan kreativitasnya serta meningkatkan kebebasan orang tersebut dalam bertindak.

Dalam pembelajaran, proses pemberdayaan tersebut mempunyai delapan prinsip yaitu: (a) belajar dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil; (b) pemberian tanggung jawab yang lebih besar kepada peserta didik selama kegiatan pembelajaran berlangsung; (c) kepemimpinan kelompok diperankan oleh peserta didik; (d) pendidik bertindak selaku fasilitator, yaitu memberikan bantuan (dorongan, bimbingan, dan lain sebagainya); (e) proses kegiatan pembelajaran berlangsung secara demokratis; (f) adanya kesatuan pandangan dan langkah antara peserta didik dengan pendidik dalam mencapai tujuan; (g) menggunakan metode dan teknik pembelajaran yang dapat menimbulkan rasa percaya diri pada peserta didik; dan (h) bertujuan akhir untuk meningkatkan status sosial, ekonomis dan/atau politik peserta didik dalam masyarakat. Berkenaan dengan kedelapan prinsip tersebut di atas. Kindervatter (1979) mengemukakan hasil studi kasus yang terdapat di Indonesia dan Thailand sebagai berikut.

1. Kelompok kecil dapat dibentuk berdasarkan kesamaan umur peserta didik atau usia campuran yang dilakukan sejak awal pembentukan kelompok.
2. Pemberian tanggung jawab kepada para peserta didik dapat terjadi apabila program pembelajaran itu dirasakan sebagai program yang disusun oleh peserta didik.
3. Kepemimpinan kelompok yang dipegang oleh peserta didik membutuhkan kejelian pendidik dalam membantu penentuan orang-orang yang cocok untuk itu.
4. Pendidik diseleksi dan dilatih secara tepat.
5. Proses yang demokratis saling berhubungan dengan proses interaksi sejajar (*horizontal*) yang muncul dari berbagai pengalaman praktis.
6. Kesamaan pandangan dan langkah untuk mencapai tujuan dapat ditumbuhkan dengan mengungkap masalah-masalah aktual dan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik.

7. Metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik adalah fleksibel, tidak kaku.
8. Peningkatan status sosial, ekonomi, dan/atau politik peserta didik merupakan tujuan jangka panjang dalam proses pemberdayaan.

Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa dalam menerapkan proses pemberdayaan dapat dilakukan dengan membentuk kelompok kecil berdasarkan kesamaan umur peserta didik atau usia campuran yang dilakukan sejak awal pembentukan kelompok. Pemberdayaan (*empowering*) menekankan pada pentingnya kesamaan langkah dalam kelompok untuk mengembangkan kegiatan. Pemberian tanggung jawab kepada para peserta didik dapat terjadi apabila program pembelajaran itu dirasakan sebagai program yang disusun oleh peserta didik. Oleh karena itu peserta didik hendaknya dilibatkan secara aktif sejak awal perencanaan program kegiatan belajar.

Kepemimpinan kelompok yang dipegang oleh peserta didik membutuhkan kejelian pendidik dalam membantu penentuan orang-orang yang cocok untuk itu. Peserta didik yang aktif dapat dipromosikan untuk menjadi pimpinan kelompok. Pendidik diseleksi dan dilatih secara tepat. Pendidik mempunyai sikap dan perilaku yang dapat diterima oleh peserta didik karena pendidik sangat mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik. Proses yang demokratis saling berhubungan dengan proses interaksi sejajar (*horizontal*) yang muncul dari berbagai pengalaman praktis. Pengembangan proses tersebut memerlukan dukungan dari para perencana dan pengambil kebijakan pendidikan. Kesamaan pandangan dan langkah untuk mencapai tujuan dapat ditumbuhkan dengan mengungkap masalah-masalah aktual dan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik.

Dalam pemberdayaan, analisis masalah dipandang sangat penting. Dalam analisis ini diperlukan pendidik yang terlatih dalam mengungkap masalah dan kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik dalam kehidupannya. Metode-metode yang digunakan dalam pembelajaran untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik adalah fleksibel, tidak kaku. Metode dapat berubah sesuai dengan masalah dan kebutuhan yang dihadapi. Kemampuan untuk membangkitkan rasa percaya diri merupakan keterampilan proses (*process skills*). Keterampilan ini mencakup upaya untuk memperoleh informasi, menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan dalam

memecahkan masalah yang dihadapi. Peningkatan status sosial, ekonomi, dan/atau politik peserta didik merupakan tujuan jangka panjang dalam proses pemberdayaan. Indikator peningkatan status itu perlu dirumuskan dengan berpartisipasi peserta didik melalui diskusi kelompok. Akhirnya Kindevatter, S. (1979) menyimpulkan bahwa *“generally, Non Formal Education for empowering is an educational approach which enable learners to gain greater understanding, of and control over social, economic, and/or political forces through: (1) exercising a high degree of control over allaspects ofthe learning process; (2) learning both "content and "process" skills responsive to their needs and problems; and (3) working collaboratively to solve mutual problems”*.

Kesimpulan di atas mengungkapkan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan nonformal, sebagai proses pemberdayaan adalah suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan pengertian dan pengendalian diri peserta didik terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan/atau politik, sehingga peserta didik mampu untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam masyarakat. Untuk itu proses yang perlu ditempuh peserta didik adalah: (1) melatih tingkat kepekaan yang tinggi terhadap berbagai aspek perkembangan sosial, ekonomi dan politik selama proses pembelajaran; (2) mempelajari berbagai macam keterampilan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan (3) bekerjasama dalam memecahkan masalah yang dihadapi bersama.

### C. SIMPULAN

Kajian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, pelatihan pendampingan kewirausahaan berbasis masyarakat digunakan bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kewirausahaan berbasis masyarakat. Pelatihan pendampingan kewirausahaan berbasis masyarakat, merupakan panduan penyelenggaraan program kewirausahaan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya di pedesaan. Pelatihan ini disusun melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

Kedua, tujuan pelatihan kewirausahaan dalam meningkatkan kompetensi kewirausahaan meliputi aspek pengetahuan kewirausahaan, sikap kewirausahaan, dan keterampilan kewirausahaan, sehingga memiliki kemampuan mengelola, menyusun konsep, memahami, mengerti, berkomunikasi dan berelasi, merumuskan masalah dan mengambil

keputusan, serta keterampilan dalam mengatur dan menggunakan waktu selama menjalankan usahanya.

Ketiga, pemberdayaan adalah merupakan proses pendidikan yang bertujuan membangkitkan kesadaran, pengertian, dan kepekaan peserta didik terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan/atau politik, sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan status sosial, ekonomi dan politiknya dalam masyarakat.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Alma, B. 2007. *Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.
- Blank W.E. 1992. *Competence Based Training Program*. Jakarta: PT Pustaka Binaman Pressindo.
- Drucker, P.F. 1994. *Inovation dan Entrepreneurship, Practice and Principles*. Jakarta: Gelora Aksara Pratama Erlangga.
- Fukuyama, F. 1995. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Kamil, M. 2009. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta.
- Kindervatter, S. 1979. *Nonformal Education as An Empowering Process*. Massachusetts: Center for International Education University of Massachusetts.
- Lincolin, A.S., Elan. dkk. 2011. *Strategi Pembangunan Perdesaan Berbasis Lokal*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Meredith, G., 2005. *Kewirausahaan, Teori dan Praktik, Seri Manajemen Strategis No. 1*. Jakarta. PT. Pustaka Bimanan Pressindo.
- Putnam, R.D. (1993). *The Prosperous Community: Social Capital and Public Life*. *American Prospect*, 13, Spring, 35- 42. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. *Foundation of Social Capital*. Massachusetts. Edward Elgar Publishing Limited.
- Sihotang, A. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Sudjana, D. 2004. *Pendidikan Nonformal, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Azas*. Bandung: Falah Production.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Sistem dan Manajemen Pelatihan, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Falah Production.
- Suharto, E. 2007. *Modal Sosial dan Kebijakan Publik*. pdf (secured). 23/6/2007. 1:49PM.
- Suherman, E. 2010. *Desain Pembelajaran Kewirausahaan*. Bandung: Alfabeta.

- Sumpeno, W. 2009. *Sekolah Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suryana. 2007. *Kewirausahaan, Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zimmener, W. T. and Norman M.S. 1996. *Entrepreneurship and The New Venture Formation*. New Jersey: Prentice Hall International Inc.

## PEMBANGUNAN EKONOMI KAWASAN PEDESAAN BERORIENTASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Wirdatul 'Aini

Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang  
Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang

### A. PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi berbasis lokalitas sangat cocok diterapkan pada era otonomi saat ini. Pembangunan ekonomi yang memusatkan perhatian pada pemanfaatan sumber daya lokal dapat menjadi perangsang terciptanya peluang kerja dan ragam kegiatan perekonomian baru. Namun demikian, kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi di daerah. Seragamnya pembangunan ekonomi di hampir banyak wilayah menjadikan pembangunan tidak tepat sasaran. Kondisi ini terjadi karena pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan potensi, kebutuhan dan karakter dari daerah tersebut.

Daerah dipahami sebagai struktur dan karakter kewilayahan yang terbagi dari kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, hingga dusun merupakan bentangan kategorisasi daerah yang sejatinya memiliki keragaman potensi sumber daya. Keragaman ini semestinya dikenali sebagai variabel pembeda pembangunan perekonomian masyarakat. Kekhasan daerah mestinya pula melahirkan keunikan produksi ekonomi masyarakat.

Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan mestinya merupakan sebuah pendekatan perekonomian yang menghubungkan distribusi hasil produksi desa dengan sistem ekonomi pasar untuk memacu kegiatan ekonomi yang berada di desa. Pengembangan tersebut dicapai dengan berfokus pada distribusi peluang produk pedesaan untuk memainkan peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan dapat meningkatkan jumlah lapangan kerja dan peluang usaha, serta memunculkan strategi untuk menjaga agar sebagian besar peluang untuk memperoleh pendapatan tetap berada di desa.

Pengembangan ekonomi pedesaan dilakukan tanpa kemauan politik dan dukungan pemerintah, baik dalam menjamin kebijakan yang akomodatif maupun prioritas sumberdaya yang menyangkut

sektor infrastruktur dan dukungan sektor jasa. Selain pihak pemerintah, terdapat *stakeholder* lain yang sepatutnya menjadi bagian dari skema pengembangan ekonomi desa adalah pihak swasta.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pembangunan Ekonomi Kawasan Pedesaan**

Sebagai sebuah proses multidimensi melalui integrasi perubahan struktur sosial, kelembagaan nasional, percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan, pembangunan ditujukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat (Todaro, 2000). Secara filosofis, pembangunan diartikan sebagai upaya sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan beragam alternatif humanis untuk pencapaian aspirasi masyarakat (Rustiadi, 2006).

Terdapat tiga tujuan utama dari pembangunan ekonomi pada suatu kawasan yaitu, (1) membuka kesempatan kerja yang berkualitas bagi penduduk, (2) mencapai situasi perekonomian yang stabil, dan (3) membangun beragam basis ekonomi dan kesempatan kerja (Jamli, 2003). Artinya, desa harus mengenal dengan baik potensi yang dimilikinya, serta memberdayakan berbagai sumber daya tersebut sebagai dasar dalam pembangunannya. Dengan demikian, perekonomian pedesaan selayaknya memperhatikan antara lain kondisi ekonomi masyarakat, potensi sumber daya alam dan sumber daya insani, serta infrastruktur yang tersedia untuk mencapai serangkaian tujuan yang ditetapkan.

Berdasar pada pertimbangan aspek-aspek tersebut, selanjutnya disusun perencanaan pembangunan kawasan pedesaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perencanaan tersebut menekankan pada pembangunan berbasis sumber daya lokal potensial untuk menciptakan peluang pekerjaan dan memacu kegiatan perekonomian baru berbasis lokal (Blakely, 1994). Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan diarahkan untuk mencapai tiga tujuan yang saling berkaitan, yaitu penciptaan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, berkurangnya jumlah penduduk miskin, dan terwujudnya mata rantai kehidupan yang berkelanjutan (*sustainable livelihood*) (Dendi, 2004).

Dalam upaya untuk mengembangkan ekonomi di kawasan pedesaan, terdapat beberapa alternatif strategi yang dapat dilakukan, diantaranya seperti yang direkomendasikan oleh Anton (2008) yaitu peningkatan kemampuan produsen di kawasan pedesaan, agar mampu

bersaing dengan produk yang berasal dari luar kawasan pedesaan yang diharapkan mampu memperbaiki kualitas produksi dan memperbesar peluang distribusi keluar hasil produksi.

Kedua, memperbaiki kerjasama antar *stakeholder* agar dapat saling mendukung dan memperkuat proses produksi serta distribusi. Ketiga, mengalokasikan sumber daya kepada kelompok masyarakat yang berpotensi untuk berkembang, akan tetapi tidak lantas melupakan kelompok lainnya yang masih berkembang, serta membuat suatu pusat perdagangan sebagai media interaksi antar kelompok usaha dengan pasar.

Keberhasilan proses pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan, hendaknya memperhatikan komponen-komponen pendukung. Komponen lingkungan (*environment*) ataupun komponen infrastruktur (*instrument*) desa memiliki peran dalam pencapaian tujuan pengembangan perekonomian yang diharapkan.

Investasi di bidang infrastruktur berperan besar dalam mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan (Anton, 2008). Perlu diperhatikan mengenai penentuan jenis infrastruktur yang akan disiapkan, karena harus berorientasi pada karakteristik dan kebutuhan desa. Sedangkan kondisi lingkungan adalah perangkat yang mendukung mudahnya proses, seperti peraturan, prosedur, pajak, dan pungutan biaya.

Pengembangan ekonomi di kawasan pedesaan berperan penting dalam memperkuat posisi produsen (produksi barang/jasa). Fokus pengembangan ditujukan pada pembentukan basis kolektif masyarakat, misal penguatan kapasitas organisasi. Peningkatan keterampilan dan kapasitas produsen, serta penyiapan sarana keterlibatan produsen dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan.

Produsen merupakan kelompok yang paling lemah dan memerlukan dukungan untuk menyuarakan kepentingan mereka maupun untuk meningkatkan keterampilan mereka. Mengorganisir para produsen ke dalam sebuah kelompok hanyalah merupakan salah satu bagian dari upaya untuk perbaikan. Peningkatan ketrampilan dan kapasitas produsen dalam memproduksi dan menjalankan bisnis serta meningkatkan akses pasar, jauh lebih penting dari itu semua (Boulle et al., 2004).

Kapasitas produsen harus dibangun melalui dua pendekatan. Pertama, kapasitas organisasi agar memiliki suara yang kuat dan jelas dalam kemitraan, dan kedua, pengembangan ketrampilan untuk

menjamin peningkatan produksi dalam klaster yang bersangkutan (Bouille et al., 2004).

Konsep pengembangan ekonomi lokal yang pro-masyarakat miskin mementingkan beberapa prinsip pokok, yakni: (1) investasi pada peningkatan sumber daya manusia dan kapital sosial penduduk miskin; (2) kebijakan dan pelayanan yang menghasilkan tersedianya secara luas dan berkelanjutan kebutuhan dasar masyarakat (akses pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan); (3) kebijakan dan pelayanan yang mengurangi biaya-biaya transaksi sehingga membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan dan atau nilai tambah dari usaha sendiri; (4) peningkatan akses masyarakat miskin kepada sumber daya ekonomi (modal, lahan, sarana produksi, informasi pasar dan lain-lain); dan (5) pembangunan yang ramah lingkungan (Dendi, dkk.2004).

Dalam kaitannya dengan prinsip pengembangan ekonomi lokal yang *pro-poor*, dalam penentuan komoditas unggulan daerah, disamping kriteria-kriteria kelayakan teknis, permintaan pasar, serta efek *multiplier* suatu komoditi/produk sektoral terhadap sektor usaha lainnya, faktor potensi nilai tambah langsung bagi keluarga miskin juga sebagai kriteria penting (Dendi, 2004: 17).

## 2. Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk memberdayakan diri dengan memiliki kemampuan/keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh perempuan. Masalah perempuan sering dikaitkan dengan gender. Secara umum gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dari segi sosial-budaya.

Kesetaraan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan yang memerlukan berbagai teknik analisa kesetaraan gender. Analisa kesetaraan gender adalah proses yang dibangun secara sistematis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

Beban gender seseorang tergantung dari nilai-nilai budaya yang berkembang di dalam masyarakat. Dalam budaya negara kita beban gender seorang laki-laki lebih dominan dibandingkan dengan beban gender seorang perempuan. Oleh karena itu masih banyak masyarakat di negara kita yang tidak mementingkan pendidikan untuk perempuan, disebabkan mereka masih menyakini bahwa perempuan tugasnya hanya mengurus rumah, anak, dan suami mereka, tanpa memberi kesempatan kepada perempuan bekerja di luar rumah seperti halnya laki-laki.

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menentukan kekuasaan dan status pun laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal itu disebabkan bahwa perempuan memiliki perilaku yang lemah lembut, sedangkan laki-laki berperilaku lebih tegas dan jantan. Dalam sebuah organisasi, kedudukan perempuan dianggap tidak lebih unggul, menurut Moss (dalam Umar, 1999:57) menyatakan bahwa ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena perempuan mempunyai berbagai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki lebih unggul, tetapi juga karena perempuan ditemukan kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi perempuan lebih mengawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih sering terjadi ketimpangan.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya memperbaiki status dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa. Selanjutnya Ulfah (2010:17) juga mengemukakan bahwa pemberdayaan perempuan dipahami sebagai proses penumbuhan kesadaran kritis agar perempuan mampu berkembang secara optimal dan mampu membuat rencana, mengambil inisiatif, mengorganisir diri, dan bertanggung jawab terhadap diri dan lingkungannya.

Kesadaran kritis tersebut hanya dapat dicapai apabila perempuan mampu melihat ke dalam diri mereka sendiri serta menggunakan apa yang didengar, dilihat, dan dialami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupan.

Pemberdayaan perempuan sering digunakan dalam konteks kemampuan meningkatkan ekonomi individu, yang merupakan pra

syarat pemberdayaan. Penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan meliputi kegiatan yang mencakup bimbingan sosial, bimbingan keterampilan, fasilitas atau bantuan sosial, termasuk di dalamnya pengembangan usaha ekonomi produktif, yang ditujukan untuk peningkatan kemampuan dan keutuhan perempuan serta peningkatan pendapatan ekonominya.

Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan sumber daya perempuan dapat digolongkan menjadi faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif), keterampilan/*skill* (psikomotorik) dan mental (afektif) merupakan komponen yang mewujudkan perilaku sosok perempuan. Sedangkan faktor eksternal, menjadi faktor penentu keberhasilan dalam memberdayakan faktor-faktor internal.

Oleh karena itu, sangat penting bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan, mengasah keterampilan yang dapat mendukungnya untuk memberdayakan dirinya sendiri. Pemberdayaan perempuan dapat dilakukan dengan pendidikan formal, informal dan nonformal. Menurut Kindervatter (dalam Ulfah, 2010: 20-21), dijelaskan empat pendekatan dalam pemberdayaan perempuan melalui pendidikan luar sekolah, yaitu sebagai berikut *community organization*, yaitu karakteristik yang mengarah pada tujuan untuk mengaktifkan masyarakat dalam usaha meningkatkan dan mengubah keadaan sosial ekonomi mereka; *self management and collaboration*, yaitu pendekatan dengan sistem penyamarataan atau pembagian wewenang di dalam kegiatan; *participatory approaches*, yaitu pendekatan yang menekankan kepada keterlibatan setiap warga belajar dalam keseluruhan kegiatan, perlunya melibatkan para pemimpin serta tenaga-tenaga ahli setempat; dan *education for justice*, yaitu pendekatan yang menekankan pada terciptanya situasi yang memungkinkan warga belajar tumbuh dan berkembang analisisnya serta memiliki motivasi untuk ikut berperan.

Pendidikan nonformal untuk pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui kegiatan kewirausahaan. Keikutsertaan perempuan dalam program yang diselenggarakan diharapkan para perempuan dapat memiliki pemahaman dan keterampilan berwirausaha demi peningkatan pendapatan ekonominya.

### 3. Pandangan Teori Pendidikan Luar Sekolah

Ketidakberdayaan masyarakat disebabkan keterbatasan pendidikan dalam menjangkau sistem pendidikan persekolahan dan kurang

berkembangnya kegiatan pendidikan luar sekolah yang terdapat di masyarakat. Oleh karena itu sangat didambakan akan kehadiran program-program pendidikan luar sekolah yang berbasis sosial budaya dan potensi alam sekitarnya untuk memberdayakan masyarakat.

Secara definitif pendidikan adalah usaha sengaja untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan kepribadian manusia. Artinya, pendidikan terdiri dari; (1) pengelola pembelajaran, (2) warga belajar dan (3) tujuan pembelajaran, yaitu untuk menghasilkan perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, wawasan, ketrampilan, nilai, sikap, dan perilaku subyek didik itu sendiri (Rogers, 1993:20-21). Lebih lanjut Rogers (1993:25) menyatakan bahwa “*Non-formal education has been defined as all education provided outside of the formal system, whatever its purposes, target groups and providers*”. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah mencakup seluruh aktivitas pendidikan atau pembelajaran yang terorganisir di luar sistem persekolahan.

Pendidikan mengandung makna suatu proses yang menempatkan belajar sebagai inti dari aktivitasnya. Belajar berlangsung dalam diri masing-masing individu dan berlangsung sepanjang hidupnya sebagai akibat interaksi dengan lingkungannya. Pengalaman individu berinteraksi dengan lingkungan, selanjutnya menciptakan pengalaman belajar. Melalui pendidikan, belajar diselenggarakan secara terencana (*organized learning program*) demi memenuhi kebutuhan belajar yang diinginkan setiap warga belajar.

Karakteristik program pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah didasarkan pada prinsip-prinsip belajar orang dewasa. Pendidikan luar sekolah diselenggarakan dengan sengaja untuk tujuan pendidikan (*organized learning program*). Sedangkan pendidikan informal relatif tidak terorganisasi dan tersistematis (Coombs, 1973:11). Pendidikan informal bukanlah suatu program yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan pendidikan (*unorganized learning program*). Namun, lebih tepat diartikan sebagai peristiwa belajar yang terjadi pada diri seseorang, yang karena interaksi dengan lingkungannya membuat orang bersangkutan menjadi berubah pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap dan perilakunya .

Pendidikan persekolahan dan pendidikan luar sekolah terkategori sebagai *organized learning program*. Namun di antara keduanya pun memiliki perbedaan dalam pengorganisasiannya. Dalam pendidikan persekolahan, programnya terorganisasi dengan sangat ketat. Sementara pada pendidikan luar sekolah, programnya terorganisasi

dengan relatif longgar. Menurut Coombs (1973:11) keterorganisasian program pendidikan luar sekolah adalah berada di tengah-tengah antara pendidikan informal dan pendidikan persekolahan. Sebab, pendidikan informal cenderung tidak terorganisasi secara sistematis. Sementara pendidikan persekolahan terorganisasi dengan sistem pendidikan yang terstruktur mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Dengan demikian, pendidikan luar sekolah berbeda dengan pendidikan informal yang cenderung tidak terorganisasi dan tidak sistematis. Namun berbeda pula dengan pendidikan persekolahan yang terorganisasi secara ketat. Dalam penyelenggaraannya, program pendidikan luar sekolah dilakukan oleh berbagai penyelenggara, berbagai tujuan dan beraneka ragam karakteristik peserta program (Apps 1979:89-101).

Karakteristik program pemberdayaan masyarakat perempuan merupakan bentuk pendidikan dalam konteks pengembangan masyarakat. Boyle (1981) membagi tiga tipe program pendidikan luar sekolah yang terdiri dari *developmental*, *institutional* dan *informational*. *Developmental*, merupakan tipe program pendidikan luar sekolah yang memusatkan perhatian pada membantu atau memfasilitasi individu, masyarakat, kelompok dan komunitas dalam menentukan dan mengatasi masalah yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup (Moedzakir, 2010:221). Sejalan dengan itu, pemberdayaan perempuan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk program pendidikan luar sekolah dengan tipe *developmental*.

### C. SIMPULAN

Perempuan umumnya telah terjebak dalam konstruksi sosial yang dibangun dengan anggapan bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah lembut, sehingga perempuan hanya cocok bekerja sebagai ibu rumah tangga atau pekerja domestik seperti misalnya mencuci pakaian, memasak, mendidik anak dan melayani suami. Tugas ini umumnya dibebankan sepenuhnya kepada perempuan atau istri, sementara laki-laki dipandang sebagai makhluk yang kuat sehingga laki-laki cocok bekerja di bidang produksi dan laki-lakilah yang memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anaknya, sehingga ketergantungan istri terhadap suami cukup tinggi.

Ketergantungan istri terhadap suami yang cukup tinggi biasanya disebabkan ketidakmampuan perempuan untuk mencari nafkah seperti laki-laki pada umumnya. Masalah perempuan adalah

akibat dari konstruksi sosial (*social contract*) yang sering menjadi penyebab munculnya diskriminasi gender (Puspitawati, 2009:6).

Keluarga yang berhasil adalah ketika seorang ibu memperoleh tingkat pendidikan yang baik, memiliki akses publik yang luas, dan mempunyai posisi tawar yang kuat. Dengan keluasan pandangan itulah, seorang ibu akan mampu mendidik anak-anak mereka dengan cerdas dan bijaksana (Puspitawati, 2009:4).

Secara psikologis, perempuan membutuhkan aktualisasi diri demi pengembangan dirinya dan sesuatu yang pada akhirnya juga berdampak positif terhadap pengembangan masyarakat dan lingkungan pada umumnya. Pemerintah sebagai alat penggerak jalannya pembangunan dan berkembangnya sebuah daerah tergantung dari sejauh mana kecerdasan dan kreativitas pemerintah dalam memajukan daerahnya. Peranan perempuan disuatu daerah sangat penting, sehingga pemerintah daerah sebaiknya mempunyai kebijakan-kebijakan terhadap perempuan seperti memfasilitasi berbagai kepentingan perempuan dalam berkarya.

Upaya peningkatan peran perempuan dalam pembangunan adalah melalui pengembangan kelembagaan dan usaha ekonomi produktif perempuan. Harapannya adalah peningkatan pendapatan guna kesejahteraan keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan posisi kaum perempuan menuju kesetaraan gender.

#### DAFTAR RUJUKAN

- APPEAL. 1996. *Pendidikan Berkelanjutan: Arah dan Kebijakan Baru*. Bangkok: Ditjen Diklusepora dan UNESCO
- Apps, JW. 1979. *Problems in Continuing Education*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Boyle, P.G. 1981. *Planning Better Programs*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Rogers, Alan. 1993. *Adult Learning for Development*. Cassel Educational Limited. Villiers House 41/47 Strand London.
- Ulfah. 2011. *Penyelenggaraan Pelatihan Keterampilan Merajut (Studi Kasus Pelatihan Keterampilan di PKBM Bina Mandiri di Cipageran Cimahi Jawa Barat)*. Tesis: Tidak diterbitkan. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Moedzakir, M.D. 2010. *Metode Pembelajaran untuk Program-Program Pendidikan Luar Sekolah*. Malang: UM Press.

## **PERAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DALAM UPAYA PENYIAPAN SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK PROGRAM PENDAMPINGAN DESA**

Muhaimin

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Luar Sekolah  
Program Pascasarjana Universitas Negeri Malang

### **A. PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan diri bagi pemenuhan kebutuhan hidup, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan. Jalur pendidikan dapat ditempuh melalui tiga jalur yaitu melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja para pekerja dalam pekerjaan yang diserahkan kepada mereka. Pelatihan berlangsung dalam jangka waktu pendek antara dua sampai tiga hari hingga dua sampai tiga bulan. Pelatihan dilakukan secara sistematis, menurut prosedur yang terbukti berhasil dengan metode yang sudah baku dan sesuai serta dijalankan secara sungguh-sungguh dan teratur. pelatihan berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani.

Pelatihan bertujuan untuk membantu pekerja dalam: (a) mempelajari dan mendapatkan kecakapan-kecakapan baru, (b) mempertahankan dan meningkatkan kecakapan-kecakapan yang sudah dikuasai, (b) mendorong pekerja agar mau belajar dan berkembang, (d) mempraktekkan di tempat kerja hal-hal yang sudah dipelajari dan diperoleh dalam pelatihan, (e) mengembangkan pribadi pekerja, (f) mengembangkan efektifitas lembaga, (g) memberi motivasi kepada pekerja untuk terus belajar dan berkembang.

Keberhasilan program pendampingan desa merupakan tujuan Negara dalam pengembangannya dan pula impian setiap masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program pendampingan desa, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bi-

dangnya. Namun namun tidak semua pendamping desa memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pendampingan desa, hal ini menimbulkan permasalahan yang sangat harus segera terselesaikan. Menurut pandangan saya program layanan pelatihan calon pendamping desa merupakan alternatif pemecahan permasalahan minimnya kompetensi pendamping desa. Dalam kegiatan pelatihan memiliki banyak keuntungan diantaranya adalah waktu pelatihan yang relatif singkat bila dibandingkan dengan pendidikan formal, materi yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan standar kompetensi pendamping desa.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Keterkaitan Antar Jalur Pendidikan**

Tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pernyataan ini amat terkait dengan pendidikan. Pentingnya pendidikan bagi seluruh warga Negara diamanatkan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 28 b ayat (1) menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia, dan Pasal 1 ayat (1) menyatakan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas manusia. Oleh karena itu pembangunan pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Pendidikan berfungsi untuk mengembangkan diri bagi pemenuhan kebutuhan hidup, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas kehidupan. Untuk mewujudkan hal ini butuh proses yang panjang dan penjadian yang tiada akhir (*the endless journey*). Hal inilah yang mendasari bangsa Indonesia menerapkan belajar sepanjang hayat yang digagas oleh Edgar Faure. Bentuk penerapannya adalah dengan membuka kesempatan kepada semua warga negaranya untuk belajar dan berkembang melalui pendidikan.

Belajar sepanjang hayat membuat masyarakat memiliki pandangan yang luas mengenai belajar, bahwa belajar tidaklah hanya ada di bangku sekolah, namun secara garis besar pendidikan dapat diperoleh melalui ketiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Hal demikian juga telah disadari dalam membangun sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Pendidikan diselenggarakan atas jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Ketiga jalur pendidikan itu diselenggarakan untuk melayani semua warga negara berdasarkan pada prinsip pendidikan sepanjang hayat menuju terbentuknya manusia Indonesia yang berkualitas.

Pendidikan Nasional Indonesia berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Pasal 3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional).

Bahkan jauh sebelum itu, Ki Hajar Dewantara (1956) telah memikirkan bahwa ada tiga tempat berlangsungnya pendidikan yang disebut sebagai Tri Pusat Pendidikan, yaitu alam keluarga, alam sekolah, dan alam kepemudaan. Pusat pendidikan di alam kepemudaan itulah hakekat dari pengakuan adanya peristiwa pendidikan secara informal dan nonformal di masyarakat.

Pada prinsipnya pilar pendidikan alam kepemudaan (menurut Ki Hajar Dewantara), jalur pendidikan luar sekolah (menurut UU No. 2 Tahun 1989), dan jalur pendidikan nonformal (menurut UU Nomor 20 Tahun 2003) menunjuk pada substansi yang sama yaitu kebutuhan bangsa Indonesia akan layanan pendidikan sistematis di luar sistem persekolahan. Setelah sekian lama dibangun dan dimodifikasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan perkembangan lokal, regional, nasional, dan internasional; maka sistem pendidikan nasional dari sisi kelembagaan dapat digambarkan sebagai bagan berikut.

U M U R	SEKOLAH					LUAR SEKOLAH				
	Ta- hun	Jenjang	Satuan			Prodi	Satuan-antuan dan Forum Belajar			
...	...	Pendidikan Berkelanjutan bagi Orang Dewasa melalui:								
...	...	Pendi- dikan	U	S		P	S3	Penataran/Up- grading		
27	21		l	e		i	Sp	BERBAGAI FORUM BELAJAR DAN PEM-		
26	20		v	k	I	i	2	Kursus dinas Pelatihan		
25	19		Tinggi	e	o	A	S2	BELAJARA N PLS	Diklas	
24	18	Tinggi	r	T	s	k	T	Sp	Kursus	
23	17		a	i	t	a	e	1	Pondok pesantren	
22	16		i	b	i	d	k		D4	Kelompok belajar (kejar, klompen- cupir, KSM, Pokmas, dsb.)
21	15		t	g	t	e	n	S1	D3	Universi
20	14		a	g	u	o	i		D2	tas Ter
19	13		s	i	t	i	k		D1	buka
18	12		Pendi- dikan	S	S	M	S	SMU	LB	Program
17	11	Menengah	M	M	A/ K	M			Paket C	Les Privat
16	10		U	K	K	Kd				Home schooling
15	9		Pendidik- an Dasar	SL		MTs		SM	PL	B
14	8	TP							Paket B-	
13	7					S			Program	
12	6					L			Pola Pembelajaran alamiah lainnya	
11	5	SD		MI		B	SD		- kelompok hobby - paclepokan/sanggar -dsb	
10	4						LB		Program	
9	3								Paket A	
8	2	Pendidika n Pra-sekolah	OA							KB,
5			OB							TPA& SKS
4			PENDIDIKAN KELUARGA, PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PIF							
3		LAINNYA								
2										
1										

Peta Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia Tahun 2012 (Dimodifikasi dari Supriadi, 1997 dan Mestoko, 1986)

## 2. Pelatihan sebagai Layanan Pendidikan Luar Sekolah untuk Masyarakat

Tanpa kita sadari dalam perjalanan hidup kita, tanpa terasa pastinya kita mengalami proses pendidikan. Sebagian besar dari kita mengenyam pendidikanya di jalur pendidikan formal, banyak pula

yang mendapatkan pendidikan dari jalur non formal, dan ada juga yang mendapatkan pendidikannya melalui jalur pendidikan non formal, ragam layanan pendidikan yang ditawarkan pendidikan non formal sangatlah beraneka ragam, beberapa diantaranya adalah program layanan pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan (paket A,B maupun C), penyuluhan, magang, pelatihan dan masih banyak program lainnya. Dalam program pelatihan sangatlah fleksibel, yang saya maksudkan fleksibel disini bisa dalam bentuk sasaran, usia, peserta, rentang waktu pelatihan itu diselenggarakan.

Pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan suasana belajar. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, "pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara".

Pelatihan (training) menurut Kamil, (2007:3) merupakan "pemberian pelajaran dan praktik, menjadikan berkembang ke arah yang dikehendaki, baik dalam persiapan dan praktik" sedangkan menurut Irianto (2001:5) merupakan "suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh keterampilan (skill) dan pengetahuan". Definisi ini dikaitkan dengan input (peserta belajar), yaitu orang dewasa. Apabila dikaitkan dengan tujuan akhir pelatihan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, maka hal sejalan dengan pendapat dari Flippo (dalam Moekijat.1985:7) yang menyatakan bahwa "pelatihan adalah berhubungan dengan menambah pengetahuan dan kecakapan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu".

Para ahli diatas berpendapat bahwa pelatihan atau *training* adalah suatu kegiatan yang berguna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sementara itu, Nadler (dalam Atmosoeparto, 2000:41) menjelaskan konsep tentang pelatihan sebagai berikut: "(a) Pelatihan merupakan suatu kegiatan belajar yang jangkauannya lebih spesifik, (b) memberikan penekanan pada keterampilan (*skill*), (c) berorientasi pada suatu topik tertentu, (d) para pengajar atau pembimbing belajarnya menggunakan metode kelas dan berperan pasif, (e) pembimbing belajarnya biasa disebut pelatih atau trainer serta (f) prespektif waktunya sekarang dan jangka pendek. Sejalan dengan pendapat Nadler (dalam Atmosoeparto, 2004:41), Hardjana (2001:15) menjelaskan sebagai berikut.

Pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja para pekerja dalam pekerjaan yang diserahkan kepada mereka. Pelatihan berlangsung dalam jangka waktu pendek antara dua sampai tiga hari hingga dua sampai tiga bulan. Pelatihan dilakukan secara sistematis, menurut prosedur yang terbukti berhasil dengan metode yang sudah baku dan sesuai serta dijalankan secara sungguh-sungguh dan teratur. pelatihan berkaitan dengan pekerjaan yang ditangani. Pelatihan bertujuan untuk membantu pekerja dalam ; (a) mempelajari dan mendapatkan kecakapan-kecakapan baru, (b) mempertahankan dan meningkatkan kecakapan-kecakapan yang sudah dikuasai, (b) mendorong pekerja agar mau belajar dan berkembang, (d) mempraktekkan di tempat kerja hal-hal yang sudah dipelajari dan diperoleh dalam pelatihan, (e) mengembangkan pribadi pekerja, (f) mengembangkan efektifitas lembaga, (g) memberi motivasi kepada pekerja untuk terus belajar dan berkembang.

Berbagai pendapat tersebut dapat dipadukan, jika bertolak dari aspek peserta belajarnya yang merupakan orang dewasa. Maka, pelatihan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membantu orang dewasa dalam memperoleh atau menambah pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan untuk melakukan pekerjaan tertentu. UNESCO (dalam Lunardi, 1989:1) menyatakan bahwa “latihan (latihan kerja) merupakan salah satu bentuk kegiatan pendidikan orang dewasa, disamping bentuk lain yaitu pendidikan yang melanjutkan maupun yang menggantikan pendidikan di sekolah-sekolah formal sebagaimana tertulis dalam pengertian pendidikan orang dewasa”.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 13 disebutkan bahwa “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”. Moedzakir (2010:2) menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah “segala bentuk pendidikan yang berlangsung di luar sistem persekolahan”. Dengan demikian salah satu jalur pendidikan yang dapat memperkaya ilmu adalah pendidikan luar sekolah.

Pelatihan merupakan satuan pendidikan luar sekolah. Pendapat tersebut ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 yang berbunyi “pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Salah satu satuan pendidikannya adalah berupa

lembaga pelatihan. Pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri dan mengembangkan profesi”. Dari ulasan tersebut maka dapat diartikan bahwa pelatihan merupakan salah satu program pendidikan luar sekolah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta pelatihan.

### **3. Peran Pelatihan Dalam Penyiapan Tenaga Pendamping Desa Yang Kompeten**

Sesuai amanat UU Desa Nomor 6 Tahun 2014, maka dalam rangka implementasinya terbitlah PP Nomor 60/2014, disana muncul sebuah posisi sebuah tenaga kerja yang disebut Pendamping Desa. Posisi ini nantinya akan berada pada tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan pada tingkat provinsi. Sebelumnya mungkin kita pernah dengar istilah Fasilitator yang dipakai pada zaman program PNPM-MPd (2007-2014). Untuk semakin memantapkan pemahaman tentang Pendamping Desa, Kementerian Desa menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 03 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa. Disana dipaparkan jelas bahwa Pendamping Desa bukan pengelola proyek pembangunan di desa. Kerja Pendampingan Desa difokuskan pada upaya memberdayakan masyarakat desa melalui proses belajar sosial. Dengan demikian, pendamping desa tidak dibebani dengan tugas-tugas pengelolaan administrasi keuangan dan pembangunan desa yang berdasarkan UU Desa sudah menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah desa. Pendampingan desa ialah bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa. Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Ruang Lingkup pendampingan desa meliputi Pendampingan masyarakat Desa dilaksanakan secara berjenjang untuk memberdayakan dan memperkuat Desa. Pendampingan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan Pemerintah Desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia.

### C. SIMPULAN

Keberhasilan program pendampingan desa merupakan tujuan negara dalam pengembangannya dan pula impian setiap masyarakat desa. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan program pendampingan desa, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Namun namun tidak semua pendamping desa memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pendampingan desa, hal ini menimbulkan permasalahan yang sangat harus segera terselesaikan. Menurut pandangan saya program layanan pelatihan calon pendamping desa merupakan alternatif pemecahan permasalahan minimnya kompetensi pendamping desa. Dalam kegiatan pelatihan memiliki banyak keuntungan, diantaranya adalah waktu pelatihan yang relatif singkat bila dibandingkan dengan pendidikan formal, materi yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan atau tuntutan standar kompetensi pendamping desa.

### DAFTAR RUJUKAN

- Atmosoeparto, K. 2004. Menuju SDM Berdaya dengan Kepemimpinan Efektif dan Manajemen Efisien. Jakarta: GRAMEDIA.
- Hardjana, Agus M. 2001. Training SDM yang Efektif. Yogyakarta: Kanisius (Anggota IKAPI)
- Irianto, Jusuf. 2001. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen pelatihan dari Analisis Kebutuhan sampai Evaluasi Program Pelatihan. Surabaya: Penerbit Insan Cendekia (Anggota IKAPI)
- Kamil, Mustofa. 2007. Model Pendidikan Dan Pelatihan (Konsep Dan Aplikasi). Bandung: Alfabeta.
- Lunandi, GA. 1989. Pendidikan Orang Dewasa (sebuah uraian praktis untuk pembimbing, penatar, pelatih dan penyuluh lapangan). Jakarta: GRAMEDIA
- Mestoko, dkk. 1986. Pendidikan Nasional dari Jaman ke Jaman. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moedzakir, M Djauzi-a. 2010. Desain Dan Model Penelitian Kualitatif; Biografi, Fenomenologi, Teori Grounded, Etnografi, Dan Studi Kasus. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.
- Moedzakir, M Djauzi-b. 2010. Metode Pembelajaran Untuk Program-Program Pendidikan Luar Sekolah. Malang: UM PRESS
- Moekijat, 1985. Latihan dan Pengembangan Pegawai. Bandung: Alumni

## PENDIDIKAN NONFORMAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN

Iswandi

Dosen STKIP YPM Bangko

### Abstrak

*Non-formal education is education that is designed to membelajarkan citizens to learn in order to have the kind of skills or knowledge and experience are implemented outside the formal education (schooling). The problems encountered in the development of society and its relationship to education contained in the countryside is the development of society tends to be static. A large part of the community members are farmers who are still bound by the traditions and customs that tend to be less supportive of development. Many people who suffer from poverty and backwardness in education. One of the targets to be achieved by non-formal education in community development is the growth of the public eager to learn which leads to a changed society from a dream state or quasi into a society that has planing.*

### A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia terbagi atas berbagai pulau dan wilayah, terdapat ratusan pulau mulai dari Sabang sampai Merauke, mulai dari kabupaten, kecamatan, juga kelurahan ataupun desa. Suryana (2009) mengungkapkan, desa merupakan salah satu bagian terkecil dari rangkaian struktural sebuah negara. Desa dari dulu kala (mungkin hingga saat ini) selalu identik dengan ketertinggalan, kotor, udik dan hal-hal lain yang sejenisnya. Dan desapun senantiasa selalu tertinggal dari pembangunan-pembangunan nasional di Indonesia. Baik pembangunan sumber daya manusia sebagai aset yang terbesar.

Permasalahan dalam pembangunan pedesaan selain dari masalah infrastruktur, yang tidak kalah penting adalah permasalahan sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia merupakan aset yang sangat berharga dan sangat vital bagi setiap bangsa. Seperti kita

ketahui, bahwa rendahnya SDM kita tidak terlepas dari rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah.

Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal, misalnya ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang melilit kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan oleh angka putus sekolah, hal yang sama juga disebabkan oleh faktor ekonomi.

Salah satu syarat untuk menjadikan SDM berkualitas adalah mendapatkan pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keterampilan dan keahlian. Ketika menyadari bahwa masih rendahnya SDM, tentu satu sikap yang harus dimiliki adalah keyakinan dan optimis untuk dapat mengangkat SDM tersebut. Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui pendidikan nonformal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah (PLS).

Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian pemerintah melalui semangat otonomi daerah adalah mengerakan program pendidikan nonformal tersebut, karena UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lugas dan tegas menyebutkan bahwa nonformal (PLS) akan terus ditumbuhkembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggungjawab kelangsungan pendidikan non formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Pendidikan Nonformal**

Pendidikan nonformal kata lain dari pendidikan luar sekolah sebenarnya bukanlah barang baru dalam khasanah budaya dan peradaban manusia. Pendidikan luar sekolah telah hidup dan menyatu di dalam kehidupan setiap masyarakat jauh sebelum muncul dan memasyarakatnya sistem persekolahan. Pendidikan nonformal mempunyai bentuk dan pelaksanaan yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan persekolahan. Pendidikan nonformal timbul dari konsep pendidikan seumur hidup dimana kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahan/pendidikan formal saja. Pendidikan nonformal pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu.

Agar Masyarakat memiliki kemampuan mengembangkan potensinya dalam rangka pemberdayaan masyarakat maka peran pendid-

dikan nonformal sangat strategis. Pendidikan Luar sekolah, atau pendidikan nonformal adalah setiap kegiatan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapam, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu didalam mencapai tujuan belajarnya (Coombs, dalam Sudjana, 2000: 23).

*Suzanna Kindervatter* mengemukakan definisi pendidikan luar sekolah sebagai suatu metoda penerapan kebutuhan, minat orang dewasa dan pemuda putus sekolah di negara berkembang, membantu dan memotivasi mereka untuk mendapatkan keterampilan guna menyesuaikan pola tingkah laku dan aktivitas yang akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan standar hidup (dalam Sudjana, 2000). Dia menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah sebagai "*empowering process*". *Empowering process* adalah pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada seseorang atau kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomi dan politik sehingga dapat memperbaiki kedudukannya dalam masyarakat.

Tujuan pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan (belajar) warga masyarakat dimana kebutuhan pendidikan sangat beragam, dengan memberikan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas kepribadian, meningkatkan kesejahteraan hidup, membangun kehidupan sosial yang dinamis, dan terwujudnya kehidupan berpolitik yang partisipatoris.

Pendidikan nonformal sebagai lembaga pendidikan masyarakat, dapat diklasifikasi menjadi tiga jenis program yaitu *developmental*, *institutional*, dan *informational* (Boyle, dalam Mundzir, 2010). Masing-masing akan dijelaskan berikut.

- a. Program Pengembangan (*developmental* program) adalah upaya PNF yang dimaksudkan untuk membantu suatu masyarakat atau kelompok sosial dalam mengenali dan memecahkan masalah yang mereka hadapi. Program *developmental* adalah program-program pengembangan atau pemberdayaan, program yang ditujukan kepada masyarakat atau komunitas untuk memberdayakan potensi mereka dalam mengatasi masalah kehidupan bersama yang sedang mereka hadapi.
- b. Program *Institutional* adalah program-program yang diselenggarakan secara melembaga (teratur, sistematis, dan agak ketat)

yang ditujukan kepada peserta didik secara individual untuk menguasai suatu keterampilan, kemampuan atau kompetensi tertentu. Program institutional bertujuan mengembangkan atau meningkatkan kinerja, kemampuan, atau kompetensi peserta didik. Fokusnya adalah membawa peserta didik ke penguasaan konten suatu pengetahuan, keterampilan atau sikap tertentu dari suatu atau beberapa disiplin ilmu demi perkembangan kemampuannya mendatang.

- c. Program *informational* adalah program-program yang bertujuan menyampaikan atau menyebarkan informasi baru guna mengembangkan wawasan, pengetahuan, atau kesadaran peserta didik. Program informational merupakan program penyampaian dan pertukaran informasi antara pendidik dan peserta didik. Tujuannya adalah tersampainya suatu informasi tertentu terutama informasi baru yang sangat esensial atau dibutuhkan oleh peserta didik.

## 2. Pembangunan Masyarakat Pedesaan

Pengembangan masyarakat diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip: keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri, dan kaderisasi. Keseluruhan prinsip menjelaskan bahwa strategi pengembangan masyarakat sebagai upaya terencana dari masyarakat yang kemudian dibantu oleh pemerintah sehingga dalam program atau kegiatan pengembangan itu terdapat keterpaduan antara kegiatan masyarakat dan program instansi pemerintah. Kegiatan pengembangan masyarakat juga tidak diharapkan untuk sekali dan tuntas, melainkan merupakan upaya yang berkelanjutan sehingga suatu kegiatan akan menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang berikutnya, yang berfungsi sebagai pendorong agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan yang mereka miliki. Lebih lanjut, untuk memperluas kegiatan pengembangan masyarakat yang sesuai dengan meningkatnya kepentingan dan kebutuhan masyarakat maka kader pembangunan yang berasal dari masyarakat itu sendiri perlu disiapkan dan ditingkatkan kuantitas serta kualitasnya.

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengembangan masyarakat pedesaan merupakan bagian terbesar dari permasalahan penduduk dunia. Laporan PBB (1953) tentang situasi dunia, hasil *survey* mengenai program-program pengembangan masyarakat serta ekonomi dunia, mengemukakan bahwa penghuni dunia terdiri atas tiga sampai lima juta komunitas pedesaan, yaitu kelompok-kelompok yang memili-

ki perasaan keakraban dan kebersamaan. Bentuk komunitas tersebut bervariasi yang mencakup kelompok masyarakat yang masih hidup berpindah-pindah, kelompok yang kehidupannya seperti suku-suku terasing, dan masyarakat petani di pedesaan. Delapan puluh persen dari jumlah seluruh komunitas tersebut tersebar di negara-negara yang sedang berkembang.

Sejak tahun enam puluhan, negara-negara berkembang memandang masyarakat pedesaan sebagai masalah yang amat penting dalam pembangunan nasional di negara masing-masing. Di antara faktor penyebabnya adalah tantangan dari luar yang berupa: (a) perubahan ekonomi, sosial dan teknologi dunia yang kurang memberi manfaat bagi masyarakat pedesaan, bahkan sering menimbulkan kegoncangan ekonomi dan melemahkan integritas sosial dan budaya masyarakat pedesaan; (b) rangsangan melalui media massa yang menimbulkan keinginan terhadap barang-barang konsumsi dan kebutuhan sosial lainnya yang tidak diimbangi oleh kemampuan masyarakat untuk memiliki, memelihara, dan memanfaatkannya.

Selain tantangan dari luar terdapat juga tantangan dari dalam yang berupa: (a) tekanan pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan luas lahan yang tersedia; (b) keinginan memproduksi bahan-bahan yang dapat dijual, disamping untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi keterampilan memproduksi dan memasarkannya masih rendah; dan (c) dorongan urbanisasi untuk memperoleh pekerjaan, pendidikan, atau kebutuhan lainnya di kota. Tantangan-tantangan tersebut sering menggoyahkan ikatan kekeluargaan dan kehidupan tradisional masyarakat pedesaan, menimbulkan sikap masa bodoh atau sikap menolak tanpa dasar, bahkan dapat membangkitkan harapan dan tuntutan luar biasa yang tidak didasarkan atas kemampuan masyarakat itu sendiri.

Kegiatan pembangunan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya pembangunan pendidikan, sangat diperlukan oleh dan untuk masyarakat pedesaan. Kebutuhan untuk membangun ini didasarkan antara lain atas adanya jurang perbedaan antara perkembangan daerah pedesaan dengan daerah perkotaan. Di daerah pedesaan, perkembangan masyarakat cenderung masih statis. Sebagian besar anggota masyarakat bermata pencaharian sebagai petani yang masih terikat oleh tradisi dan adat yang cenderung kurang mendukung pembangunan. Banyak warga masyarakat yang menderita kemiskinan serta keterbelakangan di bidang pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan

banyaknya penduduk yang tidak berkesempatan memasuki dunia pendidikan sekolah, atau kebanyakan masih dalam tingkat sekolah dasar. Di daerah pedesaan juga masih banyak penduduk yang buta aksara.

Sekitar 70-80 persen penduduk dunia, bermukim di pedesaan. Tenaga terdidik masih sangat rendah, dikarenakan sebagian besar penduduk berpendidikan rendah, dan masih banyak yang buta huruf. Botkin dalam Sudjana (1991:199) mengemukakan bahwa buta huruf merupakan Dunia Kelima, dan merupakan peringkat dunia kelima setelah peringkat Dunia Keempat yaitu negara-negara miskin.

Sistem dan program pendidikan sekolah belum menunjang tuntutan pembangunan masyarakat pedesaan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain ialah kelangkaan sumber-sumber, kurangnya relevansi, dan kebijakan pembangunan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dapat dijelaskan bahwa pembangunan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, melandasi kehadiran dan perkembangan sub sistem pendidikan nonformal untuk berperan dalam pengembangan sumber daya manusia sebagai perilaku utama pengembangan masyarakat pedesaan.

### **3. Sasaran Pendidikan Nonformal dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan**

Salah satu sasaran yang ingin dicapai oleh program pendidikan nonformal dalam pembangunan masyarakat adalah tumbuhnya masyarakat gemar belajar yang mengarahkan pada masyarakat yang berubah dari keadaan mimpi atau semu menjadi masyarakat yang memiliki *planing*. Kehidupan semu digambarkan oleh Freire (1972) dengan kehidupan yang merasa tertekan, masa bodoh, tertekan, dalam derita hidupnya, dan fatal. Masyarakat berencana (*planning society*), menurut Graham (1975) dalam Sudjana (1991:212), adalah masyarakat yang sangat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan terhadap kemungkinan-kemungkinan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Sebagian besar warga masyarakat mampu berpikir kreatif, bersikap inovatif, dan memiliki tanggung jawab yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Ditinjau dari proses belajar, masyarakat gemar belajar memiliki beberapa ciri sebagai berikut.

- a. Sebagian besar atau seluruh warga masyarakat gemar mencari informasi yang berhubungan dengan kepentingan hidupnya.

Informasi yang mereka peroleh dapat dari berbagai sumber, seperti teman, media televisi, serta dapat dengan melihat obyek dan peristiwa yang berkaitan dengan kemajuan.

- b. Gemar melakukan penggalian informasi baru melalui kegiatan membaca sebagai berbagai sumber buku, dan media cetak.
- c. Gemar menulis dan menyampaikan informasi. Hal tersebut menandakan bahwa mereka menghasilkan sesuatu, yang baru mereka dapatkan dari penelitian, pengalaman dalam pekerjaan ataupun kegiatan yang lainnya.
- d. Gemar melakukan kegiatan belajar secara berlanjut atas dasar bahwa belajar tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya. Mereka bukan sekedar mempelajari, tapi juga ditujukan untuk peningkatan kualitas kehidupan diri dan masyarakatnya.

#### **4. Implikasi Pendidikan Nonformal dalam Pembangunan Masyarakat Pedesaan**

Dengan menggunakan kata pembangunan, kegiatan ini menempatkan masyarakat sebagai subyek yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan mengembangkan diri. Pembangunan dalam perspektif pendidikan nonformal mengandung beberapa tujuan antara lain:

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya mereka untuk membebaskan diri dari kebodohan, dari upah kerja yang rendah, dari ketidakadilan dan kekerasan dapat diatasi melalui pendidikan keaksaraan, latihan keterampilan, penyuluhan tentang kesadaran hukum dan sebagainya.
- b. Membantu masyarakat untuk bisa hidup berorganisasi secara bersama-sama agar dapat menjajagi berbagai peluang peningkatan akses terhadap pembangunan.
- c. Secara bersama dengan berbagai unsur mengidentifikasi kebutuhan dan mendayagunakan prasarana sosial dalam memecahkan masalah sosial ekonomi.

Sebuah model pengembangan masyarakat yang menekankan pada partisipasi penuh seluruh warga masyarakat, menggambarkan adanya suatu proses yang dirancang untuk menciptakan kemajuan kondisi ekonomi dan sosial dengan partisipasi aktif dan sejauh mungkin menimbulkan prakarsa masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini program pendidikan nonformal merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilakukan oleh untuk dan dalam masyarakat guna meningkatkan

kualitas hidup dan kehidupannya. Untuk mendukung keberhasilan program tersebut prinsip dasar pengenalan ide-ide baru kepada masyarakat bertujuan untuk: (a) membangkitkan kemampuan manusia baik individu/kelompok (*capacity*); (b) mendorong tumbuhnya keber-samaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*); (c) keper-cayaan untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada (kesempatan, kebebasan memilih dan kekuasaan untuk memutuskan sesuatu (*empowerment*); (d) membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*); (e) mengurangi ketergantungan dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati (*interdependence*).

Upaya pembangunan ini bertujuan untuk terjadinya perubahan kualitas kehidupan manusia dan kualitas wilayahnya atau lingkungannya ke arah yang lebih baik. Agar pembangunan itu berhasil, maka pembangunan haruslah menjadi jawaban yang wajar terhadap kebutuhan perorangan, masyarakat dan pemerintah baik di tingkat desa, daerah ataupun di tingkat nasional. Dengan demikian maka isi, kegiatan dan tujuan pengembangan masyarakat akan erat kaitannya dengan pembangunan nasional.

Pengembangan masyarakat ialah proses yang dilakukan oleh masyarakat dengan usaha untuk pertama-tama mendiskusikan dan menentukan kebutuhan atau keinginan mereka, kemudian merencanakan dan melaksanakan secara bersama usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka itu. Dalam proses tersebut maka keterlibatan masyarakat meliputi:

- 1) Identifikasi masalah, kebutuhan, keinginan dan potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian mereka mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan mereka, menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan itu berdasarkan tingkat keperluan, kepentingan dan mendesak tidaknya usaha pemenuhan kebutuhan. Dalam identifikasi kebutuhan itu didiskusikan pula kebutuhan perorangan, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Pemerintah di daerah itu.
- 2) Mereka menyusun urutan prioritas kebutuhan itu sesuai dengan sumber dan potensi yang terdapat di daerah mereka. Mereka menjajaki kemungkinan-kemungkinan usaha atau kegiatan yang dapat mereka lakukan, untuk memenuhi kebutuhan itu. Apakah sesuai dengan sumber sumber yang ada dan dengan memper-timbangkan kemungkinan-kemungkinan hambatan yang akan diha-

dapi dalam kegiatan itu. Selanjutnya, mereka menentukan pilihan kegiatan atau usaha yang akan dilakukan bersama.

- 3) Membuat rencana kegiatan, yaitu program yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki di kalangan masyarakat. Rasa kepemilikan bersama itu menjadi prasyarat timbulnya rasa tanggung jawab bersama untuk keberhasilan usaha itu.
- 4) Melaksanakan kegiatan. Dalam tahap ini motivasi perlu dilakukan. Disamping itu, komunikasi antara pelaksana terus dibina. Dalam tahap pelaksanaan ini akan terdapat masalah yang menuntut pemecahan. Pemecahan masalah itu dilakukan setelah dirundingkan bersama oleh masyarakat dan para pelaksana.
- 5) Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan, terhadap hasil kegiatan dan terhadap pengaruh kegiatan itu. Untuk kegiatan yang berkelanjutan, hasil evaluasi itu dijadikan salah satu masukan untuk tindak lanjut kegiatan atau untuk bahan penyusunan program kegiatan baru. Semua tahapan kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif.

Berdasarkan lima pendekatan diatas, jika dipahami betul oleh para *agent* pembaharu (*social change*), termasuk di dalamnya tenaga kependidikan pendidikan nonformal, akan memberikan kemudahan dalam menganalisis, mengembangkan dan melaksanakan program-program pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah yang sesuai serta dibutuhkan warga masyarakat. Artinya, program pendidikan yang dilaksanakan menyentuh dan mengangkat warga belajar/masyarakat menjadi lebih baik dalam kehidupannya yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan (ekonomi), kesadaran akan lingkungan sosialnya atau warga belajar/masyarakat yang mengerti dan memahami bagaimana membangun dirinya (memberdayakan dirinya).

##### **5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Masyarakat**

Pengembangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, bila dibandingkan dengan daerah perkotaan jelas menunjukkan suatu ketimpangan, sehingga memerlukan upaya yang lebih keras untuk mencoba lebih seimbang di antara keduanya. Pengembangan masyarakat, pengembangan sosial atau pembangunan masyarakat tersebut menunjukkan suatu upaya yang disengaja dan diorganisasi untuk memajukan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya yang dilakukan

baik daerah pedesaan atau daerah perkotaan. Dengan kata lain upaya yang disengaja dan diorganisasi untuk memajukan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya tersebut mengandung makna pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat yang dulu dikenal dengan istilah pengembangan masyarakat (*community development*) atau pembangunan masyarakat desa (*rural development*) yang sarannya cenderung ke arah fisik. Kegiatan tersebut saat ini, mengacu ke istilah yang baru, yaitu *community empowerment*. Secara konseptual, aktivitas ini sejalan dengan *developmental* yang diketengahkan oleh Boyle (1981), dimana yang menjadi sasarannya adalah komunitas dan yang menjadi inti kegiatannya adalah membantu untuk mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi bersama. Cara yang ditempuh dalam hal ini adalah mengembangkan potensi, kapasitas, atau kemampuan komunitas yang bersangkutan, baik kapasitas individu, kelompok, ataupun kelembagaannya, sedangkan target keluarannya adalah meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah tersebut.

Oleh karena itu, yang diberdayakan adalah kapasitas komunitas, termasuk potensi individu, organisasi, dan lingkungannya. Pemberdayaan dilakukan dalam bentuk pembimbingan ke arah pemecahan masalah dan bukan dalam bentuk pemberian solusi siap pakai, atau "hidangan siap santap". Komunitas digugah kesadarannya terhadap masalah yang sedang mereka hadapi dan dampaknya bila masalah tersebut tidak segera diatasi, serta potensi yang mereka miliki atau fasilitas yang bisa dimanfaatkan, dimotivasi untuk bersedia dan berupaya mengatasi masalah tersebut, dibantu mengidentifikasi potensi atau sumber daya yang ada pada diri mereka dan di lingkungannya, dan dibimbing ke arah penemuan solusi yang tepat, serta diberi pendampingan dalam proses penuntasan masalahnya.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Boyle, P. G. (1981). *Planning better programs*. USA: McGraw-Hill, Inc.
- Coombs, P.H, & Manzoor Ahmed, (1974), *Attacking Rural Poverty, How Nonformal Education Can Help*, London: The John Hopkins University Press
- Kamil Mustofa, 2009. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta
- Mundzir, 2010, *Pendidikan Nonformal Dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat DesaHutan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sosiologi Pendidikan pada Fakultas Ilmu Pendidikan

SEMINAR NASIONAL  
 JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
 "KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"  
 Kamis/ 6 Oktober 2016

(FIP) Disampaikan dalam Sidang Terbuka Senat Universitas Negeri Malang (UM) Tanggal 30 September 2010.

Sudjana, H.D. 1991. *Pendidikan Luar Sekolah Wawasan Sejarah Perkembangan Falsafah dan Teori Pendukung Asas*. Bandung: Penerbit Nusantara Press.

-----, 2000. *Pendidikan Luar Sekolah, Wawasan, Sejarah Perkembangan, Falsafah, Teori Pendukung, Asas*. Bandung: Falah Production.

Suryana, Deni. 2009. *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Online), (<http://Badranaya/2009/12/23/Pembangunan-Masyarakat-Desa>, diakses 26 Februari 2012)

## PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI MASYARAKAT DESA

Elfi Rahmi

Dosen Fakultas Pertanian  
Universitas Andalas

### A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses perubahan dan gerak pada sebuah perkembangan kehidupan manusia. Pengembangan potensi dan dinamika kehidupan manusia ditujukan agar menjadi dinamis dan mandiri. Pembangunan harus ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam menghadapi berbagai perubahan, meningkatkan produktifitas, memenuhi kebutuhan, menganalisa dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pembangunan terhadap manusia sebagai sumber daya utama harus menjadi skala prioritas.

Rakyat Indonesia sebagian besar hidup di pedesaan, keadaan yang alamiah dan apa adanya, menggantungkan hidup pada pertanian. Karena itu sektor pertanian merupakan sumber penghidupan bagi kebanyakan masyarakat di pedesaan sebagai mata pencaharian pokok, posisi sektor pertanian menjadi sangat strategis dalam struktur ekonomi desa maupun nasional. Tantangan pertanian ke depan adalah menuntut kesiapan pengembangan produk pertanian dalam menghadapi persaingan terbuka di pasar internasional agar tidak kalah bersaing dengan produk negara lain. Karena itu pembangunan di pedesaan di arahkan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi petani sebagai sumber daya manusia yang tangguh yang sekaligus menjadi pelaku utama pembangunan pertanian.

Petani sebagai pelaku utama pembangunan di pedesaan di perlukan motivasi tinggi, kreativitas, mampu mengambil keputusan terhadap sebuah inovasi, mampu menganalisa dan menyelesaikan masalah secara mandiri, serta membuka diri untuk bekerjasama dengan kelompok tani sebagai wadah untuk melakukan difusi inovasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya perberdayaan terhadap potensi-potensi yang ada dan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat, dari kondisi kurang berdaya menjadi

lebih berdaya dan menghasilkan karya nyata, dan upaya memperkuat kemampuan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam keseluruhan proses pembangunan di pedesaan. Keberhasilan pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh sikap sumber daya manusia di dalamnya terhadap tujuan dan pesan-pesan pembangunan. Akses terhadap pesan-pesan pembangunan sangat mudah diperoleh karena kemajuan teknologi dan media komunikasi yang telah berkembang pesat saat ini sampai ke pelosok-pelosok desa.

Penyuluhan merupakan proses pemberdayaan masyarakat (*Community Empowerment*). Intinya penyuluhan merupakan memberdayakan masyarakat. Memberdayakan berarti memberi daya kepada yang tidak berdaya dan atau mengembangkan daya yang sudah dimiliki menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat bagi masyarakat yang bersangkutan. Dalam konsep pemahaman tersebut terkandung pemahaman bahwa pemberdayaan di arahkan guna terwujudnya masyarakat madani (beradab) dan mandiri dalam pengertian dapat mengambil keputusan (terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri (Margono Slamet, 2000).

Pemberdayaan pada penyuluhan pertanian merupakan upaya memperbaiki individu maupun kelompok dalam proses pengambilan keputusan dan tanggung jawab secara partisipatif sehingga diharapkan terwujudnya motivasi, kesadaran, semangat dan tumbuhnya kinerja yang baik dalam mencapai tujuan pembangunan.

Penyampaian pesan pembangunan melalui proses komunikasi pembangunan suatu upaya untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan (inovasi) yang menghendaki terjadinya respon masyarakat dalam bentuk munculnya partisipasi aktif untuk memahami, melaksanakan dan menyebarkan pesan-pesan pembangunan tersebut. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa (petani), baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun terjadinya perubahan sikap menjadi lebih baik. Kegiatan penyuluhan harus dilakukan dengan menjalin interaksi yang dinamis antara penyuluh dan petani. Kesinambungan kegiatannya sangat diperlukan karena permasalahan petani selalu ada dari waktu ke waktu dan di perlukan upaya untuk mengatasinya. Pertanyaannya, bagaimanakah penyuluhan mampu memberdayakan usaha tani masyarakat desa dengan memanfaatkan komunikasi inovasi?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Peran dan Tugas Penyuluhan

Era pasar bebas saat ini sudah memperlihatkan berbagai produk dan tenaga kerja asing yang telah memasuki berbagai wilayah di Indonesia mulai dari perkotaan sampai ke pedesaan. Sangat mudah mendapatkan produk-produk yang mereknya 'made in luar'. Mulai dari jenis produk makanan, pakaian, alat komunikasi, alat transportasi dan sebagainya. Dilihat dari kualitas dan harganya sangat kompetitif, murah dan terjangkau. Khusus di pedesaan banyak ditemukan makanan dan jajanan instan yang di kemas sangat menarik, sehingga dapat mengalahkan industri makanan dan jajanan lokal. Sebenarnya persaingan usaha sudah di depan mata, tinggal bagaimana pelaku usaha menyikapinya. Kompetitor tidak selalu berdampak buruk pada sebuah usaha, tetapi sebaliknya bisa menjadi pendorong untuk semakin meningkatkan kualitas kinerja, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Ini saatnya usaha lokal membuka mata dan segera belajar.

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi, usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelesetarian fungsi lingkungan hidup. (UU No. 16 tentang SP3K pasal 1 ayat 2). Penyelenggaraan penyuluhan merupakan wadah pembelajaran bagi pelaku usaha di pedesaan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan upaya pengembangan diri, mengembangkan kesadaran masyarakat atas potensi diri dalam rangka memenuhi kebutuhan terhadap pembangunan.

Toto Mardikanto (2009), menyatakan bahwa peran dan tugas penyuluhan dalam proses pemberdayaan masyarakat yaitu untuk meningkatkan kapasitas individu melalui:

- a. Edukasi, yaitu memfasilitasi proses belajar yang dilakukan para penerima manfaat penyuluhan (*benefit-carries*) dan atau *stakeholders* pembangunan yang lainnya.
- b. Diseminasi informasi/inovasi, yaitu: penyebar luasan informasi/inovasi dari sumber informasi dan atau penggunaanya.
- c. Fasilitasi atau pendampingan, yaitu melayani kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh *client*.

- d. Konsultasi, yaitu membantu memecahkan masalah atau sekedar memberikan alternatif pemecahan masalah.
- e. Supervisi atau pembinaan.
- f. Pemantauan, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan selama proses kegiatan sedang berlangsung.
- g. Evaluasi, yaitu kegiatan pengukuran yang dilakukan sebelum (formatif), selama (*on-going*, pemantauan), setelah kegiatan selesai dilakukan (sumatif, *ex-post*).

Tugas dan peranan penyuluhan cukup kompleks untuk mengantarkan masyarakat terutama di pedesaan untuk melakukan perubahan yang berbekal sebuah keahlian diri dalam menghadapi berbagai perubahan, baik perubahan sosial, ekonomi, politik, budaya dan sebagainya. Memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif agar terjadinya perubahan dan peningkatan terhadap pengetahuan, ketrampilan dan sikap, mau dan mampu menolong dirinya dalam mengakses pasar, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kesejahteraan. Penyuluhan sebagai upaya menyebar luaskan informasi/inovasi melalui proses diseminasi agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengadopsi inovasi.

Peranan fasilitasi adalah peranan pendampingan dalam melayani kebutuhan yang dirasakan masyarakat dengan cara-cara yang kreatif. Karena itu pendampingan berfungsi sebagai penyadaran dan pembelajaran, serta memberikan kesempatan pada masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan dan terhindar pembangunan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Penyuluhan sebagai ujung tombak pembangunan berhadapan langsung dengan masyarakat penerima manfaat perlu terus menerus meningkatkan profesionalismenya, kreatif dalam menemukan cara-cara pemberdayaan masyarakat yang efektif, dengan pelaksanaan waktu yang relatif singkat dan mudah diterapkan. Saat ini sudah banyak akses informasi yang dapat mendukung proses memodernisasikan masyarakat di pedesaan, misalnya memberdayakan petani supaya dalam pemasaran usaha taninya dapat menembus pasar modern (swalayan, super market, *mall* dan sebagainya), dalam hal ini tugas dan peranan penyuluhan sangat penting untuk memberikan pengayaan tentang berbagai hal yang terkait dengan pemasaran produk pertanian di pasar modern.

## 2. Komunikasi dengan Masyarakat Desa

Pentingnya sebuah komunikasi seiring dengan pentingnya kehidupan itu sendiri bagi peradaban manusia, sejak manusia pertama diturunkan oleh Tuhannya ke bumi dan sejak pertama kalinya seorang anak dilahirkan oleh ibunya ke muka bumi, tangisan pertamanya menandakan sudah terjadinya proses komunikasi. Komunikasi merupakan sebuah proses penyampaian/pemberitahuan kepada orang lain tentang apa yang dirasakan, apa yang diinginkan/apa yang tidak diinginkan, dan sebagainya dengan maksud dapat terpenuhinya kebutuhan, dapat terselesaikannya persoalan, terjadinya perubahan perilaku, diperbaharui keadaan yang tidak dinamis dan sebagainya. Proses penyampaian tersebut dapat dilakukan dengan berbicara/bahasa, gerak tubuh, sinyal dan sebagainya, baik secara langsung maupun menggunakan media komunikasi. Untuk masa sekarang komunikasi sudah dapat dilakukan dengan berbagai model alat komunikasi yang canggih, misalnya dengan *handphone* dengan berbagai macam programnya, internet, media cetak dan sebagainya, semuanya sudah menjangkau masyarakat sampai ke pelosok negeri nusantara ini. Media komunikasi sudah tersedia di negeri ini mulai dari perkotaan sampai pedesaan, tinggal bagaimana mengisinya dengan pesan dan informasi yang bermanfaat guna bagi masyarakat penggunanya. Memberikan pendidikan dan penyuluhan dengan membangun komunikasi yang baik, sehingga menjadi suatu usaha yang dapat mengubah perilaku positif dan produktif. Karena itu komunikasi menjadi ujung tombak bagi pencapaian tujuan dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat pedesaan sebagian besarnya masih sangat terikat pada pola kebudayaannya, jika mata pencaharian bertani maka kehidupannya sangat tergantung kepada alam dalam artian pengolahan lahan-lahan pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya, Kebiasaan hidup yang santai, dan mungkin masih adanya sikap pasif, tertutup terhadap pihak-pihak di luar masyarakatnya. Maka diperlukan upaya-upaya persuasif agar pesan-pesan pembangunan dapat disampaikan dan diterapkan.

Tujuan penting komunikasi bagi masyarakat pedesaan adalah menyampaikan sebuah inovasi yang penting bagi tumbuhnya peran serta secara aktif dan ikut ambil bagian dalam melaksanakan dan mengembangkan program yang bersifat inovatif, diharapkan tumbuhnya kerjasama sesama warga masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di desanya. Inovasi berupa pengetahuan baru, teknologi

baru, perilaku yang baru, segala bentuk perubahan dan sebagainya yang selama ini belum dikenal atau belum digunakan oleh masyarakat desa atau belum terima/belum diterapkan oleh masyarakat. Agar inovasi dapat diterima oleh masyarakat, sebaiknya inovasi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan atau dapat memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat pedesaan, misalnya jika sedang berjangkitnya hama tikus di persawahan, sehingga petani terus merugi, maka perlu diberikan penyuluhan tentang teknologi yang dapat memberantas hama tikus yang selama ini belum diketahui oleh masyarakat. Dengan begitu diharapkan masyarakat dapat dengan mudah menerima dan menerapkannya. Untuk mengatasi sikap tertutup masyarakat desa perlu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat setempat, kalangan pemuda, tokoh adat dan agama karena tokoh-tokoh tersebut dapat mempengaruhi warganya untuk menerima inovasi tersebut.

Proses perubahan dalam komunikasi menurut Totok Mardikanto (2009) dapat dilakukan melalui empat cara: 1) Secara Persuasif atau bujukan yaitu dilakukan dengan cara menggugah perasaan secara bertahap sampai dia mau mengikuti apa yang dikehendaki komunikator; 2) Secara *pervasion*, atau pengulangan yaitu penyampain pesan yang sama secara berulang-ulang; 3) Secara *compulsion* yaitu teknik pemaksaan tidak langsung dengan cara menciptakan kondisi yang membuat sasaran harus melakukan/menuruti kehendak komunikator; 4) Secara *coersion* yaitu teknik pemaksaan secara tidak langsung dengan cara memberi sanksi bagi yang melanggar.

### 3. Pemberdayaan Petani dengan Penyuluhan

M. Silahudin (2015) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa
- b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya alam yang ada di desa
- c. Menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal.
- d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

- e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa;
- f. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat;
- g. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa;
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa;
- i. Melakukan pendampingan Desa yang berkelanjutan; dan
- j. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa.

Penjelasan M. Silahudindi atas menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa diharuskan melibatkan partisipasi langsung mereka mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan selalu mendapat pendampingan secara transparan. Untuk itu perlu upaya pemberdayaan petani desa agar terjadi pembangunan pertanian berkelanjutan atau agribisnis kerakyatan yang mandiri. Upaya pemberdayaan petani desa harus diarahkan pada kemampuan teknik-teknik pertanian, kewirausahaan, pengembangan modal usaha, manajemen dengan perencanaan partisipatif secara swakelola oleh petani itu sendiri. Sehingga menjadikan petani yang berwawasan, sikap mental *entrepreneur* dan mampu bersaing, karena petani adalah pelaku utama dalam usaha pertanian. Berbagai fungsi dan peranan dapat dilakukan dalam program penyuluhan. Menumbuhkan partisipasi petani menjadi faktor penting bagi terselenggaranya kegiatan-kegiatan penyuluhan yang inovatif.

Totok Mardikanto (2009), penyuluhan sebagai proses pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama yang tidak terbatas pada terciptanya “*better farming, better bussiness, better living,*” tetapi untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengadopsi teknik produksi dan pemasaran demi meningkatkan pendapatannya. Disamping itu masyarakat difasilitasi agar memiliki posisi tawar yang semakin baik dalam pengambilan keputusan dan konsistensi implementasi kebijakan yang berpihak kepada petani dan masyarakat lapisan bawah.

Kegiatan penyuluhan pertanian dalam upaya pemberdayaan petani desa diperlukan kegiatan yang sistematis, melalui proses perencanaan dengan melakukan identifikasi terhadap permasalahan dan

kebutuhan agar diketahui materi penyuluhan yang diprioritas untuk segera disampaikan kepada masyarakat. Mengikut sertakan petani dalam tahap ini menjadi penting, karena petani sebagai masyarakat setempat lebih mengetahui situasi dan kondisi. Secara tidak langsung akan terbangunnya partisipasi petani sebagai upaya pemberdayaannya. Penyuluh sebagai pihak yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu terus menerus meningkatkan pengetahuan dan wawasannya. Sukino (2013) menyatakan bahwa penyuluh merupakan ujung tombak pembangunan pertanian yang berhadapan langsung dengan petani dalam menjalankan tugasnya yang dikenal dengan kegiatan penyuluhan pertanian. Penyuluhan merupakan kegiatan untuk mengubah atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap para petani. Kegiatan penyuluhan sebagai upaya memberdayakan masyarakat petani pedesaan juga harus menggunakan komunikasi yang mudah dipahami dan dilaksanakan setiap materi yang disampaikan. Sehingga komunikasi dalam kegiatan penyuluhan menjadi sangat penting manakala mampu menyesuaikan dengan kondisi pengetahuan para petani. Keterlibatan langsung para petani pedesaan dalam merencanakan, melaksanakan, dan menindak lanjuti kegiatan penyuluhan sudah merupakan bukti langsung sebagai upaya pemberdayaannya sebagai petani mengarah pada kemandirian. Pendekatan partisipatif dalam memberdayakan petani pedesaan merupakan kunci keberhasilan penyuluhan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa “penyuluhan-komunikasi efektif-pemberdayaan, merupakan suatu sistem yang perlu dijaga kualitasnya, jika menjadikan petani pedesaan untuk mandiri.

### C. SIMPULAN

1. Pemberdayaan petani desa dapat terwujud jika melibatkan mereka secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pendampingan yang transparan
2. Pemberdayaan petani desa menjadi efektif apabila dilakukan penyuluhan yang terencana dengan baik dan melibatkan para petani secara aktif.
3. Komunikasi efektif menjadi sangat penting dalam kegiatan penyuluhan agar upaya pemberdayaan petani desa mudah terimplementasikan dalam setiap kegiatan pertanian.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Hafsah, MJ. 2009. *Membangun Pertanian*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Leta Rafael. 1996. *Komunikasi Penyuluhan Pedesaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Raharjo. 2014. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- M. Silahudin. 2015. *Panduan Pendampingan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- Sukino. 2013. *Membangun Pertanian dengan Pemberdayaan Masyarakat Tani*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Totok Mardikanto. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press.

## MEMAHAMI MASYARAKAT SEBAGAI SUATU SISTEM SOSIAL

Setiawati

Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

### Abstract

To increase society participation in development is a very important thing and will be decisive for the success of development itself. Because of this thing to raise awareness of the importance of a development program conducted for the society, and will also the fosters a feeling on the results of the construction carried out.

In building framework empowering the village society, the implementation of Law No. 6 2014 about the village had to be escorted by professional facilitators tasked to facilitate and assist the society as an innovative creative guided by the Village Law (6/2014) on the implementation of the village government, the implementation of village development, village society development, society empowerment village. Rural societies are facilitated to learn to be able to manage the development activities independently.

One aspect that can be taken to realize the things above are: the need for a deep understanding of the society as a social system, because of the companion village can determine strategic steps in performing their duties in accordance with local conditions. This article will be discuss about the society as a social system and its relevance in the process of public participation.

**Key Words:** Society, Social System.

### A. PENDAHULUAN

Berbicara tentang masyarakat, tentunya bagi kita bukan hal yang baru dan asing, kerana semua kita adalah anggota masyarakat, hidup di dalam masyarakat dan setiap hari dan setiap saat kita berkumpul saling dan berinteraksi dengan orang lain dalam masyarakat. Apakah makna masyarakat sederhana itu? Jawabannya adalah tidak, kalau

begitu apa itu masyarakat?, bagaimana masyarakat tersebut terbentuk dan berproses. Hal ini sangat penting diketahui, terutama bagi tenaga profesional pendamping desa, karena keberhasilan dan kelancaran tugas mereka sangat ditentukan oleh sejauh mana pemahaman mereka terhadap masyarakat itu sendiri.

Sebuah pengalaman nyata yang dihadapi oleh sekelompok tim gabungan dari beberapa lulusan Universitas di Padang, dimana mereka diminta untuk menangani secara bersama suatu proyek air bersih di salah satu daerah tertinggal di Sumatera Barat. Tim tersebut diberi waktu 6 bulan untuk menyelesaikannya, dan diharapkan semua masyarakat memahami dan menyadari pentingnya penyediaan air bersih tersebut. Selain itu program ini merupakan prasyarat untuk diangkat sebagai pegawai tetap pada suatu instansi pemerintahan. Setelah beberapa bulan berlalu, secara fisik pembangunan air bersih tersebut sudah mulai nampak keberhasilannya, namun keikutsertaan masyarakat dalam program itu sangat kurang, sehingga hampir semua kegiatan dilakukan dengan cara memberi upah kepada pekerja-pekerja. Kehadiran masyarakat pada kegiatan proyek tersebut boleh dikatakan tidak ada kecuali hanya perangkat desa secara bergantian. Setelah waktu penyelesaian program berakhir dan dilakukan penilaian secara menyeluruh dengan berbagai alat dan sumber termasuk juga melalui wawancara dengan masyarakat, dinyatakan proyek tersebut tidak berhasil sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pengalaman sebagaimana dijelaskan di atas, diduga disebabkan oleh ketidakmampuan tim untuk menumbuhkan kebutuhan masyarakat terhadap program yang dilaksanakan. Selain itu, pemahaman tim terhadap masyarakat sebagai suatu sistem sosial juga dirasa masih rendah. Dengan mempedomani apa yang dikemukakan oleh Djohary Windows dalam pengklasifikasikan bagaimana masyarakat memandang kebutuhannya, dimana dapat disimpulkan bahwa: masyarakat dalam memahami suatu perubahan yang dilakukan dapat dilihat melalui empat jendela, dimana setiap jendela memiliki cara dan pendekatan yang berbeda pula.

Jendela pertama: "*I am oke, you oke*", pada kategori ini, masyarakat sudah memahami dengan jelas dan transparan tentang apa, mengapa dan untuk apa suatu program dilaksanakan. Disini petugas pembangunan masyarakat dengan mudah dapat menjalankan programnya dan akan mendapat dukungan yang tinggi di dalam masyarakat.

Bagaimana dengan jendela yang kedua yaitu: *"I am oke, you are not oke"*, disini yang mengetahui tentang pentingnya program tersebut hanya para petugas pembangunan, sedang masyarakat tidak memahami sama sekali. Pada kategori ini para petugas tidak bisa langsung memulai pekerjaan program yang akan dilakukan, tetapi perlu pemberian motivasi, menumbuhkan kebutuhan masyarakat akan program yang dilaksanakan.

Demikian pula dengan jendela ke tiga dan ke empat yaitu: *"I am not oke, you are oke"* dan *"I am not oke, you are not oke"*. Untuk kategori jendela ketiga dan ke empat ini, pekerjaan yang utama yang perlu dilaksanakan adalah: memberikan motivasi, mengidentifikasi kebutuhan, menumbuhkan kebutuhan, dan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan, baik formal maupun secara informal.

Pada artikel ini akan dibahas secara singkat tentang masyarakat sebagai suatu sistem sosial, yang meliputi: konsep tentang masyarakat, masyarakat sebagai struktur sosial, masyarakat sebagai suatu proses sosial dan hubungan antara keduanya dalam pembangunan masyarakat.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Masyarakat menurut pendapat para ahli**

Untuk memahami lebih jauh tentang masyarakat, sebaiknya kita pahami beberapa definisi menurut pendapat para ahli sosiologi.

- a. Emile Durkheim. Masyarakat adalah suatu kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.
- b. Karl Marx. Masyarakat adalah suatu struktur yang menderita ketegangan organisasi ataupun perkembangan karena adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terpecah-pecah secara ekonomis.
- c. Max Weber. Masyarakat adalah suatu struktur atau aksi yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
- d. Koentjaraningrat. Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu.
- e. Mayor Polak. Masyarakat adalah wadah segenap antar hubungan sosial yang terdiri dari banyak sekali kolektivitas serta kelompok, dan tiap-tiap kelompok terdiri lagi atas kelompok-kelompok yang lebih kecil (subkelompok).

- f. Roucek dan Warren. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang memiliki rasa dan kesadaran bersama, di mana mereka berdiam (bertempat tinggal) dalam daerah yang sama yang sebagian besar atau seluruh warganya memperlihatkan adanya adat istiadat serta aktivitas yang sama pula.
- g. Paul B. Horton. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama dan melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu. Pada bagian lain Horton mengemukakan bahwa masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat dapat dibedakan dalam pengertian natural dan kultural. Masyarakat dalam pengertian natural adalah *community* yang ditandai oleh adanya persamaan tempat tinggal. Masyarakat dalam pengertian kultural adalah *society* yang keberadaannya tidak terikat oleh *the same geographic area*, melainkan hasil dinamika kebudayaan dan peradaban manusia.

Sehubungan dengan itu Soerjono Soekanto dan juga beberapa para ahli sosiologilainnya menyimpulkan bahwa ciri-ciri suatu masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut: (1) manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang; (2) bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia-manusia baru. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia; (3) sadar bahwa mereka merupakan satu-kesatuan; dan (4) merupakan suatu sistem hidup bersama, dimana sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan tentang masyarakat, seperti yang sudah dikemukakan terdahulu, maka dapat diketahui bahwa masyarakat itu bukanlah kumpulan orang-orang yang menduduki suatu daerah tertentu, tetapi adalah suatu sistem yang terbentuk dari stuktur dan proses sosial, dimana keduanya merupakan suatu kesatuan dalam kelangsungan hidup masyarakat.

## 2. Masyarakat sebagai Suatu Sistem

Apabila kita mengikuti pengertian masyarakat, baik secara natural maupun kultural, maka akan tampak bahwa keberadaan kedua masyarakat itu merupakan satu-kesatuan. Dengan demikian, kita akan tahu bahwa unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat yang masing-masing saling bergantung merupakan satu-kesatuan fungsi. Adanya mekanisme yang saling bergantung, saling fungsional, saling mendukung antara berbagai unsur dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain itulah yang kita sebut sebagai sistem.

Sistem adalah bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga dapat berfungsi melakukan suatu kerja untuk tujuan tertentu. Sistem sosial itu sendiri adalah suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen sosial. Elemen tersebut terdiri atas tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu-individu yang berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dalam sistem sosial terdapat individu-individu yang berinteraksi dan bersosialisasi sehingga tercipta hubungan-hubungan sosial. Keseluruhan hubungan sosial tersebut membentuk struktur sosial dalam kelompok maupun masyarakat yang akhirnya akan menentukan corak masyarakat tersebut.

Masyarakat sebagai suatu sistem sosial selalu mengalami dinamika yang mengikuti hukum sebab akibat (kausal). Apabila ada perubahan pada salah satu unsur atau aspek, maka unsur yang lain akan menerima konsekuensi atau akibatnya, baik yang positif maupun yang negatif. Oleh karena itu, para ahli sosiologi melihat masyarakat atau perubahan masyarakat selalu dalam kerangka sistemik, artinya perubahan yang terjadi di salah satu aspek akan memengaruhi faktor-faktor lain secara menyeluruh dan berjenjang. Sebagai suatu sistem, individu-individu yang terdapat di dalam masyarakat saling berhubungan atau berinteraksi satu sama lain, dengan melakukan kerja sama guna memenuhi kebutuhan hidup masing-masing. Sebagai sebagai suatu sistem sosial, masyarakat dapat dipandang dari dua unsur pokok, yaitu struktur dan proses sosial.

## 3. Masyarakat sebagai Suatu Struktur Sosial

Struktur sosial mencakup susunan status dan peran yang terdapat di dalam satuan sosial, ditambah nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur interaksi antarstatus dan antarperan sosial. Di dalam struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial yang pokok, seperti kaidah-kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, dan lapi-

san-lapisan sosial. Bagaimana sebetulnya unsur-unsur sosial itu terbentuk, berkembang, dan dipelajari oleh individu dalam masyarakat? Melalui proses-proses sosial semua itu dapat dilakukan. Proses sosial itu sendiri merupakan hubungan timbal balik antara bidang-bidang kehidupan dalam masyarakat dengan memahami dan mematuhi norma-norma yang berlaku.

Perlu disadari bahwa untuk setiap masyarakat tidak memiliki struktur sosial yang sama, perbedaan ini terjadi biasanya dipengaruhi oleh banyak hal, misalnya tingkat perkembangan masyarakatnya, tingkat pendidikan, perkembangan kebudayaan dan kemajuan masyarakat itu sendiri dan lain sebagainya. Perbedaan ini misalnya: kelompok-kelompok sosial yang ada pada masyarakat, perbedaan tentang nilai-nilai yang berlaku didalam masyarakat, lembaga-lembaga sosial yang ada di dalam masyarakat dan sebagainya.

#### **4. Masyarakat sebagai Proses Sosial**

Inti dari kehidupan sosial adalah interaksi sosial. Tanpa adanya interaksi sosial, tidak mungkin ada kehidupan sosial (masyarakat), karena adanya interaksi sosial, terbentuklah kehidupan bersama. Dari adanya kehidupan bersama itulah timbul proses interaksi sosial yang berkaitan erat dengan terjadinya proses sosial.

Bentuk umum proses sosial adalah interaksi sosial (yang juga dapat dinamakan sebagai proses sosial) karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia.

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi anatara kelompok tersebut sebagai suatu kesatuan dan biasanya tidak menyangkut pribadi anggota-anggotanya. Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi benturan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak. Interaksi sosial tak akan mungkin terjadi apabila manusia mengadakan hubungan yang langsung dengan sesuatu yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap sistem syarafnya, sebagai akibat hubungan termaksud.

Adapun syarat-syarat terjadinya interaksi sosial menurut ahli sosiologi dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, adanya kontak sosial (*social contact*), kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok, antar kelompok. Selain itu, suatu kontak dapat pula bersifat langsung (*face to face*) maupun tidak langsung atau sekunder. Yakni kontak sosial yang dilakukan melalui perantara, seperti melalui telepon, orang lain, surat kabar, dan lain-lain. Kontak sosial yang bersifat positif mengarah pada suatu kerja sama, sedangkan yang bersifat negatif mengarah pada suatu pertentangan atau bahkan sama seali tidak menghasilkan suatu interaksi sosial.

Kedua, adanya komunikasi sosial, yaitu seseorang memberi arti pada perilaku orang lain, perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan orang tersebut. Orang yang bersangkutan kemudian memberi reaksi terhadap perasaan yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Dengan adanya komunikasi tersebut, sikap-sikap dan perasaan suatu kelompok manusia atau perseorangan dapat diketahui oleh kelompok lain atau orang lainnya. Hal itu kemudian merupakan bahan untuk menentukan reaksi apa yang dilakukannya.

Dilihat dari keadaan yang ditimbulkan oleh interaksi sosial tersebut, menurut Tim Sosiologi (2002), interaksi sosial dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Interaksi-interaksi sosial yang bersifat asosiatif, yakni yang mengarah kepada bentuk-bentuk asosiasi (hubungan atau gabungan), seperti: (1) kerjasama yaitu, suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok atau kelompok dengan masyarakat, untuk mencapai tujuan bersama; (2) akomodasi adalah suatu proses penyesuaian social dalam interaksi antara pribadi dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan; dan (3) asimilasi yaitu proses sosial yang timbul bila ada kelompok masyarakat dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda, saling bergaul secara intensif dalam jangka waktu lama, sehingga lambat laun kebudayaan asli mereka akan berubah sifat dan wujudnya membentuk kebudayaan baru sebagai kebudayaan campuran; (4) akulturasi, proses sosial yang timbul, apabila suatu kelompok masyarakat manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga lambat laun unsur-unsur kebudayaan asing itu diterima

dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian dari kebudayaan itu sendiri.

- b. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif, yakni yang mengarah kepada bentuk-bentuk pertentangan atau konflik, seperti: (1) persaingan, suatu perjuangan yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu, agar memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif, tanpa menimbulkan ancaman atau benturan fisik di pihak lawannya; (2) kontravensi yaitu bentuk proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan atau konflik. Wujud kontravensi antara lain sikap tidak senang, baik secara tersembunyi maupun secara terang-terangan yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok atau terhadap unsur-unsur kebudayaan golongan tertentu. Sikap tersebut dapat berubah menjadi kebencian akan tetapi tidak sampai menjadi pertentangan atau konflik; (3) konflik adalah proses sosial antar perorangan atau kelompok masyarakat tertentu, akibat perbedaan paham dan kepentingan yang sangat mendasar, sehingga menimbulkan adanya semacam *gap* atau jurang pemisah yang mengganjal interaksi sosial di antara mereka yang bertikai tersebut.

### 5. Hubungan antara Struktur Sosial dengan Proses Sosial

Sebagaimana dikemukakan terdahulu bahwa interaksi sosial merupakan suatu proses yang dapat memberikan pola interaksi tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Pola interaksi sosial tersebut merupakan bentuk jalinan interaksi yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok yang bersifat dinamis dan mempunyai pola tertentu. Adapun pola interaksi tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) didasarkan atas kedudukan sosial (status) dan peranannya; (2) merupakan suatu kegiatan yang terus berlanjut dan berakhir pada suatu titik yang merupakan hasil dari kegiatan tadi; (3) mengandung dinamika, artinya dalam proses interaksi sosial terdapat berbagai keadaan nilai sosial yang diproses, baik yang mengarah pada kesempurnaan maupun kehancuran; dan (4) tidak mengenal waktu, tempat, dan keadaan tertentu. Berarti interaksi sosial dapat terjadi kapan dan dimana pun, dan dapat berakibat positif atau negatif terhadap kehidupan masyarakat.

Dari pola-pola tersebut, berdasarkan bentuknya, interaksi sosial dapat diklasifikasikan menjadi tiga pola, yaitu: (1) pola interaksi individu dengan individu, dalam mekanismenya, interaksi ini dipenga-

ruhi oleh pikiran dan perasaan yang mengakibatkan munculnya beberapa fenomena, seperti: jarak sosial, perasaan simpati dan antipati, intensitas dan frekuensi interaksi; (2) pola ini merupakan bentuk hubungan antara individu dengan individu sebagai anggota suatu kelompok yang menggambarkan mekanisme kegiatan kelompoknya, dimana setiap perilaku didasari kepentingan kelompok, diatur dengan tata cara yang ditentukan kelompoknya, dan segala akibat dari hubungan merupakan tanggung jawab bersama; (3) pola interaksi kelompok dengan kelompok, hubungan ini mempunyai ciri-ciri khusus berdasarkan pola yang tampak. Pola interaksi antar kelompok dapat terjadi karena aspek etnis, ras, dan agama, termasuk juga di dalamnya perbedaan jenis kelamin dan usia, institusi, partai, organisasi, dan lainnya.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan perlu sekali pemahaman mendalam dan mendasar terhadap masyarakat sebagai suatu sistem sosial. Hal ini sangatlah penting karena akan terkait dengan langkah-langkah apa yang akan dilakukan, bagaimana cara dan proses pelaksanaannya serta bagaimana kiat-kiat yang perlu dilakukan dalam memgerakkan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Sehubungan dengan fokus kerja pendamping desa yang tujuan utamanya adalah: mewujudkan desa sebagai *self governing community*, maka dalam hal ini pendampingan desa diarahkan pada proses kaderisasi masyarakat desa. Pemberdayaan masyarakat desa adalah bagian dari proses transformasi sosial yang digerakkan oleh kader-kader desa yaitu warga desa yang dengan kebebasannya memilih untuk secara sukarela terlibat menjadi penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desanya, karena kader desa adalah orang kunci yang mengorganisir dan memimpin gerak masyarakat desa menuju pencapaian cita-cita. Kader desa hadir sebagai para penggerak pembangunan desa, tokoh-tokoh masyarakat, pengelola organisasi kemasyarakatan yang ada di desa.

Untuk mewujudkan kader-kader desa yang bersedia membantu pembangunan di desanya, maka kepada pendamping desa perlu kiat-kiat khusus, karena itulah bagi mereka perlu pemahaman yang mendalam tentang seluk beluk masyarakat sebagai suatu sistem sosial dimana mereka bertugas.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abdullah, 2011, *Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press.
- Ahmadi, Abu, 2004, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan, Ary, 2010, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Koencaraningrat, 1992, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia
- Rifa'i, Muhammad, 2011, *Sosiologi Pendidikan*, Jokjakarta: AR- Ruzz Media.
- Soekanto Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press
- Rifa'i, Muhammad, 2011, *Sosiologi Pendidikan*, Jokjakarta: AR- Ruzz Media.
- <http://shigmapustaka.blogspot.com/2011/03/sosiologi-sma-masyarakat-sebagai-sistem.html> diakses 10 oktober 2016

**SURAU DAN UPAYA MEWUJUDKAN  
SELF GOVERNING COMMUNITY  
DI SUMATERA BARAT**

MHD. Natsir

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah FIP UNP Padang

e-mail: mhdnatsir\_yunas@fip.unp.ac.id

**Abstract**

Surau has big role in public life especially in West Sumatera. Essentially, surau has presented as social formation in people's life. So, it has great contribution to society and become a system that plays an important task in shaping the cultural mentality. These all will certainly promote self governing community in West Sumatera.

**Keyword:** Surau, Nagari, Self Governing Community

**A. PENDAHULUAN**

Konsep *self governing community* (kesatuan masyarakat hukum) mempunyai perjalanan yang cukup panjang di Eropa maupun di Indonesia. Di negara-negara Eropa dikenal berbagai macam nama *self governing community*, mulai dari dewan komunitas di Spanyol, *Commune* di Italia, *Parish* di Inggris dan di Indonesia seperti *Lurah* di Jawa, *Lembang* di Tana Toraja, *Kuwu* di Ciroben, *Kampung* di Papua dan di Sumatera Barat dikenal dengan sebutan *Nagari*.

Suatu *nagari* di Sumatera Barat tidak lengkap dan sempurna apabila tidak memiliki dua institusi yang menjadi lambang *nagari* yaitu balai adat dan mesjid (*surau gadang*). Balai adat adalah lembaga kebudayaan sedangkan mesjid merupakan lembaga agama. Hal ini menggambarkan bagaimana suatu *nagari* dibangun berdasarkan erat-nya hubungan agama dan adat. Sehingga Hamka menyimpulkan bahwa sangat sulit untuk memisahkan antara adat dan agama dalam masyarakat Minangkabau. Hubungan ini bukan seperti halnya paduan minyak dan air dalam susu. Agama juga bukanlah semata-mata tempelan-tempelan dalam adat Minangkabau (Azra: 2003). Dalam hal ini, adat dan agama Islam dapat dipahami sebagai sesuatu yang sangat

konstruktif untuk membangun masyarakat nagari dalam mewujudkan *self governing community*.

Di antara institusi agama yang dapat bersinergis untuk mempercepat terwujudnya *self governing community* di Sumatera Barat adalah surau. Karena pada dasarnya basis pembinaan ummat di Sumatera Barat dimulai di surau. Dari suraulah cikal bakal keutuhan dan keutamaan masyarakat Minang beradat dan beragama. Keberhasilan ditandai apabila anak pandai mengaji, taat beribadah, berakhlak dan berbudi pekerti luhur. Memakaikan tata krama adat, pandai petatah petitih adat, menguasai kesenian anak *nagari* serta bela diri (pencak silat).

Di surau, para pemuda Minang dapat mempelajari cara menulis dan membaca Al Qur'an, ilmu agama yang mengajarkan tentang akidah, syari'ah, dan akhlak. Menurut adat yang berlaku di Minangkabau, anak-anak muda menjelang kawin tinggal di surau, dengan sendirinya semua orang Minangkabau masa itu telah pandai membaca Al-Qur'an berikut menulisnya dan secara dasar mengetahui ilmu agama dalam bentuk alamiah dan pengetahuan. Dengan demikian lembaga surau telah membebaskan masyarakat dari buta aksara dan telah berhasil mencetak ulama. Sehingga pada masa lalu telah banyak lahir tokoh pemikir dan diplomat, negarawan, politikus, ulama. Di antara mereka adalah H. Agussalim, M.Yamin, Hamka, M.Hatta, M.Natsir dan lain-lain.

Di samping itu, surau selain menjalankan pendidikan agama, juga mendidik anak muda dalam aktivitas ekonomi. Seperti keterlibatan surau *Tuanku nan Tuo* di bidang perdagangan, sehingga guru ini dijuluki sebagai pelindung para pedagang. *Tuanku Nan Tuo* telah mampu memberikan pendidikan yang tidak saja bersifat tekstual, namun juga mengkombinasikan dan memanifestasikan tekstual kitab pada kontekstual realitas hidup manusia. Dalam khazanah Islam, hal ini disebut dengan kombinasi syari'ah dan fiqih (Hanani: 2002).

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Relasi Surau dan Masyarakat**

Surau dan masyarakat membuat hubungan yang saling menguntungkan (Abidin: 2004). Di antara gambaran dari dekatnya hubungan ini dapat dilihat secara fisik dari bangunan surau yang awalnya tidak diberi pagar. Hal ini merupakan simbol dari persatuan dan kedekatan surau dengan masyarakat (Daya: 1995). Surau juga telah

menumbuhkan sifat demokratis dan keterbukaan dalam masyarakat yang sejak lama menganut sistem *matrilineal* (Jasmi: 1996).

Di samping itu letak geografis surau mencerminkan sifat hubungan antara surau dan komunitas masyarakat secara keseluruhan. Terdapat saling ketergantungan yang kuat antara surau dan masyarakat; surau membutuhkan masyarakat, khususnya untuk mendukungnya secara finansial atau memberikan bantuan ekonomi guna menyelamatkan keberadaannya.

Di pihak lain, masyarakat juga membutuhkan surau bagi pendidikan agama anak-anaknya, juga upacara keagamaan mereka di *nagari* yang biasanya dilakukan orang-orang surau (Azra:2003). Dalam hal ini tentu saja surau yang berhasil menyesuaikan diri dan mendapat penerimaan luas akan memiliki peran yang lebih besar dalam kehidupan bermasyarakat (Aziz: 2001).

Surau telah mengisi formasi sosial dalam kehidupan masyarakat, sehingga surau mempunyai eksistensi yang kontributif terhadap masyarakat dan menjadi sebuah sistem yang berperanan penting dalam membentuk mentalitas kultural (Hanani: 2002). Hal ini tentu saja akan banyak mendorong terwujudnya *self governing community* di Sumatera Barat.

Hubungan surau dengan masyarakatnya ibarat dua sisi mata uang (di mana masing-masing keduanya saling membutuhkan). *Orang siak* membutuhkan bantuan biaya dari masyarakat, sedangkan masyarakat memerlukan orang siak untuk mengajarkan agama, dan menjalankan upacara-upacara keagamaan di *nagari* (Azra:2003). Dengan pembaharuan sistem pendidikan agama, dan perubahan-perubahan ekonomi yang dilancarkan pemerintah kolonial telah mengaburkan hubungan ini.

## 2. Tantangan Surau dalam Mewujudkan *Self governing community*

Dalam perkembangannya, sejarah panjang kejayaan surau sebagai salah satu institusi yang dapat membangun masyarakat mulai tergerus. Masyarakat seakan tenggelam dalam pengaruh modernisasi dan gelombang globalisasi yang sedang berjalan. Pembangunan yang seharusnya berkontribusi positif terhadap pengembangan masyarakat, saat ini seperti dua sisi pisau yang sama tajam dan dapat membuat luka apabila tidak bisa menggunakannya. Kehidupan anak *nagari* terutama

generasi muda sudah banyak yang terpengaruh oleh efek negatif globalisasi dan transformasi (Natsir: 2013).

Nilai luhur yang disemai melalui peran surau telah mundur dan tergusur. Surau telah sepi dan malah ada yang tidak berfungsi lagi. Guru mengaji banyak *urbanisasi* ke kota, ulama-ulama muda banyak yang enggan kembali ke desa, pemangku adat banyak dijabat oleh para birokrat yang bertugas di kota. Dalam hal ini betul apa yang dituliskan Navis (2002) dalam novelnya “robohnya surau kami” yang menggambarkan surau sebagai aset lokal telah hilang; fungsi surau tidak seperti dulu lagi, surau sudah ditinggalkan oleh masyarakatnya.

Dengan demikian dapat dikatakan, hanya sebagian penduduk *nagari* (terutama generasi muda) yang berkesempatan mengikuti pengajian agama dan lebih sedikit lagi anak-anak yang sempat mengikuti pengajian Al-Qur’an. Akibatnya, nilai dan peranan ajaran agama serta aqidah menjadi lemah. Adat tinggal semboyan, agama dan adat hanya tampil dalam bentuk acara seremonial saja, tidak lagi menjadi acuan kepribadian.

Kondisi seperti ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi semua masyarakat, khususnya Sumatera Barat. Sehingga surau sebagai salah satu lembaga yang mampu mengkader generasi muda untuk berperan aktif dalam mewujudkan *self governing community* menjadi terabaikan. Padahal ini dapat diwujudkan dengan keterlibatan intensif surau dalam mewujudkan *self governing community*.

### 3. Surau dan Perubahan Sosial Masyarakat di Sumatera Barat

Menurut Soekanto (1998) ada beberapa hal yang menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, antara lain adalah; 1). Bertambah atau berkurangnya penduduk; 2). Penemuan-penemuan baru; 3). Pertentangan (*conflict*) masyarakat; 4). Terjadinya pemberontakan atau revolusi; hal ini meliputi, *pertama*, sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia; *kedua*, peperangan; *ketiga*, pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

Masyarakat di Sumatera Barat (Minangkabau) merupakan masyarakat yang kooperatif terhadap perubahan (Sairin: 2002). Bagi mereka perubahan sosial dan budaya pasti akan terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Masyarakat Minangkabau bukanlah masyarakat yang tertutup seperti halnya masyarakat Badui di Jawa Barat atau orang Amish di Amerika Serikat.

Namun dalam perkembangannya, semangat akan perubahan dan meningkatnya aspirasi modernisasi, bahkan sekularisasi dalam masyarakat telah mengakibatkan semakin hilangnya surau dalam masa-masa terakhir ini. Keinginan untuk memasuki alam kemajuan ini dimulai dengan transformasi banyak surau menjadi "*sekolah nagari*" (*volkscholen*) sejak 1870-an. Bahkan modernisasi dan pembaharuan keagamaan pada awal dasawarsa abad 20 semakin membuat surau dipandang oleh banyak masyarakat Minang semakin tidak relevan dengan perkembangan zaman (Azra: 2002).

Gelombang-gelombang pembaharuan keagamaan dan pendidikan umum telah memberikan andil bagi kemunduran surau sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional. Seperti pemurnian Islam yang dilancarkan Padri dan kemunculan modernisme Islam *Salafi* pada awal abad ke-20 memunculkan corak Islam yang tidak *kompatibel* dengan tradisi sistem nilai surau. Dalam kondisi seperti ini surau menjadi sasaran dan target pembaharuan, karena surau dipandang memiliki paham dan praktek keagamaan yang tradisional yang tidak sesuai dengan kemajuan, yang penuh dengan bid'ah, khurafat dan takhyul. Demikian juga, ketika sekolah-sekolah yang didirikan Belanda (*volkscholen*) diperkenalkan kepada masyarakat di Sumatera Barat, dengan cepat mereka meresponi secara positif, karena hal ini dianggap dapat membawa mereka kepada kemajuan. Kondisi ini telah menyeret anak-anak muda semakin menjauh dari pendidikan surau.

Kesempatan yang diberikan pemerintah Belanda untuk mendapat pendidikan bagi masyarakat lokal dari kelas tertentu, telah menghasilkan murid-murid yang terpengaruh oleh sistem pendidikan Barat. Dalam hal telah terjadi suatu gerakan emansipasi di antara para murid-murid untuk mencapai kemajuan (Tilaar: 2002).

Mereka beranggapan bahwa cara untuk mencapai kemajuan ialah dengan merombak sistem pendidikan tradisional menjadi pendidikan modern *ala* Barat. Karenanya menurut mereka sekolah-sekolah agama sudah ketinggalan zaman (*out of date*), dan harus diganti dengan sekolah-sekolah baru yang modern. Untuk itu, ulama-ulama yang berpengaruh hendaknya tidak lagi mengajar di lembaga-lembaga pendidikan.

Keinginan seperti ini ditolak oleh kaum ulama tradisional (kaum tua) karena mereka menganggap bahwa ide-ide kemajuan itu dapat mengancam konsepsi adat alam Minangkabau yang selama ini mereka yakini. Menurut mereka kemajuan hanya bisa dicapai dengan

menggali dan mengelaborasi kembali gagasan-gagasan adat dan budaya Minangkabau, bukan meninggalkannya dan menggantikannya dengan gagasan-gagasan Barat.

Sikap ulama tradisional ini berbeda dengan ulama modern (Kaum muda). Di mana mereka semakin *ekspansif* dalam menerapkan gagasan-gagasan mereka. Mereka mulai mendirikan sekolah-sekolah agama yang telah dimodernisasi, baik sistem, metode maupun kurikulumnya. Pengajaran bukan lagi berlangsung di surau, tetapi sudah di kelas. Metode pengajarannya bukan lagi *halaqah*, tetapi sudah menggunakan sistem kelas yang memiliki tingkatan-tingkatan.

Pembaharuan sistem pendidikan agama, ditambah perubahan-perubahan ekonomi yang dilancarkan pemerintah kolonial, juga mengubah watak dasar *orang siak* dan surau. *Pakiah* (murid yang sedang belajar di surau) yang pada masa kejayaan surau belajar agama dari satu surau ke surau lain dengan biaya yang diperoleh dari partisipasi ummat, sekarang harus menjadi murid madrasah modern atas biaya keluarganya. Perubahan ini berarti pecahnya integrasi *orang siak* dengan masyarakat. Padahal sebelumnya kedekatan surau dengan masyarakat, merupakan salah satu keunggulan dari surau yang bisa akrab dan diterima oleh masyarakatnya.

Pada dasarnya, modernisasi pendidikan Islam tidak serta merta melenyapkan peran surau dan sekolah-sekolah agama tradisional yang semata-mata mengajarkan ilmu agama. Tetapi sulit dibantah, bahwa mereka ini semakin tertinggal, sehingga selepas pada 1940-an surau dan sekolah-sekolah agama tradisional menjadi minoritas dibandingkan sekolah-sekolah Islam modern.

Perkembangan ekonomi yang membuka berbagai lapangan kerja baru juga memiliki andil mempersempit pamor surau. Surau sebagaimana dikenal tidak mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan khusus yang bernilai ekonomis dalam sistem ekonomi modern. Surau juga tidak mengeluarkan ijazah bagi *orang siak* sebagai bukti kompetensinya dalam bidang tertentu sebagai guru agama. Sebelumnya hal ini tidak pernah menjadi persoalan, dan ijazah bukanlah suatu hal yang penting. Tuntutan ekonomi telah mengakibatkan meningkatnya kecenderungan orang tua untuk tidak menyerahkan anak-anaknya belajar di surau.

Perkembangan ekonomi dan modernisasi dalam masyarakat juga telah menimbulkan proses sekularisasi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebagian besar kemudian berubah menjadi sekolah umum

dengan kurikulum umum yang paling dominan, dan sebagian lagi berusaha mempertahankan identitasnya sebagai sekolah Islam dengan menempatkan cukup banyak mata pelajaran keislaman di dalam kurikulumnya (Azra: 2002). Kondisi seperti ini telah berimplikasi pada berkurangnya minat masyarakat pada sistem pendidikan surau.

#### 4. Surau dan Upaya Mewujudkan *Self Governing Community* di Sumatera Barat

Pada prinsipnya *self governing community* adalah komunitas lokal *beyond the state*, yang mengelola hidupnya sendiri dengan menggunakan lembaga lokal. Pengalaman “kembali ke nagari” di Sumatera Barat merupakan eksperimentasi lokal membangun otonomi desa. Sumatera Barat lebih dulu bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain, termasuk Jawa, meski kapasitas desa di Jawa mungkin lebih baik ketimbang *nagari* di Sumbar. Sumatera Barat merupakan daerah yang sangat unik dalam hal desentralisasi dan demokrasi lokal. Karena sejak lama orang Minang mempunyai sejarah otonomi yang berbasis pada *nagari*.

Di sepanjang zaman proses desentralisasi di Sumatera Barat berlangsung secara dinamis. Ketika republik Indonesia baru berumur satu dekade, Sumbar telah tampil sebagai penantang gigih sentralisasi melalui PRRI, meski dari pemerintah hal ini dianggap sebagai sebuah pembangkangan yang harus ditumpas secara represif. Begitu juga halnya ketika Orde Baru berkuasa, Sumatera Barat kembali tampil sebagai penentang terhadap intervensi dan penyeragaman (*regimentasi*) pemerintahan desa melalui UU No. 5/1979. Masyarakat Sumatera Barat dipaksa menerima intervensi Jakarta, meski mereka merasakan kehilangan identitas politik lokal dan *self governing community* yang sudah lama berbasis pada *nagari*.

Marginalisasi terhadap *nagari* mulai bergeser menjadi eforia ketika desentralisasi dan demokrasi lokal mengalami kebangkitan, menyusul berakhirnya Orde Baru. Sejak 1998, Sumatera Barat menemukan momentum sambil melakukan respons yang cepat terhadap isu desentralisasi. Salah satu jargon yang selalu disuarakan terkait terkait isu desentralisasi di Sumatera Barat adalah “*kembali ke nagari*”, yakni kembali ke identitas dan komunitas politik lokal yang desentralistik dan demokratis. Setelah melewati dialektika yang panjang, Propinsi Sumbar mengundangkan Perda No. 9/2000, yang menjadi efektif pada bulan Januari 2001.

Kini pembentukan kembali (*recreating*) *nagari* di wilayah kabupaten telah selesai dilakukan. Prinsipnya adalah membentuk “nagari baru” yang menggabungkan antara *self governing community* (otonomi asli yang berbasis adat) dan *local-self government* (desentralisasi dari pemerintah). Pola penggabungan ini adalah format baru yang memungkinkan terjadinya “rekonsiliasi” antara “desa adat” dengan “desa dinas” yang dibentuk oleh negara.

Dalam hal ini, untuk mempercepat terwujudnya *self governing community* yang matang. Maka institusi surau sebagai bagian dari lembaga yang akan banyak mempengaruhi pola pikir dan cara bersikap masyarakat di Sumatera Barat dirasa sangat perlu untuk mengambil peran yang lebih aktif. Hal ini dimaksudkan agar persoalan-persoalan yang seringkali timbul dalam masyarakat terkait dengan *self governing community* bisa diminimalisir. Sehingga arah pembangunan masyarakat di Sumatera Barat khususnya dan Indonesia pada umumnya dapat lebih ditingkatkan dengan senantiasa memelihara anesia pada umumnya dapat lebih ditingkatkan dengan senantiasa memelihara aset masyarakat setempat.

### C. SIMPULAN

Penguatan kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai usaha membangun organisasi, sistem-sistem, kemitraan, orang-orang dan proses-proses secara benar untuk menjalankan agenda atau rencana tertentu. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah Daerah oleh karenanya berkaitan dengan *individual capability development*, *organizational capacity building*, dan *institutional capacity building*. Pengertian penguatan kapasitas tersebut memberikan gambaran bahwasanya terdapat banyak hal yang harus diperhatikan dan dicermati agar penguatan kapasitas dapat membuahkan hasil nyata, bermanfaat dan menimbulkan dampak positif.

Penguatan kelembagaan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kelembagaan yang tangguh, dinamis dan mandiri. Dengan adanya penguatan kelembagaan diharapkan diharapkan dapat menggerakkan para pihak untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan organisasi pemerintahan. Selain itu, pembagian peran menjadi lebih jelas, masing-masing pihak mengetahui tugas dan wewenang sehingga system manajemen penyelenggaraan pemerintahan dapat dijalankan secara optimal.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Abidin, Mas'ood. 2004. *Surau Kito*. Padang: PPIM.
- Aziz, Imam. dkk (Ed.). 2001. *Agama dan Perubahan Sosial ; Studi tentang Hubungan antara Islam, Masyarakat, dan Struktur Sosial-Politik Indonesia*. Yogyakarta: LKPSM.
- Azra, Azyumardi. 2003. *SURAU; Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan Modernisasi*. Jakarta: Logos.
- Daya, Burhanuddin. 1995. *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana
- Hanani, Silfia. 2002. *Surau; Aset Lokal yang Tercecer*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Navis, Ali Akbar. 1999. *Yang Berjalan Sepanjang Jalan*. Jakarta: Grasindo
- Sairin Sjafrin. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia; Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1998. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

**PROCESSING WASTE INTO ORGANIC FERTILIZER  
FOR THE GROUP OF FARMERS IN BLOOMING SAIYO  
KENEGARIAN TANJUNG BALIT THE DISTRICT X  
KOTO DISTRICT SOLOK**

Siti Farida F. & Mas'ula

Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan UNP

**Abstract**

Viewed artificial fertilizer prices always go up, many farmers complain, because they could no longer buy fertilizer for their crops, therefore, rural communities need to be smart in processing waste, to be used as organic fertilizer, in addition to organic fertilizers are healthier than artificial fertilizers. The technology used is very simple, and the cost of energy and processing time is also not a lot of organic fertilizers was nearly produced can be utilized. The first activity of the 53-member group which is present only 26 people, or 50%, completion of the three present 72 people, who are not members also MINTAK participate, because they get benefits, they even promised to get junk market in the nearest town, and many requests from another farmer groups to be taught, it is hoped this activity can be a national strategy, in order to overcome the scarcity of fertilizer and litter control.

**Keywords:** organic fertilizers, rural farmers.

**Abstrak**

Melihat harga pupuk buatan yang selalu naik, petani banyak mengeluh, karena tidak sanggup lagi membeli pupuk bagi tanaman mereka, oleh sebab itu masyarakat pedesaan perlu cerdas dalam mengolah sampah, untuk dijadikan pupuk organik, disamping itu pupuk organik lebih sehat dibandingkan dengan pupuk buatan. Teknologi yang digunakan sangat sederhana, biaya dan tenaga serta waktu pengolahan juga tidak banyak, pupuk organik yang dihasilkan dapat segera dimanfaatkan. Kegiatan pertama dari 53 anggota kelompok yang hadir hanya 26 orang atau 50%, kegiatan ketiga hadir 72 orang, yang tidak anggota juga mintak ikut, karena sudah dapat informasi manfaatnya,

bahkan mereka berjanji akan mencari sampah pasar di kota terdekat, serta masih banyak permintaan dari kelompok tani yang lain untuk diajarkan, diharapkan kegiatan ini dapat menjadi strategi nasional, guna mengatasi kelangkaan pupuk dan pengendalian sampah.

**Kata kunci:** Pupuk organik, petani pedesaan.

## A. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan AFTA 2015, di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) sangat pesat dan menyebar keseluruh pelosok, masyarakat pedesaan perlu diberikan pengetahuan dan keterampilan tepat guna agar tidak tergiur untuk datang ke kota, atau mengerjakan pekerjaan yang merugikan misalnya; mabuk, main game secara terus menerus. Membakar sampah dapat merusak diri sendiri dan lingkungan. Pembuatan pupuk organik dengan teknologi sederhana dan biaya sedikit dapat membantu petani mengurangi penggunaan pupuk buatan. Yaitu; 1 botol EM-4 seharga Rp 20.000,-, dapat menghasilkan pupuk organik cair sampai 20 liter, dan pupuk organik padat 17-18 Kg, tapi pemerintah perlu membelikan Komposternya seharga Rp 300.000,- pada setiap rumah tangga, yang dapat digunakan selama lebih kurang 30 tahun.

Jika dilaksanakan di pedesaan pembuatan pupuk organik dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, menggunakan komposter dan membuat komposter langsung di tanah, karena masih banyak lahan kosong yang dapat digunakan, hanya saja kalau komposternya langsung ke bumi, petani hanya memperoleh pupuk organik yang padat saja, sedangkan yang cair masuk ke dalam tanah, oleh sebab itu, pembuatannya harus jauh dari sumber air bersih atau dari daerah yang menghasilkan mata air untuk kehidupan masyarakat sendiri. Oleh sebab itu, rumsan masalahnya adalah; Bagaimana mengolah sampah menjadi pupuk organik bagi masyarakat kelompok tani mekar saiyo di kenegarian Tanjung Balit Kecamatan X Koto di Atas Kabupaten Solok.

## B. METODOLOGI

Tingkat mengkhawatirkan penipisan sumber daya dan peningkatan volume limbah, terkait dengan pertumbuhan penduduk dan pe-

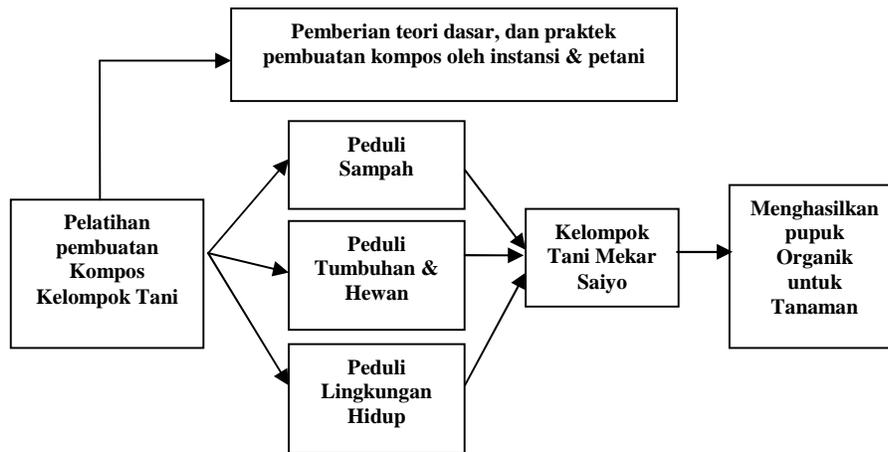
ningkatan urbanisasi telah menjadi masalah serius di seluruh dunia (Palmer & Suggate, 1996:109-122). Secara khusus dapat dikatakan bahwa pembuangan limbah sudah mulai mengubah cara biosfer berfungsi. Penipisan lapisan ozon dan perubahan iklim mulai mengurangi produktivitas ekosistem global pada saat jutaan orang mencari penghidupan dan rezeki yang akan diberikan oleh lingkungan (Simmons, 1996:163-170). Masing-masing masalah ini memerlukan perhatian global. Masalah pengelolaan sampah, pembuangan dan daur ulangnya tampak menjadi masalah paling mendesak terutama di negara berkembang di mana teknologi pengelolaan limbah domestik masih terbatas (UN-Habitat, 1988: 12-29 ; Palmer, 1998:35-77). Meningkatnya standar hidup di sebagian besar belahan dunia juga menyiratkan perubahan selera, dan peningkatan konsumsi energi dan material.

Peningkatan produksi limbah manusia akibat perubahan gaya hidup membuat masalah kritis terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang sering memiliki masalah yang lebih mendesak, seperti kerawanan pangan dan ancaman dari epidemi dan pandemi penyakit, termasuk HIV/AIDS, malaria, TBC dan sebagainya (Coinstreau, 1987:1-30; UNEP, 1994:20-35). Namun, kegagalan untuk mengatasi masalah pengelolaan limbah secara memadai hanya dapat memperburuk situasi kesehatan, seperti penyakit terutama di daerah tropis yang paling memiliki keterkaitan langsung dengan standar sanitasi dan higienis (UNEP, 1994:20-35).

Masalah serius dalam pembuangan limbah di negara-negara berkembang seperti Indonesia meningkat secara linear dengan pertumbuhan konsumsi karena meningkatnya jumlah penduduk untuk menghasilkan berbagai aliran limbah dari rumah tangga dan tempat-tempat pasar yang padat. Limbah ini, yang sering berserakan di jalanan besar maupun kecil akhirnya akan menemukan jalan mereka di sungai dan saluran air di dekatnya, yang kemudian menjadi tercemar (UNEP, 2002:50-65). Dalam banyak kasus, sumber-sumber air yang tercemar ini digunakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat miskin, untuk beberapa tujuan, termasuk minum, mencuci dan atau mandi. Wabah penyakit dan bahaya kesehatan lainnya yang pada masyarakat tidak biasa dalam pengaturan seperti di kebanyakan negara berkembang akan terus meningkat (Teurlings, 1993:7-19). Dalam kasus lain, beban organik dan nutrisi besar sungai dan sungai menyebabkan eutrofikasi luas, yang akan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekosistem (UNEP, 2002:50-65).

Pembuatan kompos adalah menumpukkan bahan-bahan organik dan membiarkannya terurai menjadi bahan-bahan yang mempunyai nisbah C/N yang rendah (telah melapuk) (Hasibuan, 2006). Bahan-bahan yang mempunyai C/N sama atau mendekati C/N tanah, dapat langsung digunakan sebagai pupuk, tetapi bila C/N nya tinggi harus didekomposisikan dulu, sehingga melapuk dengan C/N rendah yakni 10-12 (Rinsemo, 1993).

Pembuatan kompos sederhana dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu: (1) dengan cara membuat lubang di tanah, lalu menumpukkan sampah organik setelah dipisahkan dari sampah plastik dan non organik lainnya; (2) meletakkan sampah organik dalam alat dekomposter dan memberikan MM adalah zat yang menolong bakteri untuk menghancurkan/menguraikan sampah dirawat dengan cara mengatur airnya sampai terbentuknya pupuk organik yang siap untuk digunakan; (3) dengan cara membuat pupuk cair dari bahan-bahan organik yang sudah dihancurkan sampai halus dan mencampurnya dengan zat kimia yang dapat mempercepat proses. Kerangka konseptual pengabdian adalah sebagai berikut.



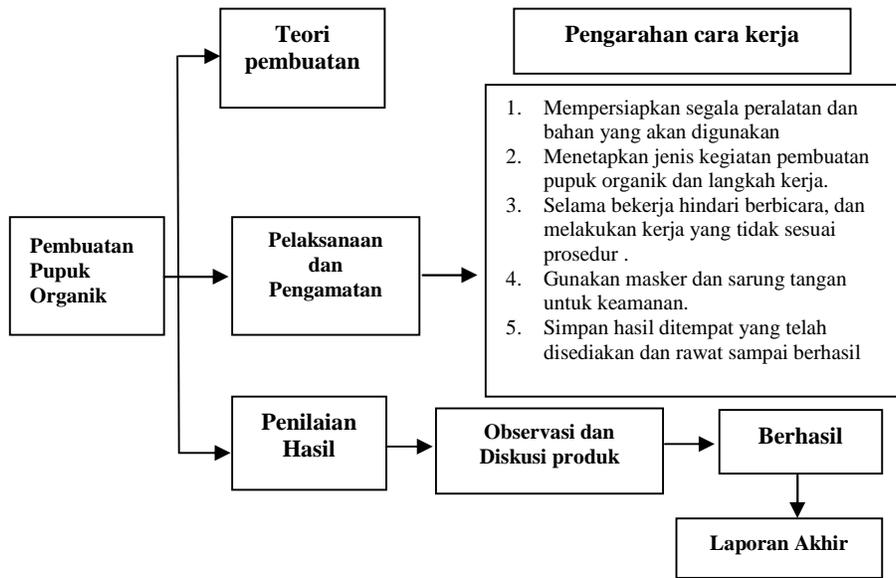
Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode multi situs, dimana dalam pelaksanaan kegiatan dibentuk beberapa kelompok, setiap kelompok pesertanya terdiri dari masyarakat petani yang datang dari satu desa, dimana pelaksanaannya dilaksanakan setelah kegiatan rutin yang mereka lakukan yaitu bertani. Kegiatan secara ber-

strata dan bernuansa mencintai lingkungan, kegiatan penelitian memakai metode *Participation Action Research* (PAR), yang dipandu oleh pendamping dilaksanakan secara berkelanjutan.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penelitian diawali dengan sosialisasi kegiatan, pemberian pengetahuan diikuti dengan pembuatan, pupuk organik, sesuai dengan langkah kerja yang telah disediakan dalam lembaran kerja, waktu pembuatan pertama hanya hadir 26 orang saja dari 53 orang peserta yang sudah terdaftar sebagai anggota, pertemuan ke dua hadir 59 orang, artinya yang tidak menjadi anggotapun berkeinginan untuk ikut berlatih. Pada pertemuan ketiga hadir 72 orang, bahkan empat orang dari yang hadir memintak untuk diadakan di kelompok tani tempat dia berdomisili. Untuk tertib kerja, maka disusun langkah kegiatan sebagai berikut.



Gambar 2. Diagram Alir Proses Kerja Penelitian

Data yang diperoleh adalah:

1. Proses pembuatan pupuk organik yang berasal dari sampah dengan proses dekomposter, dengan menggunakan media sederhana 70%, berhasil, karena masih ada yang dalam proses.

2. Mengamati proses perubahan sampah, menjadikan kompos, kemudian menjadi pupuk organik yang siap untuk digunakan (masih dalam proses).
3. Pupuk organik, jenis cair dan padat telah jadi, dan siap untuk digunakan (masih dalam proses).
4. Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan perilaku peserta yang meliputi interaksi antar peserta dan keseriusan kerja, 90%, karena peserta yang berebut bahan.
5. Keaktifan kerja dari hasil observasi; 95%, peserta aktif dan serius dalam melakukan kegiatan kerja.
6. Hasil wawancara menunjukkan 98% peserta, menjawab sangat baik untuk kegiatan di pedesaan.

Hasil penelitian yang dapat dilaporkan saat sekarang adalah tingkat keinginan dan keseriusan kerja peserta dari kelompok tani Mekar Saiyo serta masyarakat desa secara keseluruhan, yaitu meningkat secara signifikan yaitu dari 50%, meningkat langsung 100%, bahkan melebihi dari perencanaan awal sedangkan produk berupa pupuk organik masih dalam proses.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Appelman A, 2005. *Embracing Divercity Through Self-Awareness*. Columbia Universitas Of Missouri. Diakses 13 Januari 2006.
- Arief, Awar, 2003. *Pendidikan Kecakapan Hidup*, Bandung, Alfabeta.
- Hungerford et.all, 1990. *Financial Jutification Discussion Thresd*. Diakses tanggal 6 Januari 2006.
- Ibrahim Muslimin, 2003. *Pengembangan Perangkat Pembelajaran*, Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Martin MGT, 2004, *The Limits of Self Awareness*. Netherland: Cluwer Academic. Diakses 9 Januari 2006.
- Slamet, P.H. 2004. *Perkembangan Manusia Indonesia Berkarakter Teknologi*. Yogyakarta: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No.029. tahun ke dua.
- Tim BBE, 2002a, *Pendidikan Berorientasi Kecakapan Hidup (Life Skill), melalui pendekatan Broad-Based Education*, Jakarta: Depdiknas.
- Tim BBE, 2003, *Pola Pelaksanaan Kecakapan Hidup (Life Skill), melalui pendekatan Berbasis Luas*, Surabaya: SIC..
- Mulyati Arifin, dkk. 2008. Ilmu pengetahuan alam dan lingkunganku 3: Jakarta: Tim Editor PT. Setia Purna Inves, Pusat Perbukuan.

**PENDEKATAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL  
AGEN PERUBAHAN SEBAGAI FASILITATOR DALAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(KASUS DESAPALEM KABUPATEN KEDIRI DAN  
DUSUN BAJULMATI KABUPATEN MALANG)**

Zulkarnain

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Malang  
zulkarnain.fip@um.ac.id

**Abstrak**

Tujuan penulisan artikel ini mengupas tentang: (a) Peran fasilitator dalam pendekatan komunikasi hubungan interpersonal dalam pemberdayaan masyarakat; (b) Faktor faktor yang menentukan hubungan interpersonal; (c) Kasus-kasus pada agen perubahan sebagai fasilitator masyarakat dalam pemberdayaan. Kesimpulan: faktor yang dapat menentukan hubungan interpersonal, yakni: (a) afektivitas komunikasi, (b) petunjuk wajah, (c) kepribadian, (d) stereotyping, (d) kelompok rujukan, (e) kesamaan karakteristik personal, (f) daya tarik personal, (g) ganjaran), (h) familiarity, (i) kedetakan, dan (j) kemampuan (*Competence*). Ketiga, karakteristik agen perubahan terdiri dari: (a) rendah hati, (b) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, (c) relegius, (d) berkualitas, (e) ber-upaya menyediakan waktu berkomunikasi dengan tokoh masyarakat dan perorangandalam masyarakat, (f) menunjukkan keakraban dengan tokoh masyarakat dan warga dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat, (g) menggunakan empati mempengaruhi efektifitas komunikasi dengan tokoh masyarakat dan warga, (h) menggunakan pendekatan empati dan beradaptasi dalam mengorganisir masyarakat masyarakat setempat.

**Kata kunci:** komunikasi interpersonal, agen perubahan, fasilitator, pemberdayaan

## A. PENDAHULUAN

Fasilitator masyarakat pada prinsipnya adalah upaya untuk menggerakkan potensi yang ada di desa sehingga desa mampu memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk perubahan-perubahan ke arah lebih baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena itu pendampingan masyarakat tidak bisa dilihat dan dimaknai sebagai aktivitas membantu desa menjalankan aspek-aspek teknokratis dan administratif semata. Lebih dari itu, pendampingan masyarakat merupakan aktivitas mentransformasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Desa agar bisa diterjemahkan dalam laku keseharian di desa.

Dalam situasi tertentu fasilitator masyarakat sering dihadapkan pada persoalan, bagaimana agar program tersosialisasikan secara efektif? dapat diterima dan mengurangi dampak negatif. Pertanyaan ini lebih mengarah pada keterampilan komunikasi dan jalinan hubungan yang dibangun secara efektif dan saling menguntungkan. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa hampir setiap kegiatan fasilitator dalam melaksanakan pendampingan banyak didukung oleh kemampuan komunikasi dan jalinan interpersonal yang mempengaruhi bentuk persepsi dan respon orang-orang atau institusi terhadap pokok persoalan yang dihadapi.

Kemampuan komunikasi tidak hanya terletak pada kefasihan menggunakan bahasa lokal tetapi perlu didukung oleh keterlibatan emosional. Proses ini membutuhkan latihan dan praktek lapangan melalui proses yang cukup lama oleh fasilitator masyarakat. Biasanya setelah dibekali dengan kompetensi fasilitasi atau komunikasi dalam pelatihan atau lokakarya, fasilitator masyarakat akan lebih efektif untuk terjun langsung dalam suatu komunikasi untuk mengasah kemampuan berbicara, berbahasa, dan mempengaruhi orang lain secara alamiah. Kemampuan komunikasi interpersonal dalam masyarakat tidak cukup dibentuk melalui sikap percaya diri, laboratorium bahasa, tanpa didukung pemaknaan nilai-nilai sosial yang ada.

Tujuan penulisan artikel ini mengupas tentang: (a) Peran fasilitator dalam pendekatan komunikasi hubungan interpersonal dalam pemberdayaan masyarakat; (b) Faktor faktor yang menentukan hubungan interpersonal; (c) Kasus-kasus pada agen perubahan sebagai fasilitator masyarakat dalam pemberdayaan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Peran Fasilitator dalam Pendekatan Komunikasi Hubungan Interpersonal**

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, istilah fasilitator biasa dikaitkan dengan pola pendampingan dalam masyarakat. Istilah fasilitator adalah menyebutkan orang yang bekerja dalam memfasilitasi dalam pemberdayaan masyarakat. Sedangkan fasilitasi adalah upaya memberikan kemudahan, kepada siapa saja agar mampu mengerahkan potensi dan sumberdaya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya (Sumpeno, 2008).

Memahami proses komunikasi interpersonal menuntut pemahaman hubungan simbiosis antara komunikasi dengan perkembangan rasional (hubungan). Komunikasi mempengaruhi perkembangan rasional, dan pada gilirannya secara serentak perkembangan rasional mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan tersebut.

Pentingnya seorang fasilitator masyarakat harus memiliki kemampuan menjalin hubungan personal: (a) komunikasi merupakan upaya membangun hubungan antar orang atau individu yang berkepentingan terhadap proses pemberdayaan masyarakat; (b) Informasi lebih mudah ditanggapi bila dilakukan secara persuasif; (c) sikap, tanggapan dan pandangan orang lain terhadap pesan akan berbeda-beda secara individu; (d) Pola hubungan komunikasi lebih mengarah pada cara pandang individu; (e) Partisipasi masyarakat pada hakekatnya keterlibatan individu secara emosional dalam suatu kerjasama; (f) Membangun kesamaan pandangan terhadap pesan dimulai dari individu; (g) Komunikasi dan jalinan personal sebagai jembatan fasilitator untuk mempengaruhi dan memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan seperti yang diharapkan; (h) Siklus kegiatan pendampingan, seorang fasilitator membutuhkan penerimaan melalui kemampuan beradaptasi dan menggunakan pengaruh orang lain untuk menyampaikan pesan (Sumpeno, 2008).

Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik verbal maupun nonverbal (Mulyana, 2007).

Komunikasi interpersonal dalam lingkup program pemberdayaan masyarakat memiliki hubungan yang saling mendukung, sebagaimana pendapat Nugroho (2009) menjelaskan bahwa pende-

katan komunikasi interpersonal memudahkan pesan dapat dipahami oleh individu-individu dalam suatu masyarakat melalui interaksi komunikasi informal sebagaimana tujuan yang ingin dicapai fasilitator desa. Begitu juga interaksi komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh agen perubahan sebagai fasilitator masyarakat di Dusun Bajulmati dan di Kampung Inggris, Desa Palem Kecamatan Pare. Faktor penghambat penyampaian informasi oleh agen perubahan atau pembaharu sebagai fasilitator masyarakat, seperti penjelasan yang disampaikan kepada warga dengan bahasa yang secara umum, dalam situasi formal, sehingga tingkat pemahaman warga yang berbeda-beda, selain itu kendala pada individu yang merasa malu atau enggan bertanya di dalam pertemuan resmi atau formal.

Oleh karena itu melalui pendekatan komunikasi interpersonal memudahkan warga atau individu yang kurang paham untuk lebih leluasa bertanya terhadap pesan yang kurang terhadap pesan yang kurang mereka mengerti. Hal yang demikian dimanfaatkan fasilitator masyarakat untuk memberikan pemahaman secara maksimal, dengan pendekatan komunikasi interpersonal dengan turun langsung ke warga masyarakat, misalnya dengan mendatangi rumah-rumah masyarakat atau mengajak *ngobrol* santai setelah kegiatan formal dilaksanakan maupun pada acara lain-lainnya di desa.

Pada saat situasi tersebut, fasilitator desa berusaha memposisikan dirinya sebagai teman bagi masyarakat. Melalui posisi fasilitator desa dapat berlaku untuk melayani keluh kesah dan mengajak berbicara santai dengan mereka, secara tidak langsung fasilitator masyarakat dapat mengetahui kondisi psikologis dan watak masyarakat secara personal dan mengetahui kondisi inilah fasilitator dapat menyalurkan pesan dengan cara tepat, dengan demikian seorang fasilitator masyarakat dapat memahami watak orang perorang dalam masyarakat sehingga akan mudah mencari celah yang tepat untuk benar-benar memberikan pemahaman pesan pada komunikannya. Pendekatan interaksi komunikasi interpersonal juga dilakukandengan cara khusus, misalnya dengan sistem tarik ulur, apabila dibutuhkan, masyarakat akan ditarik atau dipaksa mengikuti keinginan pendamping. Namun ada kalanya masyarakat dilepas atau dibiarkan menjalankan kegiatannya dengan keinginan sendiri.

## 2. Faktor-Faktor yang Menentukan Hubungan Interpersonal

Seorang fasilitator masyarakat atau pendamping masyarakat harus memiliki keseriusan, ketekunan disamping pengetahuan yang cukup tentang masalah kemasyarakatan. Pada dasarnya tugas pendampingan yang dilakukan berkaitan erat dengan bagaimana seorang fasilitator masyarakat memotivasi masyarakat untuk melakukan tindakan yang dianggap penting dalam memecahkan persoalan dengan mengembangkan potensinya secara mandiri.

Kunci keberhasilan seorang fasilitator masyarakat dalam mendampingi masyarakat terletak pada persiapan dirinya untuk turun dan terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat, sehingga tidak cukup hanya berbekal kemampuan wawasan tentang pemberdayaan, tetapi juga perlu memiliki penghayatan tentang jatidiri manusia dan bagaimana melakukan interaksi komunikasi interpersonal secara efektif serta siap memegang tanggung jawab agar kegiatan fasilitasi yang dilakukan dapat berhasil secara efektif.

Menurut Sumpeno (2008), ada sepuluh hal yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator agar pendampingan masyarakat desa dapat berjalan secara efektif, antara lain meliputi: menghayati kebutuhan masyarakat; menyadari kekuatan diri; bekerja dengan penuh tanggung jawab; menikmati tugas; kebanggaan atas kinerja; menyesuaikan diri; menetapkan prioritas; berkolaborasi; *possitive believing*, dan belajar.

Selain itu, komunikasi interpersonal juga memegang peran penting dalam mencapai keberhasilan pendampingan pada masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat menentukan hubungan interpersonal, yakni: (a) efektivitas komunikasi; (b) petunjuk wajah; (c) kepribadian; (d) *stereotyping*; (e) kelompok rujukan; (f) kesamaan karakteristik personal; (g) daya tarik personal; (h) ganjaran; (i) kedekatan; dan (j) kemampuan (*Competence*). Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif apabila pertemuan antara *stakeholder* terbangun dalam situasi komunikatif interaktif dan menyenangkan. Efektivitas komunikasi sangat ditentukan oleh validitas informasi yang disampaikan dan keterlibatan dalam menformulasikan ide atau gagasan secara bersama. Bila berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan pandangan akan membuat gembira, suka dan nyaman. Sebaliknya bila berkumpul dengan orang atau kelompok yang benci akan membuat tegang, resah, dan tidak enak.

Petunjuk wajah menimbulkan kesan dan persepsi yang sangat menentukan penerimaan individu atau kelompok. Senyuman yang dilontarkan dan menunjukkan ungkapan bahagia, mata melotot sebagai kemarahan dan seterusnya. Wajah telah lama menjadi sumber informasi dalam komunikasi interpersonal. Wajah merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam menyampaikan makna dalam beberapa detik raut wajah akan menentukan dan menggerakkan keputusan yang diambil.

Kepribadian sangat menentukan bentuk hubungan yang akan terjalin. Kepribadian mengekspresikan pengalaman subjektif seperti kebiasaan, karakter dan perilaku. Faktor kepribadian lebih mengarah pada bagaimana tanggapan dan respon yang akan diberikan sehingga terjadi hubungan. Tindakan dan tanggapan terhadap pesan sangat tergantung pada pola hubungan pribadi dan karakteristik atau sifat yang dibawanya.

Fasilitator akan merespon pengalaman atau memperlakukan anggota masyarakat secara berbeda atau cenderung melakukan pengelompokan menurut jenis kelamin, cerdas, bodoh, rajin, atau malas. Penggunaan cara ini untuk menyederhanakan begitu banyak stimuli yang diterimanya. Kelompok masyarakat diberi kategori akomodatif, terdidik, konsisten, supel, partisipatif, semua sifat yang dikenakan tersebut merupakan pengkategorian pengalaman untuk memperoleh informasi tambahan dengan segera.

Dalam pergaulan masyarakat, konsultan, pendamping kepala rumah tangga, RT, RW, kepala desa, BPD, dan pekerja akan menjadi anggota organisasi atau kelompok dimana di dalamnya dapat mengaktualisasikan dirinya. Setiap kelompok memiliki norma, nilai, dan aturan tertentu. Ada kelompok yang secara emosional mengikat diri masyarakat dan berpengaruh terhadap posisi dan peran masyarakat. Melihat pada kelompok yang telah diakui kemampuan dan profesionalitasnya, maka orang akan cenderung merujuk kelompok itu untuk menentukan makna dan kesan yang ditanggapinya.

Kesamaan karakteristik personal dalam hal ini orang-orang yang memiliki kesamaan dalam nilai-nilai, norma, aturan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tingkat sosial ekonomi, budaya, agama, ideologis cenderung saling menyukai dan menerima keberadaan masing-masing. Bila percakapan yang dilakukan dengan rekan kerja atau masyarakat menunjukkan rasa senang, dan percaya hal ini diakibatkan kesesuaian terhadap sesuatu yang diketahui atau tidak. Oleh karena itu perlu

ditemukan apa yang menjadi persamaan dan kepentingan yang harus dikomunikasikan.

Dalam hal daya tarik personal terkait pada pintar, pandai bergaul, *performance* rapi cenderung ditanggapi dan dinilai dengan cara yang menyenangkan dan dianggap memiliki sifat yang baik, meskipun hal demikian belum menjadi jaminan, namun sebagian relatif menerima daya tarik personal tersebut. Penelitian mengungkapkan bahwa daya tarik seseorang baik fisik maupun karakteristik sering menjadi penyebab tanggapan dan penerimaan personal tersebut, karena personal yang memiliki daya tarik cenderung akan disikapi dan diperlukan lebih baik, sopan dan efektif untuk mempengaruhi pendapat orang lain.

Ganjaran dalam hal ini, seseorang akan menyenangkan orang lain yang memberi penghargaan atau ganjaran berupa pujian, bantuan, dorongan moral. Apabila dalam interaksi komunikasi personal fasilitator masyarakat dalam mendampingi masyarakat dengan masyarakat disekitarnya sangat menyenangkan, maka akan sangat menguntungkan ditinjau dari keberhasilan program, menguntungkan secara ekonomis, psikologis dan sosial.

*Familiarty*, dalam hal ini seseorang yang sering dikenal atau banyak diberitakan dan menjadi buah bibir masyarakat cenderung disenangi dan akan didekati. Dalam interaksi komunikasi personal, makin sering melihat dan bertemu dalam berbagai kesempatan masyarakat akan cenderung mengenal dan tertarik terhadap fasilitator desa.

Kedekatan, dalam hal ini seorang fasilitator perlu secara erat menjalin kedekatan baik dari sisi kepribadian, kebiasaan, persahabatan, persaudaraan atau hubungan baik dalam bertetangga atau bahkan tempat tinggal. Kedekatan akan mudah tumbuh diantara orang-orang yang berdekatan secara sosiologi atau psikologis.

Kemampuan, dalam hal ini masyarakat cenderung menyenangkan fasilitator masyarakat apabila memiliki kemampuan (*competence*) lebih tinggi. Dalam situasi ini, fasilitator masyarakat perlu meningkatkan kemampuan profesionalnya atau menunjukkan sesuatu yang lebih dari warga sekitarnya. Masyarakat akan cenderung menanggapi informasi dan pesan pada orang-orang yang cenderung memiliki sikap dan kemampuan yang menonjol. Dalam berbagai situasi kemampuan lebih banyak berperan dalam menumbuhkan kerjasama dan penyelesaian terhadap tugas yang disepakati bersama.

Kesebelas penjelasan tersebut merupakan indikator faktor-faktor dalam menentukan keberhasilan seorang fasilitator masyarakat dalam membangun hubungan komunikasi interpersonal dengan masyarakat, sehingga menjadi salah satu dari kompetensi dalam komunikasi interpersonal.

### **3. Pendekatan Komunikasi Interpersonal Agen Perubahan sebagai Fasilitator Masyarakat dalam Pemberdayaan**

Kampung Inggris adalah suatu komunitas lembaga kursus bahasa Inggris pada sebuah desa yang bernama Desa Palem dan Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur. Desa tersebut memiliki keunikan dan kelebihan yakni banyaknya jumlah lembaga kursus Bahasa Inggris kini jumlahnya sudah mencapai 150 lembaga kursus dan dalam 1 (satu) tahun lembaga-lembaga kursus yang ada di Kampung Inggris Pare ini dapat menampung lebih dari 3000 peserta kursus.

Munculnya lembaga kursus tersebut sebagai awal jembatan perubahan sosial yang terjadi oleh masyarakat di Desa Palem dan Desa Tulungrejo, dimana pemberdayaan masyarakat merasakan perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Keberadaan lembaga kursus yang semakin bertambah dan menyebar di sekitar lingkungan kedua desa tersebut banyak memberikan peluang-peluang mata pencaharian baru.

Berawal dari dinamisnya perkembangan kursus bahasa Inggris dengan sistem pendekatan pendidikan luar sekolah, maka semakin meningkat pula dinamika ekonomi masyarakat yang menopang kebutuhan peserta didik atau warga belajar pada kampung Inggris tersebut, sehingga muncullah usaha-usaha ekonomi baru oleh masyarakat sekitar dan pendatang yang dapat meningkatkan ekonominya, seperti warung, rumah kos-kosan atau kontrakan, warnet, toko pakaian, khususnya busana muslim, usaha jajanan keliling, persewaan sepeda pancal, toko buku, dan usaha lain yang berkaitan dengan keperluan para peserta didik yang sebagian besar datang dari pelajar dan mahasiswa, bahkan pekerja dari pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Hal ini tidak terlepas dari peran yang diterapkan oleh agen perubahan sebagai salah satu fasilitator masyarakat dalam mengembangkan kampung Inggris tersebut. Agen perubahan (*agent of change*) adalah orang yang bertugas mempengaruhi klien agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh pengusaha pembaharuan (*change agency*). Semua agen perubahan bertugas membuat

jalinan komunikasi antara sumber inovasi dengan sistem masyarakat atau sasaran inovasi.

Kampung Inggris didirikan oleh Mohammad Kalend pada tahun 1976. Sejarahnya diawali ketika tahun 1976 Mohammad Kalend (ketika itu berusia 27 tahun) seorang santri asal Kutai Kartanegara tengah menimba ilmu di Pondok Modern Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Di tahun kelima ia “nyantri” karena ketiadaan biaya Mohammad Kalend terpaksa meninggalkan bangku Pondok Pesantren Gontor. Dalam situasinya yang serba sulit itu seorang temannya memberitahukan adanya seorang guru yang baik dan pintar bernama Achmad Yazid di Desa Pare yang menguasai delapan bahasa asing.

Mr. Kalend seorang agen perubahan yang bertugas menggerakkan masyarakat agar mau menerima inovasi sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh agen perubahan (*agent of change*). Semua agen perubahan bertugas membuat jalinan komunikasi antara sumber inovasi, tokoh masyarakat, dan sasaran inovasi.

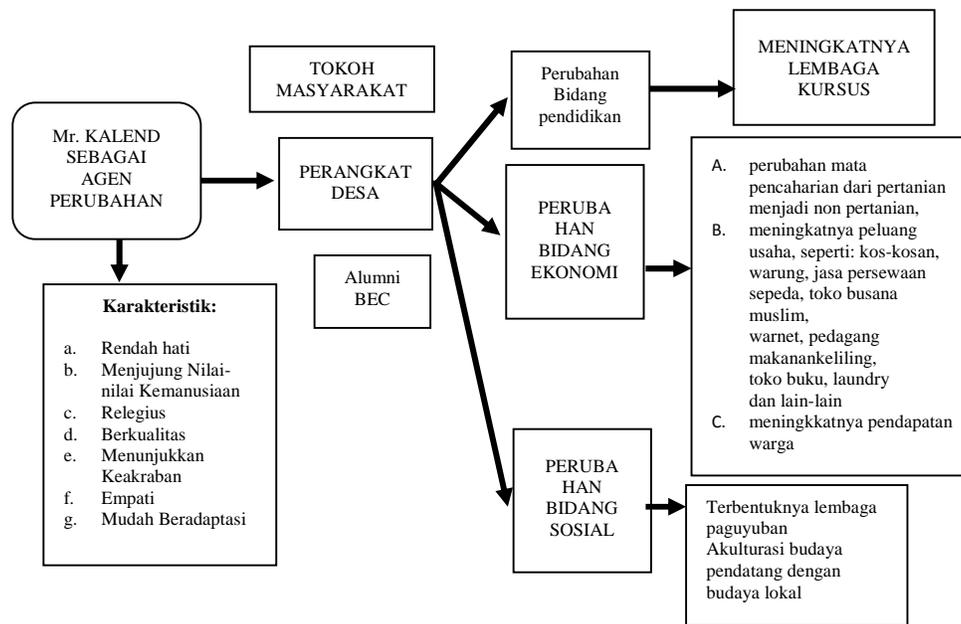
Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik agen perubahan terdiri dari: (a) rendah hati; (b) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; (c) relegius; (d) berkualitas; (e) berupaya menyediakan waktu berkomunikasi dengan tokoh masyarakat dan perorangan di dalam masyarakat; (f) menunjukkan keakraban dengan tokoh masyarakat dan warga dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat; (g) menggunakan empati untuk mempengaruhi efektifitas komunikasi dengan tokoh masyarakat dan warga; (h) menggunakan pendekatan empati dan beradaptasi dalam mengorganisir masyarakat setempat.

Berdasarkan paparan data penting tersebut, maka karakteristik agen perubahan berperan dalam meningkatkan pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Agen perubahan mulai dengan mengemukakan berbagai masalah yang ada, membantu menemukan masalah yang penting dan mendesak, serta meyakinkan masyarakat bahwa mereka mampu memecahkan masalah tersebut. Pada tahap ini, agen perubahan menentukan kebutuhan masyarakat dan membantu cara menemukan masalah atau kebutuhan dengan cara konsultatif.

Agen perubahan bertanggung jawab untuk menganalisa situasi masalah yang dihadapi masyarakat agar dapat menentukan mengapa berbagai alternatif yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan klien (diperlukan alternatif baru). Untuk sampai pada kesimpulan diagnosa, agen perubahan harus meninjau situasi dengan penuh empati.

Membangkitkan kemauan klien untuk berubah. Setelah agen perubahan menggali berbagai macam cara yang mungkin dapat dipakai oleh klien untuk mencapai tujuan, maka agen perubahan bertugas untuk mencari cara memotivasi dan menarik perhatian klien agar timbul kemauannya untuk berubah (membuka dirinya untuk menerima inovasi). Tetapi cara yang digunakan harus berorientasi pada klien, artinya berpusat pada kebutuhan klien, jangan terlalu menonjolkan inovasi.

Mewujudkan kemauan dalam perbuatan. Agen pembaharu berusaha untuk mencoba mempengaruhi tingkah laku klien dengan persetujuan dan berdasarkan kebutuhan klien (jangan memaksa). Pada tahap ini, tindakan agen pembaharu yang paling tepat menggunakan pengaruh secara tidak langsung, yakni dengan mendayagunakan pengaruh pemuka pendapat agar mengaktifkan kegiatan kelompok klien. Alur pola peran agen perubahan dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Inggris Pare sebagai berikut.



Gambar. 1. Pola Peran Agen Perubahan dalam Memberdayakan Masyarakat

Begitu juga dengan pemberdayaan masyarakat di Dusun Bajulmati Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang. Pendekatan komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh Bapak SI, berasal dari Mojokerto Jawa Timur. Bapak dari ketiga orang anak tersebut dulunya pernah menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Sebelum Pak SI lulus dari UIN Malang, pada tahun 1989, Ia mendapatkan tugas dari kampus untuk melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bajulmati.

Dusun Bajulmati Kecamatan Gedangan pada saat itu keadaannya tidak seperti desa Bajulmati pada saat sekarang. Dusun tersebut pada saat itu terisolir dan masih dikelilingi oleh hutan. Akses jalan satu-satunya harus melalui dua sungai dan melewati jembatan. Jika terjadi musim hujan dan banjir maka jelas akan menghambat jalan, belum lagi kondisi pendidikan, dan ekonomi masih tertinggal. Bidang pendidikan sangat memperhatikan, karena 90% warga masyarakat Dusun Bajulmati usianya 40 tahun ke atas masih buta huruf, dan tingkat pendidikannya yang rendah untuk dapat bersekolah SD, apabila bersekolah harus menempuh jarak 5 sampai dengan 7 kilo meter, jarak ke sekolah SMP ditempuh dengan minimal jarak 8 sampai dengan 21 kilo meter di Kecamatan Gedangan. Sedangkan untuk masyarakat yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu SMA maka dapat ditempuh dengan jarak 12 kilo meter untuk daerah Sitarjo dan 42 kilo meter di daerah Turen. Keadaan yang seperti itu otomatis jarak juga menjadi kendala bagi masyarakat Dusun Bajulmati untuk mengikuti pendidikan pada saat itu.

Sebagai fasilitator agen perubahan dituntut untuk memiliki sifat-sifat tertentu. Beberapa sifat yang dimiliki oleh seorang SI adalah: (a) memiliki rasa empati yang tinggi; (b) memiliki kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat; (c) memiliki kemauan untuk mengalokasikan banyak waktunya untuk masyarakat dan; (d) memiliki kemampuan untuk mendiagnosis masalah dan kebutuhan masyarakat.

Sifat pertama adalah rasa empati yang merupakan hal penting dalam diri agen perubahan. Hal ini disebabkan rasa empati akan mengarahkan agen perubahan untuk memiliki kepedulian terhadap masyarakat sehingga memotivasi SI untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini sejalan dengan pendapat Rogers (1983:276) yang menyatakan bahwa “keberhasilan agen perubahan berhubungan positif dengan empati mereka pada binaan”.

Pernyataan Rogers juga dijelaskan Nasution (2009) bahwa “suatu sifat yang paling penting adalah empati”. Kedua tokoh di atas dengan jelas mengatakan bahwa rasa empati merupakan syarat yang sangat penting yang harus ada pada agen perubahan. Kemampuan agen perubahan dalam mendiagnosa kebutuhan dan masalah binaan sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar program yang dijalankan oleh sesuai dengan kebutuhannya. Program yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah akan mengalami kegagalan bahkan dapat mengalami penolakan dari masyarakat. Maka dari itu mendiagnosa kebutuhan adalah hal yang sangat penting bagi agen perubahan untuk menentukan keberhasilan program.

Pernyataan tersebut didukung oleh Rogers (1983) bahwa “keberhasilan agen perubahan berhubungan positif dengan seberapa jauh program difusi sesuai dengan kebutuhan binaan”. Kemudian pernyataan dari Everet mendapat dukungan dari Nasution (2009) bahwa “agen perubahan dalam prosesnya harus mampu memberikan petunjuk mengenai bagaimana mengenali dan merumuskan kebutuhan”. Jika masalah dan kebutuhan telah teridentifikasi maka agen perubahan berkewajiban untuk mempersilakan binaannya mencari pemecahan terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi.

Mengidentifikasi setiap masalah dan kebutuhan binaan harus dilakukan dengan cara berposes yang membutuhkan alokasi waktu cukup lama. Maka dari itu alokasi waktu dari agen perubahan sangat dibutuhkan, bahkan harus mementingkan kepentingan binaan dari pada kepentingan diri agen perubahan. Menurut Duncan (dalam Nasution, 2009) bahwa syarat seorang agen perubahan adalah “kemampuan administratif yaitu persyaratan administratif yang paling dasar dan elementer, yakni kemauan untuk mengalokasikan waktu untuk persoalan-persoalan yang relatif *njelimet*”. Alokasi waktu yang diberikan agen perubahan kepada binaan berperan penting dalam mengenali kehidupan dan kebiasaan dari binaan. Norma dan sistem sosial yang ada didalamnya menjadi salah satu faktor penting yang harus dipahami oleh agen perubahan.

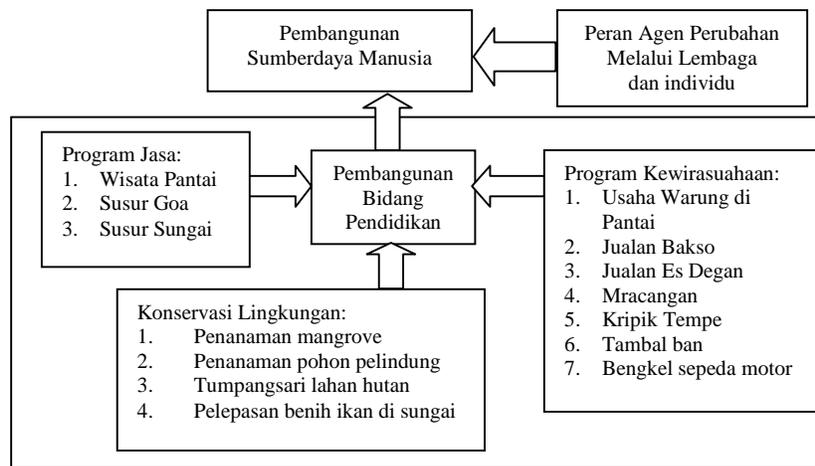
Proses interaksi dengan masyarakat juga membutuhkan waktu yang cukup banyak dengan binaannya. Interaksi dan komunikasi yang terjadi antar keduanya dilakukan secara intens untuk menumbuhkan persepsi yang baik terhadap sosok agen perubahan. “Para agen perubahan yang berhasil acap kali berupaya menampilkan kesan baik

menyangkut perubahan dengan cara meng-identifikasinya dengan unsur-unsur budaya yang sudah dikenal” (Horton, 1985).

Kedua pernyataan tersebut menjelaskan bahwa interaksi dan komunikasi yang baik mutlak diperlukan oleh agen perubahan untuk membangun kesan yang positif dan mempermudah agen perubahan untuk menjalankan programnya. Komunikasi dengan Sesepuh dusun, tokoh agama, dan perangkat desa harus dibangun dengan baik karena mereka merupakan *key person* dari masyarakat binaan. Mereka merupakan orang yang paling dekat dan paling memahami masyarakatnya serta menjadi orang yang sangat dipercaya dan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

Menurut Hanafi (1991) bahwa “tokoh masyarakat adalah anggota masyarakat (sistem sosial) dimana mereka menggunakan pengaruhnya”. Pengaruh yang dibawa oleh mereka akan diikuti oleh masyarakatnya, karena besar pengaruhnya 86 pada masyarakat maka program yang akan dijalankan agen perubahan juga membutuhkan bantuan dari tokoh masyarakat tersebut. Semua sifat yang ada di dalam diri SI seperti diatas telah memenuhi kriteria sebagai agen perubahan.

Pola agen dalam pemberdayaan masyarakat digambarkan dalam diagram sebagai berikut.



Gambar 2. PolaAgen Perubahan di Dusun Bajulmati Desa Gajahrejo Kabupaten Malang

Sosok agen perubahan yaitu SI yang mengembangkan dan menjadi penyebar inovasi khususnya dalam pendidikan berbasis masyarakat PAUD Bina Harapan, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rumah Pintar Harapan, TK Harapan, TPQ Nurul Huda, Perpustakaan di Dusun Bajulmati, serta TK Tunas Harapan dan SD Harapan Goa Cina. Agen perubahan yaitu SI dan MJ merintis sejak tahun 1989 telah melakukan upaya-upaya dalam proses mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat dalam aspek peningkatan mutu sumber daya manusia.

Selain itu, dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia warga Bajulmati Kegiatan pelatihan juga merupakan salah bentuk mendidik masyarakat yang sering dilakukan di Lembaga Sosial Pendidikan Harapan Bajulmati. Dalam mengadakan berbagai pelatihan perlu adanya kerjasama dan juga pemateri. Salah satu hal yang menjadi keuntungan di Dusun Bajulmati adalah banyaknya rekan dari SI dan MJ yang turut membantu mengadakan pelatihan, bakti sosial dan bantuan lainnya.

Pola peran pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari peningkatan kualitas pendidikan dengan merintis pendidikan taman kanak-kanak (TK) yang dibangun oleh swadaya masyarakat sendiri, merintis SD Kecil, mandiri-kan Taman Bacaan Masyarakat (TBM), pemberdayaan dengan peningkatan pendidikan dasar baik setingkat SD maupun sekolah lanjutan pertama, dan atas.

Dalam menjalankan program pemberdayaan, agen perubahan selalu melakukan tahapan pertama yaitu untuk membina hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, karena melalui menjalin hubungan akan tercipta komunikasi dan kepercayaan. Dengan terciptanya kepercayaan, maka akan lebih mudah dalam mendiagnosa kebutuhan dan masalah masyarakat, karena informasi yang disampaikan masyarakat akan lebih valid dan sesuai dengan keadaan. Tahap yang dilalui oleh agen perubahan selanjutnya adalah dengan memberikan sumber penyelesaian masalah sehingga pemecahan masalah dapat dilakukan dan diterima oleh masyarakat/sasaran kegiatan. Dengan meningkatnya kemampuan masyarakat dan adanya pemecahan masalah maka tahap akhir yang dilakukan oleh agen perubahan adalah menjaga kestabilan.

### C. SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa: Pertama, fasilitator masyarakat harus memiliki kemampuan menjalin hubu-ngan personal: (a) komunikasi membangun hubungan antar orang atau individu yang berkepentingan terhadap proses pemberdayaan masyarakat; (b) Informasi dilakukan secara persuasif; (c) sikap menanggapi pandangan orang lain berbeda-beda secara individu; (d) Pola hubungan komunikasi lebih mengarah pada cara pandang individu; (e) Partisipasi masyarakat dibutuhkan keterlibatan individu secara emosional dalam suatu kerjasama; (f) Membangun kesamaan pandangan terhadap pesan dimulai dari individu; (g) Komunikasi dan jalinan personal sebagai jembatan fasilitator untuk mempengaruhi dan memotivasi seseorang untuk melakukan tindakan seperti yang diharapkan; (h) Siklus kegiatan pendampingan, seorang fasilitator membutuhkan penerimaan melalui kemampuan beradaptasi dan menggunakan pengaruh orang lain untuk menyampaikan pesan.

Kedua, faktor yang dapat menentukan hubungan interpersonal, yakni: (a) afektivitas komunikasi; (b) petunjuk wajah; (c) kepribadian; (d) *stereotyping*; (d) kelompok rujukan; (e) kesamaan karakteristik personal; (f) daya tarik personal; (g) ganjaran; (h) *familiarity*; (i) kedekatan; dan (j) ke-mampuan (*competence*).

Ketiga, karakteristik agen perubahan terdiri dari: (a) rendah hati; (b) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; (c) religius; (d) berkualitas; (e) ber-upaya menyediakan waktu berkomunikasi dengan tokoh masyarakat dan perorangan dalam masyarakat; (f) menunjukkan keakraban dengan tokoh masyarakat dan warga dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat; (g) menggunakan empati mempengaruhi efektifitas komunikasi dengan tokoh masyarakat dan warga; (h) menggunakan pendekatan empati dan beradaptasi dalam mengorganisir masyarakat masyarakat setempat.

### DAFTAR RUJUKAN

- Hanafi, Abdillah. 1981. *Memasyarakat Ide-Ide Baru*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Horton, Paul B, Hunt Chesterl. 1985. *Sociologi*. New York: Mcgraw-Hill
- Mulyana, Dedy. 2007. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, A.W. 2009. *Komunikasi Interpersonal Antara Perawat Dan Pasien(Studi Deskriptif Kualitatif Aktivitas Komunikasi Terapeutik*

- Antara Perawat Terhadap Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta*). Abstrak. Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Rogers, Everett M, 1995, *Diffusions of Innovations, Fifth Edition*. New York: Tree Press.
- Sumpeno Wahyudin. 2008. *The Capacity Building Hand Book: Menjadi Fasilitator Genius*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi Suatu Tinjauan Sosiologis*. Malang: UMM Press.

## PERANAN PENDAMPING DESA DALAM MEMBENTUK MASYARAKAT SADAR BENCANA SEBAGAI SALAH SATU MITIGASI BENCANA

Vevi Sunarti

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang  
vj\_vevi@yahoo.com

### Abstract

Undang-undang No. 6 of 2014 about Desa, Government Regulation No. 60 about Dana Desa and Permendes PDTT No. 3 of 2015 about Tenaga Pendamping Desaas the momentum for stakeholders to make disaster education as one of the priority programs in the development and empowerment of rural communities. This is due to the amount of damage and even setbacks against development outcomes caused by disaster is huge. In order to minimize the impact of disasters, so it needed the villagers are aware of disasters through disaster education. This disaster education is one important task that must be carried out by assistants villages particularly Cadre Community Empowerment (KPMO). KPMO is a member of the community that have a very central role as everyday direct contact with villagers. Disaster education program of the rural population is expected in turn spawned a cadre of community empowerment are aware of the disaster and villages disaster preparedness as one of the steps in disaster mitigation, so that the results of the development that has been undertaken by the government to minimize the risk of damage both a physical or non-physical when disaster strikes.

**Key words:** disaster, mitigation, mentoring village, empowerment

### A. PENDAHULUAN

Data Badan Penanggulangan Bencana (*dibi.bnpb.go.id*) dalam kurun waktu tahun 2000 sampai tahun 2016 di Sumatera Barat tercatat sebanyak 707 jumlah kejadian bencana baik alam ataupun non alam

SEMINAR NASIONAL  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
"KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"  
Kamis/ 6 Oktober 2016

dengan jumlah korban meninggal 2.180 orang, terluka 3.735 orang sedangkan jumlah rumah rusak berat sebanyak 72.333 rumah dan rusak ringan sebanyak 139.585 rumah serta telah berdampak terhadap kehidupan sebanyak 102.031 jiwa. Besarnya akibat yang ditimbulkan oleh bencana tersebut tentu saja akan berakibat terhambatnya pembangunan bahkan terjadi kemunduran dalam pembangunan, baik di kota ataupun di kawasan perdesaan akibat hancurnya sarana dan prasarana yang telah dibangun. Artinya, bencana alam ataupun bencana non alam bisa menghancurkan sasaran agenda pembangunan yang telah tercapai dan mendorong jutaan orang akan kembali hidup di bawah garis kemiskinan.

Salah satu dampak dari bencana tersebut adalah wilayah perdesaan. Kemunduran pembangunan kawasan perdesaan akibat bencana ini menjadi masalah tersendiri, di mana satu sisi pemerintah telah mengalokasikan anggaran pembangunan desa dan di sisi lain pembangunan yang dilakukan tersebut memiliki ancaman terhadap bencana baik alam maupun bencana sosial yang pada gilirannya akan menggerus anggaran juga. Karena akibat yang ditimbulkan bencana ini dapat menghancurkan hasil-hasil pembangunan yang telah diperoleh dengan susah payah. Sementara dana yang digunakan untuk tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana juga telah mengurangi anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan nasional dan program-program pengentasan kemiskinan ataupun program pemberdayaan masyarakat lainnya.

Sejatinya dampak yang ditimbulkan oleh bencana ini bisa diminimalisir, jika kesadaran masyarakat di suatu daerah yang rawan bencana terpupuk sejak dini. Kesadaran bencana bukanlah lahir serta merta ataupun instan namun harus melalui berbagai cara, salah satunya adalah pendidikan kebencanaan yang bisa didapatkan melalui pendidikan keluarga, sekolah ataupun pendidikan luar sekolah.

Selama ini bencana selalu dianggap sebagai sesuatu yang di luar kendali manusia. Sebetulnya, jika kaji lebih jauh, bencana juga tak lepas dari kegagalan kita untuk memasukkan faktor dan potensi pengurangan resiko bencana ke dalam arus utama perencanaan dan kebijakan pembangunan. Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi bencana tidak terjadi begitu saja. Dalam taraf tertentu, bencana terjadi karena kegagalan pembangunan yang mengakibatkan peningkatan kerentanan terhadap resiko bencana (Teddy Lesmana, 2012).

Di sisi lain dengan lahirnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta peraturan turunannya yang salah satunya tentang dana desa dan program pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan pembangunan desa, maka sudah menjadi sebuah keniscayaan bahwa salah satu program dalam pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping pembangunan desa adalah program pendidikan kebencanaan terhadap masyarakat desa sehingga diharapkan pada gilirannya akan melahirkan kader-kader pemberdayaan masyarakat desa yang sadar bencana dan desa-desa siaga bencana sebagai salah satu langkah dalam mitigasi bencana, sehingga hasil-hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah dapat diminimalisasi resiko kerusakannya baik secara fisik ataupun non fisik jika bencana terjadi.

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Desa dan Dana Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of hauses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Desa” menyatakan bahwa “Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat” (Widjaja, 2003).

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1).

Sedangkan menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan desa adalah mengartikan Desa sebagai berikut, “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 12).

Dalam pengertian desa menurut Widjaja dan UU Nomor 32 Tahun 2004 di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis, sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Dana desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Sedangkan prioritas penggunaan dana desa tersebut adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan. Pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- a. menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa.
- b. sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan dana desa; dan
- c. sebagai acuan bagi pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana desa.

## 2. Pendampingan Desa dan Tenaga Pendamping

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, kegiatan pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.

Pendampingan sebagai suatu strategi yang umum digunakan oleh pemerintah dan lembaga non profit dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia, sehingga mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari permasalahan yang dialami dan berupaya untuk mencari alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan disetiap kegiatan pendampingan. Suharto (2005) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, selanjutnya dikatakannya pula dalam kutipan Payne (1986) bahwa pendampingan merupakan strategi yang lebih mengutamakan “*making the best of the client’s resources*”.

Menurut Departemen Sosial, (2005) pendampingan adalah proses pembimbingan atau pemberian kesempatan kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang dilakukan oleh para pendamping atau fasilitator melalui serangkaian aktivitas yang memungkinkan komunitas tersebut memiliki kemampuan dan kepercayaan diri dalam menghadapi permasalahan di seputar kehidupannya.

Sedangkan tujuan pendampingan desa menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015, Pasal 2 meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor;
- d. mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berperan sebagai fasilitator,

komunikator dan dinamisor, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok (CCDP, 2015).

Berdasarkan hal di atas, pendampingan bisa diartikan sebagai kegiatan yang menggunakan bantuan dari pihak luar, baik perorangan maupun kelompok untuk menambahkan kesadaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan pemecahan permasalahan. Pendampingan diupayakan untuk menumbuhkan keberdayaan dan keswadayaan agar masyarakat yang didampingi dapat hidup secara mandiri. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk anggota, serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran sebagai manusia yang utuh, berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Untuk mesukseskan kegiatan pendampingan desa dalam membangun, maka pemerintah menyiapkan tenaga pendamping desa yang terdiri dari: (a) tenaga pendamping profesional; (b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau (c) pihak ketiga (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015).

Tenaga pendamping profesional terdiri atas: (a) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berkedudukan di kabupaten; dan (c) Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi, sedangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa berkedudukan di Desa. Pihak ketiga sebagai pendamping desa terdiri dari: (a) Lembaga Swadaya Masyarakat; (b) Perguruan Tinggi; (c) Organisasi Kemasyarakatan; atau (d) Perusahaan (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015).

Seorang pendamping mempunyai peranan kunci dalam program pengembangan masyarakat. Tugas utama seorang pendamping adalah menggali, membangun dan mengembangkan kapasitas masyarakat agar mampu mengorganisasi dirinya kelompoknya, serta menentukan sendiri upaya-upaya yang diperlukan dalam memperbaiki kehidupan mereka. Pendamping bekerja bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun kepercayaan diri mereka terhadap kemampuan dan potensi yang sebenarnya mereka miliki.

Pendamping desa bertugas mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

- a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;
- e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;
- f. mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
- g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 pasal 24 menyebutkan bahwa kompetensi pendamping desa sekurang-kurangnya memenuhi unsur kualifikasi antara lain:

- a. memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat;
- b. memiliki pengalaman dalam pengorganisasian masyarakat desa;
- c. mampu melakukan pendampingan usaha ekonomi masyarakat desa;
- d. mampu melakukan teknik fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat desa dalam musyawarah desa; dan/atau memiliki kepekaan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat desa.

### **3. Bencana dan Mitigasi Bencana**

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manu-

sia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2007). Rahmat (2006) menyatakan bahwa mitigasi adalah suatu tahapan yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan dampak negative kejadian bencana terhadap kehidupan dengan menggunakan cara alternatif yang lebih dapat diterima secara ekologi. Bencana ini bisa berupa gempa bumi, tsunami, banjir, longsor, kebakaran, angin puting beliung, wabah penyakit maupun kecelakaan lalu lintas dan lainnya.

Sebagai daerah yang rawan bencana, maka penanggulangan bencana sudah dimulai dari tahap pra bencana atau yang lebih dikenal dengan mitigasi bencana. Mitigasi merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Resiko (*risk*) bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Kegiatan mitigasi dapat dilakukan melalui sosialisasi bagaimana menghadapi bencana, simulasi evakuasi bencana, rambu-rambu rawan bencana, membuat jalur evakuasi, pendidikan dan pelatihan menghadapi dan mengurangi dampak bencana, dan lain sebagainya.

Mitigasi bencana bisa berupa mitigasi fisik dan mitigasi non fisik. Mitigasi fisik (*structure mitigation*) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan membangun infrastruktur. Sedangkan mitigasi non fisik merupakan (*non structure mitigation*) upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana (Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 118 Tahun 2008).

Menurut Nirmalawati (2011) bencana dapat terjadi karena ditimbulkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) kurangnya pemahaman tentang karakteristik bencana; (2) sikap atau perilaku yang mengakibatkan kualitas sumber daya alam; (3) kurangnya informasi peringatan dini; dan (4) ketidak berdayaan atau ketidak mampuan dalam menghadapi bahaya. Karena bencana merupakan suatu proses kejadian, maka diperlukan suatu penanganannya dalam manajemen ben-

cana, yaitu dimana seluruh kegiatan yang meliputi aspek perencanaan dan penanggulangan bencana, pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana dimana dikenal dengan "Siklus Manajemen Bencana".

Siklus manajemen bencana dibagi dalam tiga kegiatan utama, yaitu: (1) kegiatan pra bencana (pencegahan, mitigasi, kesiap siagaan, serta peringatan dini); (2) kegiatan saat terjadi bencana (tanggap darurat, seperti SAR, bantuan darurat dan pengungsian); dan (3) kegiatan pasca bencana (pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi). Kegiatan pra bencana inilah yang sering dilupakan, padahal justru kegiatan pada pra bencana ini sangat penting karena apa yang sudah dipersiapkan pada tahap ini merupakan modal dalam menghadapi bencana dan pasca bencana.

Menurut Agus Rahmat dalam artikel Manajemen dan Mitigasi Bencana secara umum kegiatan manajemen bencana dapat dibagi dalam kedalam tiga kegiatan utama, yaitu:

1. Kegiatan pra bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, mitigasi, kesiap siagaan, serta peringatan dini;
2. Kegiatan saat terjadi bencana yang mencakup kegiatan tanggap darurat untuk meringankan penderitaan sementara, seperti kegiatan *Search And Rescue* (SAR), bantuan darurat dan pengungsian;
3. Kegiatan pasca bencana yang mencakup kegiatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Kegiatan pada tahap pra bencana selama ini masih kurang menjadi perhatian, padahal kegiatan ini sangat penting karena merupakan modal sebagai persiapan dalam menghadapi bencana dan pasca bencana. Sedikit sekali pemerintah bersama masyarakat maupun swasta memikirkan tentang langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan apa yang perlu dilakukan di dalam menghadapi bencana atau bagaimana memperkecil dampak bencana.

Berdasarkan Konferensi Pengurangan Bencana Dunia, substansi dasar yang merupakan prioritas kegiatan mitigasi sampai tahun 2015, antara lain:

1. meletakkan pengurangan resiko bencana sebagai prioritas nasional maupun daerah yang pelaksanaannya harus didukung oleh kelembagaan yang kuat;
2. mengidentifikasi, mengkaji dan memantau risiko bencana serta menerapkan sistem peringatan dini;

3. memanfaatkan pengetahuan, inovasi dan pendidikan untuk membangun kesadaran keselamatan diri dan ketahanan terhadap bencana pada semua tingkatan masyarakat;
4. mengurangi faktor-faktor penyebab risiko bencana;
5. memperkuat kesiapan menghadapi bencana pada semua tingkatan masyarakat agar respons yang di lakukan lebih efektif;

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Menurut Kartasmita (1997) hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Komitmen pemerintah Republik Indonesia terhadap pembangunan perdesaan pada tahun 2016 ini sangat tinggi, hal ini bisa dilihat dari sisi alokasi anggaran dana desa yang mencapai Rp46,98 triliun. Untuk Sumatera Barat saja pada tahun anggaran 2016 mempunyai alokasi dana desa sebesar Rp598.637.609.000,00 dengan jumlah desa sebanyak 880 buah desa (Data Kemenkeu, 2015). Dana yang besar tentunya saja menuntut pengelola dan semua pihak yang terlibat harus mengelola dengan akuntabilitas dan penuh tanggungjawab. Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional, desa merupakan bagian tolok ukur keberhasilan suatu pembangunan jika dilihat dari distribusi pembangunan itu sendiri.

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat

permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pemerintah melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI telah membuat berbagai program prioritas yang berhubungan dengan pembangunan kawasan perdesaan di seluruh Indonesia. Salah satu dari tujuh program prioritas kementerian desa adalah pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk di kawasan transmigrasi. Implementasi kegiatan dari program prioritas ini melalui jalan peningkatan peran aktif masyarakat desa sebagai tenaga pendidikan dan kader kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Dari definisi tersebut terlihat ada tiga tujuan utama dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisir diri masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati (Sutoro Eko, 2002).

## **2. Pendampingan Desa dan Mitigasi Bencana**

Kegiatan pendampingan desa ini pada dasarnya merupakan upaya untuk mengajak serta dan membimbing masyarakat (individu atau kelompok) untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya, agar mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Program pendampingan ini membutuhkan ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) memiliki integritas dan kualitas, yang mampu berpe-

ran sebagai fasilitator, komunikator dan dinamisator, serta berperan sebagai konsultan tempat bertanya bagi kelompok masyarakat desa.

Tujuan pendampingan desa dalam Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 meliputi:

- a. meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa;
- b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif;
- c. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antarsektor; dan
- d. mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.

Untuk melaksanakan pendampingan ini, berdasarkan Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 disebutkan bahwa tenaga pendamping desa terdiri dari tiga kelompok yaitu: (1) tenaga pendamping profesional; (2) kader pemberdayaan masyarakat (KPM); dan (3) pihak ketiga.

Tenaga pendamping profesional terdiri atas: (a) pendamping desa yang berkedudukan di kecamatan; (b) pendamping teknis berkedudukan di kabupaten; dan (c) tenaga ahli pemberdayaan masyarakat berkedudukan di pusat dan provinsi, sedangkan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) berkedudukan di desa. Pihak ketiga sebagai pendamping desa juga bisa berupa: (a) lembaga swadaya masyarakat (LSM); (b) perguruan tinggi; (c) organisasi kemasyarakatan; atau (d) perusahaan (Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015).

Jika dilihat dari Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, terlihat bahwa tenaga pendamping yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa adalah Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), sedangkan pendamping teknis berkedudukan di kecamatan dan tenaga ahli berkedudukan di pusat dan provinsi. Hal ini tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi KPM dalam melakukan pendampingan pembangunan desa karena kurang efektif mengingat lokasi dan jarak antar desa dengan kecamatan dan bahkan ibu kota provinsi relatif jauh. Untuk itu, tugas dan tanggungjawab yang sangat besar berada pada Kader Pemberdayaan masyarakat desa yang berada di garda terdepan dan sehari-hari bersentuhan langsung dengan masyarakat dan pembangunan desa.

Dengan strategisnya peran kader pemberdayaan masyarakat hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendamping profesional dan tenaga ahli untuk mentransfer *knowledge* kepada KPM

tersebut, melakukan mentoring dalam rangka pemberdayaannya khususnya dalam mitigasi bencana melalui pemberian pendidikan kebencanaan.

KPMD sebaiknya berasal dan besar di daerah atau desa tersebut serta memiliki pengetahuan, pengaruh, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.

Walaupun dalam Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 tidak menyebutkan secara langsung kompetensi dari KPMD, namun menurut pandangan penulis, kompetensi dari KPMD sebagai bagian dari tenaga pendamping desa sangat penting, karena akan menjadi fasilitator, mediator ataupun mentor terhadap masyarakat desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat baik yang bersifat fisik ataupun non fisik. Menurut Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 KPMD bertugas untuk menumbuhkan dan mengem-bangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya go-tong-royong. Artinya, disini seorang KPMD adalah seorang yang bisa menggerakkan atau mempunyai pengaruh yang sangat kuat di tengah-tengah masyarakat desa tersebut agar program pendampingan desa ini berjalan dengan baik. KPMD di sini bisa seorang ulama, tokoh adat ataupun seseorang yang dituakan dalam kehidupan bermasyarakat, karena para KPMD ini akan ikut serta membantu kepala desa atau wali nagari untuk pembentukan organisasi pembangunan desa.

Salah satu tugas besar dari seorang pendamping desa adalah melakukan edukasi tentang mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan yang bertujuan menciptakan masyarakat sadar bencana. Masyarakat sadar bencana adalah kondisi masyarakat yang memiliki pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan kepedulian dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebencanaan, sehingga memiliki kesadaran untuk bersikap dan melakukan adaptasi di wilayah yang rawan bencana dengan sebaik baiknya, dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam meminimalisir terjadinya bencana atau mengatasi dampak apabila terjadi bencana. Dalam upaya membangun masyarakat atau komunitas yang sadar bencana ini, pendidikan kebencanaan menjadi pintu

masuk yang cukup penting dan strategis. Pendidikan kebencanaan dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.

Pendidikan kebencanaan sebagai upaya untuk membangun masyarakat sadar bencana memiliki dimensi kajian yang cukup luas, dan dalam implementasinya perlu memperhatikan metode, media yang sesuai dan perlu menjalin kerjasama dengan pihak lain yang memiliki misi yang sama, untuk menuju terwujudnya masyarakat partisipatif dalam mengelola bencana. Dengan pendidikan kebencanaan, diharapkan cita-cita bersama masyarakat Indonesia khususnya masyarakat desa dapat terwujud, sehingga dapat menikmati hidup lebih aman, tenteram dan sejahtera dan pada gilirannya dana desa yang digelontorkan oleh negara kepada setiap desa menjadi lebih berarti dan dapat mendorong pembangunan nasional.

Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa kesiapan menghadapi bencana ini seringkali terabaikan pada masyarakat yang belum memiliki pengalaman langsung dengan bencana. Salah satu indikator kurangnya kesadaran bencana adalah banyaknya alat-alat peraga bencana, peta, petunjuk jalur evakuasi, sistem peringatan dini bencana baik gempa/tsunami, alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR) yang banyak tidak berfungsi, dirusak atau bahkan hilang.

Hal ini tidak semata-mata kesalahan dari masyarakat, pemerintah pun punya andil besar sebagai pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan belum optimal dalam mensosialisasikan kepada masyarakat pentingnya mitigasi bencana yang dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Untuk itu melalui tenaga pendamping profesional yang terdiri dari tenaga ahli ataupun terampil diharapkan mampu menjadi fasilitator, mediator ataupun mentor terhadap kader pemberdayaan masyarakat dan masyarakat desa untuk memberikan pendidikan kebencanaan sebagai salah satu langkah dalam mitigasi bencana. Sehingga pada gilirannya akan melahirkan kader pemberdayaan, keluarga, masyarakat dan desa yang sadar dan tanggap serta siap terhadap berbagai bencana dalam rangka meminimalisir dampak dan resiko bencana.

Berdasarkan hal tersebut di atas serta begitu sentralnya peran dari seorang KPMD ataupun pendamping profesional lainnya, maka sinergitas antara para pendamping tersebut sangat diperlukan dalam melakukan edukasi kepada masyarakat desa tentang mitigasi bencana melalui pendidikan kebencanaan yang dapat ditempuh dengan jalan

formal ataupun non formal. Beberapa langkah kongkrit yang dapat ditempuh dalam mengajarkan pendidikan kebencanaan terhadap masyarakat desa diantaranya sebagai berikut.

- 1) Memberikan pemahaman kepada setiap kader pemberdayaan dan masyarakat terhadap setiap bahaya yang terjadi serta sifat-sifatnya, yaitu: (a) penyebab-penyebabnya misalnya bermain api/lilin, petasan dan colokan listrik yang menumpuk akan berakibat kebakaran, buang sampah sembarangan akan berakibat banjir; (b) ukuran atau tingkat kerusakan dan kemungkinan frekuensi kemunculannya; (c) elemen-elemen yang paling rentan terhadap kerusakan; (d) kemungkinan-kemungkinan konsekuensi sosial dan ekonomi dari bencana; (e) mengetahui daftar urutan bahaya-bahaya sesuai dengan daerah masing-masing; (f) menyiapkan tas siaga bencana dan memberitahukan kepada setiap anggota masyarakat atau keluarga yang berisi dokumen-dokumen penting, mie instan, roti gandum, air mineral.
- 2) Dalam periode-periode tertentu antar keluarga dalam satu RW atau kelurahan melakukan simulasi bagaimana menghadapi berbagai jenis bencana yang terjadi. Dilakukan dengan mendemonstrasikannya, pelatihan atau praktek dalam mengatasi terjadinya bencana.
- 3) Memberikan berbagai contoh tanda-tanda adanya terjadi bencana misalnya bencana gempa bumi, bencana tsunami, banjir, gunung berapi, tanah longsor.
- 4) Memberikan contoh-contoh tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi berbagai jenis bencana.
- 5) Memberitahukan daerah-daerah yang harus dihindari jika bencana terjadi sekaligus jalur evakuasi ataupun shelter atau tempat evakuasi sementara.
- 6) Menempelkan atau mencatat nomor-nomor telepon penting seperti pemadam kebakaran, kantor polisi, kantor PLN, Badan SAR, ketua RT atau nomor-nomor telepon yang dianggap penting jika terjadi bencana.

Jika sinergitas antara tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat ataupun pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi, berjalan dengan baik dan optimal, maka diharapkan nantinya akan melahirkan masyarakat desa yang sadar bencana sehingga tidak ada lagi kita mendengar adanya alat-alat mitigasi bencana yang

hilang atau dirusak, tawuran antar pelajar atau kampung ataupun konflik sosial lainnya, kecelakaan di jalan raya akibat perilaku *ugal-ugalan* dari pengguna jalan raya. Andai pun nanti bencana terjadi maka kita berharap dengan adanya pendidikan kebencanaan ini resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat diminimalisir.

#### **D. SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Salah satu prioritas penggunaan dana desa dalam pembangunan kawasan perdesaan adalah untuk keperluan mitigasi bencana sebagai salah satu jalan untuk meminimalisir resiko dari akibat yang ditimbulkan oleh bencana.
2. Pendidikan kebencanaan merupakan hal yang penting dalam rangka mitigasi bencana salah satunya dengan memberikannya melalui kader pemberdayaan masyarakat desa sebagai salah satu tenaga pendamping pembangunan desa.
3. Kompetensi tenaga pendamping profesional sangat menunjang dalam melakukan proses pendampingan. Sedangkan tanggung jawab menghasilkan tenaga pendamping profesional yang mumpuni di bidangnya dan memenuhi kriteria ada pada perguruan tinggi, dimana pada satu sisi perguruan tinggi juga merupakan sebagai tenaga pendamping profesional dalam pembangunan desa ini dan di sisi lain sebagai insdutri penghasil tenaga ahli pemberdayaan dan tenaga teknis maupun kader pemberdayaan masyarakat.
4. Kader pemberdayaan masyarakat sebaiknya orang yang mempunyai pengaruh dan disegani di desa tersebut, bisa seorang tokoh agama, tokoh adat karena peran strategis mereka dalam menyukseskan program pendampingan dan pembangunan di kawasan perdesaan.
5. Jika sinergitas antara tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat ataupun pihak ketiga dalam hal ini perguruan tinggi, berjalan dengan baik dan optimal, maka diharapkan nantinya akan melahirkan masyarakat desa yang sadar bencana, sehingga tidak ada lagi kita mendengar adanya alat-alat mitigasi bencana yang hilang atau dirusak, tawuran antar pelajar atau kampung ataupun konflik sosial lainnya, kecelakaan di jalan raya akibat perilaku *ugal-ugalan* dari pengguna jalan raya. Andai pun nanti bencana terjadi maka kita berharap dengan adanya pendidikan ke-

bencana ini resiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana tersebut dapat diminimalisir.

6. Perguruan tinggi sebagai pihak lain yang diamanatkan dalam Permendes RI Nomor 3 Tahun 2015 hendaknya secara rutin dan terpolo melakukan pendampingan dan bekerjasama dalam melakukan pendampingan desa, sehingga setiap persoalan yang muncul di lapangan nantinya bisa dijadikan sebagai bahan kajian oleh perguruan tinggi secara akademis di pusat-pusat studi keilmuan yang ada di perguruan tinggi tersebut.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Coastal Community Development Project (CCDP). 2015. *Petunjuk Teknis Tenaga Pendamping Desa Masyarakat Pesisir*. Jakarta: CCDP.
- Eko, Sutoro. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*, (yang diselenggarakan Badan Diklat Provinsi Kaltim). Samarinda.
- HAW. Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat. Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat*. Yogyakarta: UGM.
- Lesmana, Teddy. 2012. *Pembangunan dan Bencana*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi LIPI.
- Nirmalawati. 2011. *Pembentukan Konsep Diri Pada Siswa Pendidikan Dasar Dalam Memahami Mitigasi Bencana*. Jurnal SMARTek, Vol. 9 No. 1 Februari 2011: 61-69.
- Payne, Malcolm .1986. *Social care in The Community*. London: MacMillan
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Desa dan PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 118 Tahun 2008 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Sumatera Barat Tahun 2008-2012.
- Rachmat, Agus. 2005. *Manajemen dan Mitigasi Bencana*. Bandung: BPLHD.
- Suharto, Edi .1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Sunarti, Vevi. 2014. *Peranan Pendidikan Luar Sekolah dalam Mitigasi Bencana*. SPEKTRUM PLS Vol. II, No.2, Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

**SEMINAR NASIONAL**  
**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG**  
**“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA”**  
 Kamis/ 6 Oktober 2016

## PERAN PENDAMPING DESA DALAM RELOKASI KORBAN ERUPSI GUNUNG SINABUNG

Mahfuzi Irwan  
Universitas Negeri Yogyakarta,  
mahfuziirwan@gmail.com

### Abstrak

Bencana gunung berapi seringkali diikuti dengan kerusakan yang terjadi pada daerah sekeliling gunung api tersebut. Salah satunya adalah pemukiman dan perkebunan warga yang ada di sekitar gunung. Kerusakan ini sering kali sangat parah sehingga wilayah ini tidak dapat lagi dihuni. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pemukiman relokasi untuk warga serta seorang pendamping desa untuk mengefektifkan proses relokasi. Adapun beberapa peran yang dapat dilakukan seorang pendamping desa dalam relokasi sebuah bencana gunung merapi dengan terlebih dahulu mengkaji literatur yang terkait ialah: (a) sebagai advokat yang efektif; (b) sebagai *a good solution giver*; (c) sebagai sumber penghubung; (d) sebagai *process helper*. Dengan demikian peran seorang pendamping desa tidak bisa asal bertugas mendampingi saja namun juga harus memiliki kompetensi sesuai dengan wilayah desanya.

**Kata kunci:** pendamping desa, relokasi sinabung, peran pendamping

### A. PENDAHULUAN

Bencana meletusnya gunung berapi seringkali diikuti dengan kerusakan yang terjadi pada daerah sekeliling gunung api tersebut. Salah satunya adalah pemukiman dan perkebunan warga yang ada di sekitar gunung. Kerusakan ini sering kali sangat parah sehingga wilayah ini tidak dapat lagi dihuni. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah pemukiman relokasi untuk warga. Seperti yang terjadi pada pemukiman di sekitar Gunung Sinabung. Maka ditetapkan sebuah area lokasi di sebuah Desa Siosar. Sebagaimana halnya dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana yang

SEMINAR NASIONAL  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
"KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA"  
Kamis/ 6 Oktober 2016

berbunyi tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
2. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. pemulihan kondisi dari dampak bencana;
5. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
6. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
7. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Oleh sebab itu, relokasi merupakan proses pembangunan yang tepat untuk bencana Sinabung dengan harapan mampu mengatasi permasalahan daerah yang terkena bencana. Dalam proses pembangunan tersebut tentu beberapa strategi disiapkan untuk membangun bukan hanya infrastruktur tapi yang lebih penting ialah sumber daya manusia. Karena relokasi merupakan proses memindahkan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitar masyarakat. Jadi bisa diketahui bahwa hal tersebut pasti membutuhkan waktu untuk kemudian kehidupan masyarakat setelah direlokasi berjalan dengan normal.

## **B. PEMBAHASAN**

Sinabung (bahasa Karo: Deleng Sinabung) adalah gunung api di dataran tinggi Karo, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Gunung ini tidak pernah tercatat meletus sejak tahun 1600, tetapi mendadak aktif kembali meletus pada tahun 2010, dan berlangsung hingga kini. Akibat dari bencana alam ini, adalah kerusakan yang terjadi, terutama bagi pemukiman dan perkebunan yang ada di sekitar Gunung Sinabung. Dengan melihat dari fakta ini, maka dibutuhkan sebuah pemukiman baru bagi para penduduk yang kehilangan tempat tinggalnya.

Sebuah desa relokasi tidak hanya sebagai tempat tinggal baru bagi para korban bencana. Melainkan juga sebagai wadah mereka untuk memulai kehidupan yang baru namun tidak terlepas juga dari budaya, adat istiadat, dan kebiasaan lama mereka yang dibawa ke lingku-

ngan baru ini. Pengembangan desa relokasi ini sebagai desa wisata juga menambah hal-hal yang harus disesuaikan dalam perancangannya. Lahan relokasi terletak di Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo. Lahan ini merupakan lahan hutan Produksi Siosar, yang telah dibebaskan izin pemakaiannya sebagai lahan bagi pemukiman. Letak lahan ini yang kaya dengan potensi.

Erupsi Gunung Sinabung yang diawali pada Agustus 2010 yang terus berkejolak sampai sekarang telah menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kehidupan di wilayah sekitarnya. Bencana tersebut menyebabkan berubahnya kondisi fisik kawasan permukiman dan sistem sosial ekonomi warga di kawasan yang terkena dampak langsung erupsi, yaitu kawasan yang letaknya dekat dengan sumber bahaya dan terlanda awan panas, aliran lava, guguran dan lontaran batu (pijar) serta hujan abu lebat. Material vulkanik yang dikeluarkan gunung api ini mengubur beberapa dusun sehingga tidak lagi dapat dikenali batas-batas kawasan penggunaan lahan sebelum terjadi erupsi.

Kondisi yang dihasilkan oleh dampak langsung erupsi misalnya adalah hilangnya tempat tinggal, rusaknya sarana-prasarana publik, hilangnya keberlanjutan pelayanan alam, belum pulihnya sistem pertanian, peternakan dan perkebunan masyarakat, krisis ketersediaan air bersih dan terisolirnya beberapa wilayah akibat infrastruktur yang rusak. Erupsi Gunung Sinabung menyisakan masalah krusial dengan tetap berada di pengungsian warga/masyarakat Kabupaten Karo yang semula menempati wilayah pada zona merah (radius 3-5 km dari puncak Gunung Sinabung) yaitu warga yang berasal dari beberapa desa/dusun di Kecamatan Payung, Tiganderket, Namantan dan Kecamatan Simpang Empat. Erupsi dan semburan lahar serta awan panas yang belum menunjukkan tanda-tanda untuk berakhir hingga kini mendorong diperlukannya kawasan untuk relokasi warga yang masih di pengungsian selama lebih dari 1 tahun tersebut ke daerah yang aman dari ancaman erupsi Gunung Sinabung itu.

### **1. Upaya yang sudah dilakukan**

Pemerintah RI melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelah mendapatkan instruksi langsung dari Presiden RI pada kunjungan kerjanya ke pengungsian Gunung Sinabung di Kabanjahe pada tanggal 29 Oktober 2014, mempercepat ijin pinjam pakai lokasi dari Kawasan Hutan Sibuatan Utara pada Kawasan Siosar, register 3/Kabupaten Karo Sumatera Utara seluas sekitar 458 hektar

menjadi kawasan relokasi bagi pengungsi Sinabung yang saat ini masih mencapai 3.284 jiwa atau 1.018 KK yang berada di 12 titik pengungsian. Kunjungan kerja Presiden Jokowi ke pengungsi Sinabung tersebut mengeluarkan empat intruksi yakni: (1) Memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera mempercepat izin pinjam pakai lahan relokasi seluas 458 hektar di Kacinambun Puncak 2000 dan akses jalan menuju lokasi hunian relokasi sepanjang 3,8 km dan lebar 12 meter. Surat izin harus selesai dalam 2 hari; (2) Pemerintah Kabupaten Karo segera mempercepat pembangunan jalan menuju lokasi relokasi sepanjang 3,8 km dan lebar 12 meter dengan melibatkan pasukan Zeni TNI; (3) Untuk mengantisipasi ancaman Erupsi Gunung Sinabung ke depan, maka perlu disiapkan juga relokasi bagi empat desa dan satu dusun untuk jangka panjang yaitu: Desa Guru Kinayan, Desa Berasitepu, Desa Gamber, Desa Kota Tunggal, dan Dusun Sibintun; dan (4) Untuk jangka pendek disegerakan relokasi bagi Desa Bekerah, Simacem, dan Sukameriah.

Menurut Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Erupsi Sinabung tahun 2010-2015, kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, telekomunikasi, listrik, dan energi serta air bersih. Di sektor permukiman, erupsi Gunung Sinabung telah mengubur sejumlah dusun di Kabupaten Karo dan mengakibatkan ribuan rumah kepala keluarga dalam kondisi yang rawan. Tercatat 28.112 KK mengungsi dengan jumlah desa yang dalam kondisi rawan sebanyak 75 Desa. Berdasarkan hal tersebut, relokasi korban Sinabung sangat diperlukan pelakasanannya.

Adapun yang dilakukan pemerintah untuk proses pembangunan relokasi korban sinabung padaradius 3 km ialah:

1. 2053 bangunan rumah dan isinya;
2. penyediaan lahan hunian seluas 250 Ha;
3. penyediaan lahan pertanian seluas 4106 Ha (2 Ha/KK);
4. jaminan hidup Rp3,5 jt/KK sampai mandiri (transmigrasi);
5. Infrastruktur jalan, sanitasi, air bersih dan listrik;
6. Sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan;
7. penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
8. peserta KIS, KIP dan KKS;
9. Beasiswa *full* untuk mahasiswa perguruan tinggi;
10. pemutihan hutang di bank;
11. administrasi status desa dan tanah.

## 2. Relokasi Ideal

Hal di atas ialah seideal-idealnya relokasi yang direncanakan pemerintah, namun karena keterbatasannya. Pemerintah fokus untuk pengadaan hunian tetap dan lahan pertanian yang akan digunakan korban untuk memulihkan perekonomian mereka. Relokasi adalah upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas berikut sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan. Relokasi merupakan bagian dari pemukiman kembali (*resettlement*) di lokasi yang baru di luar kawasan rawan bencana (Kemenpu, 2011). Jhaetal (2010) mendefinisikan relokasi sebagai sebuah proses dimana permukiman masyarakat, aset dan infrastruktur publik dibangun kembali di lokasi lain.

Dalam melaksanakan relokasi setelah terjadinya, ada beberapa prinsip yang harus dipegang sebagai pedoman. Jhaet al. (2010) menyebutkan beberapa prinsip tentang relokasi, yaitu:

1. Perencanaan relokasi yang efektif adalah yang bisa membantu membangun dan melihat secara positif;
2. Relokasi bukanlah sebuah pilihan yang harus dilakukan karena resiko bisa dikurangi dengan mengurangi jumlah penduduk pada suatu permukiman daripada memindahkan seluruh permukiman;
3. Relokasi bukan sekedar merumahkan kembali manusia, namun juga menghidupkan dan membangun kembali masyarakat, lingkungan dan modal sosial;
4. Lebih baik menciptakan insentif yang mendorong orang untuk merelokasi daripada memaksa mereka untuk meninggalkan;
5. Relokasi seharusnya mengambil tempat sedekat mungkin dengan lokasi asal mereka;
6. Masyarakat di lokasi yang akan ditempati merupakan salah satu yang mendapatkan dampak dari relokasi dan harus dilibatkan dalam perencanaan.

Berdasarkan Tata Cara Pelaksanaan Penataan Kawasan Relokasi yang disusun oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, relokasi harus mempertimbangkan bahwa penerima dampak relokasi merupakan pihak yang dinilai rentan (*vulnerable person*).

Dengan mempertimbangkan hal itu, maka dalam pelaksanaan relokasi harus mengikuti beberapa prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Pemandahan bersifat sukarela.
2. Penerima dampak mendapatkan penghidupan yang setara atau lebih baik dari sebelum relokasi.
3. Penerima dampak mendapatkan kompensasi penuh selama proses transisi.
4. Meminimalisir kerusakan jaringan sosial dan peluang ekonomi.
5. Memberikan peluang pengembangan bagi penerima dampak.
6. Demokratis, partisipatoris, terbuka dan akuntabel.
7. Kemandirian dan Keberlanjutan.

Penyelenggaraan kegiatan relokasi memperhitungkan dengan cermat kondisi pasca relokasi dan menjamin berjalannya proses menuju kemandirian dan keberlanjutan kehidupan dan penghidupan serta pengelolaan dan pengembangan lingkungan permukiman relokasi. Cernea (1996 dalam Badri et al., 2006) menyebutkan bahwa pemukiman kembali bisa menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap penduduk yang dimukimkan kembali (khususnya anggota masyarakat yang paling rentan) melalui beberapa faktor:

1. hilangnya perumahan dan tanah, dan kurangnya sanitasi (menyebabkan kekurangan gizi dan masalah kesehatan lainnya);
2. penurunan kualitas-kualitas pendidikan dan kesempatan kerja (seorang yang direlokasi mungkin tidak lagi memiliki akses ke lahan pertanian dan perusahaan);
3. gangguan pada jaringan dukungan sosial (individu kegiatan sosial tidak pernah dapat dipulihkan dan tersebar mungkin mengalami kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan jauh dari keluarga dan teman-teman);
4. hilangnya aset budaya.

Masyarakat yang tinggal di hutan menghadapi berbagai macam perubahan di tempat tinggal mereka yang baru. Permukiman di hutan yang berbeda dengan permukiman lama warga pengungsi ini, berpengaruh terhadap perilaku penghuninya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh untuk pendidikan anak-anak korban, mereka mengeluhkan karena jarak antara sekolah dengan hunian tetap yang baru sangat jauh. Sehingga anak-anak mereka malas atau kesulitan untuk ke sekolah. Begitupula dengan jarak hunian tetap yang terlalu jauh

dengan akses sehari-hari masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan pembangunan yang sifatnya holistic dan membentuk populasi yang baru. Sehingga memungkinkan aktifitas warga berjalan kembali normal atau malah semakin baik. Karena hunian tetap didukung dengan kondisi lahan yang cukup mendukung untuk dijadikan tempat tinggal ataupun lahan pertanian.

Sebagaimana yang dibahas Abdul Rauf (2015) dalam jurnal pertanian *tropic* Universitas Sumatera Utara tentang kajian karakteristik lahan kawasan relokasi pengungsi erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo sebagai dasar penggunaan lahan berbasis pengelolaan DAS, terdapat beberapa kesimpulan bahwa Kawasanyang dijadikan areal relokasi pengungsi gunung Sinabung berada di kawasan hulu dua DAS penting dan potensial di Sumatera Utara dan Aceh, yaitu DAS Wampu dan DAS Singkil dengan topografi dominan landai hingga bergelombang (kemiringan lereng 8-15%) sebanyak 65,19% dari luas lahan relokasi dan datar hingga landai (kemiringan lereng 0-8%) sebanyak 33,99 dari luas lahan dan sisanya 0,81% dengan topografi berbukit (kemiringan lereng 15-25%).

Tanah di lokasi relokasi pengungsi Sinabung tergolong ke dalam sub group *Andic Dystropept* yang memiliki sifat andik (*smearly* atau tiksotropik) dengan kadar bahan organik yang sangat tinggi di tanah lapisan atas yang berwarna hitam, sehingga ikatan antar partikel tanahnya sangat kuat yang memungkinkan lebih resisten terhadap energi kinetik curah hujan dan limpasan permukaan (erosi). Pada kondisi alami tanah di lokasi relokasi pengungsi Sinabung mudah meloloskan air (infiltrasi) dan memiliki kemampuan daya mengikat air (*water holding capacity*) yang tinggi karena tanahnya sangat gembur ( $BD < 0,8 \text{ g/cm}^3$ ) dan kandungan bahan organik yang tinggi di lapisan atas (pada ketebalan 22-42cm).

Lokasi relokasi pengungsian Sianabung berada pada ketinggian tempat lebih dari 1.550 m di atas permukaan laut memiliki indikator tingkat kesuburan tanah yang baik ditandai dengan kadar bahan organik tanah yang sangat tinggi di tanah lapisan atas, pH tanah cenderung sesuai bagi tanaman dataran tinggi, tanahnya yang gembur dan jumlah (populasi) mikroba yang tinggi, namun kesuburan tanah ini dibatasi oleh mineral *Amorf Alophanic* yang memiliki sifat memfiksasi yang tinggi. Pemberian pupuk kandang dan atau kompos sebanyak minimal 5 ton/ha/ musim tanam memungkinkan sifat fiksasi dari

mineral *Amorf Alophanic* tanahnya dapat ditekan yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktifitas tanah dan tanaman yang dibudidayakan.

Lebih lanjut Abdul Rauf (2015) merekomendasikan pengelolaan lahan relokasi bagi warga sinabung sebagai berikut.

1. Pada pembangunan permukiman, terutama dalam pembangunan perumahan pengungsi jangan melakukan tindakan pemeratakan permukaan lahan, apalagi mengupas permukaan tanah (membuang/menyinkingirkan tanah hitam lapisan atas) karena tanah hitam lapisan atas ini dengan kandungan bahan organik yang tinggi dan bersifat *andik* yang dapat menjaga massa/partikel tanah dari erosi, selain menjamin kemampuan tanah dalam meloloskan air dan menahan air hujan dalam jumlah banyak.
2. Pembangunan permukiman, baik sarana jalan, maupun barisan bangunan perumahannya dan fasilitas pendukung lainnya sebaiknya dilakukan sesuai/mengikuti kontur di lapangan. Dengan demikian, bagian lahanyang merupakan cekungan masih dapat berperan dalam menampung air saat terjadi hujan.
3. Mengupayakan pembangunan permukiman selaras alam dalam arti membuka lahan (tanpa mengupas tanah lapisan atas) pada tapak yang akan dibangun saja dan lahan yang terlanjur telah dibuka agar segera ditutupi kembali dengan vegetasi permanen guna menjaga/melindungi degradasi sifat *andik* dan bahan organik tanah lapisan atasnya.
4. Melakukan pemeliharaan/penanaman pohon yang sesuai pada dataran tinggi dan memiliki sifat mampu menyerap dan menyimpan air dalam jumlah banyak, terutama di sekitar mata air, seperti pohon beringin, *macadamia*, aren, durian dataran tinggi, pulai, sengon, asam gelugur, dan lain-lain.
5. Penerapan sistem pertanian konservasi, terutama dengan menerapkan sistem pertanian yang berprinsip pada penutupan lahan/permukaan tanah secara kontinu, seperti penerapan sistem *agro forestry*, sistem pertanian terpadu, pemulsaan, pembumbunan dan lain-lain.
6. Membangun embung pada puncak-puncak bukit dan waduk mini/kolam-kolam pada bagian punggung dan lembah lereng.
7. Membangun sumur resapan dan bak penampung (penyadapan) air hujan di sekitar bangunan perumahannya.
8. Dalam melakukan budidaya tanaman pertanian, pemberian pupuk kandang dan atau kompos minimal 5 ton/ha/musim tanam diperlu-

kan guna mempertahankan/meningkatkan produktifitas tanah dan tanaman yang dibudidyakan.

### 3. Mempertanyakan Relokasi Sinabung

Jika melihat dampak dari relokasi korban Gunung Sinabung tentu belum dapat diketahui apakah ada keberhasilan atau tidak. Namun dari beberapa studi yang pernah dilakukan di berbagai Negara ditemukan faktor-faktor atau pun hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan relokasi maupun kegagalan relokasi. Kebijakan relokasi di berbagai negara adayang mengalami keberhasilan, namun tidak sedikit yang mengalami kegagalan. Seperti penelitian Usamah dan Haynes (2012) pada program pemukiman kembali pasca meletusnya Gunung Mayon di Filipina, masyarakat yang direlokasi kembali kelokasi semula karena dampak sosial ekonomi yang mereka alami setelah berada di lokasi baru.

Di Indonesia, kegagalan relokasi pernah terjadi pada program rekonstruksi perumahan warga Turgo pasca letusan Gunung Merapi tahun 1994, meskipun warga telah diberikan perumahan yang layak dan bantuan yang cukup besar namun warga kembali lagi ke kampung mereka di Turgo (Dove,2008). Aysan (1987 dalam Oliver-Smith, 1991) memberikan contoh keberhasilan relokasi pada program pemukiman kembali warga Muhipler dan Gediz setelah mengalami bencana gempa bumi.

Di Italia relokasi telah diperkenalkan dalam hukum nasional setelah kejadian luapan lumpur Sarno yang menewaskan hampir 200 orang pada Mei 1998 di daerah gunung Alvano Pizzo di wilayah Campania (Menoni & Pesaro, 2008). Jha et al.(2010) menyebutkan beberapa kriteria mengenai faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan relokasi. Faktor kegagalan relokasi yaitu, tidak memadainya lokasi baru; jarak yang jauh dari sumber penghidupan dan jaringan sosial; susunan permukiman yang tidak sesuai dengan keadaan sosial budaya; kurangnya partisipasi masyarakat; kurangnya anggaran untuk relokasi.

Sedangkan faktor keberhasilan relokasi yaitu, masyarakat yang terkena dampak berpartisipasi dalam relokasi dan keputusan implementasi (pemilihan lokasi, identifikasi kebutuhan dasar, perencanaan permukiman, desain rumah, dan implementasi); mata pencaharian tidak spesifik pada lokasi, sehingga tidak terganggu; air, angkutan umum, pelayanan kesehatan, pasar, dan sekolah dapat diakses dan terjangkau; orang dapat membawa barang-barang yang berhubungan dengan, spiritual, budaya atau nilai emosional tinggi (benda-benda ke-

agamaan, bagian-bagian bangunan diselamatkan, patung atau *landmark* lokal lainnya); orang pada kelompok masyarakat yang sama bersama-sama dipindahkan ke lokasi baru; keterikatan emosional, spiritual, dan budaya lampiran pada lokasi yang lama tidak terlalu tinggi; desain rumah, tatanan permukiman, habitat alami, dan fasilitas masyarakat sesuai dengan cara hidup masyarakat; penilaian resiko sosial, lingkungan, dan bahaya mengkonfirmasi bahwa resiko tidak dapat dikurangi di lokasi lama, sementara masyarakat yakin dengan kesesuaian tempat relokasi; komunikasi yang intensif dengan kelompok sasaran dan transparan; mekanisme penyelesaian keluhan yang efektif, serta relokasi dan bantuan untuk mengurangi dampak ekonomi yang didanai secara memadai selama periode waktu yang wajar.

Pada dasarnya, perencanaan pasca bencana memiliki tiga tujuan utama: pemulihan secara tepat waktu kegiatan normal dan kondisi hidup; melindungi masyarakat terhadap dampak bahaya di masa depan; dan perumusan dan pencapaian tujuan bersama antara pihak yang terlibat (Alexander, 2004). Alexander (2004) menyebutkan bahwa strategi perencanaan pasca bencana yang berhasil akan memiliki berbagai atribut:

1. masyarakat bisa beradaptasi pada keinginan akan perubahan, karena lamanya waktu rekonstruksi pasca bencana berlangsung;
2. masyarakat dapat secara efisien menggunakan modal dan sumber daya yang mereka miliki;
3. kerjasama akan menjamin luasnya partisipasi dan peningkatan sasaran;
4. bermacam pendekatan akan melindungi strategi terhadap kegagalan melalui penekanan pada satu tujuan atau metode;
5. masyarakat akan mandiri dalam hal kemampuan mereka untuk beroperasi secara independen dari kontrol di luar;
6. strategi dari organisasi yang berbeda akan saling mendukung;
7. masyarakat akan tahan terhadap serangan luar.

Sadiqiet al. (2012) menyebutkan bahwa faktor yang menyebabkan kegagalan pembangunan kembali perumahan pasca bencana adalah kurangnya partisipasi masyarakat; masalah yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat; dan pengabaian akan kebutuhan/budaya lokal. Oleh sebab itu, penjelasan berbagai studi di atas dapat digunakan sebagai indikator dari penilaian ataupun evaluasi dari relokasi korban erupsi Gunung Sinabung dengan tujuan terwujudnya pembangunan

yang berkeadilan. Artinya pembangunan bukan hanya mementingkan infrastruktur namun juga siapa penikmat infrastruktur yaitu sumber daya manusianya. Tentunya peran pendidikan nonformal akan sangat terbuka untuk mengelolal atau turut berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut. Khususnya relokasi korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang terjadi sepanjang tahun 2010-2016. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mempercepat dan mempermudah proses relokasi dibutuhkan pendamping desa guna mengefektifkan kerja relokasi dan mengefisiensi sumber daya yang ada.

#### 4. Peran Pendamping Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendamping desa merupakan orang yang dimandatkan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten untuk memberdayakan desa dengan: (a) menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan dan pertanian masyarakat desa; (b) meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan (c) mengakui dan memfungsikan institusi asli dan atau yang sudah ada di masyarakat desa.

Maka dapat dipahami bahwa pendamping desa merupakan cara untuk membantu desa dan masyarakatnya untuk mampu berkehidupan lebih baik berdasarkan kondisi dan sumber daya yang ada pada desa tersebut. Oleh karena itu peran pendamping desa perlu dijabarkan lebih jelas terkhusus pada desa yang sedang mengalami proses relokasi seperti desa di Sinabung.

Beberapa peran yang dapat dilakukan pendamping desa dalam membantu proses relokasi ialah:

##### a. Sebagai Katalis atau Advokat yang Efektif

Seorang katalis berfungsi untuk melihat situasi dari sistem kepemimpinan yang sudah ada, sehingga bisa mengantisipasi atau menyiapkan kapan dan bagaimana ia dapat menjadi pengaruh yang efektif. Seorang katalis juga harus sensitif dengan fakta atau realita yang terjadi di lapangan, sehingga ia sadar tidak akan mampu membawa perubahan sebuah desa dengan sendirian. Tidak hanya itu, seorang pendamping desa juga harus sabar dengan waktu. Maksudnya dapat memperkirakan kapan kira-kira waktu atau momen yang tepat untuk menilai sebuah keadaan.

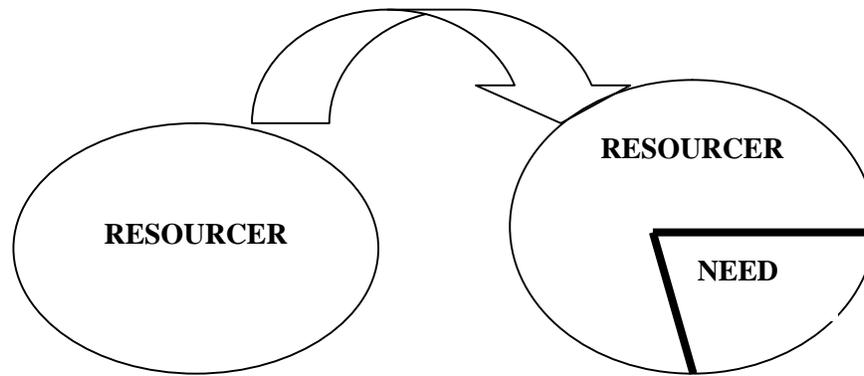
**b. Sebagai A Good Solution Giver**

Dalam kehidupan sehari-hari biasanya kita merasakan bahwa kita memiliki jawaban yang benar untuk suatu permasalahan, kita mengetahui apa solusi yang tepat untuk sebuah permasalahan yang ada dan mampu mengkomunikasikannya pada masyarakat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memberi solusi (Havelock Ronald:1995) diantaranya ialah:

- 1) tanggap kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan masyarakat dan berusaha dengan tulus untuk memenuhinya;
- 2) mengadaptasi inovasi-inovasi yang berkembang, sehingga solusi yang diberikan bisa lebih relevan dan bermanfaat untuk masyarakat;
- 3) memiliki lebih dari satu solusi, karena masyarakat kadang berpikir lebih fleksibel jadi harus memiliki jumlah solusi yang banyak;
- 4) cobalah untuk memberikan solusi yang bersumber dari ide masyarakat sendiri agar mereka mampu menggunakannya terus menerus dan memperoleh keuntungan;
- 5) bantu masyarakat untuk menjadi penilai atau juri dari sebuah inovasi yang diusulkan, jadi mereka dapat mengevaluasi dan memutuskan yang terbaik untuk mereka;
- 6) cobalah untuk membangun sebuah hubungan yang *authentic relationship* yaitu dengan senantiasa berdialog, berbagi informasi dan pengetahuan.

**c. Sebagai Sumber Penghubung**

Bertindak dengan menimbang masalah masyarakat, apa kebutuhannya, bagaimana cara membantunya dan siapa yang dapat membantunya. Karena pada hakikatnya pendamping desa hanyalah bertugas untuk mendampingi, bukan orang yang tahu segalanya. Untuk menjadi sumber penghubung, pendamping desa juga harus memiliki keahlian komunikasi dan mampu membangun sebuah hubungan yang baik.



Gambar 1. diadopsi dari *Outside one way resourcer linking* (Havelock Ronald:1995)

Gambar di atas menjelaskan bahwa kadang kadang seseorang atau sesuatu yang memiliki solusi yang lebih baik tidak mendapatkan cara untuk menyampaikan solusinya. Maka perlu adanya seseorang untuk memfasilitasi seorang tersebut untuk menyampaikan maksudnya. Istilah itu dikenal dengan penghubung satu arah (*one way*).

**d. Sebagai *Process Helper***

*Process helper* maksudnya seseorang yang senantiasa membantu masyarakat pada setiap langkah pemecahan masalah dan bekerja untuk membangun kapasitas internal masyarakat agar mampu memecahkan masalah dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. *Process helper* dapat menyelenggarakan pertemuan dengan masyarakat untuk membahas beberapa isu yang sedang hangat, yang diinginkan masyarakat atau yang diusulkan (Havelock Ronald:1995).

Keberadaan pendamping desa dalam masyarakat sejatinya untuk merangsang pemikiran masyarakat, menyadarkan mereka apa yang mereka lakukan dan bagaimana bekerja bersama dalam sebuah tim atau aturan yang ada, memberitahukan apa tujuan yang akan mereka peroleh dan bagaimana memperolehnya dengan baik. Dengan demikian jelaslah bahwa seorang pendamping desan harus senantiasa memiliki keahlian dalam berkomunikasi maupun memecahkan masalah yang ada pada masyarakat.

### C. SIMPULAN

Peran pendamping desa dalam proses relokasi bencana Sinabung sangat diharapkan mampu mempercepat dan mengefektifkan proses relokasi. Namun idealnya sebelum melakukan relokasi ada beberapa prinsip yang harus dipegang sebagai pedoman. Jha et al. (2010) menyebutkan beberapa prinsip tentang relokasi, yaitu:

1. perencanaan relokasi yang efektif adalah yang bisa membantu membangun dan melihat secara positif;
2. relokasi bukanlah sebuah pilihan yang harus dilakukan karena resiko bisa dikurangi dengan mengurangi jumlah penduduk pada suatu permukiman daripada memindahkan seluruh permukiman;
3. relokasi bukan sekedar merumahkan kembali manusia, namun juga menghidupkan dan membangun kembali masyarakat, lingkungan dan modal sosial;
4. lebih baik menciptakan insentif yang mendorong orang untuk merelokasi daripada memaksa mereka untuk meninggalkan;
5. relokasi seharusnya mengambil tempat sedekat mungkin dengan lokasi asal mereka;
6. masyarakat di lokasi yang akan ditempati merupakan salah satu yang mendapatkan dampak dari relokasi dan harus dilibatkan dalam perencanaan.

Adapun tiga tujuan utama dari relokasi ialah: (1) pemulihan secara tepat waktu kegiatan normal dan kondisi hidup; (2) melindungi masyarakat terhadap dampak bahaya di masa depan; dan (3) perumusan dan pencapaian tujuan bersama antara pihak yang terlibat (Alexander, 2004).

Berdasarkan hal di atas dapat disimpulkan beberapa peran yang harus ada pada pendamping desa bukan hanya sebagai perpanjangan tangan dengan pemerintah namun juga membantu keefektifan berjalannya proses relokasi, jika mengacu pada pendapat Havelock Ronald G, maka peran pendamping desa ialah (1) sebagai advokat yang efektif; (2) sebagai *a good solution giver*; (3) sebagai sumber penghubung; dan (4) sebagai *process helper*.

### DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Rauf. 2015. *Kajian Karakteristik Lahan Kawasan Relokasi Pengungsi Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Sebagai Dasar Penggunaan Lahan Berbasis Pengelolaan DAS*. Jurnal Pertanian Tropik Vol 2, No.1. April 2015. (8): 41-53. USU

- Abdul-Rauf. 2011. *Pengelolaan DAS; Sebuah Rencana Pengelolaan Terpadu DAS Asahan Toba*. Medan: USU Press.
- Abdul-Rauf, Jamilah dan K.S. Lubis. 2010. *Dasar-Dasar Pengelolaan DAS*. Medan: USU Press.
- Alexander, D. 2004. *Planning for Post-Disaster Reconstruction. Paper presented at the Presentation at Second International Conference on Post-Disaster Reconstruction in Developing.--*
- Badri,S.A.,Asgary,A., Eftekhari, A., & Levy, J. 2006. *Post-Disaster Resettlement, Development and Change: A Case Study of the 1990 Manjil Earth quake in Iran*. *Disasters*, 30 (4), 451-468.
- Begin, D Tia. 2015. *Desa Wisata Sebagai Desa Relokasi Dengan Prinsip Simbiosis*. *Jurnal Sains dan Senitis Vol.4. No.2.(2015) 2337-3520 (2301-928 XPrint): ITS*
- Boen,T.&Jigyasu,R.2005. *Cultural Considerations for Post Disaster Reconstruction Post-Tsunami Challenges*. Paper presented at the UNDP Conference.
- Fakhrudin, Martanto. 2012. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persoalan Relokasi Pasca Bencana Lahar Dingin di Kali Putih (Studi Kasus Dusun Gempol, Desa Jumoyo, Kecamatan Salam, KabupatenMagelang*. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota B SAPPK V3Ni j 74. ITB*
- Havelock Ronald. 1995. *The Change Agent's Guide*. Educational Technology Publications Englewood Cliffs, New Jersey 07632
- Sadiqi,Z.,Coffey,V.,& Trigunaryah, B. 2012. *Rebuilding Housing After a Disaster: Factors for Failure*. Paper presented at the Proceedings of 8th Annual International Conference of the International Institute for Infrastructure, Renewal and Reconstruction (IIIRR).
- Usamah, M.,&Haynes, K.2012. *An Examination of the Resettlement Program at Mayon Volcano: What Can We Learn for Sustainable Volcanic Risk Reduction?* *Bulletin of Volcanology*, 74(4), 839-859.
- Yaoxian, Y. 2002. *Chinese Experience With Post-Natural-Disaster Reconstruction. Paper presented at the Proceedings of the First International Conference on Post-Disaster Reconstruction: Improving Post-Disaster Reconstruction in Developing Countries*, Universite de Montreal, Canada.

**PENDAMPING DESA SEBAGAI  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN BERWAWASAN  
LINGKUNGAN DALAM MEWUJUDKAN  
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Marta Dwi Ningrum

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta  
martadwin@gmail.com

**Abstrak**

Pendamping desa adalah salah satu upaya dalam pengembangan masyarakat melalui pengorganisasian, pengarahannya dan berbagai program pemberdayaan yang bertujuan untuk mendorong kemajuan suatu desa ke arah yang lebih baik. Pada kajian ini akan membahas peran pendamping desa sebagai penggerak pemberdayaan berwawasan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, pendamping desa akan melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang menggunakan lingkungan sebagai medianya demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan berkelanjutan dalam hal ini mewujudkan masyarakat yang memiliki kemampuan secara kreatif dan mandiri dalam berkarya tanpa mengganggu maupun merusak potensi lingkungannya. Konsep pemberdayaan berwawasan lingkungan yaitu memberikan ketrampilan kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan, melestarikan, dan mengelola potensi lingkungan yang dimiliki.

Penulis akan mengkaji lebih dalam terkait dengan konsep pemberdayaan berwawasan lingkungan dan implementasi pendamping desa sebagai penggerak pemberdayaan berwawasan lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui berbagai kajian literatur. Dengan demikian, kajian ini mampu memberikan deskripsi lengkap terkait peran pendamping desa dalam pembangunan bangsa dan negara.

**Kata Kunci:** pendamping desa, potensi, pemberdayaan berwawasan lingkungan, pembangunan berkelanjutan.

## A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan suatu usaha maupun upaya yang mampu meningkatkan kapasitas manusia berupa sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Konsep terkait dengan pemberdayaan dapat dijumpai sebagai suatu cara maupun pendekatan untuk mengarahkan individu menjadi orang yang lebih baik. Secara umum, pemberdayaan merupakan konsep yang berasal dari kata *empowerment* sebagai bentukan kata dari kata *power* yang bermakna sebagai “daya”.

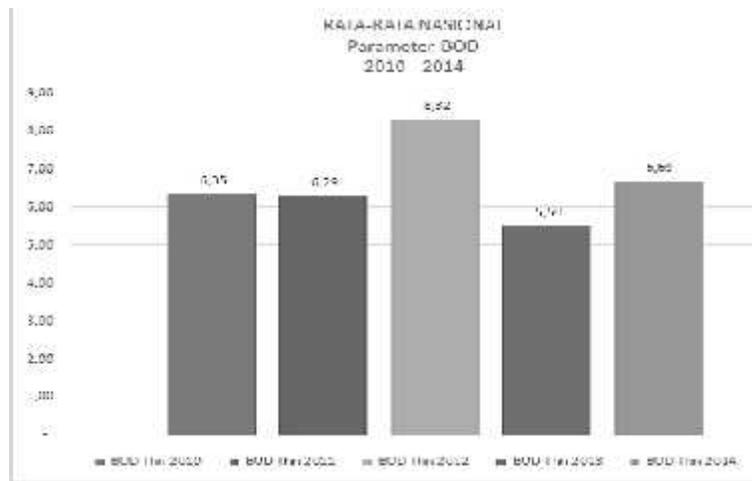
Daya dalam arti ke-kuatan yang berasal dari dalam, tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar (Ace, 2009:24). Pengertian tersebut mengungkapkan bahwa pemberdayaan yaitu upaya yang dilakukan untuk memberikan “daya” berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi individu. Pemberdayaan berwawasan lingkungan diartikan memberikan daya kepada individu yang terkait dengan wawasan lingkungan dan bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat dalam melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada. Masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan secara kreatif dan efektif dalam memanfaatkan potensi alam yang dimiliki.

Konsep pemberdayaan berwawasan lingkungan berisi kegiatan yang mampu menstimulus masyarakat untuk memahami pentingnya melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan potensi lingkungan yang ada untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang dengan memperhatikan kebutuhan generasi mendatang. Harapannya, dampak dari kegiatan pemberdayaan ini adalah terwujudnya pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).

Definisi pembangunan berkelanjutan menurut Komisi Dunia untuk Pembangunan dan Lingkungan PBB adalah pembangunan yang tanpa kompromi akan tetap memelihara sumber daya alam dan/atau lingkungan demi kepentingan generasi mendatang (Soeriaatmadja, 2000:53). Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep bahwa adanya upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masa kini namun tidak mengganggu dan mengorbankan generasi masa depan. Konsep ini dilatar belakangi adanya berbagai permasalahan terkait dengan kerusakan lingkungan di berbagai daerah di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah ruah, namun apabila sumber daya manusianya tidak mampu mengelola dan melestarikan sumber daya tersebut maka semua itu tidak berarti. Kondisi lingkungan di Indonesia yang semakin lama

semakin menurun memberikan pengaruh negatif dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat. Menurut Hempri (2003:104) persoalan lingkungan hidup di Indonesia menjadi *issue* krusial yang dipandang perlu untuk diperhatikan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Bencana kekeringan yang berlanjut kebakaran hutan dan pencemaran sudah muncul sejak tahun 1982.

Kondisi demikian masih terjadi hingga sekarang, bencana alam banjir, kebakaran hutan, pencemaran limbah, dan tanah longsor di Indonesia sudah menjadi berita rutin yang akan terjadi setiap tahunnya. Apabila dikaji lebih dalam, bencana-bencana alam yang terjadi dipicu oleh kurangnya kepedulian dan perhatian masyarakat untuk menjaga dan melestarikan lingkungannya. Menurut data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutani tahun 2014 terdapat pencemaran sungai di Indonesia yang semakin tinggi. Berikut diagram lebih lanjut terkait dengan permasalahan tersebut.



Grafik 1. Grafik Parameter BOD secara Nasional Tahun 2010-2014

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa kandungan BOD pada sungai-sungai di Indonesia mengalami penurunan. Hal ini mengandung arti bahwa banyak terjadi pencemaran sungai oleh aktifitas rumah tangga, pembuangan sampah maupun terkena limbah industri. Aktifitas-aktifitas tersebut merupakan contoh dari tindakan

masyarakat yang mampu mengakibatkan kerusakan-kerusakan pada lingkungan dan jika terus dibiarkan akan menyebabkan bencana-bencana alam yang akan mengganggu dan membahayakan kehidupan masyarakat.

Persoalan terkait dengan kerusakan lingkungan tanpa disadari disebabkan oleh tindakan yang tidak bertanggungjawab dan kelalaian masyarakat dalam menjaga, melestarikan, dan mengelola lingkungan yang dimiliki. Banyaknya kasus-kasus eksploitasi alam dan tindakan perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan sudah tidak asing lagi bagi Negara Indonesia. Perilaku seperti ini dipicu oleh berbagai faktor individu baik faktor dari dalam diri individu maupun faktor dari luar individu. Faktor dari dalam individu meliputi kesadaran, emosi, watak dan faktor dari luar individu meliputi ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Luas kebakaran hutan dari tahun 2014 mengalami kenaikan 15% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, luas kebakaran hutan hingga mencapai 32.761,26ha. Data secara detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.  
Luas Kebakaran Hutan Tahun 2014

Keterangan	Luas Kebakaran Hutan dan Lahan tahun 2014 (ha)
Hutan Produksi	12.050,95
Hutan Lindung	1.890,35
Hutan Konservasi	18.585,90
Jumlah Total	32.761,26

Sumber : Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut perlunya dirumuskan sebuah program yang mampu memberikan kontribusi pada pengurangan kerusakan lingkungan. Pendamping desa sebagai usaha yang dicanangkan pemerintah tentunya memiliki kontribusi dalam penyadaran kesadaran masyarakat terhadap pelestarian, pengelolaan, dan pemanfaatan potensi lingkungan. Dalam kajian ini akan dibahas terkait implementasi pendamping desa sebagai penggerak dalam pemberdayaan berwawasan lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

## B. PEMBAHASAN

Pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua aspek yaitu *to give or authority to* and *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama, pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam pengertian yang kedua, pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi kemampuan atau pemberdayaan. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya *community awareness*. Adanya kesadaran komunitas ini diharapkan dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan serta mengeliminir terbentuknya solidaritas komunal semu pada masyarakat (Suparjan, 2003:43-44).

Edi (2010:59) bahwa proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Proses pemberdayaan apabila dikaitkan dengan pengembangan masyarakat harus mampu mewujudkan masyarakat yang berkembang sesuai dengan caranya sendiri, artinya bahwa masyarakat harus mampu menentukan kebutuhan dan cara memenuhinya secara mandiri. Pendapat tersebut diperkuat oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014:510), yang menyatakan bahwa pemberdayaan seharusnya menjadi tujuan dari semua bentuk pengembangan masyarakat. Pemberdayaan dalam hal ini berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosakata, pengetahuan dan ketrampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menentukan masa depannya sendiri, dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Pada dasarnya pemberdayaan mengandung dua pengertian atau kecenderungan:

1. Pemberdayaan menekankan pada proses pemberian, memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat atau individu agar menjadi lebih berdaya. Proses memberikan atau mengalihkan kekuatan dan kekuasaan ini menurut Okley & Marsdan dapat dilengkapi dengan membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi-organisasi.
2. Menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya

dengan menggunakan potensi kritis yang ada pada dirinya, seperti dikemukakan oleh Paulo Freire (1972). Proses menstimulasi ini tidak selamanya berasal dari luar dirinya. Dari dalam sendiri orang juga bisa menstimulasi memberdayakan dirinya (Siti Partini Suardiman, 2011:27-30).

Berdasarkan penjelasan terkait beberapa definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang di dalamnya terdapat aktivitas memberikan dan mengalihkan kekuatan berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan kepada individu dengan tujuan memberikan “daya kepada individu tersebut. Konsep pemberdayaan dalam kaitan dengan mewujudkan pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kepada masyarakat dalam mengelola, memanfaatkan dan melestarikan potensi lingkungan. Apabila upaya tersebut berhasil, maka diharapkan terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Dalam Soeriaatmadja (2000: 42) dikemukakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana dalam menggunakan dan mengelola sumber daya secara bijaksana bagi berbagai kegiatan manusia secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidupnya.

Pembangunan berkelanjutan juga merupakan visi pembangunan yang mencakup populasi, spesies hewan dan tumbuhan, ekosistem, sumber daya alam dan mengintegrasikan aspek sosial dan ekonomi seperti memerangi kemiskinan, kesetaraan gender, hak asasi manusia, pendidikan untuk semua, kesehatan, keamanan manusia, dialog antar-budaya. Suparjan dan Hampri (2003:178-179) menyatakan konsep pembangunan berkelanjutan mulai menggema sejak tahun 1992 ketika diselenggarakan Konferensi Rio yang membahas pembangunan dan lingkungan hidup. Konsep ini muncul sebagai respon atas makin memburuknya lingkungan ekonomi dan sosial dunia yang disebabkan kurangnya perhatian banyak negara dalam membangun masyarakatnya. Akibatnya, kerusakan alam dan sosial akan membawa konsekuensi serius bagi kelangsungan pembangunan itu sendiri.

Penjelasan di atas mengandung pengertian bahwa potensi alam yang dimiliki oleh suatu negara apabila tidak diperhatikan maka akan menjadi bomerang pada negara itu sendiri. Negara memiliki kewajiban untuk mengembangkan masyarakatnya agar mampu mengelola dan menjaga potensi alam yang dimilikinya demi terwujudnya pema-

ngunan dan menyelematkan kehidupan generasi yang akan datang. Pemberdayaan sebagai upaya dalam memberikan “daya” kepada masyarakat memiliki peran penting dalam menyadarkan masyarakat untuk peduli dengan potensi lingkungan yang dimilikinya. Untuk mensosialisasikan hal tersebut perlu dikembangkan program bagi semua kalangan untuk dapat memahami dan berpartisipasi mendukung terjadinya pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini dibutuhkan peran penting pendamping desa sebagai penggerak masyarakat dan memberikan kesadaran masyarakat untuk melestarikan, mengelola, dan memanfaatkan potensi lingkungan yang dimiliki.

Selain itu, program ini mampu membantu mengurangi kerusakan lingkungan yang sudah terjadi di Indonesia. Sesuai dengan berbagai kerusakan lingkungan yang sudah dipaparkan di dalam pendahuluan. Dengan demikian, kajian ini menempatkan pemberdayaan berwawasan lingkungan sebagai langkah awal dalam mengatasi permasalahan ini. Pemberdayaan dinilai mampu dalam memberikan kesadaran bagi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Hal ini sesuai dengan definisi bahwapemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan ketrampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan masyarakat. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003:37).

Sementara dari perspektif lingkungan, Borrini mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu konsep yang mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolannya secara berkelanjutan. Indikator keberhasilan pemberdayaan masyarakat hanya dapat dilihat dengan adanya *community awareness*. Adanya kesadaran komunitas ini, diharapkan dapat mengubah pemberdayaan yang bersifat penguasaan menjadi bentuk kemitraan yang terbentuknya solidaritas komunal pada masyarakat (Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003: 43-44 ). Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemberdayaan berwawasan lingkungan merupakan suatu upaya yang tepat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, perlunya peran pendamping desa dalam memberikan arahan, motivasi, dan penyadaran bagi masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengelolaan, pelestarian, dan pemanfaatan lingkungan.

### **1. Pendamping Desa sebagai Penggerak Pemberdayaan Berwawasan Lingkungan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan**

Pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan “daya” kepada individu melalui pemberian pengetahuan, sikap, dan keterampilan bagi agar menjadi individu yang lebih baik. Pengertian tersebut merupakan sebuah definisi sederhana dari berbagai pengertian pemberdayaan yang telah dikemukakan oleh para ahli. Pemberdayaan dinilai menjadi startegi yang tepat dalam langkah awal membentuk pengembangan masyarakat. Pemberdayaan pada kajian ini lebih difokuskan pada pemberdayaan berwawasan lingkungan yaitu memberikan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang terkait dengan wawasan lingkungan melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Tujuan dari pemberdayaan berwawasan lingkungan ini, yaitu membentuk masyarakat yang mampu memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan potensi lingkungan yang ada. Dampak yang diharapkan dari program ini yaitu mampu berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki saat ini tanpa mengorbankan sumber daya pada generasi yang akan datang.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilakukan harus berkaitan dengan wawasan lingkungan. Menurut Emil Salim dalam Hampri dan Suparjan (2003:99), kebijakan pengembangan lingkungan tertuju kepada empat sasaran yaitu, pertama, membina hubungan keselarasan antara manusia dengan lingkungan. Kedua, melestarikan sumber alam agar dapat dimanfaatkan secara terus-menerus oleh generasi demi generasi. Ketiga, mencegah kemerosotan mutu dan meningkatkan mutu lingkungan sehingga menaikkan kualitas hidup manusia Indonesia. Dan keempat, membimbing manusia dari perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan. Pendapat tersebut sangat sesuai dengan konsep pemberdayaan berwawasan lingkungan pada kajian ini. Ada tiga pokok utama di dalamnya yaitu: pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat dan perubahan dari perusak lingkungan menjadi pembina lingkungan.

Kegiatan pemberdayaan tersebut harus disesuaikan dengan potensi dan ketrampilan lokal. Dengan demikian, langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengidentifikasi potensi lingkungan lokal dan ketrampilan masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk menyinergikan potensi dan keterampilan lokal yang dimiliki masyarakat untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Dalam hal ini, dibutuhkan generator

masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Pendamping desa yang dipandang sebagai pengorganisasi dan pengarah masyarakat harus mampu berperan dalam penerapan pemberdayaan berwawasan lingkungan. Pendamping desa diharapkan mampu berperan sebagai penggerak, motivator dan fasilitator masyarakat.

1. Penggerak, pendamping desa mampu membuat dan menerapkan berbagai strategi untuk mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan.
2. Motivator, pendamping desa mampu memberikan semangat dan dorongan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan.
3. Fasilitator, pendamping desa mampu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan yang disesuaikan dengan keterampilan dan potensi lokal masyarakat setempat.

Peran-peran tersebut harus dilakukan oleh pendamping desa demi mewujudkan masyarakat yang berwawasan lingkungan dan diharapkan mampu mencapai pembangunan berkelanjutan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah:

1. Identifikasi potensi lokal, tahap ini sangat diperlukan untuk mengetahui potensi lingkungan yang dimiliki oleh masyarakat. Pendamping desa mengidentifikasi terkait dengan potensi wilayah yaitu potensi hasil pertanian, perkebunan atau perikanan, potensi wisata, dan potensi geografis. Identifikasi potensi lokal bertujuan untuk mengetahui potensi apa saja yang harus dikembangkan oleh masyarakat agar mampu mengelola kekayaan alam yang dimiliki.
2. Identifikasi ketrampilan lokal, tahap ini dilakukan dengan mengidentifikasi ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Keterampilan tersebut dimiliki oleh mayoritas masyarakat tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari kegiatan ini mengetahui ketrampilan yang dimiliki masyarakat, sehingga diharapkan ketrampilan tersebut mampu mendukung kegiatan pemberdayaan yang akan dilakukan.
3. Perencanaan kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan, pendamping desa membuat rencana kegiatan pemberdayaan ber-

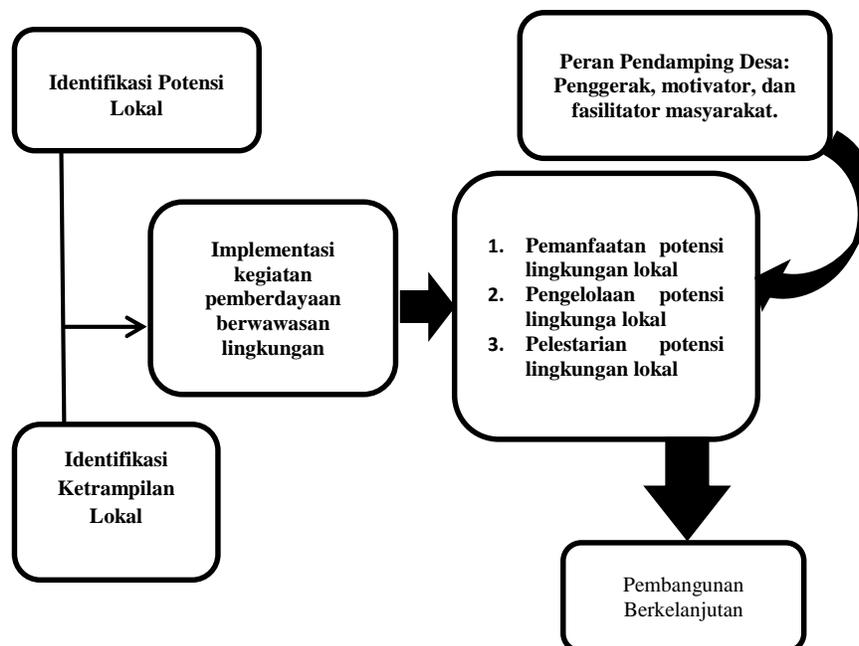
wawasan lingkungan sesuai hasil identifikasi potensi dan keterampilan lokal masyarakat.

4. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan, pendamping desa mampu menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan yang sudah direncanakan. Kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan dan penyuluhan.

Pendamping desa dalam hal ini berperan dalam analisis hingga pelaksanaan kegiatan pemberdayaan tersebut. Indikator keberhasilan dari program ini yaitu mampu membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi untuk memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan potensi lingkungan dengan baik.

1. Memanfaatkan, masyarakat mampu memanfaatkan sumber daya yang dihasilkan oleh lingkungan ataupun potensi lingkungan yang dimilikinya. Misalnya, menggunakan hasil pertanian, perkebunan, maupun perikanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ataupun memanfaatkan potensi lingkungan seperti air terjun untuk obyek wisata.
2. Mengelola, masyarakat mampu merawat, mengendalikan, dan mengembangkan sumber daya yang dihasilkan oleh lingkungan ataupun potensi lingkungan yang dimilikinya sehingga terhindar dari eksploitasi sumber daya alam.
3. Melestarikan, masyarakat mampu melestarikan sumber daya yang dihasilkan oleh lingkungan ataupun potensi lingkungan yang dimilikinya. Misalnya: daerah penghasil cengkeh mampu mempertahankan daerah tersebut sebagai penghasil cengkeh, sehingga cengkeh tidak hanya dapat dijumpai pada saat ini namun cengkeh dapat dijumpai dan dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang.

Implementasi kegiatan pemberdayaan berwawasan lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan beserta peran pendamping desa dapat digambarkan dengan bagan di bawah ini:



Bagan 1. Alur Pelaksanaan Pemberdayaan Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diharapkan mampu memperjelas implementasi pemberdayaan berwawasan lingkungan dan posisi atau peran pendamping desa sebagai penggerak masyarakat dalam pemberdayaan berwawasan lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

### C. SIMPULAN

Simpulan yang dihasilkan dari pembahasan dan kajian literatur terkait dengan peran pendamping desa sebagai penggerak masyarakat dalam pemberdayaan berwawasan lingkungan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan adalah: (a) konsep pemberdayaan berwawasan lingkungan yaitu memberikan “daya” kepada masyarakat melalui pemberian pengetahuan, sikap, keterampilan kepada masyarakat terkait wawasan lingkungan, sehingga masyarakat mampu memanfaatkan, mengelola, dan melestarikan potensi lingkungan yang dimiliki; (b) Implementasi pemberdayaan berwawasan lingkungan memerlukan pe-

ran pendamping desa sebagai penggerak masyarakat dengan cara memberikan motivasi dan memfasilitasi masyarakat dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan sesuai dengan identifikasi potensi dan ketrampilan lokal masyarakat setempat.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Ace Suryadi. (2009). *Mewujudkan Masyarakat Pembelajar Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Edi Suharto. 2010. *Membangun Masyarakat Menberdayakan Rakyat :Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*.Bandung : PT Refika Aditama.
- Jim Ife dan Frank Tesoriero. 2011. *Community Development AlternatifPengembanganMasyarakat di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. *Statistik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2014*. Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- R.E Soeriaatmadja. 2000. *Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Siti Partini. 2011. *Psikologi Usia Lanjut*. Yogyakarta: Gama Press.
- Suparjan dan Hempri Suyatno. 2003. *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta: Aditya Media.

**URGENSI PENGEMBANGAN KOMPETENSI PAMONG  
BELAJAR DALAM PELAYANAN PROGRAM  
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH SEBAGAI BAGIAN  
UPAYA PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DESA**

Tasril Bartin

Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang

**Abstrak**

Pembangunan atau pemberdayaan masyarakat desa yang dimaksudkan dalam tulisan ini bukanlah pembangunan desa yang diartikan secara administratif, melainkan pembangunan desa dalam pengertian geografis dan sosiologis yaitu pembangunan bagi masyarakat yang masih berada dalam suasana pedesaan yang dicirikan dengan sumber perekonomian utama adalah dari sektor pemanfaatan lahan, masih berkembangnya nilai, norma, dan budaya pedesaan, meskipun secara administratif masyarakat ini berada dalam lingkup pemerintahan kota.

Pada dasarnya pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat desa lebih dominan melalui pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu, pamong belajar sebagai salah satu tenaga pendidik luar sekolah yang melaksanakan tugas pemberdayaan masyarakat perlu ditingkatkan kompetensinya dalam mengemban tugas pelayanan pendidikan luar sekolah. Semakin baik kompetensi yang dimiliki, semakin baik pula mutu layanan yang diberikan. Tercapainya standar kompetensi yang maksimal ditandai oleh tampilan kerja (*performance*) yang profesional dan berdaya guna. *Performance* ini akan lebih maksimal lagi apabila diiringi dengan perbaikan pada berbagai aspek kelembagaan SKB tempat bernaung, diantaranya perbaikan budaya organisasi, perbaikan fasilitas kerja, perbaikan kepemimpinan, dan perbaikan kesejahteraan.

Salah satu cara untuk meningkatkan kompetensi pamong belajar dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan luar sekolah adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan hendaklah bersifat komprehensif dan berkelanjutan dan disesuaikan dengan kon-

teks program, tantangan program, skala prioritas program, kebutuhan masyarakat, serta potensi spesifik lainnya yang dimiliki oleh individu Pamong Belajar. Oleh karenanya perlu dilakukan penilaian kebutuhan (*need assessment*) terhadap pengembangan model diklat yang diberikan sehingga relevan dengan kebutuhan tantangan program yang dilayani.

**kata kunci:** pembangunan desa, pendidikan non formal, pamong belajar, kompetensi.

## A. PENDAHULUAN

Sebutan bagi individu yang bertugas sebagai pekerja masyarakat dalam memberdayakan masyarakat dapat berbagai macam, misalnya penyuluh, fasilitator, pendamping, kader, penggerak pembangunan, dan lain sebagainya. Khusus dalam bidang pendidikan luar sekolah dikenal sebutan pamong belajar, tutor, instruktur, penilik, Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), Fasilitator Desa Intensif, dan sebutan lainnya.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pamong belajar sebagai agen pemberdayaan masyarakat perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat yaitu lahirnya program yang pada dasarnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik, yaitu dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, politik, hukum, dan berbagai aspek sosial lainnya.

Beberapa program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan luar sekolah sebagai jawaban atas tuntutan atau kebutuhan masyarakat diantaranya pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), pendidikan anak usia dini, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keluarga, pendidikan keorangtuan dan berbagai jenis pendidikan luar sekolah lainnya. Program-program tersebut perlu diklasifikasikan dan dikaitkan dengan jenis profesi yang ada dalam pendidikan luar sekolah.

Sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi, peran pamong belajar sebagai agen pemberdayaan masyarakat semakin berat dan semakin luas cakupannya. Banyak program pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan luar sekolah yang tidak dikuasai konsep, tujuan, strategi, dan operasional di lapangan. Para pengambil

kebijakan juga sering gagal paham dalam pengelolaan kewenangan, tugas pokok dan fungsi tenaga fungsional pendidikan luar sekolah, termasuk bagi pamong belajar. Sering terjadi pencampur adukan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada pamong belajar antara tugas pokok yang ada dalam ketentuan jabatan fungsionalnya dengan pekerjaan sehari-hari.

Pembangunan desa, selain masalah infrastruktur, yang tidak kalah penting adalah pembangunan sumber daya manusia. Masyarakat pedesaan adalah kelompok komunitas terbesar, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Oleh karenanya paradigma pembangunan di berbagai negara berkembang tersebut hendaklah pembangunan yang dimulai dari desa, atau pembangunan dari pinggiran.

Pendidikan yang rendah merupakan salah satu variabel yang signifikan dalam menambah kemiskinan di pedesaan. Oleh karena itu untuk mengatasi ketertinggalan pada pendidikan formal, tidak ada jalan lain selain peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan non formal bagi masyarakat pedesaan. Melalui pendidikan luar sekolah, masyarakat pedesaan bisa diajak berpikir kreatif, inovatif dan mampu menrapkan teknologi baru dan terciptanya pola pikir yang berorientasi pada pembangunan manusia sebagai subyeknya.

Pada umumnya masyarakat menganggap bahwa pamong belajar adalah orang yang kompeten dan ahli dalam pelayanan pendidikan luar sekolah. Masyarakat berharap akan mendapat pelayanan pendidikan non formal yang memuaskan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka. Namun kenyataannya harapan di atas seringkali tidak dapat diwujudkan menurut semestinya, bahkan sering memberikan ketidakpuasan bagi masyarakat yang dilayani. Maka, proses dari pengolahan sumber daya manusia (*human management*) di dalam suatu organisasi formal umumnya merupakan bagian atau kegiatan yang dianggap utama. Individu-individu dalam kelembagaan tersebut merupakan modal manusia (*human capital*) yang amat menentukan di dalam pencapaian tujuan institusi yang efektif.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Kompetensi**

Kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap pamong belajar adalah berbeda antara satu dengan yang lainnya tergantung jenis profesi yang dijalani. Menurut Berge, Z. et.al, (2002) sangat banyak

definisi kompetensi yang berbeda yang menghasilkan rentang *framework* yang luas, sehingga kompetensi tertentu bagi sebuah profesi dalam hal ini pamong belajar belum tentu cocok dengan kompetensi lain yang dibutuhkan selain pamong belajar, meskipun yang bersangkutan sama-sama pendidik, fasilitator, pendamping, dan penggiat untuk pembangunan desa atau masyarakat. Namun pada dasarnya kompetensi dasar yang dibutuhkan sebagai tenaga pemberdayaan adalah sama, yaitu sebagai pendidik dan tenaga kependidikan mereka memerlukan pengembangan kompetensi baik yang sifatnya umum, maupun spesifik dalam proses membelajarkan masyarakat.

Menurut Spencer & Spencer (1993), kompetensi adalah *“an underlying characteristic of an individual that is casually related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation,”* atau karakteristik dasar seseorang (individu) yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala situasi yang dihadapi, serta bertahan cukup lama dalam diri manusia. Sedangkan Kamus Inggris-Indonesia mengartikan kompetensi secara harfiah yaitu kecakapan, kemampuan, wewenang.

Konsep kemampuan mengandung suatu makna adanya semacam tenaga atau kekuatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat mental. Pengertian ini menunjukkan pada adanya suatu kekuatan nyata yang dapat diperlihatkan seseorang melalui tindakan atau perbuatan, baik secara fisik maupun mental, yang umumnya diperoleh melalui latihan dan pendidikan.

Kompetensi juga merupakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non rutin. Dengan perkataan lain, kalau seseorang ingin memiliki kemampuan tertentu, ia dapat mempelajarinya. Kemampuan ini akan banyak membantunya pada saat ia melaksanakan atau mengerjakan tugas tertentu yang berhubungan dengan profesinya. Kadang-kadang kemampuan secara fisik dan mental dapat muncul secara bersamaan pada saat mengerjakan suatu tugas.

Mengacu kepada kompetensi pendidik pada pendidikan formal, guru dan dosen memerlukan kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Karena sama-sama bertugas sebagai pendidik, maka hal yang sama juga

dibutuhkan oleh pamong belajar, hanya saja kompetensi pedagogik tidak banyak diperlukan tetapi diganti dengan kompetensi andragogik.

Schroeder seperti yang dikutip oleh Stuart, R. & Lindsay, P. (1997) mendefinisikan kompetensi sebagai karakter, sifat, pengetahuan, *skill* dan motivasi pokok seorang pemegang jabatan/profesi yang telah dikaitkan secara kausalitas dengan managerial *performance* yang unggul, Becker et. al (2001) mengatakan kompetensi mengacu pada karakter *knowledge, skill, dan abilities* setiap individu yang mempengaruhi *job performance* individu secara langsung.

Lebih jauh dikatakan oleh Antonacopoulou, E. & Fitz Gerald, L. (1996) bahwa kompetensi terdiri dari sifat-sifat unik setiap individu yang diekspresikan dalam proses interaksi dengan pihak lain dalam konteks sosial, jadi tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan *skill* yang spesifik atau standar kinerja yang diharapkan dan perilaku yang diperlihatkan. Jadi kompetensi mencakup sikap, persepsi dan emosi serta menekankan pada faktor interaksi personal dan sosial. McConnell (1998) menyampaikan dua istilah kompetensi yang sering digunakan yaitu *competence* dan *competency* dimana keduanya bukanlah sinonim.

*Competence* maksudnya kemampuan potensial, kesanggupan menjalankan fungsi pada suatu situasi, sedangkan *competency* fokus pada kinerja aktual seseorang dalam suatu situasi. Jadi *competence* dibutuhkan sebelum mencapai *competency*. *Competence* menjadikan individu mampu memenuhi tanggung jawab kerja yang dipikulnya. *Competency* berarti individu mengisi pekerjaan sesuai yang diharapkannya.

*Competence* ditentukan oleh perbandingan keadaan sekarang dengan standar kinerja yang dibangun di lingkungan kerja menurut peran dan setting individu. *Competence* menguji kemampuan potensial, *competency* menguji bukti kinerja seseorang dan aplikasi pengetahuan, *skill*, dan standar perhatian dalam kemampuan individu dapat meniru mengoperasikan atau menggunakan peralatan atau melaksanakan suatu rencana. Penilaian *competence* melibatkan uji *skill* dan penilaian tertulis. Sedang penilaian *competency* fokus pada kinerja dalam melaksanakan pekerjaan. Sehubungan dengan itu, Kesler, GC., (1995) merumuskan kompetensi sebagai = *performance capabilities + HR technical know how + business know how*. Diharapkan setelah meninjau kedua istilah itu pendefinisian kompetensi menjadi lebih jelas.

## 2. Konsep Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pembangunan desa yang dimaksudkan dalam tulisan ini bukanlah pembangunan desa yang diartikan secara administratif, melainkan pembangunan desa dalam pengertian geografis dan sosiologis. Secara administratif desa dapat diartikan sebagai wilayah pemerintahan terendah yang ada di wilayah kabupaten/kota, namun pembangunan desa yang dimaksudkan adalah pembangunan desa yang lebih terfokus kepada masyarakat yang secara geografis dan sosiologis berada dalam suasana pedesaan. Hal ini terindikasi dengan pergerakan perekonomian yang masih bersumber dari pemanfaatan lahan sebagai faktor produksi utama, masih kentalnya norma, budaya, dan nilai kehidupan pedesaan, seperti masih hidupnya sifat gotongroyong, sistem masyarakat yang belum masih tertutup, dan penggunaan teknologi yang terbatas.

Ciri lainnya adalah tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakatnya yang masih rendah, dan secara politik, hukum, dan sosial budaya juga masih tertinggal dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dengan demikian, pedesaan yang dimaksudkan disini adalah daerah atau kawasan yang didiami oleh sekelompok masyarakat yang masih mengandalkan perekonomian utama dari sektor pemanfaatan lahan, meskipun secara administratif mereka tinggal di daerah dalam lingkup pemerintahan kota.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995). Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya.

Konsep pemberdayaan juga dapat diartikan pada tataran yang lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), namun Kartasmita (1997), menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi, karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat, di mana peran ekonomi teramat penting. Cara mengukurnya telah banyak berkembang, seperti yang antara lain jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, pe-

ranan industri kecil, nilai tukar pertanian, upah minimum dan sebagainya.

Pembangunan manusia yang berkualitas bukan hanya menyangkut aspek ekonominya, tetapi juga sisi lainnya, yaitu pendidikan dan kesehatannya. Di bidang ini, juga telah banyak ukuran dikembangkan antara lain persentase penduduk yang buta aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, persentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup. Angka indeks kesejahteraan rakyat dapat diukur dengan menggabungkan indikator ekonomi, kesehatan, dan pendidikan ke dalam suatu angka indeks. atau yang dikenal dengan nama Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*).

Manusia juga harus mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi melalui pembangunan spiritual, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, dalam rangka membangun masyarakat berakhlak. Terkait dengan itu adalah pembangunan budaya, yakni untuk menciptakan, di atas budaya yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, sikap budaya kerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasi dan siap bersaing. Ukurannya tentu sangat relatif dan terutama bersifat kualitatif. Dalam pembangunan budaya perlu dikembangkan orientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberdayaan teknologi, merupakan jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan berkesinambungan dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera.

### **3. Kompetensi Pamong Belajar dan Berbagai Permasalahannya**

Berdasarkan pengamatan yang mendalam terhadap kondisi nyata kompetensi pamong belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) secara umum dapat dikatakan masih lemah. Lemahnya kompetensi tersebut dapat dilihat dari kurang tercapainya empat kompetensi dasar yang diamanatkan PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yaitu: (1) kompetensi pedagogik dan andragogik; (2) kompetensi profesional; (3) kompetensi kepribadian; dan (4) kompetensi sosial. Gejala yang ditemui di lapangan diantaranya rendahnya kemampuan dan kecakapan pamong belajar dalam merancang kegiatan belajar, tidak mampu menganalisis masalah dan kebutuhan peserta didik (klien), tidak mampu menggunakan sumber daya yang tersedia, lemah koordinasi dan kerjasama, kurang semangat

kerja, bekerja setengah hati, adanya persaingan tidak sehat antar sesama rekan kerja, dan kurang bersosialisasi dengan masyarakat klien.

Beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya kompetensi pamong belajar tersebut di atas adalah:

1. Secara kuantitas jumlah ketenagaan ini sangat kurang, dimana tenaga fungsional makin lama makin berkurang secara kuantitas dan kualitas disiplin ilmu. Kondisi ini terjadi karena minim regenerasi atau terbatasnya rekrutmen baru, bahkan relatif banyak tenaga fungsional yang dipromosikan ke jabatan struktural di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota atau pindah tugas ke instansi lain. Penambahan setiap tahun dapat dikatakan hampir tidak ada.
2. Kualifikasi pendidikan juga terbatas. Sesuai dengan sertifikasi mutu tenaga fungsional pamong belajar sebagaimana juga diatur menurut sertifikasi guru maka pendidikan minimal S1 dan dianjurkan bisa sampai S2. Namun pendidikan pegawai rata-rata baru S1, dan sebagian masih berpendidikan SLTA dan D3.
3. Kompetensi akademik yang diperlukan belum mendukung ketersediaan ketenagaan yang kompeten sesuai dengan bidang tugas. Kebanyakan dari tenaga fungsional adalah tamatan tenaga kependidikan formal yang lebih sesuai bertugas di lingkungan pendidikan formal seperti SD, SMP dan SMA/SMK, sementara tamatan tenaga vokasional selain PLS juga sangat dibutuhkan, seperti sarjana ilmu komunikasi, sarjana ilmu penyuluhan, sarjana peternakan, sarjana teknik mesin/sipil, sarjana komputer, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana hukum, dan lain-lain. Disamping itu, kecakapan di bidang emosional dan sosial kelihatan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan kurangnya semangat kerja, tidak percaya diri, sehingga menyebabkan lemahnya kemampuan koordinasi dan berbagai pendekatan dengan berbagai pihak dan instansi terkait. Karena itu sistem rekrutmen pamong belajar perlu ditinjau ulang dan disesuaikan dengan analisis kebutuhan lembaga dan berorientasi pada beban kerja.
4. Kualitas tenaga pendidik pada pendidikan luar sekolah termasuk Pamong Belajar masih dinilai berdasarkan strata pendidikan formal, sering mengabaikan kompetensi khusus dan berbagai kecakapan sosial lainnya. Dalam hal ini sertifikasi masih diukur berdasarkan ijazah formal, padahal banyak juga pamong belajar yang punya kemampuan teknis lain di luar bidang tugas dan menyan-

dang status sosial lainnya meskipun berpendidikan rendah, misalnya pamong belajar punya bidang usaha tertentu, menjadi tokoh masyarakat, pengurus Ormas, dan lain sebagainya.

5. Belum adanya evaluasi terukur, umpan balik (*feedback*), dan tindak lanjut atas berbagai Diklat yang dilaksanakan sendiri atau diikuti di berbagai instansi. Seyogyanya diklat yang dilaksanakan dievaluasi efektifitas dan efesiesinya, seterusnya bagaimana tindak lanjut pelaksanaan Diklat tersebut apakah sudah memadai, relevan, dan efektif untuk menunjang pelaksanaan tugas.
6. Penghargaan dan perlindungan profesi yang lemah dari pemerintah. Penghargaan bagi pamong belajar umumnya diberikan oleh pemerintah pusat berupa sertifikat-sertifikat saja, padahal yang sangat diperlukan pamong belajar adalah kesempatan untuk beraktualisasi diri dan pengembangan kreatifitas dengan penyediaan fasilitas kerja yang memadai dan kesejahteraan lainnya yang layak. Disamping itu proses kenaikan pangkat juga sering menjadi kendala karena kurangnya perhatian dari jajaran terkait di pemerintah daerah sebagai akibat ketidak pahaman terhadap tugas dan fungsi tenaga fungsional pamong belajar.
7. Secara organisasi keberadaan tenaga fungsional dan tenaga struktural masih lemah. Memang sudah ada wadah profesi yang baru dibentuk seperti Forum Komunikasi Pamong Belajar, Forum Komunikasi Tutor, Forum Komunikasi Kepala SKB, namun organisasi ini tidak mandiri karena aspirasinya tidak tumbuh dari bawah dan anggaran terpaut dengan anggaran institusi, sehingga masih tampak nuansa politilisasi dalam pembinaan organisasi profesi ini.

#### **4. Kompetensi Pamong Belajar yang Diharapkan**

Sumber daya manusia pada institusi pendidikan non formal termasuk Sanggar Kegiatan Belajar tidak terlepas dari fungsinya sebagai “agen pembaharu” bagi pengembangan pendidikan masyarakat yang tertinggal, yaitu tertinggal dalam pendidikan dan tertinggal dalam ekonomi. Untuk itu diharapkan tumbuh dan lahir sumber daya manusia pada Sanggar Kegiatan Belajar yang mempunyai beberapa kompetensi dasar. Kompetensi dasar menurut Neilsen (dalam Gilley & Egglan, 1988), yaitu kemampuan interpersonal (kemampuan berhubungan antar pribadi), kemampuan konseptual (kemampuan berpikir), dan kemampuan teknis (kemampuan mengerjakan sesuatu).

Sejalan dengan itu PP Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, maka tenaga pendidik termasuk pamong belajar harus mempunyai empat kompetensi sebagai berikut: (1) kompetensi pedagogik dan andragogik; (2) kompetensi profesional; (3) kompetensi kepribadian; dan (4) kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik dan andragogik berkaitan dengan pemahaman teori belajar dan mengajar pedagogi (pendidikan anak) dan andragogi (pendidikan orang dewasa). Dengan mempelajari kedua teori pendidikan tersebut diharapkan mereka akan lebih mampu dalam membina dan membimbing warga belajar sebagai sistem klien, sehingga penyelenggaraan pendidikan luar sekolah akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Kompetensi profesional berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok di intitusi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan non formal. Mampu melakukan kerjasama dengan semua pihak. Sedangkan kompetensi kepribadian berkaitan dengan kepribadian seseorang seperti kejujuran, keramahan, bertanggung jawab, suka menyapa, dan murah senyum kepada semua *stake holder* dan kelompok sasaran. Kompetensi kepribadian ini memudahkan Pamong Belajar dalam pelaksanaan program di lapangan, sehingga tujuan insitusi dengan sendirinya akan tercapai pula dengan baik.

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan sumberdaya manusia untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, berkomunikasi dengan warga belajar sebagai sistem klien. Kemampuan ini diperlukan karena mereka akan menghadapi berbagai lapisan dan golongan masyarakat yang berbeda-beda usia, watak, sikap, dan status sosialnya.

Seiring dengan tumbuhnya kompetensi di atas, segala hak, fasilitas, dan penghargaan yang seharusnya dimiliki Pamong Belajar dapat diberikan sebagaimana mestinya. Kesejahteraan, insentif, fasilitas kerja, kesempatan untuk mengikuti pendidikan lebih tinggi, dan dan promosi jabatan hendaklah diberikan secara transparan dan akuntabel. Kemudian institusi dapat pula memberikan pengakuan dan posisi yang layak bagi mereka yang telah selesai mengikuti pendidikan formal maupun non formal.

Berkaitan dengan kompetensi yang diperlukan oleh agen pemberdayaan, Anwas (2013) mengemukakan bahwa seiring dengan tuntutan perkembangan zaman di era global, maka kompetensi agen pemberdayaan perlu dikembangkan secara dinamis. Kompetensi atau kemampuan tersebut dapat diwujudkan dalam pengetahuan yang luas dan keterampilan yang handal di bidangnya. Pengetahuan dan keterampilan

pilan tersebut akan lebih sempurna apabila ditopang dengan sikap dan karakter yang terpuji. Sehubungan dengan itu, berdasarkan pengalaman lapangan, beberapa kompetensi yang diperlukan pamong belajar sebagai bagian dari agen pemberdayaan masyarakat desa melalui pendidikan luar sekolah ialah:

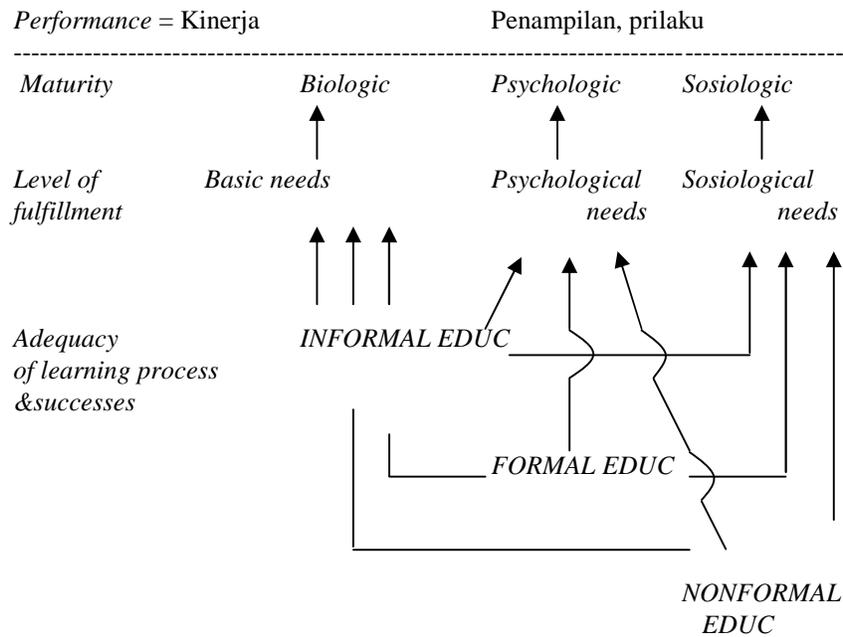
1. Kompetensi di bidang pemahaman sasaran
2. Kompetensi di bidang penumbuhan kesadaran
3. Kompetensi di bidang komunikasi inovasi
4. Kompetensi di bidang pengelolaan pembelajaran
5. Kompetensi di bidang pengembangan kewirausahaan
6. Kompetensi di bidang pemandu sistem jaringan
7. Kompetensi di bidang TIK
8. Kompetensi di bidang *sponsorship*
9. Kompetensi di bidang humas dan *public relation* (PR)

Dengan adanya pengembangan kompetensi pamong belajar yang sistematis dan terencana secara baik diharapkan akan terwujud tenaga fungsional pamong belajar yang profesional di bidangnya dan pada gilirannya dapat meningkatkan layanan pendidikan non formal yang lebih bermutu, relevan, dan berdaya guna dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan.

### **5. Strategi Peningkatan Kompetensi SDM Pamong Belajar**

Pada dasarnya, dalam struktur pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang mempunyai kematangan dalam dirinya, yaitu matang secara biologik, psikologik, dan sosial. Proses ini lahir setelah terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan ketiga aspek tersebut. Pemenuhan kebutuhan tersebut tentunya diperoleh melalui proses belajar (*learning process*) yang panjang, baik pendidikan informal, formal, maupun non formal.

Berdasarkan hal di atas, di bawah ini dapat digambarkan skema fokus peningkatan sumber daya manusia pamong belajar pada Sangar Kegiatan Belajar yang berorientasi pada peningkatan layanan pendidikan non formal kepada masyarakat luas.



Gambar Struktur Proses Pembentukan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Dalam rangka peningkatan kompetensi Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar ada beberapa aspek yang perlu menjadi fokus perhatian yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi pamong belajar melalui pendidikan formal yang relevan, pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis terpadu, serta tindak lanjut dari pendidikan dan pelatihan.
2. Mengembangkan sistem penilaian karir dan penilaian kinerja yang terencana dan sistematis, transparan dan akuntabel.
3. Mengembangkan penilaian kinerja berbasis mutu, bukan berdasarkan subjektivitas pimpinan (*like and dislike*).
4. Mengembangkan sistem penghargaan (*reward*), kesejahteraan (*incentive*), fasilitas, dan perlindungan bagi sumber daya manusia dalam bekerja. Hal ini dapat memacu motivasi kerja, kreatifitas, dan prestasi kerja.

5. Masing-masing pihak dan *stake holder* yang ada di SKB perlu mengedepankan mutu pelayanan yang prima berdasarkan azas persaudaraan, egaliter, kolegial, dan kemitraan sehingga setiap orang yang datang merasa diperlakukan sebagai manusia dan puas menerimanya.
6. Mengembangkan institusi yang lebih kondusif guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program, dan pelayanan kepegawaian.

Kualitas program Sanggar Kegiatan Belajar sebagai institusi pelayanan publik sebagian besar ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia pelaksananya, dalam hal ini pamong belajar. Mutu sumber daya manusia dimaksud berkaitan dengan kualitas pengetahuan, sikap mental (kepribadian), maupun keterampilan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut diperoleh melalui proses pembelajaran (*learning process*), baik melalui pendidikan yang direncanakan maupun melalui kegiatan belajar mandiri dan pengalaman lapangan.

Peningkatan kompetensi pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar melalui pendidikan yang direncanakan merupakan hal yang *urgent*. Kegiatan ini dapat melalui tiga bentuk pembelajaran berikut.

2. Pengajaran, yaitu proses transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang menekankan pada aspek kognitif.
3. Pembimbingan, yaitu proses menuntun, mengarahkan atau menela-dani perilaku atau perbuatan sumber daya manusia sesuai dengan kondisi dan potensi kelompok sasaran. Penekanannya adalah pada ranah afektif.
4. Pelatihan, yaitu proses melatih keterampilan tertentu melalui belajar dan bekerja yang menekankan pada ranah psikomotor. Hal ini bertujuan agar sumberdaya manusia tersebut tidak hanya menguasai teori dan ide-ide, tetapi juga mampu mengaplikasikannya di lapangan.

Melalui pendidikan dan pelatihan yang terencana dan melalui analisis kebutuhan (*need assesment*) yang tepat diikuti pamong belajar maka peningkatan kualitas sumber daya manusia pamong belajar akan tercapai. Daya-daya tersebut meliputi daya biologik (fisik), daya psikologik (sikap mental), dan daya sosiologik (interaksi sosial dan sistem nilai).

### C. SIMPULAN

Pada dasarnya pencapaian tujuan pembangunan masyarakat desa lebih dominan melalui pendidikan luar sekolah. Pamong belajar sebagai salah satu tenaga fungsional yang turut menjaga dan mengendalikan mutu layanan pendidikan nonformal dan informal perlu ditingkatkan kompetensinya. Semakin baik kompetensi yang dimiliki, semakin baik pula mutu layanan yang diberikan.

Pelatihan dan pengembangan merupakan bagian penting dalam pengelolaan sumber daya manusia. Untuk itu, dalam rangka melahirkan pamong belajar yang profesional dalam pemberdayaan masyarakat desa diperlukan pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan program pemberdayaan desa, yang direncanakan secara matang berdasarkan analisis kebutuhan terkait dengan bidang tugas dan kebutuhan kelompok sasaran masyarakat desa.

Oleh karena itu model-model pelatihan dan diklat kompetensi yang selama ini diberikan kepada pamong belajar perlu dievaluasi lagi untuk disesuaikan dengan konteks dan tantangan program, skala prioritas program, serta kondisi spesifik lokasi dan masyarakat. Disamping itu, juga dibutuhkan dukungan fasilitas kerja, budaya organisasi, dan kesejahteraan yang memadai.

### DAFTAR RUJUKAN

- Antonacopoulou, E. & FitzGerald, L. 1996. "Reframing Competency in Management Development" *Human Resource Management Journal*; 6(1). London.
- Anwas, Oos. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Penerbit Alfabeta. Bandung
- Becker, B.E., Huselid, M.A., & Ulrich, D. 2001. *The HR Scorecard*, Harvard Business School Press, Boston-Massachusetts.
- Berge, Z., Marie, V., Linda, D., Donna, S. 2002. "The Increasing Scope of Training and Development Competency" *Benchmarking: An International Journal*, 9(1): 43-61.
- Chambers, Robert. 1995. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts? Under Kirdar dan Leonard Silk(eds.), People: From Impoverishment to Empowerment*. New York University Press. New York.
- Dessler, G. 2000, *Human Resource Management*, Prentice-Hall, New Jersey.
- Kesler, GC. 1995, "A Model and Process for Reengineering the HRM Role, Competencies And Work in Multi National" *HRM Journal of Michigan*.

- Gilley JW & Egglan SA. (1993). *Principles of Human Resources Development*. Addison-Wesley Publishing Company, Inc. USA
- Ginandjar Kartasmita. 1997. Makalah disampaikan dalam Sarasehan DPD Golkar TingkatI Provinsi Jawa Timur.
- Lippitt, Ronald. et al. (1958). *Dynamic of Planned Change* – Under The General Editorship of Williard B. Spalding Harcourt Brace & World Inc. New York.
- McConnell, A.E. 1998. "Competence And Competency: Keeping Your Skills Sharp" *Nursing*, 28 (9): 1-4. Horsham.
- Rogers M. & Shoemaker F. Floyd.(1971). *Communication Innovation*. New York The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc
- Salkind, Neil, J. (1985). *Theories of Human Development*. John Willey and Sons. New York.
- Spencer, Lyle M., and Spencer, Signe, M. (1993). *Competence at Work*. John Willey and Sons. New York.

## PEMUDA SEBAGAI FASILITATOR PENDAMPING DESA

Syamsuddin

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pendidikan Nonfomal  
Konsentrasi Pemberdayaan Masyarakat  
Universitas Negeri Yogyakarta  
syamsuddin.juhran@gmail.com/081352696565

### Abstrak

Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa. Setiap desa memiliki keragaman potensi berbeda. Potensi desa mampu diaktualisasikan sesuai dengan perencanaan dan tata kelola desa yang mapan demi keberlanjutan pembangunan desa (*sustainable development*). Keberlanjutan ditandai dengan adanya generasi (pemuda) yang lahir dari realitas sosial dan sistem pengetahuan adat istiadat yang memiliki modal sosial (*social capital*) untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam *self governing community* sebagai fasilitator pendamping desa. Dalam artikel ini, penulis menelaah pemuda sebagai fasilitator pendamping desa agar seluruh elemen terkait mampu menerjemahkan potensi pemuda sebagai *empowerment* dan bertujuan sebagai perwujudan pemuda dalam berpartisipasi untuk desa, bangsa dan negara.

**Kata Kunci:** pendamping, desa, potensi, *sustainable development*, pemuda, modal sosial, *self governing community*, *sustainable community facilitator*.

### A. PENDAHULUAN

Manusia memiliki hal yang *evident* dalam dirinya, yakni fitrah dengan ragam potensi dan aktualnya. Seperti halnya manusia, begitu juga dengan Desa. Sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa “desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

SEMINAR NASIONAL  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA”  
Kamis/ 6 Oktober 2016

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 tahun 2015 tercatat jumlah desa di Indonesia adalah  $\pm 74.754$ . Sebelumnya dalam Permendagri No. 39 tahun 2015, tercatat jumlah desa adalah sebanyak 74.093 desa. Desa dengan segala keragaman dan kompleksitas potensinya, aktual mengikuti nalar perubahan dunia. Potensi desa bukan saja terletak pada aspek-aspek material yang melimpah seperti Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa diproduksi menjadi industri manufaktur (hulu) ataupun industri kecil dan menengah (hilir) yang mampu menciptakan ragam lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa.

Keberadaan potensi yang telah aktual tentu mengalami fase degradasi (penyusutan). Sebuah pembaharuan SDA membutuhkan waktu bertahun-tahun agar bisa terbarukan. Perangkat desa yang terlatih, terdidik, terpercaya dalam mengelola potensi desa diharapkan mampu mengelola sumber daya desa. Sudah sepatutnya pemerintah tidak lagi berharap pada SDA terbarukan dan tak terbarukan, namun fokus pada kekuatan (*empowerment*) sumber daya manusia (BJ Habibi, Presiden ke-3 RI).

Pemanfaatan potensi di aspek sumber daya manusia (SDM). Maksudnya, setiap desa memiliki regenerasi potensial untuk mengembangkan dan memajukan desa, bukan saja bergerak dalam memobilisasi massa pada praksis-praksis sosial (*social change*), regenerasi tersebut bisa menjadi seorang *leader* yang mapan. *Leader* yang mapan adalah mereka yang memiliki keterampilan komunikasi yang *apik*, disiplin yang baik.

Sesuai dengan Potensi yang ada pada SDM, harus jeli dilihat oleh perangkat desa untuk menjaga *sustainable* (keberlanjutan) kaderisasi dengan memperhalus *skills*, memberikan pelatihan dan mendidiknya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Kepememudaan No. 40 tahun 2009, pasal 13 yang menegaskan bahwa “Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing”.

SDM dapat disematkan pada terminologi pemuda. Pemuda yang lahir dari rahim desanya, yang sejak kecil ia tumbuh dari realitas

sosial, kultur dan adat istiadat. Jika berkaca pada beberapa program skala nasional seperti program kesehatan dan pendidikan sering tidak efektif di kalangan masyarakat desa, karena kerap terjadi ketidakmampuan beradaptasi dengan baik terhadap masyarakat desa. Salah satu yang menjadi ciri *self governing community* adalah adanya hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumber daya alam, hubungan sosial yang pada prinsipnya untuk menjaga kesinambungan dan keberlanjutan hubungan antara manusia, tuhan dan alam (Nurcholis, 2011:11).

Maka penting sekiranya pemuda yang lahir dari realitas sosial desa *urun angan* untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga dan mengawal keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan desa. Karena pemuda tersebut memahami psikologis sosial desa untuk merajut komunikasi-komunikasi yang *missing understanding* dalam sistem pengetahuan masyarakat desa.

Namun, permasalahan yang sering mengemuka pada pemuda, sering dipicu oleh beberapa hal. Pertama, ketidakpercayaan tetua (orang tua) atau dalam hal ini perangkat desa kepada pemuda yang diklaim minim pengalaman (*hard & soft skill*). Kedua, realitas pemuda yang telah menempuh studi, pergi merantau kekota mencari pekerjaan sesuai *passion*-nya. *Ketiga*, personalitas pemuda yang masih dalam kecenderungan hedonis. *Kempat*, sangsi sosial ketika pemuda lulus studi hanya tinggal dan kerja didesa, yang menyebabkan pemuda memilih meninggalkan desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, perangkat desa diharapkan inklusif dan memberi kesempatan kepada pemuda sebagai Kader Muda Desa (KEMUDI) untuk ikut berpartisipasi bersama-sama mendampingi *self governing community*, sebagai pengontrol dan pendamping untuk menjaga keberlangsungan pembangunan desa.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Pemuda dan Kepemudaan**

Pemuda dan Kepemudaan, dua terminologi yang secara artifisial terlihat sama. Namun dalam berbagai tinjauan keilmuan, dua kata tersebut memiliki arti dan makna yang dinamis. Dalam tinjauan ilmu biologi, pemuda dapat diartikan dan diidentifikasi sebagai satu proses perubahan fisik (material) dari fase kanak-kanak ke fase remaja dewasa.

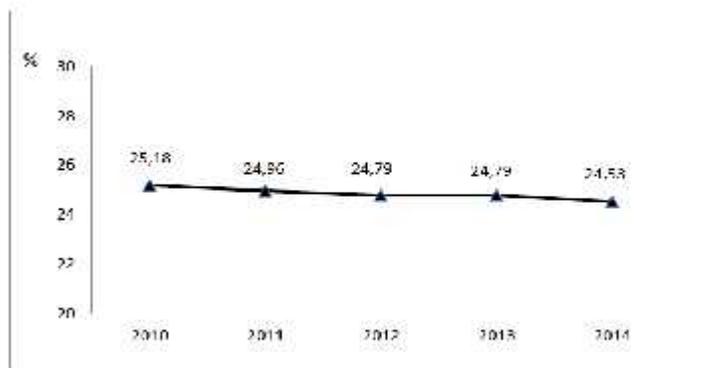
Berbeda dengan perspektif biologis, pemuda juga bisa ditinjau dari aspek demografi. Dari jumlah penduduk yang dikategorikan sesuai rentang (*range*) usia (lihat tabel di bawah).

Tabel 1.1 Jumlah dan Presentase Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2014

Kelompok Umur (Tahun)	Perkotaan (K)		Perdesaan (D)		K+D	
	Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
< 16	49 800,72	29,18	39 816,74	51,68	75 677,46	30,92
16 - 30	32 751,57	25,92	29 083,12	73,4	61 034,69	24,53
> 30	55 720,89	44,90	56 802,61	45,9	113 523,50	45,04
<b>Jumlah</b>	<b>126 333,18</b>	<b>100,00</b>	<b>115 702,46</b>	<b>100,00</b>	<b>252 035,65</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS, Susenas Kor 2014

Tabel 1.2 Presentase Jumlah Pemuda Indonesia, 2010-2014



Sumber: BPS, Susenas Kor 2010- 2014

Dari kedua tabel di atas kita bisa melihat jumlah presentase pemuda yang berkembang secara dinamis dari tahun ke tahun. Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah pemuda Indonesia dengan *range* usia 16-30 tahun berjumlah sekitar 61,83 juta jiwa atau 24,53% dari jumlah penduduk Indonesia yakni 252,035,065 juta jiwa.

Pada tabel 1.2 menunjukkan di tahun 2010 persentase pemuda Indonesia tercatat sebesar 25,18%. Angka tersebut menurun menjadi 24,96 persen di tahun 2011. Pada tahun 2012 dan 2013 persentase pemuda mengalami penurunan menjadi sebesar 24,79 % dan pada tahun 2014 menjadi sebesar 24,53%.

Bila kita membandingkan tingkat presentase jumlah pemuda Indonesia pada tahun 1961 sampai dengan 1971 dengan *range* usia muda dipatok dari umur 10-24 tahun. Tahun 1961 berjumlah sekitar 23678,6 atau 24,6% dan tahun 1971 berjumlah 33580,6 atau 28,4%. Artinya, selama dasawarsa peningkatan jumlah pemuda saat itu meningkat 42%.

Berbeda dengan persentase jumlah pemuda di Indonesia pada tahun 2010 hingga tahun 2014 cenderung mengalami penurunan. Penurunan tersebut bisa dilihat dari berbagai aspek, salah satunya ketika berhasilnya program Keluarga Berencana (KB) seperti yang diutarakan oleh M. Yasin dalam buku *Pemuda dan Perubahan Sosial*, (1974). Penurunan presentase jumlah penduduk di tahun 2010 hingga 2014, pernah terjadi pada tahun 1971 hingga 2001, lihat tabel 1.3 berikut.

Tabel. 1.3 Proyeksi Pemuda di Indonesia 1971-2001

Tahun	Tanpa Keluarga Berencana (KB)	Dengan Keluarga Berencana
1971	35302	35302
1976	42518	42518
1981	50242	50242
1986	56401	56401
1991	63357	60979
1996	72920	64459
2001	86183	68381

Sumber: Lembaga Demografi FEUI

Dengan jumlah presentase demografi pemuda di Indonesia tahun 2014, bahwa jumlah usia produktif di masa bonus demografi 2025-2040 memberi sinyal kepada negara Indonesia (seluruh elemen terkait) untuk menyambut dan mempersiapkan seluruh asepek material ataupun non material agar dapat mengaktualkan potensi *Generasi Emas* sebagai sumber daya manusia yang produktif, aktif dan partisipatif dalam membangun dan menjaga kestabilan negara. Sumber daya manusia itu disebut *Pemuda*.

Fakta sejarah dari peran pemuda cukup memberikan ruang perubahan untuk negara Indonesia, salah satu dari sekian fakta sejarah adalah berdirinya organisasi modern Budi Utomo pada 1908 (Ricklefs, 2005:249-251). kemudian pada Kongres Pemuda I di tahun 1926 dan Kongres Pemuda II di tahun 1928 (Leirissa, 1989:1-26) yang ditengarai oleh Sumpah Pemuda.

Pemuda merupakan unsur yang menarik dan esensial dalam suatu gerakan perubahan, karena di dalam jiwa pemuda terdapat kerelaan berkorban demi cita-cita. Jika pemuda adalah aspek lahiriah maka kepemudaan adalah batiniyah (jiwa) yang memiliki cita rasa perubahan dan secara potensial dimiliki oleh keseluruhan manusia (pemuda).

Dengan begitu sekiranya penting pemuda sebagai harapan masa depan bangsa Indonesia harus dibina agar potensi roh/jiwa kepemudaannya sebagai pembaharu (*social change*) dapat teraktual untuk membangun negara, bangsa, daerah dan desa tempat ia tumbuh besar.

## 2. Pemuda, Komunikasi dan *Self Governing Community*

Pemuda yang lahir dari rahim realitas sosial (desa), budaya, adat istiadat dan sistem pengetahuan memiliki probabilitas untuk menjadi kader/regenerasi desa. Dalam hal ini kader desa merupakan seorang *agent* yang memiliki kapasitas dan kualitas diri yang mumpuni di berbagai aspek, seperti komunikasi, *life skill's* dan *leadership* sebagai modal sosial.

Modalitas sosial tersebut merupakan nilai dimiliki individu yang didapatkan dari hasil proses atau peremajaan. Setiap individu memiliki bakatnya masing-masing, hanya saja bakat tersebut bisa menjadi endapan di dalam diri bila tidak diasah melalui *training* dan pendidikan formal-nonformal. Bakat sebagai modalitas memiliki nilai guna yang efektif dalam berkehidupan sosial. Dengan bakat gaya komunikasi yang kontekstual, pemuda diharapkan mampu bercakap sesuai dengan norma dan etika yang berlaku pada komunitas. Kemudian, dengan *skill* (kemampuan) tata kelola administratif dan ketajaman analisis dapat berguna untuk kemajuan lembaga (perangkat desa) dan masyarakat desa.

Masyarakat desa atau *self governing community*, pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis struktural dengan struktural yang lebih tinggi, dan memiliki ciri adanya hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumber daya, hubungan sosial, dan seterusnya (Nurcholis, 2011). Sedangkan, Undang-Undang RI No. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Bab I Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*Self governing community* yang pada mulanya tidak mengenal sistem hirarki yang lebih tinggi di atasnya, kini secara *inheren* dan integral dengan sistem pemerintahan dengan catatan menghormati hak tradisional yang berlaku. Walaupun dengan adanya transformasi tersebut diharapkan tidak ada *missing* dalam mengkomunikasikan dan menjalankan pembangunan desa.

Acap kali ditemukan sebuah kekeliruan oleh seorang pendamping desa atau pekerja sosial di tahap komunikasi, baik

persuasif maupun di tahap sosialisasi (<http://kbbi.web.id/sosialisasi>). Para ahli pendamping desa tidak diragukan lagi bahwa mereka memiliki kualitas pengetahuan. Namun pengetahuan tersebut terkadang mendevaluasi pengetahuan masyarakat lokal, karena merasa memiliki pengetahuan lebih dari pada masyarakat, sehingga ia bertindak tanpa melibatkan masyarakat setempat, yang pada akhirnya *miss communication* antara masyarakat dan pendamping desa.

Menurut Jim Ife dan Frank T (2008), Menghargai pengetahuan lokal adalah sebuah komponen esensial dari setiap kerja pengembangan masyarakat. Masyarakat lokal yang memiliki pengetahuan, kearifan dan keahlian ini, dan peran pekerja masyarakat adalah untuk mendengar dan belajar dari masyarakat, bukan mengajari masyarakat tentang masalah dan kebutuhan mereka (Holand & Blackburn, 1998).

Dalam pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas tentang pengembang masyarakat, secara ekstensif pengertian tersebut dalam artikel ini untuk menerangkan posisi seorang pendamping desa. Pendamping desa sebagai komunikator atau perpanjangan tangan dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat dituntut dalam pelaksanaannya tidak ada terjadinya *noise* (hambatan) dalam proses komunikasi.

Berbagai macam media komunikasi yang bisa digunakan dan dilakukan oleh pendamping desa dalam menyampaikan maksud pesannya kepada masyarakat. Media yang digunakan seyogyanya mampu diterima dengan baik oleh masyarakat setempat, salah satu dari media tersebut adalah media seni. Media seni yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dan berakar pada kebudayaan lokal, antara lain bahasa, adat istiadat, nilai-nilai yang tercermin dan sebagainya (Kartodirdjo, 1984).

Penelitian tentang jenis pertunjukan rakyat tradisional yang tepat untuk keperluan menyampaikan pesan-pesan pembangunan pernah dilakukan dalam penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur pada tahun 1967/1977 dan daerah Sumatera Barat dan Riau pada tahun 1977/1978. Dari sekian hasil penelitian pertunjukan rakyat tersebut di antaranya; pertunjukan wayang, ludruk, dul muluk, senjang, sandiwara sunda, dan lain-lain.

Dengan demikian dalam proses komunikasi terhadap *self governing community* diharapkan sosok pemuda (kader desa) mendapatkan tempat untuk dapat mengkomunikasikan serta menjalankan pemba-

ngunan desa dengan menghormati hak-hak tradisional yang menjadi tatanan dan tuntunan masyarakat desa (*self governing community*).

### 3. Partisipasi Pemuda sebagai Fasilitator Pendamping Desa

Theodorson dalam (Mardikanto,1994), partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi adalah keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan eksternal (Sastropetro,1995:11). Secara holistik definisi partisipasi adalah keikutsertaan atau turut andilnya individu atau warga masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Undang-undang RI No.40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, Bab 1, Pasal 1(2) menjelaskan bahwa individu yang turut andil dan memegang tanggung jawab tersebut dapat disematkan pada pemuda sebagai sumber daya manusia yang jiwa kepemudaannya aktif, potensial, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Itu sebabnya pemuda mendapat gelar identitas sebagai pembaharu (*agent of change*). Maka sepatutnya pemuda dapat bereksistensi dan meningkatkan kapasitas, tentu bukan hanya tanggung jawab pemuda, tetapi tanggung jawab seluruh elemen terkait (keluarga, *stakeholders*, lingkungan belajar) yang integratif dan interkoneksi sesuai amanah konstitusi (Pasal 9). Keseriusan negara dalam merawat kepemudaan sebagai tonggak regenerasi bangsa, diterjemahkan dari landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945, kemudian termaktub dalam berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Bentuk partisipasi pemuda dapat ditempuh dengan berbagai cara, dalam artikel ini memfokuskan partisipasi pemuda sebagai fasilitator pendamping desa. Fasilitator adalah seseorang yang terlibat dalam kegiatan fasilitasi. Mereka membantu sekelompok orang memahami tujuan umum mereka dan membantu mereka untuk merencanakan bagaimana untuk mencapai tujuan, dalam melakukannya (Bens, 2012). Untuk tujuan dan peran sebagai fasilitator pendamping desa dapat dilihat Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Peraturan Pemerintah Desa No. 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Peraturan Pemerintah Desa No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa	
Bab 1, Pasal 1 (14)	Pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
Pasal 2	Tujuan pendampingan desa dalam peraturan menteri ini meli-puti: a. Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pe-merintahan desa dan pembangunan desa; b. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masya-rakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif; c. meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor; d. mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris.
Pasal 3	Ruang lingkup pendampingan desa meliputi: a. pendampingan masyarakat desa dilaksanakan secara ber-jenjang untuk memberdayakan dan memperkuat desa; b. pendampingan masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada kondisi geografis wilayah, nilai APB Desa, dan cakupan kegiatan yang didampingi; dan c. pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah dae-rah kabupaten/kota, dan Pemerintah desa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat desa melalui pendampingan masyarakat desa yang berkelanjutan, termasuk dalam hal penyediaan sumber daya manusia dan manajemen.
Pasal 4	Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping yang terdiri atas: a. tenaga pendamping profesional; b. kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau c. pihak ketiga.
Pasal 9	Kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) berkedudukan di desa.
	Pendamping desa melaksanakan tugas mendampingi desa, meliputi:

Bab 2, Pasal 12	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>b. mendampingi desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana prasarana desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>c. melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;</li> <li>d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa;</li> <li>e. melakukan peningkatan kapasitas bagi kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru;</li> <li>f. mendampingi desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan</li> <li>g. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.</li> </ul>
Pasal 18	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) kader pemberdayaan masyarakat desa bertugas untuk menumbuhkan dan mengembangkan, serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, dan swadaya gotong royong.</li> <li>(2) dalam hal tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kader pemberdayaan masyarakat desa melibatkan unsur masyarakat, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kelompok tani;</li> <li>b. kelompok nelayan;</li> <li>c. kelompok pengrajin;</li> <li>d. kelompok perempuan;</li> <li>e. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;</li> <li>f. kelompok masyarakat miskin; dan</li> <li>g. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.</li> </ul> </li> </ul>

Sumber: Permen Desa No.3 tahun 2005

Bila mencermati Permen tentang desa di atas tugas yang paling asasi dari partisipasi pemuda sebagai fasilitator pendamping desa adalah mendampingi desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

### C. SIMPULAN

Artikel ini telah mengkaji dan memaparkan terkait masalah yang sering mengemuka pada pemuda (telah disebutkan dalam pendahuluan) melahirkan beberapa butir simpulan, diantaranya sebagai berikut.

1. Seluruh elemen terkait baik personal, keluarga, *stakeholders* dan lingkungan belajar mesti jeli melihat potensi pemuda.
2. Memberikan ruang dengan memfasilitasi potensi tersebut agar dapat aktual dan bermanfaat bagi desa, bangsa dan negara.
3. Mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, bahwa aktivitas pemuda sebagai fasilitator pendamping desa adalah wujud pengabdian bela negara.
4. Memperhalus bakat (*skills*) dengan pelatihan dan pendidikan.
5. Menjaga dan mengembangkan serta memahami sistem pengetahuan lokal, adat isitiadat yang berlaku di suatu desa.
6. Mengkomunikasikan kepentingan nasional dengan mempertimbangkan hak masyarakat desa.
7. Pemuda sebagai fasilitator pendamping desa adalah kader/regenerasi yang dimiliki desa untuk kemajuan dan keberlangsungan kehidupan desa.

Demikian kesimpulan dari kajian artikel ini yang membahas partisipasi pemuda sebagai fasilitator desa. Kurang dan lebihnya, penulis memohon saran dan kritik yang membangun agar proses diskursus mengenai studi kepemudaan dapat berlanjut sebagai modal pengembangan khasanah keilmuan.

### DAFTAR RUJUKAN

#### Buku

Abdullah, Taufik. 1974. *Pemuda dan Perubahan Sosial*. Jakarta. LP3ES.

SEMINAR NASIONAL  
 JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
 FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
 “KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA”  
 Kamis/ 6 Oktober 2016

- M.C. Ricklefs. 2005. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Holand, J. & Blackburn, J. (eds.) 1998. *Whose Voice? Participatory Research And Policy Change. Intermediate Technology Publication*, London. (penulis mengutipnya dari bukunya Jim Ife dan Frank T, "Community Development", hal.243 cetakan ke 3).
- Ife, J dan Frank T. 2015. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. (edisi ke-3).
- Kartodirdjo, Sartono. 1984. *Komunikasi dan Kaderisasi dalam Pembangunan Pedesaan*. Yogyakarta. P3PK UGM.
- Mardikanto, Totok. 1994. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. Surakarta. Sebelas Maret University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta. Erlangga.
- Sastroetro, Santoso. 1986. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung. Penerbit Alumni.
- R.Z. Leirissa dkk. 1989. *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

**Peraturan Perundangan**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kependudukan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2015 Tentang Kependudukan
6. Sensus Pemuda Indonesia 2014 oleh Badan Pusat statistik (BPS) Indonesia

## PERAN GURU PROFESIONAL DALAM PROSES PEMBELAJARAN

Darnis Arief

Dosen Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang

### A. PENDAHULUAN

Profesi guru harus dihargai dan dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Hal ini karena guru dan tenaga kependidikan merupakan tenaga profesional yang mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam mencapai visi pendidikan 2025 yaitu “Menciptakan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif”.

Keberadaan guru dalam proses pembelajaran memegang peranan penting. Peran tersebut tak bisa tergantikan oleh teknologi seanggih apapun. Proses pembelajaran yang berhasil mustahil dicapai dengan alat teknologi canggih tanpa kehadiran guru. Seorang guru diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang, selain mendidik siswa di sekolah, guru juga berperan penting bagi masyarakat dalam berbagai kegiatan. Ia dapat mengembangkan kemampuannya pada bidang-bidang yang dikuasainya.

Di sekolah fungsi guru antara lain sebagai pengelola pembelajaran, sementara siswa berperan aktif mengembangkan semua potensi yang mereka miliki. Hal ini dimungkinkan karena, pada dasarnya setiap siswa memiliki potensi untuk mencapai suatu kompetensi. Andaikan mereka tidak mencapai kompetensi, tentulah bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu, melainkan lebih banyak karena belum disediakan pengalaman belajar yang cocok. Menjadi seorang pengelola pembelajaran yang handal dituntut guru pembelajar yang senantiasa mengembangkan pengetahuan dan keterampilan setiap saat sehingga tidak ketinggalan jaman.

Proses pembelajaran yang melibatkan pendidik dan siswa akan memunculkan berbagai tingkah laku, baik tingkah laku yang berterima ataupun tingkah laku yang tidak berterima. Tingkah laku yang tidak berterima dapat muncul akibat dari suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Suasana tidak kondusif disebabkan oleh berbagai faktor seperti materi pembelajaran yang tidak menarik, materi terlalu sulit.

SEMINAR NASIONAL  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
“KOMPETENSI PENDAMPING PEMBANGUNAN DESA”  
Kamis/ 6 Oktober 2016

Ataupun pemilihan metode yang kurang tepat dan tidak bervariasi. Selain itu, suasana tidak kondusif dapat muncul jika guru lebih terfokus perhatiannya pada materi pembelajaran dengan tujuan supaya siswa mampu menjawab soal ujian dengan baik.

Untuk mampu membelajarkan siswa baik aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan seorang guru dituntut memiliki kompetensi. Kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Hakikat Pembelajaran**

Pembelajaran pada hakikatnya merupakan usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan siswanya, atau mengarahkan interaksi siswa dengan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai tujuan. Banyak faktor yang menyebabkan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah bagaimana pembelajaran itu direncanakan dan dilaksanakan. Proses pembelajaran yang tidak menarik akan membuat siswa bosan, akibatnya siswa menjadi malas dan tidak tertarik terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk mengaplikasikan kegiatan pembelajaran yang menarik di kelas.

Kenyataan di lapangan adalah siswa sering yang dipersalahkan ketika tidak mampu menyerap pembelajaran. Untuk itu, berbagai label pun diberikan kepada siswa misalnya pemalas, nakal, bodoh, dan lain-lain. Padahal boleh jadi penyebab ketidakmampuan siswa dalam menyerap pembelajaran bermula dari proses pembelajaran yang tidak menarik dan tidak menantang. Mengutip pendapat Andi Wira Gunawan dalam buku "*Genius Learning Strategy*", bahwa sesungguhnya tidak ada mata pelajaran yang membosankan, yang ada adalah guru yang membosankan, suasana belajar yang membosankan. Hal ini terjadi antara lain karena proses pembelajaran berlangsung secara monoton dan merupakan proses perulangan dari itu ke itu juga tanpa variasi. Proses belajar hanya merupakan proses penyampaian informasi satu arah, siswa pasif menerima materi pelajaran. Oleh sebab itu sudah saatnya guru merubah paradigma mengajar yang masih bersifat *teacher-centred* menjadi *student-centred* yang menyenangkan. Apalagi hal tersebut sudah diamanatkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas dan Peraturan Pemerintah No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional. Undang-undang No. 20

pasal 40 ayat 2 berbunyi “guru dan tenaga kependidikan berkewajiban menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis”. Di samping itu, Peraturan Pemerintah No. 19 pasal 19 ayat 1 berbunyi “proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik, serta psikologi siswa”.

## 2. Hakikat Kompetensi Guru

Menurut Wina (2009) guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa, pendidik (guru) merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Dalam hal ini, guru berperan aktif mengembangkan proses pembelajaran dalam rangka membimbing siswa agar berkembang seoptimal mungkin.

Di samping mengembangkan proses pembelajaran, guru sebagai pendidik berfungsi memotivasi siswa agar mereka dapat memecahkan berbagai persoalan hidup dalam masyarakat yang penuh tantangan, serta membentuk siswa yang memiliki kemampuan inovatif. Motivasi erat hubungannya dengan kebutuhan, sebab motivasi muncul karena adanya kebutuhan. Oleh sebab itu, guru dituntut kreatif membangkitkan motivasi belajar siswa dengan berbagai cara.

Untuk dapat berperan aktif dalam membimbing, memfasilitasi, dan memotivasi siswa belajar, guru dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran. Kemampuan tersebut meliputi pemahaman wawasan kependidikan, pemahaman terhadap siswa, kemampuan dalam pengembangan kurikulum/silabus. Selanjutnya, kemampuan merancang pembelajaran, kemampuan melaksanakan pembelajaran yang dialogis, kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi pembelajaran.

Merencanakan pembelajaran dimulai dengan menganalisis kebutuhan, menganalisis kompetensi dasar, dan menyusun program pembelajaran (Mulyasa, 2007). Menyusun pecanaan yang efektif membu-

tuhkan kemampuan untuk menetapkan materi pembelajaran yang relevan, media yang menunjang pencapaian materi. Selain itu, dibutuhkan pula kemampuan guru dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Di samping itu yang tidak kalah penting adalah kemampuan guru dalam menyusun penilaian pembelajaran.

Perencanaan yang disusun diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran pada dasarnya terdiri dari kegiatan pendahuluan yang bertujuan untuk membangkitkan motivasi siswa dalam mengikuti kegiatan inti pembelajaran. Begitu semua siswa siap baik fisik maupun mental kegiatan dilanjutkan dengan inti pembelajaran dengan membimbing siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya. Selanjutnya adalah kegiatan penutup pembelajaran, yang antara lain berisi bimbingan pada siswa untuk mengambil kesimpulan pembelajaran serta memberikan tindak lanjut pembelajaran.

Kompetensi berikutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi ini sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Kompetensi sosial merupakan kemampuan sebagai bagian dari masyarakat. Kompetensi sosial meliputi kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis, menggunakan teknologi informasi, bergaul secara efektif dengan siswa, sesama guru, dan orang tua serta masyarakat secara santun.

Kompetensi profesional menyangkut kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Penguasaan materi amat penting bagi guru. Bila guru tidak menguasai materi, mustahil mereka mampu membimbing siswa memiliki suatu kompetensi. Salah satu tugas guru adalah mengajar. Menurut Wina (2009), mengajar dalam konteks standar proses pendidikan tidak hanya sekedar menyampaikan materi pembelajaran, melainkan juga dimaknai sebagai proses mengatur lingkungan supaya siswa belajar. Guru perlu memberdayakan semua potensi siswa untuk menguasai kompetensi yang diharapkan. Pemberdayaan diarahkan untuk mendorong pencapaian kompetensi dan perilaku khusus, supaya setiap individu mampu menjadi pembelajar sepanjang hayat dan mewujudkan masyarakat belajar.

Komponen kepribadian sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan bijaksana, berwibawa, berakhlak mulia. Kompetensi sosial, meliputi kemampuan berkemu-

nikasi baik lisan maupun tulisan, bergaul secara efektif dengan siswa, sesama guru, dan orang tua secara santun.

### 3. Pembelajaran yang Kondusif

Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon. Tingkah laku tersebut dapat dikategorikan menjadi tingkah laku yang berterima dan tingkah laku yang tidak berterima. Kenyataan dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah, tingkah laku siswa kurang mendapat perhatian dari guru. Guru lebih terfokus perhatiannya pada penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, bagaimana siswa memahami materi dengan baik sehingga mampu menjawab soal ujian dengan baik.

Sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan menciptakan iklim yang memungkinkan siswa belajar dengan nyaman. Pengelolaan pembelajaran meliputi mengelola tempat, materi, kegiatan pembelajaran, siswa, dan mengelola sumber belajar.

Pembelajaran bukanlah bersifat penyampaian informasi berupa fakta, konsep, ataupun prinsip, melainkan siswa berperan aktif dalam proses menemukan fakta, konsep, ataupun suatu prinsip. Hal ini sejalan dengan pendapat Suparno (2007) yang mengemukakan bahwa, pengetahuan dibangun sendiri oleh siswa, baik secara personal maupun secara sosial. Siswa harus berbuat, karena pengetahuan tidak bisa dipindahkan dari guru ke siswa, kecuali hanya dengan keaktifan siswa menalar. Selanjutnya dijelaskan bahwa, guru berperan sebagai fasilitator, menyediakan sarana dan situasi agar proses konstruksi pengetahuan siswa berjalan mulus.

Pembelajaran yang efektif haruslah menyenangkan, untuk itu siswa lebih diarahkan memiliki motivasi tinggi dalam belajar dengan menciptakan situasi yang menyenangkan dan menggembirakan. Menurut Mulyasa, pembelajaran menyenangkan (*joyfull instruction*) merupakan suatu proses pembelajaran yang didalamnya terdapat suatu kohesi yang kuat antara guru dan siswa, tanpa ada perasaan terpaksa atau tertekan. Pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan baik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Guru memosisikan diri sebagai mitra belajar siswa, bahkan dalam hal tertentu tidak menutup kemungkinan guru belajar dari siswanya. Dalam hal ini perlu diciptakan suasana yang demokratis dan tidak ada beban, baik guru maupun siswa dalam melakukan proses pembelajaran

(Rusman, 2011). Pembelajaran dikatakan menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi. Sementara sebaliknya pembelajaran menjadi tidak menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaan menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas/tidak berminat, jenuh/bosan, suasana pembelajaran monoton, pembelajaran tidak menarik (Indrawati dan Wawan, 2009).

Konsentrasi yang tinggi tidak akan terwujud jika kondisi kelas tidak nyaman. Oleh karena itu pengaturan lingkungan belajar sangat diperlukan agar siswa mampu melakukan kontrol terhadap pemenuhan kebutuhan emosionalnya. Lingkungan belajar yang demokratis memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan pilihan-pilihan tindakan belajar dan akan mendorong siswa untuk terlibat secara fisik, emosional dan mental dalam proses belajar, sehingga akan dapat memunculkan kegiatan-kegiatan yang kreatif-produktif (C. Asri, 2005).

Demikian pula sebaliknya, prakarsa siswa untuk belajar akan mati bila kepadanya dihadapkan berbagai aturan yang tak ada kaitannya dengan belajar. Banyaknya aturan yang sering kali dibuat oleh guru dan harus ditaati oleh siswa akan menyebabkan mereka selalu diliputi rasa takut. Lebih jauh lagi, siswa akan kehilangan kebebasan berbuat dan melakukan kontrol diri. Apa yang terjadi bila siswa selalu dikuasai oleh rasa takut. Mereka akan mengembangkan pertahanan diri (defence mechanism), sehingga yang dipelajari bukanlah pesan-pesan pembelajaran, melainkan cara-cara untuk mempertahankan diri mengatasi rasa takut. Siswa yang demikian tidak akan mengalami *growth in learning*, dan akan selalu menyembunyikan ketidakmampuannya (Asri, 2005).

Sebagian guru atau sekolah masih terperangkap dalam tradisi yang menghambat kreatifitas siswa. Seperti kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suatu sekolah ketika guru masuk kelas, dimana ketua kelas memberikan aba-aba dengan kata-kata duduk yang rapi, tangan di meja, dan lain-lain. Memang sepintas kebiasaan tersebut terlihat baik karena suasana kelas menjadi tenang, tetapi suasana tersebut mempengaruhi keleluasaan siswa dalam berekspresi dan mengemukakan pendapat. Siswa menjadi takut dan lebih banyak menerima dari guru ketimbang aktif mencari.

Pembelajaran menyenangkan adalah adanya pola hubungan baik antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran. Tercipta suasana yang demokratis dan tidak ada beban, baik guru maupun siswa dalam melakukan proses pembelajaran. di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh, perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, konsentrasi tinggi. Sementara sebaliknya pembelajaran menjadi tidak menyenangkan apabila suasana tertekan, perasaan terancam, perasaan menakutkan, merasa tidak berdaya, tidak bersemangat, malas/tidak berminat, jenuh/bosan, suasana pembelajaran monoton, pembelajaran tidak menarik bagi siswa.

Untuk itu selalu awali kegiatan pembelajaran dengan memberikan sapaan hangat kepada siswa, misalnya “anak-anak senang bertemu ananda hari ini, ananda adalah anak-anak bapak atau/ibu yang hebat”. Karena sapaan hangat dan raut wajah cerah memantulkan energi positif yang dapat memengaruhi semangat para siswa. Kita dapat bayangkan jika seorang guru ketika memulai pembelajaran dengan raut muka *ruwet*, tidak senyum, penampilan kusut, tentu saja suasana kelas menjadi menegangkan dan menakutkan.

Ciptakanlah lingkungan yang rileks, yaitu dengan menciptakan lingkungan yang nyaman. Oleh karena itu aturlah posisi tempat duduk secara berkala sesuai keinginan siswa. Bisa memakai format “U”, lingkaran, *Cevron*, dan lain-lain. Selain itu, ciptakanlah suasana kelas dimana siswa tidak takut melakukan kesalahan. Untuk menanamkan keberanian kepada siswa dalam mengemukakan pendapat atau menjawab pertanyaan, katakan kepada siswa jawabannya salah katakan “kan lagi belajar”. Karena sedang belajar, maka kesalahan adalah suatu yang lumrah dan tidak berdosa.

Adanya dorongan dalam diri individu untuk belajar bukan hanya tumbuh dari dirinya secara langsung, tetapi bisa saja karena rangsangan dari luar, misalnya berupa stimulus model pembelajaran yang menarik memungkinkan respon yang baik dari diri siswa yang akan belajar. Respon yang baik tersebut, akan berubah menjadi sebuah motivasi yang tumbuh dalam dirinya, sehingga ia merasa terdorong untuk mengikuti proses pembelajaran dengan penuh perhatian dan antusias.

Apabila dalam diri siswa telah tumbuh respon, hingga termotivasi untuk belajar, maka tujuan belajar akan lebih mudah dicapai. Sis-

wa yang antusias dalam proses pembelajaran memiliki kecenderungan berhasil lebih besar dibanding mereka yang mengikuti proses dengan terpaksa atau asal-asalan.

Kebanyakan guru mengajar hanya untuk mengejar target tanpa memperdulikan pemahaman siswa. Padahal belajar adalah suatu bentuk aktivitas manusia yang memerlukan adanya motivasi untuk mencapai tujuan. Semakin tinggi motivasi yang didapat siswa maka semakin tinggi pula keberhasilan yang akan dicapai. Banyak cara dalam memberikan motivasi kepada siswa antara lain dengan membuat *yel-yel* berupa kata-kata afirmasi seperti: Apa Kabar?.

Individu adalah makhluk yang unik memiliki kecenderungan, kecerdasan, dan gaya belajar yang berbeda-beda. Setidaknya, terdapat empat gaya belajar siswa seperti yang diungkapkan Howard Gardner yaitu *Auditory*, *Visual*, *Reading* dan *Kinesthetic*. Guru perlu menyadari bahwa siswa dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, untuk mengakomodir semua siswa belajar dengan latar belakang yang berbeda tersebut guru dapat menggunakan metode yang bervariasi.

#### 4. Pengembangan Karakter

Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang relegius, nasionalis, produktif, dan kreatif (Kemendiknas, 2010).

Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa di sekolah dasar (SD) tidak merupakan satu bidang kajian tersendiri, melainkan diintegrasikan dengan setiap pembelajaran, termasuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia pengintegrasian dapat dilakukan dalam kompetensi dasar sastra, baik melalui mendengarkan atau membaca. Pembelajaran sastra di SD mulai kelas satu sampai kelas enam, terdiri dari pembelajaran prosa, puisi, dan drama. Pelaksanaan pembelajaran prosa, puisi, ataupun drama dilakukan melalui kegiatan menyimak, berbicara, membaca, atau menulis. Pembelajaran sastra lebih menekankan pada apresiasi ketimbang belajar teori sastra. Siswa mengapresiasi sastra melalui mendengarkan cerita dan atau membacanya. Mendengarkan pembacaan puisi dan atau mengubah puisi. Selain

itu mengapresiasi drama dengan menonton pertunjukan drama, mementaskan drama sederhana dan atau menulis naskah drama.

Sastra sarat nilai positif, di antaranya nilai pendidikan. Nilai-nilai tersebut digali dan dipupuk melalui pembelajaran di kelas. Pada kegiatan eksplorasi, guna mengaktifkan skemata siswa, kepada mereka dipertanyakan berbagai cerita yang pernah mereka kenal. Selanjutnya, pada kegiatan elaborasi siswa akan membaca atau mendengarkan cerita. Dengan membaca atau mendengarkan cerita, siswa mendapat pengalaman dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat memperluas cakrawala pandang mereka. Pengalaman baru diperoleh melalui peristiwa yang disajikan dalam alur dan tokoh dengan berbagai karakternya. Mengenal berbagai karakter tokoh dalam cerita dengan mendengarkan, kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan karakter yang baik, atau buruk serta dampaknya dalam kehidupan, merupakan sarana dalam mengembangkan karakter yang baik yang sesuai dengan norma-norma yang diyakini dan disepakati.

Di dalam suatu cerita, biasanya ada konflik atau masalah, baik masalah antartokoh, maupun masalah dalam diri sang tokoh yang disebut konflik pribadi. Membaca atau mendengarkan cerita, siswa didik akan memperoleh pengalaman melalui bagaimana tokoh menghadapi dan mengatasi masalah. Selain itu, melalui berbagai masalah yang dialami sang tokoh, siswa akan berpikir bahwa bukan hanya mereka yang mempunyai masalah, orang lain juga, bahkan mungkin lebih rumit. Bagaimana sang tokoh bermasalah, kemudian mampu ke luar dari masalah, dapat membentuk karakter siswa yang gigih dan tidak mudah menyerah.

Melalui latar cerita, yang antara lain terdiri dari tempat dengan budayanya, memungkinkan siswa memperoleh wawasan baru tentang adat dan budaya yang beragam, sehingga dapat menumbuhkan apresiasi atas keanekaragaman budaya. Dengan demikian diharapkan tumbuh kesadaran kolektif sebagai sesama anak bangsa, mesti memiliki latar belakang etnik, budaya, dan agama yang berbeda (Masnur, 2011). Selanjutnya, mengetahui keanekaragaman budaya, siswa akan memperdalam pengertian terhadap orang lain, mereka akan belajar menghargai dan memahami orang lain walaupun dengan budaya yang berbeda.

### C. SIMPULAN

Banyak faktor yang menyebabkan tercapai tidaknya tujuan pembelajaran. Di antaranya adalah bagaimana pembelajaran itu direncanakan dan dilaksanakan. Proses pembelajaran yang tidak menarik akan membuat siswa bosan, akibatnya siswa menjadi malas dan tidak tertarik terhadap materi yang disampaikan. Oleh karena itu penting bagi guru untuk mengaplikasikan kegiatan pembelajaran yang menarik di kelas. Para guru hendaknya menyadari bahwa pembelajaran yang menyenangkan dapat meningkatkan keberhasilan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru hendaknya dapat menciptakan suasana yang menyenangkan dalam setiap proses pembelajaran. Beberapa cara yang dapat dipakai guru untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan antara lain dengan menambahkan *ice breaking* dalam proses pembelajaran, metode yang bervariasi, menciptakan suasana yang rileks, memotivasi siswa, dan menyapa peserta dengan santun.

Pembentukan akhlak mulia perlu menjadi perhatian semua pihak yang terkait. Hal ini dapat dilakukan melalui proses pembelajaran yang mendidik dan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa untuk SD, dilakukan dengan mengintegrasikan pada mata-mata pelajaran, salah satu di antaranya pembelajaran bahasa Indonesia dalam kompetensi sastra.

### DAFTAR RUJUKAN

- Sadiman, Arief S. dkk., 1990, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: CV. Rajawali
- Asri Budiningsih, C., 2005, *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyasa, Enco. 2007. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Indrawati & Setiawan, Wawan. 2009. *Modul Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan*. PPPPTKIPA: Rasail Media Group.
- Muslich, Masnur. 2008. *KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dasar) Pemahaman dan Pengembangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Rusman. 2011. *Model-Model Pembelajaran*, Jakarta : Rajawali PRES.
- Suparno 2007. *Keterampilan Menulis*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Wina Sanjaya. 2009. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran*. Jakarta: Media Group.

## Prosiding Seminar Nasional Kompetensi Pendamping Pembangunan Desa

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Padang

Target pemberdayaan masyarakat desa merupakan tanggung jawab bersama antara seluruh komponen bangsa, baik pemerintah ataupun masyarakat desa. Terkait itu, pemerintah melalui Kementerian Desa PDT mengonsep adanya tenaga pendamping desa. Pendampingan Desa merupakan dimaksudkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fasilitasi pendampingan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai pelatihan dan beragam kegiatan pengembangan kapasitas yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat sebagai bagian dari proses belajar masyarakat (community learning process).

Para tenaga pendamping profesional bertugas untuk mensosialisasikan maksud dan tujuan UU tentang Desa dan mendampingi masyarakat dalam peningkatan daya tawar untuk mengakses sumberdaya lokal yang dibutuhkan demi kepentingan pembangunan. Pendampingan dilakukan sebagai proses penguatan (empowering society) sebagai masyarakat yang memiliki pemerintahannya sendiri (self governing community), dan bukan berbasis pada mobilisasi partisipasi masyarakat yang lebih bersifat top down.

Demi upaya mewujudkan desa sebagai self governing community, para tenaga profesional Pendamping Desa diarahkan untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk mampu mengorganisir dan mengkonsolidasikan seluruh potensi yang selanjutnya akan direkrut, dilatih dan dibentuk menjadi kader-kader desa.

Diterbitkan oleh:  
**Jurusan Pendidikan Luar Sekolah**  
**Fakultas Ilmu Pendidikan**  
**Universitas Negeri Padang**  
J. Prof. Dr. Hennis  
Kampus UPR Air Tawar  
Padang (25131)  
Sumatera Barat, Indonesia  
Telp. (075)445292

